

2020



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 ini telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat agar laporan yang disajikan memuat informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016–2021.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 tentunya tidak terlepas dari kerjasama dan



kerja keras semua pihak baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Mudah-mudahan Laporan Kinerja ini dapat menjadi suatu bentuk upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020.

Muntok, Maret 2021

Pih. BUPATI BANGKA BARAT,

Drs. MUHAMMAD SOLEH, M. A. P.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xvi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1 - 1
1.2. Landasan Hukum	1 - 2
1.3. Maksud dan Tujuan	1 - 4
1.4. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Barat.....	1 - 4
1.4.1 Kondisi Geografis.....	1 - 4
1.4.2 Kondisi Demografis	1 - 6
1.5. Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah	1 - 6
1.5.1 Urusan/Kewenangan	1 - 6
1.5.2 Organisasi Perangkat Daerah.....	1 - 8
1.5.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil	1 - 11
1.6. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan	1 - 12
1.6.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	1 - 14
1.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1 - 25
1.6.3 Isu Strategis Daerah	1 - 28
1.7. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	1 - 29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Visi	2 - 1
2.2. Misi	2 - 1
2.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	2 - 4
2.3.1 Target Indikator Tujuan Tahun 2020	2 - 6
2.3.2 Target Indikator Sasaran Tahun 2020	2 - 7
2.4. Indikator Kinerja Utama	2 - 10
2.5. Perejanjian Kinerja Tahun 2020.....	2 - 12



2.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020	2 - 15
--	--------

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	3 - 1
3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020	3 - 3
3.3. Capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD di Tahun 2020	3 - 64
3.3.1. Capaian Indikator Tujuan Tahun 2020	3 - 64
3.3.2. Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020	3 - 67
3.4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2020.....	3 - 216
3.4.1 Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2020	3 - 2169
3.4.2 Program Pendukung Capaian Sasaran Tahun 2020.....	3 - 219
3.4.3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020	3 - 231

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	4 - 1
4.2 Permasalahan/ Kendala Pencapaian Kinerja Tahun 2020	4 - 3
4.3. Strategi di Masa Datang	4 - 3



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat -----	1 - 5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 (Semester I)-----	1 – 6
Tabel 1.3	Penilaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2019 Kabupaten Bangka Barat-----	1 - 15
Tabel 1.4	Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2019-----	1 - 15
Tabel 1.5	Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian , Perkebunan dan Perikanan Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD-----	1 - 19
Tabel 1.6	Peringkat Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-----	1 - 20
Tabel 2.1	Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat -----	2 - 4
Tabel 2.2	Target Indikator Tujuan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	2 - 6
Tabel 2.3	Target Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	2 - 7
Tabel 2.4	Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ----	2 - 11
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	2 - 13
Tabel 2.6	Ringkasan Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020 -----	2 - 16
Tabel 3.1	Penilaian Capaian Tahunan -----	3 - 2
Tabel 3.2	Penilaian Capaian Kinerja Sasaran terhadap Target Akhir RPJMD-----	3 – 3
Tabel 3.3	Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 3
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah Tahun 2020 -----	3 - 5
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persentase) -----	3 - 6



Tabel 3.6	Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020-----	3 - 11
Tabel 3.7	Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 serta perbandingan dengan Provinsi dan Nasional-----	3 - 11
Tabel 3.8	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016 - 2020-----	3 - 12
Tabel 3.9	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2020--	3 - 14
Tabel 3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015 - 2020-----	3 - 15
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 17
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif Tahun 2020 -----	3 - 19
Tabel 3.13	Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 – 2020 -----	3 - 20
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 21
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2020 -----	3 - 23
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 24
Tabel 3.17	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2020-----	3 - 25
Tabel 3.18	Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-----	3 - 26
Tabel 3.19	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 - 2020 -----	3 - 27
Tabel 3.20	Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 – 2020 -----	3 - 28
Tabel 3.21	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 29
Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel Tahun 2020 -----	3 – 31



Tabel 3.23	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 33
Tabel 3.24	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif Tahun 2020 -----	3 - 35
Tabel 3.25	Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 Kabupaten Bangka Barat -----	3 - 36
Tabel 3.26	Kualifikasi ASN Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 -----	3 - 37
Tabel 3.27	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Memperkuat Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 38
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2020 -----	3 - 39
Tabel 3.29	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 40
Tabel 3.30	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dibandingkan Dengan Target Nasional -----	3 - 41
Tabel 3.31	Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi/Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 49
Tabel 3.32	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2020 -----	3 - 50
Tabel 3.33	Capaian Kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 51
Tabel 3.34	Capaian Kinerja Indikator Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 52
Tabel 3.35	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Investasi/ Penanaman Modal di Daerah Tahun 2020 -----	3 - 54
Tabel 3.36	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Investasi/ Penanaman Modal di Daerah Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 55
Tabel 3.37	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2020 -----	3 - 56
Tabel 3.38	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Terhadap Target Akhir RPJMD	3 - 58



Tabel 3.39	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan Tahun 2020 -----	3 - 58
Tabel 3.40	Perhitungan Indeks Pencemaran Air Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 59
Tabel 3.41	Hasil Pengukuran NO ₂ Udara dan SO ₂ Udara Ambien Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 61
Tabel 3.42	Indeks Standar Pencemaran Udara-----	3 - 61
Tabel 3.43	Luas Tutupan Hutan Per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat -----	3 - 62
Tabel 3.44	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-	3 - 63
Tabel 3.45	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD-----	3 - 63
Tabel 3.46	Pencapaian Indikator Tujuan Tahun 2020 dan Sampai Dengan Akhir RPJMD-----	3 - 65
Tabel 3.47	Rata-rata Capaian Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 67
Tabel 3.48	Capaian Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020-----	3 - 68
Tabel 3.49	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2020 -----	3 - 73
Tabel 3.50	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 74
Tabel 3.51	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2020-----	3 - 75
Tabel 3.52	Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-----	3 - 75
Tabel 3.53	Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2020-----	3 - 76
Tabel 3.54	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 77
Tabel 3.55	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel Tahun 2020 -----	3 - 79



Tabel 3.56	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 80
Tabel 3.57	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif Tahun 2020 -----	3 - 81
Tabel 3.58	Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 Kabupaten Bangka Barat-----	3 - 82
Tabel 3.59	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 83
Tabel 3.60	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2020 -----	3 - 84
Tabel 3.61	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 85
Tabel 3.62	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2020 -----	3 - 86
Tabel 3.63	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD-----	3 - 87
Tabel 3.64	Capaian Indikator Kinerja Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 88
Tabel 3.65	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan Tahun 2020-----	3 - 89
Tabel 3.66	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 91
Tabel 3.67	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi, Komuditas Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2020-----	3 - 92
Tabel 3.68	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Priduksi, Komuditas Unggulan Perkebunan Rakyat Terhadap Target Akhir RPJMD-----	3 - 93
Tabel 3.69	Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan Tahun 2020 -----	3 - 94
Tabel 3.70	Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 95
Tabel 3.71	Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 97



Tabel 3.72	Produksi Budidaya Ikan Air Laut Per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 99
Tabel 3.73	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 100
Tabel 3.74	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Peternakan Tahun 2020 -----	3 - 101
Tabel 3.75	Populasi dan Produksi Ternak Ruminansia Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020-----	3 - 102
Tabel 3.76	Populasi dan Produksi Ternak Unggas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020 -----	3 - 104
Tabel 3.77	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Peternakan Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 105
Tabel 3.78	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Sistem Agribisnis/Agroindustri Tahun 2020-----	3 - 106
Tabel 3.79	Jumlah Usaha Rantai Agribisnis Hulu hingga Hilir Tahun 2020 Kabupaten Bangka Barat -----	3 - 107
Tabel 3.80	Nilai Tambah Komoditas Pertanian dalam Arti Luas (Juta Rupiah) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2018 -----	3 - 108
Tabel 3.81	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Sistem Agribisnis/Agroindustri Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 110
Tabel 3.82	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Investasi/Penanaman Modal di Daerah Tahun 2020 -----	3 - 111
Tabel 3.83	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Investasi/ Penanaman Modal di Daerah Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 112
Tabel 3.84	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Jumlah Unit dan Kapasitas UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Mandiri Tahun 2020 ---	3 – 113
Tabel 3.85	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Jumlah Unit dan Kapasitas UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Mandiri Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 – 121
Tabel 3.86	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Ragam Usaha dan Produk UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing Tahun 2020 -----	3 – 123
Tabel 3.87	Ragam Usaha Industri Kecil di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-----	3 - 125



Tabel 3.88	Lingkup Pemasaran Usaha Mikro di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2020 -----	3 - 129
Tabel 3.89	Lingkup Pemasaran Industri Kecil di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2020 -----	3 - 131
Tabel 3.90	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Ragam Usaha dan Produk UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD-----	3 - 132
Tabel 3.91	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata Tahun 2020 -----	3 - 134
Tabel 3.92	Data Kunjungan Wisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2020 ----	3 - 135
Tabel 3.93	PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 -----	3 - 138
Tabel 3.94	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 140
Tabel 3.95	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terjaganya Kelestarian Warisan Budaya sebagai Aset Wisata Tahun 2020-----	3 - 113
Tabel 3.96	Realisasi Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya, Seni dan Kebudayaan Daerah yang Dilestarikan dan Terintegrasi dengan Program Pariwisata Tahun 2017 – 2020 -----	3 - 143
Tabel 3.97	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terjaganya Kelestarian Warisan Budaya sebagai Aset Wisata Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD	3 - 144
Tabel 3.98	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas Daerah Tahun 2020 -----	3 - 145
Tabel 3.99	Indeks Konektivitas Kabupaten per Kecamatan Tahun 2018-2020 -----	3 - 146
Tabel 3.100	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas Daerah Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 147
Tabel 3.101	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Air Baku untuk Usaha Budidaya Komoditas Pertanian Tahun 2020-----	3 - 148
Tabel 3.102	Luas Areal Pertanian yang Beririgasi Sekunder Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 148



Tabel 3.103	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Air Baku untuk Usaha Budidaya Komoditas Pertanian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD-----	3 - 149
Tabel 3.104	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tahun 2020 -----	3 - 150
Tabel 3.105	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD-----	3 - 155
Tabel 3.106	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Tahun 2020-----	3 - 157
Tabel 3.107	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD-----	3 - 159
Tabel 3.108	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020-----	3 - 162
Tabel 3.109	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 164
Tabel 3.110	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Minat dan Wadah Pengembangan Olahraga Tahun 2020 -----	3 - 165
Tabel 3.111	Perolehan Medali dan Peringkat Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-----	3 - 166
Tabel 3.112	Peringkat Lomba Porprov, Popda, dan Kejurda Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2020 -----	3 - 166
Tabel 3.113	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Minat dan Wadah Pengembangan Olahraga Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 167
Tabel 3.114	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berbudaya/Berwawasan Lingkungan Tahun 2020 --	3 - 168
Tabel 3.115	Perusahaan/industri/masyarakat yang taat dalam menyampikan laporan RKL-RPL Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Berdasarkan Kelayakan Amdal -----	3 – 172
Tabel 3.116	Perusahaan/industri/masyarakat yang taat dalam menyampikan laporan RKL-RPL Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Berdasarkan Kelayakan Lingkungan (UKL – UPL) -----	3 – 174



Tabel 3.117 Perusahaan/industri/masyarakat yang taat dalam menyampikan laporan RKL-RPL Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Berdasarkan Izin Lingkungan OSS-----	3 - 189
Tabel 3.118 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berbudaya/Berwawasan Lingkungan Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 190
Tabel 3.119 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berkelanjutan Tahun 2020-----	3 - 191
Tabel 3.120 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berkelanjutan Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD-----	3 - 193
Tabel 3.121 Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan Permukiman Tahun 2020-----	3 - 194
Tabel 3.122 Jumlah Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 195
Tabel 3.123 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan Permukiman Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD ----	3 - 198
Tabel 3.124 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terkendalinya Bencana Banjir Tahun 2020 -----	3 - 199
Tabel 3.125 Sebaran Titik Banjir di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 -----	3 - 200
Tabel 3.126 Jumlah Titik Lokasi Banjir dan lokasi yang telah dimitigasi per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 201
Tabel 3.127 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terkendalinya Bencana Banjir Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 202
Tabel 3.128 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Konservasi Sumber Air Tahun 2020 -----	3 - 203
Tabel 3.129 Sumber Air Di Kabupaten Bangka Barat-----	3 - 204
Tabel 3.130 Data Sumber Air yang Telah Dikonsumsi-----	3 - 205
Tabel 3.131 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Konservasi Sumber Air Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD -----	3 - 207
Tabel 3.132 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Pemulihan Lahan Kritis Tahun 2020 -----	3 - 207



Tabel 3.133	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Pemulihan Lahan Kritis Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD-----	3 - 208
Tabel 3.134	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menjaga dan Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Produk Hukum Penataan Ruang Tahun 2020 -----	3 - 209
Tabel 3.135	Data Pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 210
Tabel 3.136	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menjaga dan Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Produk Hukum Penataan Ruang Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD-----	3 - 213
Tabel 3.137	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Tahun 2020-----	3 - 213
Tabel 3.138	Luas Kawasan Perkotaan dan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 214
Tabel 3.139	Rekapitulasi Ruang Terbuka Hijau yang dipelihara -----	3 - 215
Tabel 3.140	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD-----	3 - 215
Tabel 3.141	Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2020 -----	3 - 216
Tabel 3.142	Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2020 -----	3 - 217
Tabel 3.143	Realisasi Program dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 219
Tabel 3.144	Realisasi APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 - 231



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat -----	1 - 5
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat Per Bulan Desember Tahun 2020 -----	1 - 11
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat Per Bulan Desember Tahun 2020 -----	1 - 12
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Per Bulan Desember Tahun 2020 -----	1 – 12
Gambar 1.5	Angka HLS Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 -----	1 – 21
Gambar 1.6	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 -----	1 – 22
Gambar 1.7	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 -----	1 – 23
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020-----	3 - 8
Gambar 3.2	IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 -----	3 - 9
Gambar 3.3	IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2019-----	3 - 10
Gambar 3.4	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 (jiwa) -----	3 – 13
Gambar 3.5	PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah) -----	3 – 16
Gambar 3.6	PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020 (Ribu Rupiah) -----	3 – 16
Gambar 3.7	PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Barat (juta rupiah) Tahun 2015-2020 -----	3 – 17
Gambar 3.8	Capaian DOFD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 -----	3 – 30
Gambar 3.9	Nilai Investasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 (dalam juta rupiah) -----	3 – 55



Gambar 3.10 Nilai Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2016 –2020 -----	3 – 57
Gambar 3.11 Capaian DOFD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 -----	3 – 76
Gambar 3.12 Pendapatan Petani melalui Komoditas Padi Sawah, Padi Ladang dan Jagung Tahun 2019-2020 -----	3 – 90
Gambar 3.13 Nilai Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2016-2020 -----	3 – 92
Gambar 3.14 Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Juta Rupiah) Tahun 2020 -----	3 – 95
Gambar 3.15 Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Tahun 2020 -----	3 – 95
Gambar 3.16 Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (Juta Rupiah) Tahun 2020 -----	3 – 97
Gambar 3.17 Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (Ton) Tahun 2020-----	3 – 97
Gambar 3.18 Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Laut (Juta Rupiah) Tahun 2020 --	3 – 99
Gambar 3.19 Produksi Perikanan Budidaya Air Laut (Ton) Tahun 2020 -----	3 – 99
Gambar 3.20 Nilai Investasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 (dalam juta rupiah) -----	3 – 112
Gambar 3.21 Jumlah dan Persentase Peningkatan Usaha Mikro di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2020 -----	3 – 114
Gambar 3.22 Jumlah Usaha Mikro per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 – 114
Gambar 3.23 Sektor UMi yang Dikerjakan Masyarakat di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 – 115
Gambar 3.24 Jumlah Industri Kecil per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2020 -----	3 – 116
Gambar 3.25 Jumlah dan Persentase Kenaikan Industri Kecil per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 – 117
Gambar 3.26 Jumlah dan Persentase Industri Kecil per Direktori di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 – 117
Gambar 3.27 Jumlah dan Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020 -----	3 – 118
Gambar 3.28 Perkembangan Omset UMi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 -----	3 – 119



Gambar 3.29 Perkembangan Kapasitas Usaha Industri Kecil dan Menengah Unggulan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020	3 – 120
Gambar 3.30 Perkembangan Jumlah Ragam Usaha Mikro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	3 – 124
Gambar 3.31 Jumlah Ragam Usaha Industri Kecil Berdasarkan Direktori di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	3 – 125
Gambar 3.32 Jumlah dan Persentase Usaha Industri Kecil Berdasarkan Ragam Usaha di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	3 – 128
Gambar 3.33 Jumlah dan Persentase Sebaran Kunjungan Wisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	3 – 135
Gambar 3.34 Kunjungan wisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020	3 – 136
Gambar 3.35 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2020	3 – 137
Gambar 3.36 Indeks Konektivitas Kabupaten per Kecamatan Tahun 2018-2020	3 – 146
Gambar 3.37 Luas Areal Pertanian yang Beririgasi Sekunder Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020	3 – 149
Gambar 3.38 Angka HLS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020	3 – 151
Gambar 3.39 Angka HLS Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	3 – 152
Gambar 3.40 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	3 – 153
Gambar 3.41 Rata - Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2019	3 – 153
Gambar 3.42 Rata- Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020	3 – 154
Gambar 3.43 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2020	3 – 157
Gambar 3.44 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	3 – 158
Gambar 3.45 Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020	3 – 163



Gambar 3.46 Persentase Desa/ Kelurahan yang Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2017 - 2020	3 – 169
Gambar 3.47 Jumlah Organisasi Masyarakat Sipil (LSM), Komunitas (<i>Civil Society Organization/CSO</i>) yang Bergerak di Bidang Lingkungan Hidup Secara Aktif Tahun 2016 - 2020	3 – 171
Gambar 3.48 Persentase Cakupan Wilayah yang Terlayani Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Tahun 2018 - 2020	3 – 192
Gambar 3.49 Perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk yang memiliki akses sanitasi yang layak disetiap kecamatan pada tahun 2020	3 – 195
Gambar 3.50 Peningkatan Persentase Penduduk yang Memiliki Fasilitas Sanitasi Yang Layak Tahun 2018 - 2020	3 – 198
Gambar 3.51 Realisasi Indikator Persentase Desa/Kelurahan/Titik Banjir yang Dimitigasi Terhadap Banjir/Genangan Air Tahun 2017 - 2020	3 – 202
Gambar 3.52 Realisasi Indikator Persentase Pengajuan Izin Pemanfaatan RuangSesuai Dengan Produk HukumPenataanRuangTahun 2017 - 2020	3 – 209



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran melalui suatu pelaporan yang disebut Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 merupakan laporan tahun ke-5 (lima) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat periode 2016-2021 yang menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis pembangunan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan target kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran tersebut dilakukan antara rencana dengan realisasi kinerja (*performance plan*) yang selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2020 (Indikator Kinerja Utama), dari 10 sasaran pembangunan sebanyak 3 (tiga) sasaran telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dengan status capaian “Sangat Baik”, 7 (tujuh) sasaran belum mencapai target yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan status capaian “Baik”, 1 (satu) sasaran dengan status capaian “Cukup” dan 1 (satu) sasaran dengan status capaian “Kurang” serta 2 (dua) sasaran tidak dapat diukur karena data tidak tersedia.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tujuan pembangunan dari 11 (sebelas) indikator tujuan pembangunan, 4 (empat) indikator mencapai target yang telah ditetapkan, 5 (lima) indikator tidak mencapai target dan 2 (dua) indikator tidak dapat diukur karena data tidak tersedia.

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2020 terhadap 29 sasaran pembangunan daerah yang diterjemahkan dalam 48 indikator sasaran pembangunan, sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator sasaran pembangunan telah melebihi target yang ditetapkan dengan status capaian “Baik Sekali”, 10 (sepuluh) indikator sasaran pembangunan dengan status capaian “Baik”, 5 (lima) indikator sasaran pembangunan dengan status capaian “Cukup”, 5 (lima) indikator sasaran



pembangunan dengan status capaian “Kurang” dan 4 (empat) indikator sasaran pembangunan tidak dapat dihitung karena tidak tersedianya data.

Hasil evaluasi capaian sasaran Tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, dari 29 sasaran pembangunan yang dijabarkan ke dalam 48 indikator sasaran, sebanyak 19 (sembilan belas) indikator sasaran pembangunan dengan kategori “Tercapai”, 11 (sebelas) indikator sasaran dengan kategori “Optimis Tercapai”, 13 (tiga belas) indikator sasaran dengan kategori “Perlu Upaya Lebih” dan 5 (lima) indikator sasaran pembangunan tidak dapat dihitung karena data tidak tersedia.

Berdasarkan analisis efisiensi terhadap penggunaan anggaran belanja langsung dari total anggaran Rp Rp517.135.137.869,00 terealisasi Rp 461.777.782.712,94 atau 89,30 persen sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 55.357.355.156,06 atau 10,70 persen jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 121,18 persen disimpulkan bahwa penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam mencapai sasaran pembangunan efektif.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah yang didalamnya memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis dari pengukuran kinerja yang dilakukan. Pelaporan kinerja tersebut merupakan salah satu komponen dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai implementasi dari peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, disampaikan laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sekaligus memberikan informasi terkait capaian kinerja serta keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pemerintah daerah.

Dalam Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki beberapa dokumen sebagai acuan diantaranya antara lain :

1. Dokumen Perencanaan Strategis Daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Daerah, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 49 Tahun 2019



- tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020.
3. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020.
 4. Dokumen Pengukuran Kinerja, yaitu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 56 Tahun 2019.
 5. Realisasi APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri A);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 3 Seri A).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 yaitu sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan media pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di Tahun 2020 serta pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja utama serta sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

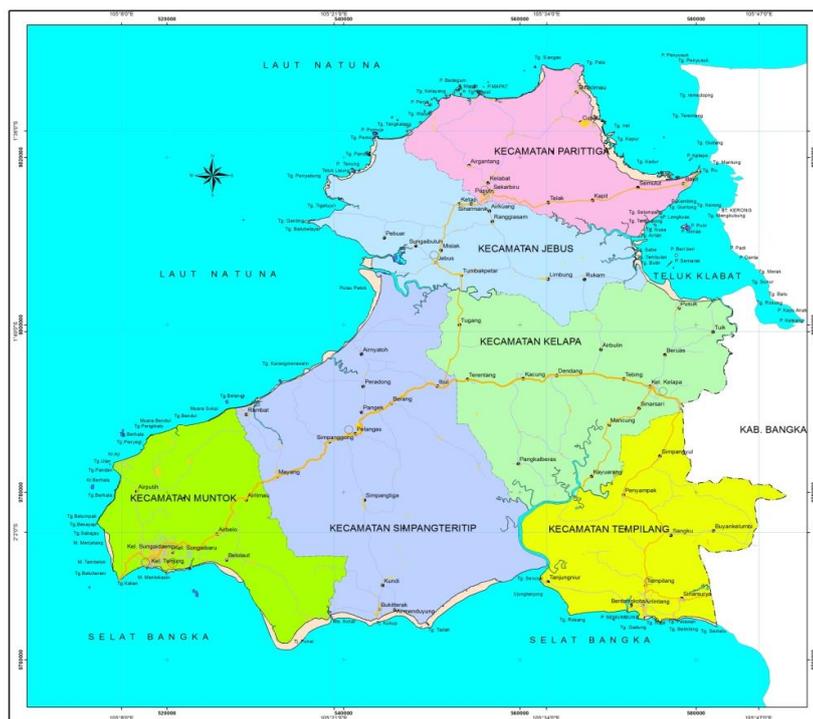
1.4 Gambaran Umum Kabupaten Bangka Barat

1.4.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Bangka Barat berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara geografis Kabupaten Bangka Barat terletak pada 105° 00' – 106° 00' Bujur Timur dan 01° 00' – 02° 10' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi :

- Sebelah utara : Laut Natuna;
- Sebelah timur : berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Selat Bangka; dan
- Sebelah barat : berbatasan dengan Selat Bangka.



Sumber: RTRW Kab. Bangka Barat, Tahun 2014-2034

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, Kabupaten Bangka Barat memiliki luas wilayah 284.886,05 ha. Secara administratif, Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 6 (enam) kelurahan dan 60 desa, dengan uraian per kecamatan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten
Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Muntok	5 kelurahan, 4 desa	36.795,25	12,92
2.	Simpangteritip	13 desa	78.447,89	27,54
3.	Kelapa	1 kelurahan, 13 desa	59.140,76	20,76
4.	Tempilang	9 desa	39.019,21	13,70
5.	Jebus	11 desa	38.811,63	13,62
6.	Parittiga	10 desa	32.671,31	11,47
Total		6 kelurahan, 60 desa	284.886,05	100

Sumber : Sekretariat Daerah, 2020



1.4.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat yang telah terverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri, pada semester I Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat adalah 199.823 jiwa. Apabila dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Muntok memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 26,05 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 102.750 jiwa laki-laki (51,42 persen) dan 97.073 jiwa perempuan (48,58 persen). Untuk pembagian jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 (Semester I)

No.	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		L	P	
1.	Muntok	26.410	25.646	52.056
2.	Simpangteritip	15.208	14.520	29.728
3.	Jebus	11.284	10.584	21.868
4.	Kelapa	17.742	16.364	34.106
5.	Tempilang	14.309	13.272	27.581
6.	Parittiga	17.797	16.687	34.484
TOTAL		102.750	97.073	199.823

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, 2021

1.5 Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah

1.5.1 Urusan/Kewenangan

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 9, menyebutkan urusan pemerintahan terdiri dari urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.



Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

- Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 6. Sosial.
- Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 1. Tenaga Kerja;
 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Pangan;
 4. Pertanahan;
 5. Lingkungan Hidup;
 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Perhubungan;
 10. Komunikasi dan Informatika;
 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 12. Penanaman Modal;
 13. Kepemudaan dan Olahraga;
 14. Statistik;
 15. Persandian;
 16. Kebudayaan;
 17. Perpustakaan, dan
 18. Kearsipan.
- Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
 1. Kelautan dan Perikanan;
 2. Pariwisata;
 3. Pertanian;
 4. Kehutanan;



5. Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Pembagian urusan konkuren antar pemerintah (pusat), pemerintah daerah (provinsi), dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dibagi berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Pada tahun 2020, dari 32 urusan pemerintahan konkuren yang merupakan kewenangan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 31 urusan dan urusan yang tidak dilaksanakan adalah Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain Urusan Wajib dan Urusan Pilihan tersebut di atas, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan juga didukung dengan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum.

1.5.2 Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Sejalan dengan kebutuhan serta evaluasi terkait perangkat daerah, di tahun 2017 dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 dan pada tahun 2020 dilakukan perubahan kembali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020.

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat antara lain sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Badan/Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :



1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
5. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan sub kebakaran;
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;



12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 16. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bidang bencana (ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Muntok dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Simpang Teritip dengan Tipe A;

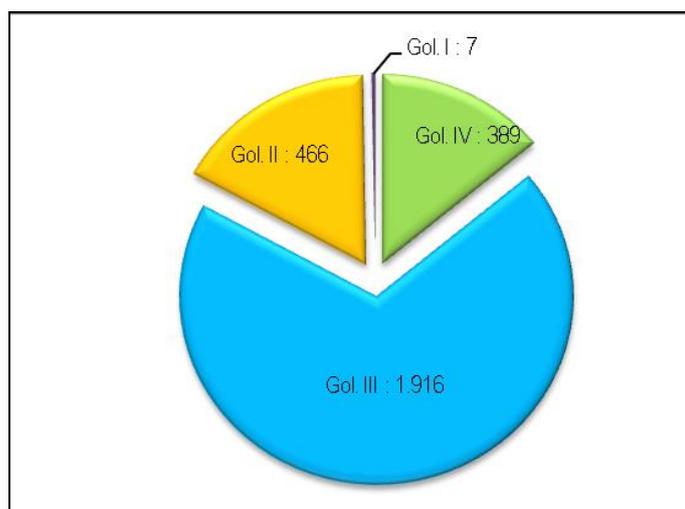


3. Kecamatan Jebus dengan Tipe A;
4. Kecamatan Parittiga dengan Tipe A;
5. Kecamatan Kelapa dengan Tipe A;
6. Kecamatan Tempilang dengan Tipe A.

1.5.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

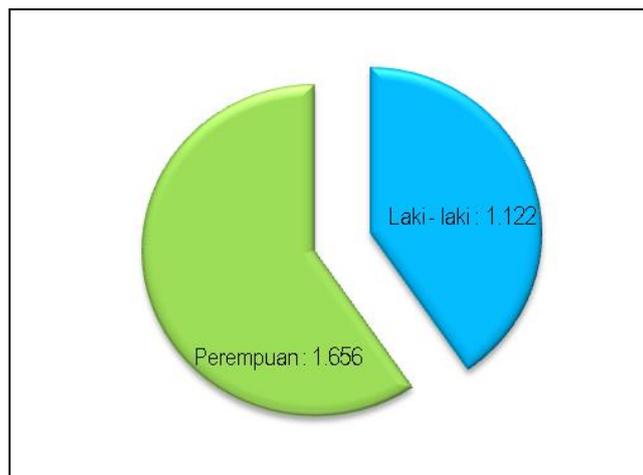
Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan dan penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan diawali oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), serta adanya pengawasan secara internal maupun eksternal.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan sampai dengan Bulan Desember 2020 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.778 orang.



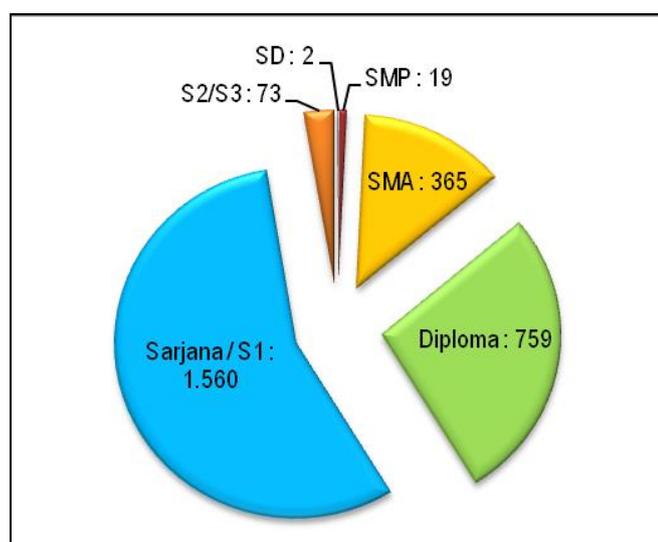
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, 2021

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan
Kabupaten Bangka Barat per Bulan Desember Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, 2021

Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Bangka Barat per Bulan Desember Tahun 2020



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, 2021

Gambar 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kabupaten Bangka Barat per Bulan Desember Tahun 2020

1.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi



permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Sementara isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang sedang berkembang di tingkat Kabupaten Bangka Barat akan secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat. Isu strategis di Kabupaten Bangka Barat juga dipengaruhi oleh isu strategis yang terjadi di tingkat provinsi dan pusat.

Secara nyata, pada Tahun 2020 telah terjadi permasalahan berskala besar yang menimpa seluruh dunia yaitu terjadinya pandemi akibat *Coronavirus Disease* 2019 atau disingkat dengan Covid-19. Indonesia termasuk negara yang terdampak pandemi ini termasuk pula wilayah Kabupaten Bangka Barat. Hal ini menyebabkan perubahan secara menyeluruh terhadap tatanan kehidupan baik masyarakat maupun pemerintahan.

Untuk menangani dampak Covid-19, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian pendapatan dan fokus belanja akibat terbitnya peraturan tersebut juga mengubah struktur APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020. Fokus belanja lebih diarahkan ke bidang kesehatan, jaringan pengamanan sosial dan pemulihan perekonomian. Hal ini mengakibatkan banyak program maupun kegiatan yang dilakukan *refocusing*. Program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 mengalami perubahan bahkan penghapusan/penundaan dan anggaran dialihkan untuk pembiayaan penanggulangan Covid-19.



Sejalan dengan *refocusing* anggaran yang dilakukan tersebut, mengakibatkan sasaran pembangunan daerah yang didukung melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan turut mengalami dampak sehingga tidak dapat dicapai secara maksimal.

Selain permasalahan utama tersebut di atas, berikut permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai RKPD Kabupaten Bangka Barat antara lain :

1.6.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berikut permasalahan pembangunan daerah secara umum yang dianggap memiliki nilai strategis jika dihubungkan dengan capaian sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan capaian sasaran pembangunan tersebut, selanjutnya menjadi permasalahan yang harus dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di tahun 2020.

Berdasarkan hasil pencapaian sasaran pembangunan RPJMD di Tahun 2019, permasalahan dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian sesuai dengan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat, yaitu:

a. Tata Kelola Pemerintahan

Sesuai dengan Misi pertama RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel untuk pelayanan publik yang berkualitas”, maka telah disusun tujuan beserta sasaran dengan indikator yang dapat mewakili perwujudan misi tersebut. Salah satu sasaran pembangunan pada misi pertama ini adalah Terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang transparan yang diukur melalui indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah. Jika dilihat dari kinerja pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Daerah Tahun 2018. Hal ini menunjukkan masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait temuan yang menyebabkan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat mendapat opini WDP. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa catatan terkait hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten



Bangka Barat oleh BPK antara lain 12 temuan terkait laporan keuangan daerah serta 2 (dua) temuan terkait barang milik daerah. Kendala dalam pencapaian indikator ini antara lain adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah serta terdapat aturan pengelolaan keuangan daerah yang belum dilaksanakan secara optimal.

Selain itu, penerapan manajerial birokrasi yang mengarah kepada profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci bagi perubahan cara pandang tata kelola pemerintahan. Manajerial birokrasi tersebut harus didukung oleh aparatur yang kuat baik dari sisi kompetensi maupun mental dalam melayani. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif merupakan sasaran yang berkaitan dengan manajemen sumber daya aparatur yang baik yang diukur melalui tingkat profesionalitas ASN. Melalui indikator ini akan diukur kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara, maka hanya mencapai poin 51,55. Nilai indeks profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2019 masuk dalam kategori sangat rendah (rentang nilai dibawah 60). Meskipun demikian, nilai Indeks Profesionalitas ASN di Tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 50 di tahun 2018..

Dari 4 (empat) dimensi yang digunakan dalam perhitungan indeks profesional ASN yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin., 2 (dua) dimensi masih belum baik hasilnya yaitu dimensi kualifikasi dan dimensi kompetensi.

Tabel 1.3 Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019 Kabupaten Bangka Barat

No.	DIMENSI	BOBOT	HASIL	TINGKAT CAPAIAN
1.	Kualifikasi	25	11,89	47,56
2.	Kompetensi	40	9,67	24,18
3.	Kinerja	30	25,00	83,33



No.	DIMENSI	BOBOT	HASIL	TINGKAT CAPAIAN
4.	Disiplin	5	4,99	99,80
TOTAL		100	51,55	

Sumber : BKPSDM, 2020

Permasalahan terkait pencapaian Indeks Profesional ASN di Kabupaten Bangka Barat, khususnya pada dimensi kualifikasi dan kompetensi antara lain :

- a. Masih banyaknya ASN di Kabupaten Bangka Barat yang jenjang pendidikannya dibawah Strata I, dan minimnya pengembangan sumber daya ASN melalui peningkatan jenjang pendidikan, baik dalam jenis izin belajar maupun tugas belajar;
- b. Masih minimnya keikutsertaan Pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam pengembangan kompetensinya, baik dalam cakupan keikutsertaan pegawai dalam mengikuti diklat kepemimpinan dan diklat fungsional serta keikutsertaan diklat teknis dan seminar/*workshop*/magang/kursus/sejenisnya guna peningkatan sumberdaya ASN.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu upaya lebih untuk dapat meningkatkan kualitas profesionalitas ASN yang ada, khususnya pada dimensi kualifikasi ASN (Jenjang Pendidikan) dan kompetensi ASN yang nilainya masih sangat jauh dari bobot yang ada.

Selanjutnya untuk permasalahan tata kelola pemerintahan secara umum dikukur dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi, dimana nilai yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 38,04. Jika dibandingkan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya, pencapaian di Tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 74,87 menjadi 38,04. Dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Tahun 2019, komponen proses yang memiliki bobot 60 persen dicapai dengan nilai 26,43 serta komponen hasil yang memiliki bobot 40 persen dicapai dengan 11,61. Terjadi perubahan pola penilaian Indeks Reformasi Birokrasi antara tahun 2019 dengan tahun sebelumnya, dimana pola penilaian Indeks Reformasi Birokrasi sebelum tahun 2019 berupa *self assessment*, sedangkan mulai tahun 2019 penilaian langsung diambil alih



oleh pihak Kementerian PAN RB.

Tabel 1.4 Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2019

KOMPONEN	BOBOT	TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		NILAI	%	NILAI	%
PROSES	60	50,84	84,73	26,43	40,95
➤ Manajemen Perubahan	5	4,71	94,29	1,21	24,20
➤ Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5	5	100	3,13	62,60
➤ Penataan dan Penguatan Organisasi	6	6	100	4	66,67
➤ Penataan Tatalaksana	5	4,34	86,7	1,19	23,80
➤ Penataan Sistem Manajemen SDM	15	12,65	84,36	10,15	67,67
➤ Penguatan Akuntabilitas	6	4,06	67,73	2	33,33
➤ Penguatan Pengawasan	12	9,09	75,71	3,58	29,83
➤ Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	4,99	83,1	1,17	19,50
HASIL	40	24,03	80,1	11,61	22,68
➤ Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	12,78	63,9	9,61	48,05
➤ Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	3,75	37,5	2	20,00
➤ Kualitas Pelayanan Publik	10	7,5	75	0	0
INDEKS REFORMASI BIROKRASI		74,87		38,04	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, 2020

Melihat rendahnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pasca penilaian dari pihak Kementerian PAN RB, banyak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain :

- a. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum ada "*quick win*";
- b. Belum terdapat pelaksanaan sosialisasi/internalisasi *Road Map/Rencana Kerja* Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi;
- c. Seluruh Tim Asessor PMPRB belum mendapat pelatihan;
- d. Koordinator Asessor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi;
- e. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut;



- f. Baru sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- g. Upaya pembentukan *Agent of Change* belum dilakukan secara formal;
- h. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
- i. Belum terdapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;
- j. Belum terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai;
- k. Belum ada standar kompetensi pejabat;
- l. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai;
- m. Belum ada pemberian sanksi dan *reward* kepada unit organisasi;
- n. Evaluasi jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ;
- o. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi;
- p. Belum terdapat *Whistle Blowing System*;
- q. Belum terdapat perencanaan Zona Integritas; dan
- r. Permasalahan lainnya yang harus ditindaklanjuti guna penguatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

b. Bidang Ekonomi

Misi kedua RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yaitu "Membangun perekonomian yang berbasis sumber daya lokal dan berdaya saing tinggi" ditetapkan dengan melihat kondisi serta potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat. Jika dilihat dari capaian kinerja sesuai sasaran RPJMD yang ditunjukkan melalui indikator-indikator terkait pembangunan ekonomi, masih terdapat permasalahan yang harus dapat ditangani dan ditingkatkan kinerjanya sehingga sasaran dapat dicapai sampai dengan akhir periode RPJMD.

Berdasarkan capaian RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019, sasaran yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, dan perikanan masih sangat rendah dan perlu upaya lebih agar dapat dicapai sesuai dengan target. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yaitu Rata-rata Pendapatan Bersih Petani Per Bulan, Nilai Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Rakyat, dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar. Capaian dari keempat indikator tersebut seluruhnya masih dibawah 52 persen.



Tabel 1.5 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	Juta Rupiah	1,02	2	51,00	Perlu Upaya Lebih
Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Miliar Rupiah	394,1	4.069,20	9,68	Perlu Upaya Lebih
Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	Rupiah	2.290.137.500,00	7.520.050.000,00	30,45	Perlu Upaya Lebih

Rendahnya capaian tersebut disebabkan antara lain masih rendahnya produksi hasil pertanian, perkebunan maupun perikanan khususnya air tawar di Kabupaten Bangka Barat sehingga akhirnya berpengaruh dengan nilai produksi. Selain itu harga dari komoditas perkebunan yang tidak menentu pada beberapa tahun terakhir sangat berimbas terhadap nilai produksi.

Terkait dengan produksi hasil pertanian yang masih rendah khususnya padi sawah, juga berkaitan dengan prasarana pendukungnya yaitu irigasi yang belum memadai. Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis sampai dengan tahun 2019 juga masih rendah yaitu hanya mencapai 51,35 persen jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu sebesar 94,76 persen. Hal-hal yang terkait dengan pencapaian ketiga sasaran tersebut harus terus dilakukan mengingat akan berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

c. Bidang Sosial

Misi yang berkaitan dengan pembangunan bidang sosial adalah misi ketiga dari RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yaitu “Membangun masyarakat yang maju dan berkualitas”. Kualitas sumber daya manusia secara umum diukur dari tingkat pendidikan serta kesehatan masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan diupayakan melalui membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas.



Berdasarkan capaian RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019, sasaran yang berkaitan dengan pendidikan masih sangat rendah khususnya yang berkaitan dengan peringkat ujian nasional se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Tahun 2019 peringkat ujian untuk jenjang SD (UASBN) tidak dapat ditampilkan dikarenakan pada Tahun 2019 soal ujian disusun oleh masing-masing kabupaten. Sedangkan untuk jenjang SMP, untuk Peringkat Ujian Nasional se-Provinsi berada berada pada peringkat 6 (enam) dengan nilai rata-rata 50,11.

Peringkat UN di Kabupaten Bangka Barat selama 5 (lima) tahun terakhir untuk jenjang SMP sederajat relatif stagnan yaitu berada pada peringkat ke 6 (enam) atau ke 7 (tujuh) dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan tidak berdampak pada peningkatan peringkat UN SD/SMP di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 1.6 Peringkat Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Uraian	Nilai Rata-rata UN jenjang SMP/MTs	Peringkat
Nasional	51,76	-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	52,12	-
Kota Pangkalpinang	58,08	1
Kab. Belitung Timur	53,93	2
Kab. Belitung	53,60	3
Kab. Bangka	51,57	4
Kab. Bangka Tengah	50,29	5
Kab. Bangka Barat	50,11	6
Kab. Bangka Selatan	47,24	7

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

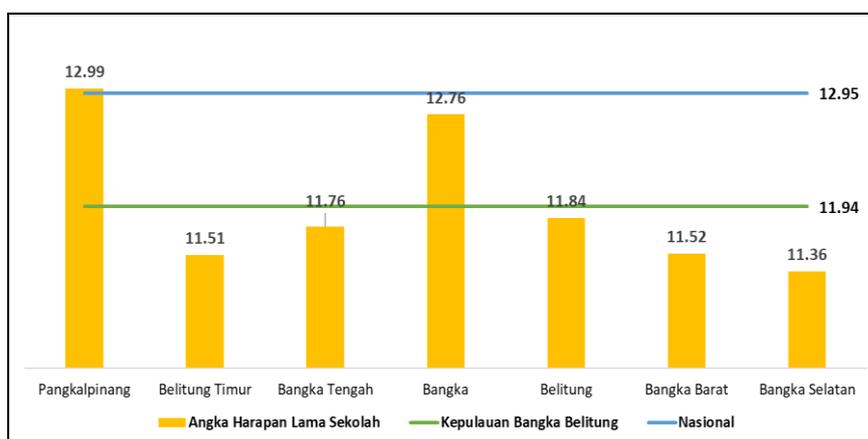
Dilihat dari capaian sampai dengan Tahun 2019, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 dengan target peringkat 1 (satu) di Tahun 2021, maka capaian ini masih sangat jauh dan sulit untuk dicapai.

Selanjutnya menjadi tugas pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan



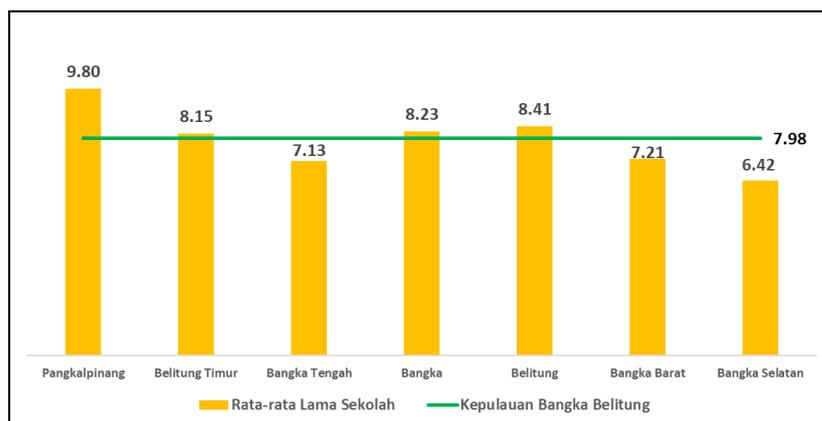
kualitas pendidikan masyarakat sesuai dengan kewenangannya serta agar dapat bersaing dengan daerah lain. Perlu dilakukan kajian lebih agar dapat mengetahui permasalahan yang menyebabkan rendahnya nilai ujian siswa tersebut baik melalui peningkatan kualitas pendidikan anak didik, guru, maupun sarana prasarana pendukungnya.

Selain indikator peringkat ujian nasional se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk mengukur kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Bangka Barat pada RPJMD juga ditetapkan 2 (dua) indikator sasaran lain yaitu angka harapan lama sekolah (HLS) dan angka rata-rata lama sekolah (RLS). Indikator ini merupakan indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yang berkaitan dengan pendidikan. Meskipun capaian kedua indikator tersebut sampai dengan tahun 2019 cukup baik dengan nilai yang meningkat setiap tahun, namun jika dibandingkan dengan angka HLS dan angka RLS di kabupaten/kota lain se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat berada pada peringkat 5 (lima) dari 7 (tujuh) kabupaten/kota yang ada. Melihat kondisi ini, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan angka HLS dan angka RLS di Kabupaten Bangka Barat seperti meningkatkan pendidikan non formal, menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan sekolah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

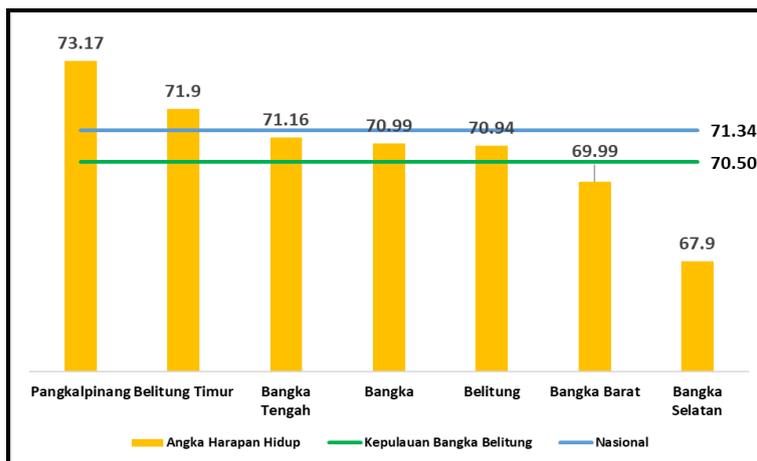
Gambar 1.5
Angka HLS Kabupaten/Kota
se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1.6
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Terkait tingkat aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 diukur melalui indikator angka harapan hidup yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Capaian indikator ini sampai dengan tahun 2019 sangat baik yaitu dengan angka harapan hidup sebesar 69,99 tahun. Meskipun capaian ini sangat baik, namun angka ini jika dibandingkan dengan 7 (tujuh) kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menduduki peringkat 6 (enam) dan dibawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan angka harapan hidup Kabupaten Bangka Barat yang juga merupakan indikator komponen IPM.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 1.7
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota
se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Walaupun capaian kinerja terkait kesehatan pada Tahun 2019 telah tercapai, namun ada beberapa permasalahan yang cukup menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat antara lain tingginya angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Bangka Barat yaitu 33,27 persen berdasarkan data Riskesdas 2018. Berdasarkan standar WHO, batas maksimal prevalensi *stunting* adalah 20 persen dari jumlah balita. Penurunan *stunting* merupakan salah satu prioritas nasional yang juga menjadi salah satu prioritas daerah di bidang kesehatan.

Selain permasalahan *stunting*, permasalahan status poskesdes sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 yang tidak lagi menjadi bagian dari jaringan puskesmas yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berdampak pada sulitnya koordinasi.

d. Lingkungan Hidup

Pada Misi keempat RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan” merupakan misi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Diharapkan melalui peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dapat mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara sinergis dan seimbang.



Sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup yang masih menjadi permasalahan dalam pencapaian RPJMD antara lain adalah pada sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berbudaya/Berwawasan Lingkungan, Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu, Terwujudnya pemulihan lahan kritis dan Meningkatnya Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Jika dilihat dari capaian sampai dengan Tahun 2019, indikator yang masih rendah pada sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berbudaya/ Berwawasan Lingkungan jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD yaitu pada indikator persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara baik yang hanya tercapai 28,04 persen. Sementara pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, ditargetkan sebesar 70 persen, sehingga capaian sampai dengan Tahun 2019 hanya mencapai 40,06 persen. Melihat hal ini perlu upaya lebih melalui usaha atau strategi yang lebih baik agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun permasalahan dalam pencapaian indikator ini antara lain adalah kesadaran pelaku usaha yang masih rendah dalam pengelolaan lingkungan dikarenakan dalam pengelolaan lingkungan pelaku usaha masih menganggap sebagai beban bukan kewajiban, Infrastruktur pengelolaan lingkungan seperti laboratorium lingkungan beserta SDM nya dan fasilitas pengolahan limbah B3 yang masih terbatas khususnya di Kabupaten Bangka Barat.

Salah satu urusan lingkungan hidup yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah terkait penanganan persampahan, yang sampai saat ini masih fokus pada Kecamatan Muntok sebagai Ibukota Kabupaten Bangka Barat. Untuk penanganan persampahan yang dikelola secara baik belum menyentuh kecamatan lain dikarenakan keterbatasan kemampuan daerah baik berupa sarana dan prasarana serta personil yang ada. Pada Tahun 2019 persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu, terealisasi sebesar 7,81 persen dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 19 persen masih cukup jauh dari target akhir RPJMD. Untuk mencapai target sasaran ini, kedepannya perlu meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah secara terpadu serta dapat diperluas ke



Kecamatan lainnya di Kabupaten Bangka Barat.

Sementara untuk pemulihan lahan kritis sampai dengan tahun 2019 belum dapat direalisasikan dikarenakan baru sebatas pelaksanaan inventarisasi lahan kritis. Kegiatan inventarisasi yang dilakukan adalah terkait studi kelayakan tanah untuk mengetahui jenis tanaman yang cocok ditanam di lahan tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian mengingat sampai dengan akhir masa RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 ditargetkan sebesar 1 (satu) persen luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif.

Untuk Sasaran Meningkatnya Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dengan indikator Persentase ruang terbuka hijau, sampai dengan Tahun 2019 terealisasi sebesar 0,11 persen dari luas kawasan kota. Pencapaian tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan total luasan perkotaan di Kabupaten Bangka Barat yaitu 9.331 ha, dengan RTH yang telah ditetapkan yaitu melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kecamatan Muntok hanya seluas 9,918 ha. Meskipun pengelolaan RTH khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Muntok telah dilakukan melebihi luasan tersebut, namun dikarenakan belum dilakukan perubahan terhadap penetapan RTH, maka luasan RTH sampai dengan tahun 2019 belum dapat mencapai target.

1.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Wajib pemerintahan daerah terdiri dari 24 urusan, sementara urusan pilihan tetap berjumlah 8 (delapan) urusan. Kemudian untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian serta urusan perencanaan pembangunan yang sebelumnya menjadi urusan wajib pemerintah daerah menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan umum pembangunan daerah yang dilihat dari kondisi umum Kabupaten Bangka Barat, secara



terperinci diuraikan permasalahan tersebut berdasarkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Berikut permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan:

A. Urusan Pemerintahan Wajib

a. Pendidikan

1. Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Bangka Barat masih rendah.
2. Rendahnya kualitas layanan pendidikan (sarana prasarana pendidikan dan ketersediaan/kualitas guru).

b. Kesehatan

1. Ketersediaan tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis masih terbatas.
2. Tingginya kasus gizi buruk
3. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih terdapat infrastruktur jalan dengan kondisi yang rusak maupun rusak berat.
2. Belum tersedianya sistem jaringan pengairan lanjutan yang baik dan optimal sehingga pemanfaatan jaringan irigasi belum tepat sesuai fungsinya.
3. Masih terbatasnya luasan RTH Publik.
4. Belum memiliki dokumen turunan RTRW

d. Ketentraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Belum optimalnya pelaksanaan dan penegakan peraturan Daerah.

e. Sosial

Pelaksanaan pelayanan sosial yang dilakukan untuk PMKS belum dilakukan secara optimal.

f. Ketenagakerjaan

Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka.

g. Pangan

1. Ketergantungan akan bahan pangan yang masih tinggi.



2. Belum tersedianya cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

h. Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Kepemilikan dokumen kependudukan masih rendah
2. Data terkait kepemilikan akta kelahiran masih rendah

i. Penanaman Modal

Masih rendahnya kepatuhan investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

j. Kepemudaan dan Olahraga

1. Peran serta kepemudaan yang masih rendah dalam membangun daerah
2. Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) yang masih sangat terbatas.
3. Masih minimnya sarana dan prasarana olahraga.
4. Kurang nya pembinaan dan pelatihan bagi para atlet baik pembinaan rutin maupun ketika persiapan menghadapi perlombaan
5. Pendanaan yang belum memadai.

B. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan perikanan

1. Menurunnya Produksi Perikanan laut;
2. Masih rendahnya minat masyarakat dalam mengembangkan budidaya di sekitar pesisir.

b. Pertanian

1. Belum semua lahan persawahan memiliki jaringan irigasi
2. Belum terbangun sistem pengairan persawahan masyarakat

c. Industri

Pertumbuhan Industri yang masih rendah.

C. URUSAN PENUNJANG

Pengelolaan keuangan daerah belum optimal.



1.6.3 Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dalam RPJMD, permasalahan pembangunan dalam RKPD, arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan dalam RKP. Perumusan isu strategis daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

1. *Universal Health Coverage* (UHC);
2. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
4. Bangka Barat akan menjadi tuan rumah PORPROV 2022;
5. Keberlanjutan rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Ular oleh Pemerintah Pusat;
6. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana wilayah dalam menopang pembangunan yang berkelanjutan;
7. Peningkatan nilai tambah usaha pertanian dalam arti luas;
8. Pengaruh global terhadap harga komoditas strategis Bangka Barat;
9. Peningkatan daya saing usaha mikro, industri kecil dan menengah di semua sektor;
10. Akan beroperasi anInya KEK Tj. Api Api;
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
12. Peningkatan infrastruktur ke sumber-sumber produksi/perekonomian;
13. Peningkatan pengelolaan persampahan;
14. Pemulihan lahan kritis;
15. Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas;
16. Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020;
17. Penerapan SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar;
18. Peningkatan Sistem pengawasan internal;
19. Peningkatan Reformasi Birokrasi;
20. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah;
22. Peningkatan kapasitas aparatur;
23. Penerapan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
24. Penerapan Tunjangan (TPP) berbasis kinerja.



1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, gambaran umum daerah, urusan dan organisasi perangkat daerah serta permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Bangka Barat.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, organisasi dan gambaran singkat mengenai rencana serta strategi untuk mencapai target pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dalam bentuk perjanjian kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2020, evaluasi dan analisa pencapaian sasaran kinerja strategis serta analisis atas pencapaian keuangan Tahun 2020.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja Tahun 2020 dan strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen terpenting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui perencanaan kinerja disusun kerangka kinerja yang selanjutnya menjadi landasan dalam pelaksanaan dan penerapan akuntabilitas kinerja. Perencanaan strategis daerah untuk jangka menengah atau lima tahunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterjemahkan melalui dokumen RPJMD yang kemudian dijabarkan melalui perencanaan tahunan melalui RKPD.

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016. Berdasarkan periodisasi RPJMD, Tahun 2020 merupakan tahun kelima dalam pelaksanaan perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Bangka Barat.

2.1. VISI

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Barat adalah :

“Menuju Kabupaten Bangka Barat Hebat 2021”

Pernyataan visi tersebut mengandung makna yaitu: “Kabupaten Bangka Barat yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, daya saing daerah yang tinggi, masyarakat yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan dengan lingkungan hidup yang lestari”.

2.2. MISI

Pencapaian visi pembangunan yang telah dirumuskan akan direalisasikan melalui misi-misi pembangunan yang telah ditetapkan bersama. Misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel untuk pelayanan publik yang berkualitas;
- 2) Membangun perekonomian yang berbasis sumber daya lokal dan berdaya saing tinggi;



- 3) Membangun masyarakat yang maju dan berkualitas; dan
- 4) Mewujudkan kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun penjelasan dari masing-masing misi di atas adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel untuk pelayanan publik yang berkualitas

Misi 1 adalah upaya mencapai pengelolaan aspek pemerintahan (*Good Governance*) secara optimal. Unsur-unsur seperti akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, responsif, ketaatan hukum, serta berorientasi kepada pelayanan publik menjadi semangat dalam pengelolaan tata pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat. Penerapan manajerial birokrasi yang mengarah kepada profesionalitas ASN menjadi kunci bagi perubahan cara pandang tata kelola pemerintahan. Manajerial birokrasi tersebut dibuktikan oleh aparatur yang kuat dan memiliki mental melayani didukung oleh parameter pelaksanaan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Membangun perekonomian yang berbasis sumber daya lokal dan berdaya saing tinggi

Misi 2 merupakan upaya membangun perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi. Kabupaten Bangka Barat sudah tidak bisa lagi menggantungkan harapan kepada penambangan dan industri pengolahan timah yang sudah terjadi sekian lama di kabupaten ini. Beberapa permasalahan krusial di aspek perekonomian daerah seperti komoditi unggulan non tambang yang kurang berdaya saing, konektivitas antar wilayah sekitar dan infrastruktur daerah yang kurang memadai, harus segera terpecahkan dan diantisipasi dengan strategi yang tepat. Pembentukan kawasan ekonomi cepat tumbuh, peningkatan infrastruktur, konektivitas antar wilayah, penguatan sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan pelibatan tenaga kerja yang masif serta pemberdayaan, pembinaan di sektor ekonomi kreatif seperti pariwisata, kerajinan, kuliner bagi UKM/IKM dan kelompok masyarakat memiliki ekspektasi tinggi untuk dikembangkan.

Hal yang tidak kalah penting adalah kehandalan melihat peluang bagi pasar produk unggulan daerah yang ada. Permasalahan kewirausahaan yang rendah, pemasaran dan promosi yang tidak efektif, nilai jual produk yang tidak memiliki



nilai tambah (bahan mentah/tidak diolah) dan penerapan teknologi yang minim di sisi produksi harus segera teratasi.

Kebutuhan akan resolusi atas perekonomian pasca timah sebenarnya sudah terlihat dari ketimpangan antar wilayah dan distribusi pendapatan. Isu pembangunan yang bersifat inklusif (*pro poor* dan *pro job*) hanya bisa diterapkan jika konsentrasi pembangunan di daerah dilaksanakan secara merata di desa-desa yang ada dengan melakukan pemetaan yang tepat sesuai kondisi dan potensi desa masing-masing.

3. Membangun masyarakat yang maju dan berkualitas

Misi 3 terkait dengan manusia yang berperan sebagai pelaku sekaligus sasaran dalam pembangunan dijadikan faktor utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas masyarakat dari aspek kesehatan dan pendidikan menjadi strategi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas. Masyarakat yang berkualitas juga tercermin dari sikap yang toleran terhadap sesama, kemampuan mengekspresikan diri dalam berkesenian dan kebudayaan sehingga tercipta lingkungan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Peningkatan kualitas masyarakat dapat dilihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia. Perwujudan masyarakat yang sehat dan cerdas, untuk meningkatkan kualitas masyarakat menjadi sumber daya manusia yang siap bersaing dalam menghadapi tantangan global. Dengan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi maka kegiatan pembangunan akan dapat mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan tenteram.

4. Mewujudkan kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Misi 4 terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan konsep pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan kehidupan, dimana pembangunan yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia diiringi dengan penjagaan lingkungan hidup yang baik. Aspek lingkungan yang menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan menjadi faktor pemacu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bangka Barat dimana pemanfaatan sumber daya lokal dalam kegiatan ekonomi tidak boleh mengorbankan aspek lingkungan hidup.



Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup tercermin dengan terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihan lingkungan dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara sinergis dan seimbang. Selain penjagaan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan pula mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bangka Barat. Pembangunan dapat diarahkan untuk pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas masyarakat agar resiko bencana yang terjadi dapat diantisipasi.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk memberikan fokus bagi pencapaian misi pembangunan daerah, dirumuskan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi yang telah ditetapkan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun atau akhir periode perencanaan. Keterkaitan misi, tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Bangka Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel untuk pelayanan publik yang berkualitas	1. Menguatkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	1. Terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang transparan
		2. Meningkatnya kemandirian pemerintah daerah
		3. Terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang akuntabel
		4. Terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang efektif
		5. Terpenuhinya pelayanan dasar masyarakat dan kualitas pelayanan publik
2. Membangun perekonomian yang berbasis sumber daya lokal dan berdaya saing tinggi	1. Mengembangkan agribisnis/ agroindustri	1. Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan
		2. Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat
		3. Meningkatnya nilai produksi perikanan
		4. Meningkatnya nilai produksi peternakan



MISI	TUJUAN	SASARAN	
		5. Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	
	2. Meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif sebagai bagian Kawasan Perhatian Investasi	1. Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	
	3. Mengembangkan Usaha mikro, industri kecil, dan menengah yang mandiri	4. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan ekonomi	1. Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri
			2. Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing
	5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi		1. Berkembangnya destinasi wisata
			2. Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata
3. Membangun masyarakat yang maju dan berkualitas	1. Meningkatkan Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan	
		2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	
		3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	
		4. Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga	
4. Mewujudkan kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	1. Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berbudaya/ berwawasan lingkungan	
		2. Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	
		3. Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	
		4. Terkendalinya bencana banjir	
		5. Terwujudnya pemulihan lahan kritis	
		6. Terwujudnya konservasi sumber air	
	2. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap produk hukum penataan ruang dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup		1. Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang
			2. Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan



2.3.1 TARGET INDIKATOR TUJUAN TAHUN 2020

Dari 9 (sembilan) tujuan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, ditetapkan 11 indikator tujuan dengan target pada tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target Indikator Tujuan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Menguatkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Indeks reformasi birokrasi	65
2.	Mengembangkan agribisnis/agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	0,98%
3.	Meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif sebagai bagian Kawasan Perhatian Investasi	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	100 M
4.	Mengembangkan Usaha mikro, industri kecil, dan menengah	Kontribusi Umi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB	11,26%
5.	Mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,26%
		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	20 %
		Persentase benda, situs, benda, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata	39%
6.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi	Indeks konektivitas kabupaten	1,2
7.	Meningkatkan Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,10
8.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	68
9.	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap produk hukum penataan ruang dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	100%



2.3.2 TARGET INDIKATOR SASARAN TAHUN 2020

Berikut dijabarkan target sasaran pembangunan daerah sesuai dengan perubahan RKPD Tahun 2020. Perubahan dilakukan berdasarkan evaluasi hasil capaian RPJMD Tahun 2019 sesuai dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 serta capaian dan kondisi pembangunan daerah di triwulan pertama Tahun 2020. Terjadinya pandemi Covid-19 menimbulkan banyak perubahan terhadap tatanan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan. Kegiatan pembangunan difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 khususnya untuk bidang kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan perekonomian masyarakat. Program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 mengalami perubahan bahkan penghapusan/penundaan dan anggaran dialihkan untuk pembiayaan penanggulangan Covid-19.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka dilakukan perubahan target sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Target Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
2.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)	8,44%
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	67
4.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	80,73
5.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	75%
		Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	83
6.	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	1,8 Juta Rupiah
7.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	3.391,00 Milyar Rupiah
8.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai produksi perikanan tangkap	563.254,42 Juta Rupiah
		Nilai produksi perikanan budidaya air tawar	6.365,20 Juta Rupiah
		Nilai produksi perikanan budidaya air laut	6.493,00 Juta Rupiah



No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
9.	Meningkatnya nilai produksi peternakan	Nilai produksi ternak ruminansia	33.833 Juta Rupiah
		Nilai produksi ternak unggas	22.820 Juta Rupiah
10.	Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	0,98%
		Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas	4,00%
11.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA & PMDN)	100 Milyar Rupiah
12.	Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas UMi, Industri Kecil dan Menengah yang mandiri	Persentase peningkatan unit usaha UMi	2%
		Persentase peningkatan unit Industri Kecil dan Menengah	5%
		Peningkatan Skala usaha UMi	2%
		Kapasitas Usaha Industri Kecil dan Menengah Unggulan (industri makanan)	3.147,18 Ton/Thn
		Kapasitas Usaha Industri Kecil dan Menengah Unggulan (industri kerajinan)	212.492 Unit/Thn
13.	Berkembangnya ragam usaha dan produk UMi, Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing	Jumlah ragam usaha UMi	140
		Jumlah ragam usaha Industri Kecil dan Menengah	52
		Jangkauan pasar produk UMi	DK=99 % AK=0,65 % AP=0,35%
		Jangkauan pasar produk unggulan Industri Kecil dan Menengah	DK=98,% AK=1,25% AP=0,75%
		Kontribusi UMi, Industri Kecil dan Menengah terhadap PDRB	11,26%
14.	Berkembangnya destinasi wisata	Kunjungan wisata	50.000 orang
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,26%
		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	5%
15.	Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata	Persentase benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata	39%



No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
16.	Meningkatnya konektivitas daerah	Indeks konektivitas kabupaten	1,2
17.	Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian	Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis	94,76%
18.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peringkat Ujian Nasional se-Provinsi Bangka Belitung	-
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,05
		Angka Rata-rata Lama Sekolah kabupaten	8,07
19.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	70,05 Tahun
20.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	88,23%
21.	Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga	Prestasi olah raga pendidikan di tingkat provinsi	-
		Peringkat olahraga prestasi di tingkat provinsi	-
22.	Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/ kegiatan yang berbudaya/ berwawasan lingkungan	Persentase desa/ kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/ kelurahan	8%
		Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas yang bergerak di bidang lingkungan hidup secara aktif	11
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan & pemantauan lingkungan secara baik	60%
23.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	16%
24.	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak	90%
25.	Terkendalinya bencana banjir	Persentase desa/ kelurahan/titik banjir yang dimitigasi terhadap banjir/genangan air	80%
26.	Terwujudnya pemulihan lahan kritis	Persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif	1,5%
27.	Terwujudnya konservasi sumber air	Persentase sumber air yang telah dikonservasi	28%
28.	Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai	100%



No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	produk hukum penataan ruang	dengan produk hukum penataan ruang	
29.	Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Persentase ruang terbuka hijau	2,75%

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah :



Tabel 2.4
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Selisih PDRB tahun t dgn PDRB t-1 [dibagi] PDRB t-1 [dikali] 100	Pemerintah Daerah	Badan Pusat Statistik
		Indeks Pembangunan Manusia	IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$		
		Angka Kemiskinan	Penduduk yang pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan [dibagi] total penduduk [dikali] 100		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pencari kerja [dibagi] jumlah angkatan kerja [dikali] 100		
		PDRB Per Kapita	Total PDRB ADHB [dibagi] dengan jumlah penduduk pertengahan tahun		
2.	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi), Inspektorat Daerah	Kemenpan RB/ Inspektorat Kabupaten
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Kesimpulan hasil evaluasi terhadap Laporan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pemeriksa Keuangan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Pendapatan Asli Daerah [dibagi] Total Pendapatan [dikali] 100	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi), Inspektorat Daerah, BP4D	Kemenpan RB/ BPKP/ Inspektorat Provinsi
6.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Penjumlahan antara gap kompetensi pejabat dengan jabatan yang disyaratkan ditambah dengan kinerja pejabat yang bersangkutan ditambah dengan kompensasi dikurangi pelanggaran disiplin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Badan Kepegawaian Nasional/ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	SPM Pelayanan Dasar yang Terpenuhi [dibagi] nilai SPM yang seharusnya dilaksanakan [dikali] 100	Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	Jumlah nilai SKM seluruh Unit Pelayanan [dibagi] jumlah Unit Pelayanan [dikali] 100	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi) dan unit pelayanan	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi)
8.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun	Jumlah investasi tahun t dikurangi t-1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan dikalikan harga	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
10.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = \frac{IPA + IPU + ITH}{3}$ IPA : Indeks Pencemaran Air Sungai IPU : Indeks Pencemaran Udara ITH : Indeks Tutupan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pusat Statistik/ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi



2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah disusun kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja pemerintah untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah dilakukan perubahan pada tahun 2019 melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 berdasarkan rekomendasi dan masukan dari pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan perubahan Indikator Kinerja Utama tersebut, ditetapkan indikator sasaran pembangunan daerah yang memuat target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang kemudian dijadikan target dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020.

Tabel 2.5.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	-7,01
		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,1
		Angka Kemiskinan	%	3,34
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,08
		PDRB Per Kapita	rupiah	64.173.193
2.	Terwujudnya sistem tata kelola pemda yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
4.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	8,44
5.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	67
6.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,73



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
7.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	%	79,76
		Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	Nilai	83
8.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun	milyar rupiah	100
9.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	milyar rupiah	3,391
10.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68

2.6. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, maka disusun rencana dan target anggaran pendapatan maupun belanja daerah yang tertuang dalam APBD Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Berikut ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 :

Tabel 2.6
Ringkasan Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun Anggaran 2020

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
PENDAPATAN	900.009.421.572,00	884.577.846.626,50	(15.431.574.945,50)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	72.519.688.000,00	75.781.823.857,35	3.262.135.857,35
Pendapatan Pajak Daerah	30.285.000.000,00	26.246.000.000,00	(4.039.000.000,00)
Hasil Retribusi Daerah	5.844.000.000,00	5.239.250.000,00	(604.750.000,00)



URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.700.000.000,00	4.694.900.000,00	994.900.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.690.688.000,00	39.601.673.857,35	6.910.985.857,35
DANA PERIMBANGAN	676.975.064.000,00	635.414.533.450,00	(41.560.530.550,00)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62.946.194.000,00	90.834.464.640,00	27.888.270.640,00
Dana Alokasi Umum	480.279.507.000,00	427.997.278.000,00	(52.282.229.000,00)
Dana Alokasi Khusus	133.749.363.000,00	116.613.295.810,00	(17.136.067.190,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	150.514.669.572,00	173.381.489.319,15	22.866.819.747,15
Pendapatan Hibah Dana BOS	24.838.720.000,00	26.820.901.431,00	1.982.181.431,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46.594.204.572,00	42.446.665.528,15	(4.147.539.043,85)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59.081.745.000,00	82.338.269.000,00	23.256.524.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20.000.000.000,00	21.775.653.360,00	1.775.653.360,00
BELANJA	1.079.280.015.508,36	984.631.597.701,45	(94.648.417.806,91)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	511.134.180.508,00	467.496.459.832,45	(43.637.720.675,55)
Belanja Pegawai	365.000.000.000,00	317.250.000.000,00	(47.750.000.000,00)
Belanja Hibah	25.110.000.000,00	36.845.151.839,00	11.735.151.839,00
Belanja Bantuan Sosial	252.595.000,00	252.595.000,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	3.612.900.000,00	2.632.213.729,45	(980.686.270,55)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	116.158.685.508,00	110.316.499.264,00	(5.842.186.244,00)
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	200.000.000,00	(800.000.000,00)
BELANJA LANGSUNG	568.145.835.000,36	517.135.137.869,00	(51.010.697.131,36)
SURPLUS / (DEFISIT)	(179.270.593.936,36)	(100.053.751.074,95)	79.216.842.861,41



URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	191.270.593.936,36	103.053.751.074,95	(88.216.842.861,41)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	191.070.593.936,36	102.853.751.074,95	(88.216.842.861,41)
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(9.000.000.000,00)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(9.000.000.000,00)
PEMBIAYAAN NETTO	179.270.593.936,36	100.053.751.074,95	(79.216.842.861,41)
SILPA TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan tersebut, di dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 juga dijabarkan program pendukung untuk mencapai sasaran pembangunan di Tahun 2020 yang bersumber dari Belanja Langsung APBD yaitu sebesar Rp517.135.137.869. Program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebanyak 180 program yang dilaksanakan oleh 30 perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sesuai dengan kondisi serta sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Selanjutnya untuk menilai kinerja yang telah dicapai, dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya serta dilakukan analisa atas pencapaian kinerja dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sasaran kinerja berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan yang selanjutnya dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Metode perbandingan capaian kinerja tersebut dilakukan antara rencana dengan realisasi kinerja (*performance plan*) yang selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*). Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Adapun kerangka pengukuran kinerja berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 adalah dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja apakah melebihi target, sesuai target atau tidak mencapai target, dalam penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 digunakan 2 (dua) skala penilaian yaitu :

1. Pengukuran Capaian Tahunan

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian tahunan menggunakan 4 (empat) kategori yaitu "**Baik Sekali**", "**Baik**", "**Cukup**" dan "**Kurang**". Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator kinerja dilakukan dengan membuat rata-rata atas capaian indikator kinerja. Kategori ini digunakan untuk memperlihatkan secara jelas ketercapaian dan keberhasilan masing-masing indikator kinerja sehingga dapat menjadi peringatan dan perhatian selanjutnya untuk dapat menjadi perbaikan kedepan dalam rangka mencapai target indikator dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel3.1
Penilaian Capaian Tahunan

Nilai Capaian (%)	Kategori
≥ 100	Baik Sekali
80 s.d. < 100	Baik
60 s.d. < 80	Cukup
<60	Kurang



2. Pengukuran Capaian Akhir RPJMD

Untuk pengukuran capaian akhir RPJMD, dilakukan pengukuran terhadap **capaian indikator kerjasasaran** yang dibagi menjadi 3 (tiga) skala dengan 3 (tiga) kategori yaitu "**Tercapai**", "**Optimis Tercapai**" dan "**Perlu Upaya Lebih**".

Tabel3.2
Penilaian Capaian Kinerja Sasaran terhadap Target Akhir RPJMD

Nilai Capaian (%)	Kategori
≥ 100	Tercapai
≥ 80 s.d < 100	Optimis tercapai
<80	Perlu upaya lebih

3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, telah ditetapkan 10 Sasaran dengan 15 Indikator Sasaran yang harus dicapai di Tahun 2020 dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel3.3
Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	-7,01	-5,43	77,46
		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,1	69,08	99,97
		Angka Kemiskinan	%	3,34	2,70	119,16
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,08	4,12	118,90
		PDRB Per Kapita	rupiah	64.173.193	61.617.200	96,02
Rata-rata Capaian						102,30
2.	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65	n/a	n/a
Rata-rata Capaian						-
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100,00



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Rata-rata Capaian						100,00
4.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	8,44	7,77	92,09
Rata-rata Capaian						92,09
5.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	67	n/a	n/a
Rata-rata Capaian						-
6.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,73	64,17	79,49
Rata-rata Capaian						79,49
7.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	%	79,76	92,59	116,09
		Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	Nilai	83	80,98	97,57
Rata-rata Capaian						106,83
8.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun	miliar rupiah	100	417,08	417,08
Rata-rata Capaian						417,082
9.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	miliar rupiah	3.391	592,67	17,48
Rata-rata Capaian						17,48
10.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68	63,29	93,07
Rata-rata Capaian						93,07

Berdasarkan target indikator yang telah ditetapkan beserta capaian kinerja masing-masing sasaran dilakukan analisis dengan penjelasan sebagai berikut :



Sasaran Strategis 1 “**Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah**”

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah terdiri dari 5 indikator yang keseluruhannya merupakan indikator makro pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan Ekonomi	%	7,13	-7,01	-5,43	77,46	Cukup
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,05	69,1	69,08	99,97	Baik
Angka Kemiskinan	%	2,67	3,34	2,70	119,16	Baik Sekali
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,85	5,08	4,12	118,90	Baik Sekali
PDRB Per Kapita	Rupiah	66.183.000	64.173.193	61.617.200	96,02	Baik

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah” diukur dari 5 (lima) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB Per Kapita. Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2020 (dua) indikator Sasaran dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan dengan kategori “Baik Sekali” dan 3 (tiga) indikator belum mencapai target yang terdiri dari 2 (dua) indikator dengan kategori “Baik” dan 1 (satu) indikator dengan kriteria “Cukup”. Rata-rata capaian sasaran sebesar 102,30 persen dengan kategori “**Baik Sekali**”. Secara rinci, capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur capaian pembangunan khususnya dibidang ekonomi, salah satu indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHK (rill)



menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori daritahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 mengalami kontraksi atau kondisi penurunan siklus ekonomi yang dalam sehingga angka PDRB berada di kisaran minus. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 sebesar -5,43 persen. Jika dibandingkan dengan target daerah yang telah disesuaikan dan ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebesar -7,01 persen, maka indikator ini hanya mencapai sebesar 77,46 persen. Turunnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang juga mempengaruhi kondisi perekonomian global, nasional serta regional.

Pada Tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di pada Tahun 2019 dengan laju pertumbuhan sebesar 7,08 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yaitu sebesar 5,05 persen, maka realisasi di Tahun 2020 masih sangat jauh untuk dicapai. Dilihat dari kondisi perekonomian khususnya pertumbuhan ekonomi di Tahun 2021, dengan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 maka diperkirakan akan sangat sulit untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persentase)

Kategori	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018 ^r	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,46	-0,21	1,57	-0,18	3,60
B	Pertambangan dan Penggalian	0,65	2,41	0,48	1,41	-13,63
C	Industri Pengolahan	3,35	6,53	6,97	12,08	-7,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,11	6,17	8,55	15,06	19,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,04	7,59	0,01	2,01	7,50



Kategori	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018 ^r	2019*	2020**
F	Konstruksi	9,14	7,05	7,23	3,85	-1,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,80	7,35	4,53	4,28	-6,48
H	Transportasi dan Pergudangan	6,52	7,85	6,54	3,34	-13,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,90	5,83	6,54	3,34	-13,37
J	Informasi dan Komunikasi	9,12	8,43	2,80	3,70	-0,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,38	2,04	10,51	12,55	24,49
L	Real Estate	6,05	5,05	7,29	1,57	4,91
M,N	Jasa Perusahaan	4,21	4,10	4,49	0,37	-9,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,48	7,80	8,08	6,08	-0,63
P	Jasa Pendidikan	9,42	9,76	9,12	6,01	-0,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,08	8,90	7,52	7,37	1,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,21	7,80	4,13	4,48	-4,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,80	5,26	5,20	7,08	-5,43

Keterangan : ^r) angka revisi
*) angka sementara
**) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021

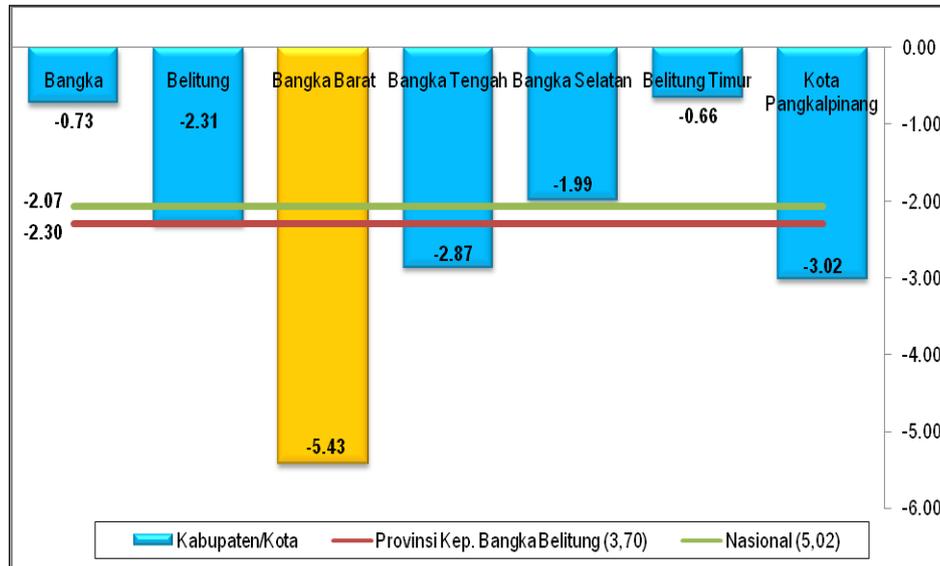
Pada tahun 2020, dari 17 kategori lapangan usaha pembentuk PDRB, hanya 6 kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, sementara 11 kategori lapangan usaha mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang negatif. Tiga kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi adalah pada lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan, Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Jika dilihat selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 merupakan capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi, sementara Tahun 2020 merupakan kondisi terendah dalam perekonomian Kabupaten Bangka Barat.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 berada pada posisi terendah diikuti oleh Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah. Sementara jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun nasional, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat jauh lebih rendah dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar -2,30 persen dan nasional dengan pertumbuhan sebesar -2,07 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020

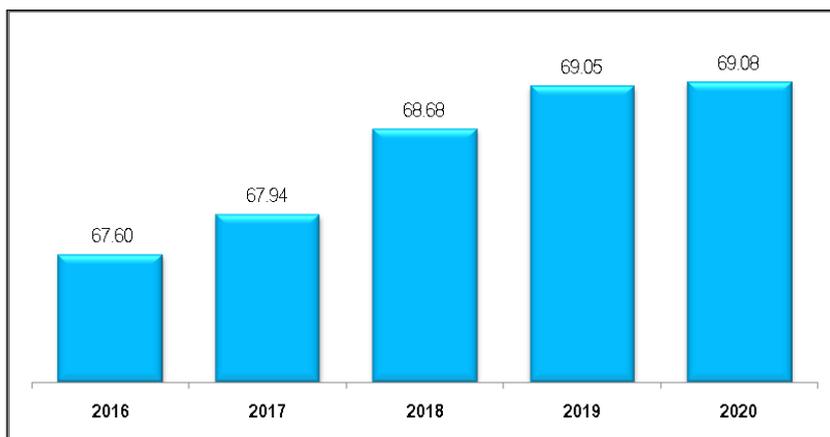
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM.



Nilai IPM Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 sebesar 69,08 dan jika dibandingkan dengan target IPM dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebesar 69,10, maka belum mencapai target dengan pencapaian sebesar 99,97 persen atau kategori "**Baik**".

Jika dilihat dari perkembangan antar waktu selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Bangka Barat menunjukkan perkembangan yang positif dan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,54 persen. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 dengan nilai 69,05, IPM Kabupaten Bangka Barat hanya meningkat sebesar 0,03 poin. Perkembangan ini secara umum menunjukkan perbaikan pembangunan manusia di Kabupaten Bangka Barat meskipun pertumbuhannya cenderung lambat. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 dengan nilai sebesar 72,23, maka telah mencapai sebesar 95,64 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

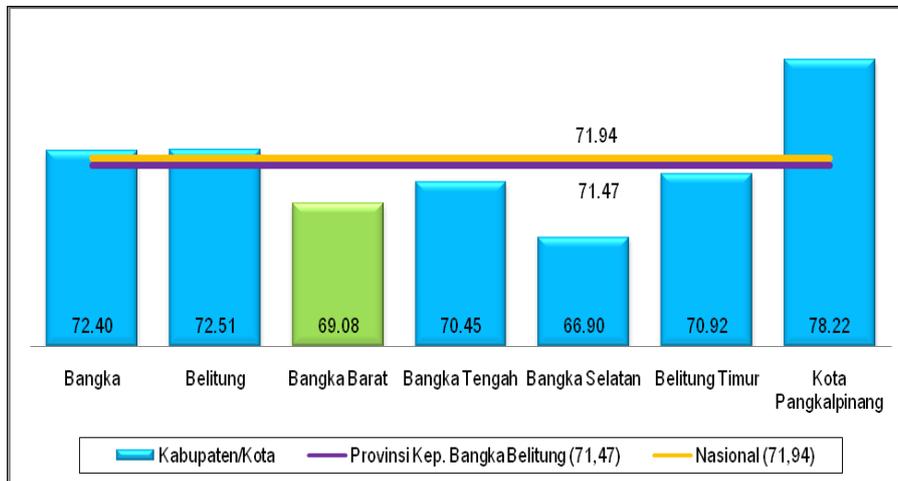
Gambar 3.2
IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 dengan nilai sebesar 72,23, maka sampai dengan Tahun 2020 nilai IPM Kabupaten Bangka Barat telah mencapai sebesar 95,64 persen. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Bangka Barat yang tidak mencapai 1 poin setiap tahunnya, maka diperkirakan target akhir RPJMD di Tahun 2021 untuk IPM tidak akan dapat tercapai.

Dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota lain di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat masih berada di peringkat ke-6 (enam) atau terendah kedua setelah Kabupaten Bangka Selatan. Sementara dibandingkan dengan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan IPM



Nasional, IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 cukup jauh tertinggal dengan perbedaan 2,39 poin dari IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 2,86 poin dari IPM Nasional.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 3.3

IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2019

Berubahnya status pembangunan manusia merupakan indikator untuk melihat perkembangan pembangunan manusia. Status pembangunan manusia berdasarkan capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Sampai dengan Tahun 2020, status Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Barat masih masuk kedalam kelompok sedang ($60 \leq \text{IPM} \leq 70$), sedangkan status Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional telah masuk di kelompok tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

Untuk melihat perkembangan IPM, tidak terlepas dari 3 komponen pembentuknya. Dilihat dari 3 komponen pembentuk IPM di Kabupaten Bangka Barat, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (Angka Harapan Hidup), dimensi pengetahuan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan. Sementara dimensi standar hidup layak (Pengeluaran Per Kapita) selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan kecuali di Tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2019. Hal ini dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi perekonomian internasional, nasional dan regional turut berdampak.



Tabel3.6
Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020

Komponen IPM	2016	2017	2018	2019	2020
AHH (tahun)	69,52	69,56	69,73	69,99	70,06
HLS (tahun)	11,49	11,5	11,51	11,52	11,53
RLS (tahun)	6,89	7,06	7,18	7,21	7,22
Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	11.303	11.394	12.011	12.275	12.233
IPM	67,60	67,94	68,68	69,05	69,08

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020
Ket : AHH (Angka Harapan Hidup)
HLS (Harapan Lama Sekolah)
RLS (Rata-rata Lama Sekolah)

Sementara jika dibandingkan antara Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, seluruh nilai komponen IPM Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 lebih rendah, kecuali untuk nilai Pengeluaran per kapita Kabupaten Bangka Barat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai nasional.

Tabel3.7
Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020
serta perbandingan dengan Provinsi dan Nasional

Komponen IPM	AHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	IPM
Indonesia	71,47	12,98	8,48	11.013	71,94
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70,64	12,05	8,06	12.794	71,47
Kabupaten Bangka Barat	70,06	11,53	7,22	12.233	69,08

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020
Ket : AHH (Angka Harapan Hidup)
HLS (Harapan Lama Sekolah)
RLS (Rata-rata Lama Sekolah)

Pembangunan manusia merupakan isu yang sangat penting. Kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan modal dasar pembangunan suatu daerah bahkan negara. Melihat perkembangan IPM Kabupaten Bangka Barat beserta komponen pembentuknya, maka kedepan diperlukan strategi dengan dukungan program dan kegiatan pembangunan yang tepat dan bersinggungan dengan komponen pendukung IPM yang mungkin belum terlaksana secara optimal untuk peningkatan IPM di Kabupaten Bangka Barat.



3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat, merupakan pihak-pihak memiliki tanggungjawab yang sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan data BPS, pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat sebesar 2,70 persen dan jika dibandingkan dengan target dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebesar 3,34 persen telah mencapai 119,16 persen. Dilihat dari perkembangan antar waktu, selama 5 (lima) tahun terakhir persentase penduduk miskin Kabupaten Bangka Barat berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 dengan presentase kemiskinan sebesar 2,67 persen maka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 meningkat 0,03 poin.

Tabel 3.8
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016 -2020

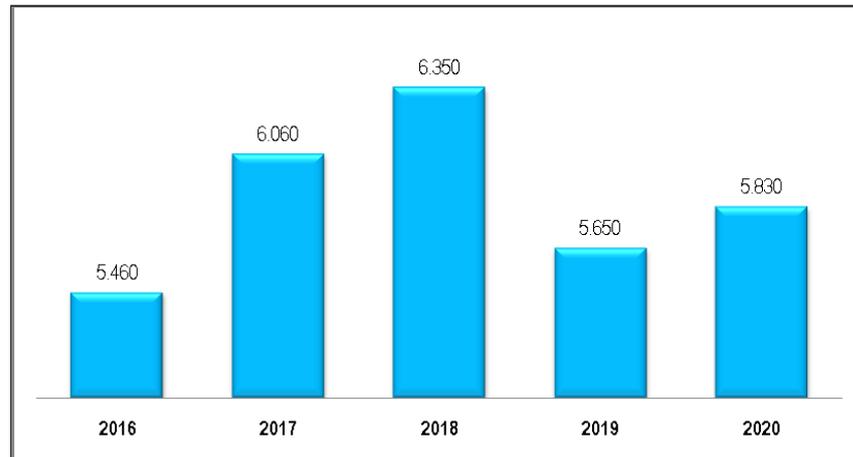
Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Bangka	5,52	5,10	5,47	4,92	4,51
Belitung	7,85	7,77	7,56	6,29	6,27
Bangka Barat	2,74	2,98	3,05	2,67	2,70
Bangka Tengah	5,64	6,07	5,81	5,02	4,85
Bangka Selatan	3,62	3,92	3,70	3,36	3,52
Belitung Timur	6,99	6,81	7,06	6,60	6,52
Kota Pangkalpinang	5,02	4,80	4,95	4,25	4,36
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5,22	5,20	5,25	4,50	4,89
Nasional	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dilihat dari perkembangan antar wilayah, kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat selama beberapa tahun terakhir berada pada posisi terbaik atau dengan angka kemiskinan terendah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Begitu pula jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di tingkat nasional dan provinsi, angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat berada jauh di bawah angka nasional sebesar 10,19 persen dan provinsi sebesar 4,89 persen.



Sejalan dengan persentase kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat juga turut mengalami peningkatan yaitu sebanyak 180 orang atau 3,19 persen dengan total penduduk miskin di Tahun 2019 sebanyak 5.650 jiwa menjadi 5.830 jiwa di Tahun 2020.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

Gambar 3.4
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 (jiwa)

Dilihat dari realisasi Tahun 2020, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 sebesar 2,85 persen, maka telah melebihi target yaitu dengan capaian 105,26 persen.

Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat terbilang rendah, namun kemiskinan tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus ditanggulangi. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta penguatan kelembagaan. Selanjutnya agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Bangka Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara pengangguran adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan



usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka dapat dikatakan tingkat ekonomi disuatu daerah semakin baik/maju, sekaligus merupakan tanda keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan.

Pada Tahun 2020, realisasi TPT Kabupaten Bangka Barat sebesar 4,12 persen sehingga jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebesar 5,08 persen, maka telah mencapai 118,90 persen.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 dengan tingkat pengangguran sebesar 2,85 persen, maka TPT di Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,27 persen. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2021 sebesar 5,65 persen, maka TPT telah mencapai 127,07 persen atau telah melampaui target.

Tabel 3.9
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja	91.923	-	65.782	106.408	103.518	-
Bekerja	86.480	-	62.668	103.102	100.563	-
Pengangguran	5.443	-	3.114	3.306	2.955	-
TPAK(Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (%)	65,47	-	68,17	70,47	66,99	65,76
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	5,92	-	4,23	3,11	2,85	4,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

Dilihat dari TPT kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat kedua terendah setelah Kabupaten Belitung Timur. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan angka 5,25 persen serta nasional dengan angka 7,07 persen, maka TPT Kabupaten Bangka Barat lebih rendah.



Tabel 3.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015-2020

No.	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Bangka	8,87	-	4,29	4,12	3,80	5,42
2.	Kab. Belitung	4,57	-	2,57	2,93	2,90	4,82
3.	Kab. Bangka Barat	5,92	-	4,23	3,11	2,85	4,12
4.	Kab. Bangka Tengah	6,58	-	3,38	3,93	4,39	5,59
5.	Kab. Bangka Selatan	2,01	-	2,74	4,35	3,87	5,42
6.	Kab. Belitung Timur	2,55	-	2,62	1,50	1,71	3,93
7.	Kota Pangkalpinang	10,64	-	5,80	4,70	5,01	6,93
Prov. Kep. Bangka Belitung		6,29	2,60	3,78	3,65	3,39	5,25
Indonesia		6,18	5,61	5,50	5,30	5,23	7,07

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

5. PDRB perkapita

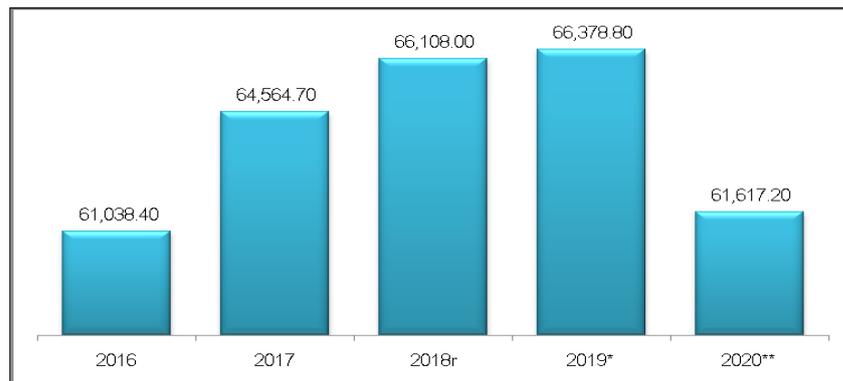
PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah yang dibandingkan dengan wilayah lain. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Berdasarkan publikasi BPS Kabupaten Bangka Barat, untuk nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp61.617.200,00. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2020 yang telah diubah sesuai dengan target Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebesar Rp64.173.193,00, maka tercapai sebesar 96,02 persen.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 dengan nilai PDRB per kapita sebesar Rp66.378.800,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp4.761.600,00 di Tahun 2020. Selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka



Barat menunjukkan perkembangan yang positif atau terus meningkat kecuali di Tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

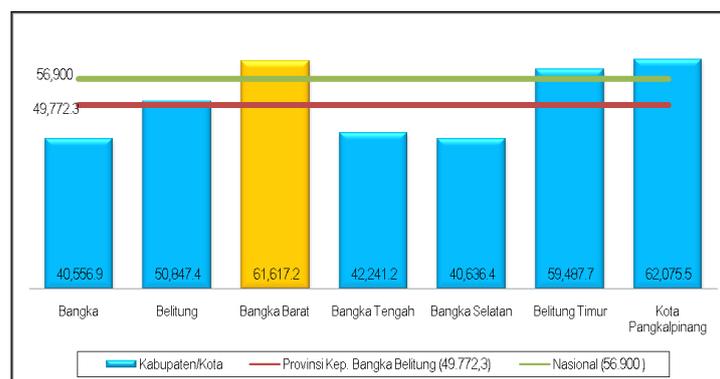


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 3.5
PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2021 dengan nilai Rp70.428.000,00, maka PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 mencapai 87,49 persen.

Jika dilihat dari perkembangan antar wilayah, PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 berada pada posisi kedua tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu setelah Kota Pangkalpinang. Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Nasional, Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat lebih tinggi.



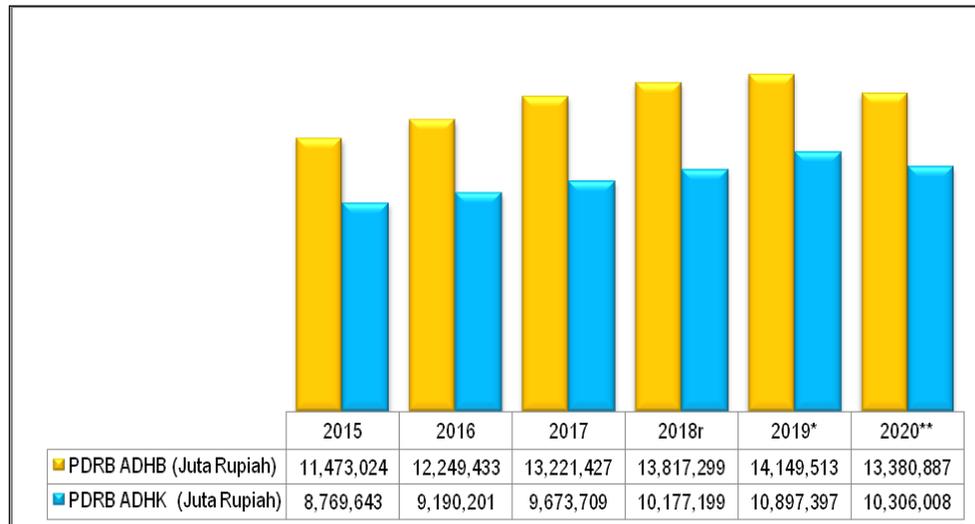
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 3.6
PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020 (ribu rupiah)

Secara umum perhitungan nilai PDRB Per Kapita sangat berkaitan dengan nilai PDRB. Pada Tahun 2020 PDRB Kabupaten Bangka Barat berdasarkan harga



berlaku sebesar Rp13.380.887 juta rupiah dan berdasarkan harga konstan sebesar Rp 10.306.008,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, nilai PDRB atas dasar berlaku dan konstan di Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 5,43 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 3.7
PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Barat (juta rupiah)
Tahun 2015-2020

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah
Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan Ekonomi	%	-5,43	5,05	-107,52	Perlu Upaya Lebih
IPM	Indeks	69,08	72,23	95,64	Optimis Tercapai
Kemiskinan	%	2,7	2,85	105,26	Tercapai
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,12	5,65	127,08	Tercapai
PDRB Perkapita	Ribu Rupiah	61.617.200	70.428.000	87,49	Optimis Tercapai



Dari capaian lima indikator sasaran tersebut jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka sampai dengan Tahun 2020 terdapat dua indikator yang telah melebihi target dengan kategori tercapai, sementara dua indikator dengan capaian di atas 80 persen dengan kategori optimis tercapai dan satu indikator dengan capaian negatif sehingga perlu upaya lebih untuk pencapaian target. Untuk indikator IPM meskipun sampai dengan Tahun 2020 telah tercapai lebih dari 90 persen, namun jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya, maka perlu dilakukan upaya yang komprehensif serta strategi yang tepat agar dapat dicapai sesuai target di Tahun 2021.

Secara umum untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah di Tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19. Diharapkan dengan pelaksanaan pemberian bantuan jaring pengaman sosial, peningkatan pelayanan kesehatan serta dukungan perbaikan perekonomian yang telah dilakukan di Tahun 2020 serta pemberian vaksinasi yang dilaksanakan di Tahun 2021 dapat segera mengembalikan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat.

Mengingat indikator Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah” adalah indikator makro, maka program pendukung adalah hampir seluruh program yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan pencapaian misi pembangunan daerah khususnya misi kedua yaitu “Membangun perekonomian yang berbasis sumber daya lokal dan berdaya saing tinggi” dan misi ketiga yaitu “Membangun masyarakat yang maju dan berkualitas”.

Sasaran Strategis 2 “**Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif**”

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih



KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	45,24	65	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>

Untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2020 masih dalam tahap evaluasi, sehingga belum didapatkan hasilnya, namun seiring dengan meningkatnya hasil evaluasi akuntabilitas, pelayanan publik, integritas dan indeks profesionalitas, diharapkan mampu meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Kabupaten Bangka Barat.

Target Indeks Reformasi Birokrasi untuk tahun 2020 adalah sebesar 65, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang sebesar 45,24 tentu saja perlu upaya yang lebih agar Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat mencapai target tahun 2020. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menaikkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, antara lain :

1. Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan tersebut.
2. Melakukan evaluasi kelembagaan guna menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi, namun masih perlu dipastikan kesesuaian struktur organisasi dalam mendukung pencapaian kinerja.
3. Menjadikan kinerja sebagai dasar pemberian TPP yang didukung dengan pengembangan sistem informasi manajemen data pegawai melalui aplikasi *e-kinerja*, namun perlu direviu kembali keselarasan antara kinerja individu dalam mendukung kinerja organisasi.



Tabel 3.13
Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 – 2020

NO	KOMPONEN PENILAI	BOBOT	NILAI	
			2019	2020
A	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	1,09	<i>n/a</i>
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,04	<i>n/a</i>
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	0,71	<i>n/a</i>
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,15	<i>n/a</i>
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	4,25	<i>n/a</i>
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,83	<i>n/a</i>
7	Penguatan Pengawasan	12,00	1,91	<i>n/a</i>
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	1,31	<i>n/a</i>
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	15,29	<i>n/a</i>
B	Komponen Hasil			
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,61	<i>n/a</i>
	Survei Internal Organisasi	6,00	4,24	<i>n/a</i>
	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,85	<i>n/a</i>
	Opini BPK	3,00	2,00	<i>n/a</i>
	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,25	<i>n/a</i>
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	29,95	<i>n/a</i>
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	45,24	<i>n/a</i>

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, 2021

Beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan implementasi Program Reformasi Birokrasi adalah :

- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum didasarkan atas perencanaan melalui *Road Map* Reformasi Birokrasi, Rencana Kerja Reformasi Birokrasi serta belum melakukan penunjukan *assessor* Reformasi Birokrasi.
- b. Implementasi Reformasi Birokrasi masih terpusat di tim Reformasi Birokrasi saja, belum terlihat adanya implementasi Reformasi Birokrasi di masing-masing OPD. Selain itu, Implementasi Reformasi Birokrasi masih dipandang



- sebagai kegiatan administratif saja belum terlihat adanya upaya-upaya nyata yang dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.
- c. Penataan tatalaksana belum didukung dengan penyusunan peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja organisasi dan perencanaan pengembangan *e-gov* yang akan mendukung percepatan birokrasi.
 - d. Penataan sistem manajemen SDM belum berjalan secara maksimal, seperti : belum dilakukannya *assessment* terhadap seluruh pegawai, belum adanya sistem perencanaan pengembangan kapasitas SDM yang terpadu dan belum adanya penetapan kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi.
 - e. Sistem pengawasan belum berjalan optimal dilihat dari belum disusunnya kebijakan terkait benturan kepentingan dan *whistleblowing system* (WBS). Selain itu, belum terlihat adanya upaya pembangunan unit kerja Zona Integritas WBK/WBBM.
 - f. Peningkatan kualitas pelayanan publik belum merata di setiap OPD meskipun telah menggunakan aplikasi, belum terlihat adanya inovasi OPD sebagai inisiatif dalam memecahkan permasalahan terkait birokrasi maupun upaya dalam peningkatan kepuasan pengguna layanan.

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif
Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	<i>n/a</i>	70	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>

Jika dilihat dari target pada indikator indeks reformasi birokrasi di akhir tahun RPJMD Kabupaten Bangka Barat sebesar 70, maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi di Tahun 2019 masih jauh dari target akhir RPJMD dan masih perlu upaya lebih dalam pencapaian sampai dengan akhir periode RPJMD.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, yaitu:



- a. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi dengan menetapkan prioritas perbaikan yang diperlukan baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Selanjutnya, menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. Road Map juga diintegrasikan dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, serta selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2024. Dalam upaya implementasi perubahan yang dicanangkan dalam Road Map tersebut perlu diikuti dengan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- b. Secara berjenjang melakukan internalisasi arah perubahan kepada seluruh pegawai sehingga mereka memahami arah perubahan dan dilibatkan dalam prosesnya. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya berupa pengumpulan dokumentasi semata, namun dititikberatkan pada perubahan budaya kinerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi.
- c. Melakukan penunjukan assessor PMPRB di level Pemerintah Daerah maupun di level Perangkat Daerah dan memastikan bahwa assessor tersebut paham mengenai mekanisme serta implementasi Reformasi Birokrasi. Assessor diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penilai, namun juga mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diperlukan dimasing-masing unit kerja secara spesifik.
- d. Memastikan pembentukan kelembagaan daerah mengacu pada kinerja organisasi guna mewujudkan *performance based organization*.
- e. Melakukan assessment kepada seluruh pegawai dan menetapkan standar kompetensi untuk seluruh jabatan. Hal dari proses ini dijadikan dasar untuk rencana pengembangan kompetensi pegawai.
- f. Menyusun proses bisnis dan memastikan bahwa proses bisnis mengidentifikasi seluruh proses yang diperlukan untuk pencapaian kinerja organisasi. Rencana pengembangan e-gov juga dapat mengintegrasikan pelayanan dan mempercepat alur birokrasi.
- g. Memastikan keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi sehingga dapat mengukur kontribusi dari masing-masing individu dalam pencapaian kinerja organisasi.
- h. Menyusun kebijakan penguatan pengawasan, seperti kebijakan mekanisme penanganan gratifikasi dan WBS. Setelah tersusun diharapkan adanya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi atas kebijakan-kebijakan tersebut.



- i. Melakukan upaya pembangunan Zona Integritas sebagai unit kerja miniatur Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada Permenpan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- j. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi-inovasi pelayan dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan di setiap unit pelayanan secara berkala.
- k. Menindaklanjuti hasil survei integritas terhadap jabatan dan organisasi, serta hasil survei pelayanan publik dan persepsi korupsi. Selain itu, pimpinan OPD aktif meningkatkan pemahaman setiap pegawai terhadap kinerja yang akan dicapai serta membangun budaya pelayanan prima dan anti korupsi di unit kerjanya.

Sasaran Strategis 3 “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan”

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Opini BPK terhadap Laporan keuangan Daerah	Opini	WDP	WTP	WTP	100	Baik

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Realisasi pengukuran indikator kinerja sasaran ini adalah berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 bahwa Laporan Keuangan



Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 mendapat penilaian yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tersebut untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan, disajikan secara wajar dan tidak terdapat kesalahan penyajian yang material. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2020
Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Opini BPK terhadap Laporan keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100	Tercapai

Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tersebut untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, disajikan secara wajar dan tidak terdapat kesalahan penyajian yang material. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang di buat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tetap berkomitmen untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK.

Pada Tahun 2020, Indikator Sasaran strategis ini didukung oleh program strategis sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.



Faktor pendukung dalam mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanakan Koordinasi intern dan ekstern dalam penganggaran, pengelolaan Keuangan daerah , dan pengelolaan barang milik daerah (BMD);
2. Pelaksanakan pembinaan dalam penganggaran, pengelolaan Keuangan daerah dan pengelolaan BMD;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan penatausahaan BMD;
4. Pelaksanakan pendampingan terhadap aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Melengkapi regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan per undangan- undangan yang berlaku;
6. Pelaksanakan pengelolaan aset daerah dengan baik dan benar (pengamanan, penilaian, Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah).

Sasaran Strategis 4 “**Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah**”

Sasaran kemandirian finansial daerah ini didukung oleh satu indikator yaitu capaian derajat otonomi fiskal daerah. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan suatu rasio guna mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah khususnya Pemerintah Daerah. Meningkatnya PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Adapun salah satu rasio yang digunakan sebagai tolok ukur dalam hal ini yaitu dengan membandingkan Total Realisasi PAD dengan Total Pendapatan Daerah.

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	7,39	8,44	7,77	92,09	Baik



Pada Tahun 2020, capaian Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebesar 7,77 persen. Pencapaian ini dibawah dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pemerintah daerah dimana target yang ditetapkan pada Tahun 2020 terkait DOFD sebesar 8,44 persen. Pencapaian DOFD Kabupaten Bangka Barat sebesar 7,77 persen didapat dari perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 64.304.326.355,09 dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 827.319.557.834,46. Detail perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.18
Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	KOMPONEN PENDAPATAN	REALISASI	PORSI
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 64.304.326.355,09	7,77
2.	Dana Perimbangan	Rp. 599.326.297.108,00	72,44
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 163.688.934.371,37	19,79
TOTAL PENDAPATAN TAHUN 2020		Rp. 827.319.557.834,46	

Sumber : BPPRD, 2021

Berikut dijelaskan secara lebih detail terkait pencapaian PAD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020:

a. Pajak Daerah

Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berhasil mendapatkan penerimaan lewat pajak daerah sebesar Rp. 20.610.403.491,80 dan berkontribusi sebesar 32,05 persen dari total PAD. Dari 11 sumber pajak daerah, kontribusi tertinggi yaitu pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, serta pajak BPHTB. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah di tahun sebelumnya (2019), realisasi penerimaan pajak di Tahun 2020 mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp. 1.325.831.862,67 atau 6,04 persen. Penurunan penerimaan pajak daerah di Tahun 2020 tentunya sudah dapat diprediksi, penyebabnya adalah wabah virus Covid-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini tidak terkecuali di Kabupaten Bangka Barat. Salah satu jenis pajak yang mengalami penurunan paling signifikan adalah pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 1.114.551.966,17 atau 59,15 persen, hal ini disebabkan banyak proyek baik dari



dana APBD atau APBN yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pemangkasan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID -19 dimana kegiatan tersebut mempunyai andil dalam menyumbang penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Tabel 3.19
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019-2020

NO	URAIAN PAJAK	REALISASI TAHUN 2019 (Rp)	REALISASI TAHUN 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel	96.795.137,00	63.051.026,00
2	Pajak Restoran	2.114.418.273,00	2.350.967.382,00
3	Pajak Hiburan	22.235.100,00	6.434.000,00
4	Pajak Reklame	391.053.946,50	385.287.548,00
5	Pajak Penerangan Jalan	12.349.144.327,00	12.370.951.168,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.884.241.995,97	769.690.029,80
7	Pajak Parkir	11.500.000,00	4.500.000,00
8	Pajak Air Tanah	219.539.280,00	165.386.115,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	247.926.075,00	244.531.228,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	3.197.404.635,00	2.907.435.845,00
11	BPHTB	1.401.976.585,00	1.342.169.150,00
TOTAL		21.936.235.354,47	20.610.403.491,80

Sumber : BPPRD, 2021

b. Retribusi Daerah

Dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berhasil mendapatkan penerimaan lewat retribusi daerah sebesar Rp. 5.346.696.788 dan berkontribusi sebesar 8,31 persen dari total PAD. Dari sumber-sumber retribusi daerah, kontribusi tertinggi yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 4.108.907.400,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi daerah di tahun sebelumnya (2019), realisasi penerimaan retribusi di Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 960.794.848,00 atau 17,97 persen. Capaian retribusi daerah di Tahun 2020 jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami



peningkatan pada semua jenis retribusi daerah, baik pada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berhasil mendapatkan penerimaan lewat Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 3.994.903.752,78 dan berkontribusi sebesar 6,21 persen dari total PAD. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan di tahun sebelumnya (2019), realisasi Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan di Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 234.525.507,99 atau 5,87 persen.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berhasil mendapatkan penerimaan lewat Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 34.352.322.322,51 dan berkontribusi sebesar 53,42 persen dari total PAD. Dari sumber-sumber lain-lain PAD yang sah, kontribusi tertinggi yaitu pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sejiran Setason sebesar Rp. 20.332.809.255,00. Jika dibandingkan dengan realisasi lain-lain PAD yang sah di tahun sebelumnya (2019), realisasi lain-lain PAD yang sah di Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.071.604.765,24 atau 8,21 persen. Penurunan yang sangat signifikan pada lain-lain PAD yang sah di Tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada jenis pendapatan bunga deposito.

Tabel 3.20
Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2020

NO	KOMPONEN PAD	REALISASI 2019	%	REALISASI 2020	%
1	Pajak	Rp. 21.936.235.354,47	32,50	Rp. 20.610.403.491,80	32,05
2	Restibusi	Rp. 4.385.901.940,00	6,50	Rp. 5.346.696.788,00	8,31
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 3.760.378.244,79	5,57	Rp. 3.994.903.752,78	6,21
4	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp. 37.423.927.087,75	55,44	Rp. 34.352.322.322,51	53,42



NO	KOMPONEN PAD	REALISASI 2019	%	REALISASI 2020	%
	TOTAL PAD	Rp. 67.506.442.627,01		Rp. 64.304.326.355,09	

Sumber : BPPRD, 2021

Jika dibandingkan dengan pencapaian DOFD tahun 2019 sebesar 7,39 persen, maka terjadi peningkatan realisasi DOFD pada Tahun 2020 sebesar 0,38 persen.

Peningkatan capaian DOFD di Tahun 2020 antara lain disebabkan oleh :

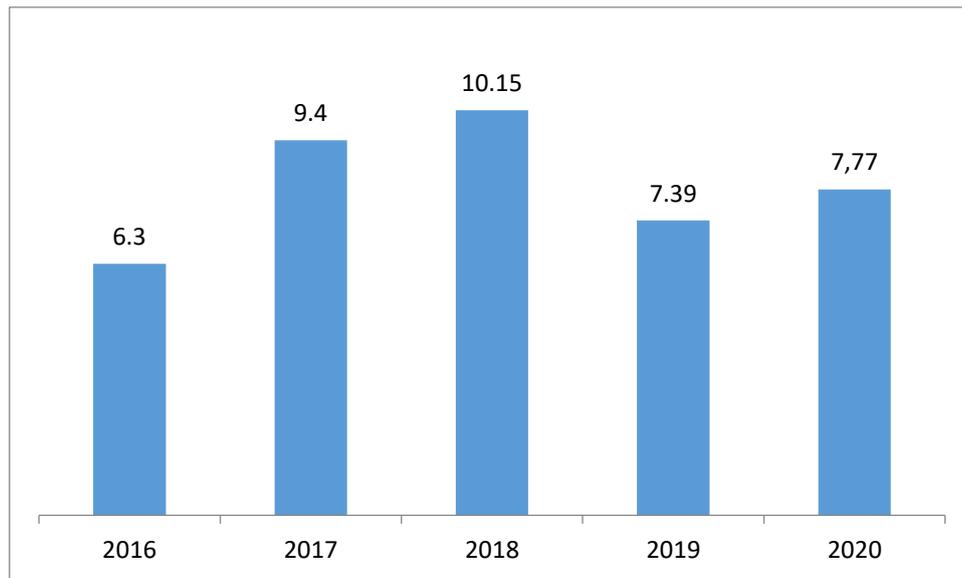
1. Adanya komitmen yang tinggi dari Pimpinan dan dukungan seluruh Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2021;
2. Adanya komitmen yang tinggi dari aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah;
3. Adanya dukungan anggaran dan fasilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah;
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat telah memiliki Standar Operasional Prosedur yang memadai dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Tabel 3.21

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	7,77	9,00	86,36	Optimis Tercapai

Dari pencapaian DOFD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebesar 7,77 persen, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 9,00 persen maka telah mencapai 86,36 persen dan sampai dengan akhir masa RPJMD optimis tercapai melalui upaya dan strategi yang tepat serta memperbaiki kekurangan yang ditemukan pada tahun - tahun sebelumnya. Program pendukung sasaran "Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah " adalah Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Program Optimalisasi PBB dan BPHTB yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.



Sumber : BPPRD, 2021

Gambar 3.8
Capaian DOFD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Dalam hal pencapaian target indikator DOFD, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah harus tetap berupaya untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah khususnya pada komponen pajak dan retribusi daerah. Strategi dan arah kebijakan terkait peningkatan DOFD antara lain melalui intensifikasi serta ekstensifikasi PAD.

Upaya-upaya peningkatan PAD melalui intensifikasi serta ekstensifikasi antara lain:

- a. Memberikan surat peringatan kepada pengelola rumah makan/restoran/cafe yang selama ini belum melakukan pembayaran pajak restoran;
- b. Melakukan relaksasi denda untuk PBB P2;
- c. Kerjasama dengan operator telekomunikasi terkait SMS Gateway kepada wajib pajak;
- d. Berkoordinasi dengan BUMN dan swasta terkait potensi pajak yang ada di BUMN dan swasta;
- e. Melakukan penyempurnaan tarif pajak dan retribusi daerah;
- f. Melakukan penagihan-penagihan pajak terutang yang timbul;
- g. Melakukan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan, kejujuran, dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak;
- h. Melakukan penyusunan *data base* potensi pajak;
- i. Menyempurnakan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis aplikasi



- secara optimal;
- j. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait yaitu kejaksaan sebagai pengacara negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam melakukan penagihan pajak dan piutang pajak;

Sasaran Strategis 5 “**Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel**”

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	69,24	67	n/a	n/a	n/a

Untuk Nilai SAKIP Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di tahun 2020 masih dalam tahap evaluasi, sehingga belum didapatkan hasilnya. Target nilai SAKIP Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2020 adalah sebesar 67, jika dibandingkan dengan realisasi tahun



2019 nilai SAKIP Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sudah melebihi target yang telah ditetapkan, tentu saja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berharap untuk nilai SAKIP Daerah Tahun 2020 menyamai nilai pada tahun 2019 atau bahkan melebihi nilai tersebut.

Faktor pendorong terhadap peningkatan capaian indikator nilai evaluasi SAKIP daerah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Melakukan revisi terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai arahan Kementerian PAN RB;
- b. Perbaiki komponen perencanaan kinerja melalui penggunaan aplikasi SIMDA perencanaan keluaran BPKP. Dalam penerapan aplikasi SIMDA perencanaan, terdapat 2 (dua) aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi 5 tahun perencanaan (RPJMD dan RENSTRA PD) yang berbasis desktop serta aplikasi tahun perencanaan (RKPD dan RENJA PD) yang berbasis website;
- c. Perbaiki komponen perencanaan kinerja dimana dalam penyusunan dokumen perencanaan selalu disertai dengan pelaksanaan reviu oleh inspektorat dan pembinaan oleh pihak pemerintah provinsi berupa fasilitasi terkait pengendalian penyusunan dokumen perencanaan;
- d. Melakukan penyusunan perjanjian kinerja mulai dari tingkatan pemerintah daerah sampai dengan tingkat eselon terendah;
- e. Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja perangkat daerah pasca penandatanganan perjanjian kinerja;
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan menyusun laporan kinerja pemerintah daerah yang lebih komprehensif dan dilakukan reviu oleh inspektorat terhadap laporan kinerja pemerintah daerah sebelum disampaikan kepada Kementerian PAN RB;
- g. Meningkatkan kualitas capaian kinerja dengan cara melakukan koordinasi rutin terkait pengendalian kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala (per triwulan);
- h. Melakukan evaluasi internal terhadap seluruh laporan kinerja perangkat daerah oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat dan memberikan rekomendasi hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti.

Sebagai penunjang SAKIP Kabupaten Bangka Barat, SAKIP perangkat daerah juga memegang peranan yang sangat penting. Hasil evaluasi 30 SAKIP perangkat



daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2019 menunjukkan perbaikan, dimana secara rata-rata nilai evaluasi adalah 67,05 (kategori baik)

Tabel 3.23
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel
Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	n/a	70	n/a	n/a

Capaian kinerja indikator nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2019 jika dibandingkan dengan target capaian di akhir Tahun RPJMD, masih menyisakan pekerjaan rumah untuk beberapa tahun kedepannya. Beberapa komponen SAKIP masih harus ditingkatkan, agar target akhir RPJMD terkait indikator nilai evaluasi SAKIP dapat tercapai. Akan tetapi, jika melihat capaian kinerja di Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sangat optimis bahwa target di akhir RPJMD terkait Nilai SAKIP Daerah akan dapat tercapai.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat guna meningkatkan pencapaian nilai SAKIP pada tahun mendatang, sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian PAN RB beberapa alternatif solusi yang harus dilakukan antara lain :

- a. Melakukan reuiu perbaikan terhadap perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah seperti : manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan pembangunan (*integrated development plan*) serta mekanisme *casecade* kinerja;
- b. *Casecade down* kinerja sampai level organisasi terendah perlu dibangun guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam RPJMD;
- c. Melakukan reuiu atas keselarasan antara kegiatan, program, dengan sasaran strategis sehingga dapat meyakinkan bahwa terdapat efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kinerja;
- d. Meningkatkan kualitas evaluasi pengelolaan program secara berkala dengan



berfokus pada ketercapaian hasil program serta keterpaduan lintas perangkat daerah;

- e. Menyempurnakan aplikasi E-SAKIP agar dapat optimal digunakan untuk monitoring dan evaluasi kinerja serta terintegrasi dengan aplikasi lainnya, seperti : aplikasi perencanaan dan penganggaran;
- f. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat dengan meningkatkan kapabilitas para evaluator agar mampu memacu perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah; dan
- g. Mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP yang ditunjang dengan pelaksanaan reuiu kinerja berjenjang secara berkala di seluruh unit kerja.

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang akuntabel secara umum dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pengawasan internal daerah, serta oleh seluruh perangkat daerah untuk penyusunan perencanaan, perjanjian, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah;
2. Program Perencanaan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh;
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.



Sasaran Strategis 6 “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif”

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	51,55	80,73	64,17	79,49	Cukup

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, dimana Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi **kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin**.

Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 adalah sebesar 64,17. Pencapaian ini dibawah target yang ditetapkan pada saat diperjanjikan yaitu sebesar 80,73. Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya (2019) yang memperoleh nilai 51,55. Beberapa faktor pendorong pencapaian Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

- Tersedianya Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 sebagai pedoman dalam pengukuran IP ASN yang dilengkapi aplikasi excel dari Badan Kepegawaian Negara.
- Rata-rata tingkat kesadaran PNS untuk menyusun SKP sudah sangat tinggi, hal ini didukung dengan adanya Kegiatan Penilaian Kinerja ASN yang dilaksanakan oleh BKPSDMD dengan memonitoring dan mengevaluasi penyusunan SKP dan DP3 Pegawai secara berkala ke OPD - OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta unit kerja yang berada di Kecamatan - kecamatan.
- Meningkatnya kualifikasi pendidikan ASN Kabupaten Bangka Barat. (disandingkan dengan tahun 2019)



Perhitungan Indeks profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sehingga pengukuran Indeks Profesional ASN dapat dilakukan secara sistematis, terukur dan berkesinambungan.

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bermanfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

- a. **Pegawai ASN** guna sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN;
- b. **Instansi Pemerintah** guna sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional; serta
- c. **Masyarakat** yang dapat digunakan sebagai instrument kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Tabel 3.25

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019 - 2020 Kabupaten Bangka Barat

NO	DIMENSI	BOBOT	Tahun 2019		Tahun 2020	
			HASIL	REALISASI	HASIL	REALISASI
1.	Kualifikasi	25	11,89	47,59	12,86	51,44
2.	Kompetensi	40	9,67	24,18	21,20	53
3.	Kinerja	30	25	83,33	25,13	83,77
4.	Disiplin	5	4,99	99,80	4,98	99,60
TOTAL		100	51,55		64,17	

Sumber : BKPSDM, 2021

Merujuk pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan indeks penilaian profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 masih jauh dari target yang telah ditetapkan, terutama dimensi kualifikasi dan dimensi kompetensi. Namun bila dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan terutama di dimensi Kompetensi sebesar 28,82 persen.

Salah satu instrumen dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah dimensi kualifikasi yang berdasarkan jenjang pendidikan ASN. Sedangkan indikator yang digunakan dalam pengukuran dimensi kompetensi adalah riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya. Detail



kualifikasi jenjang pendidikan pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.26
Kualifikasi ASN Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total	Persentase %
	Laki-laki	Perempuan		
SD	2	0	2	0,07
SMP Sederajat	15	4	19	0,68
SMA Sederajat	172	193	365	13,14
Diploma I	0	8	8	0,29
Diploma II	71	53	124	4,46
Diploma III	152	430	582	20,95
Diploma IV	13	32	45	1,62
Sarjana/S1	652	908	1.560	56,16
Magister/Doktor (S2/S3)	45	28	73	2,63
Jumlah Total	1.122	1.656	2.778	

Sumber : BKPSDM, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ASN Pemerintah Kabupaten Bangka Barat didominasi jenjang pendidikan Strata 1 sebanyak 1.560 orang atau 56,16 persen, sedangkan yang paling sedikit adalah jenjang pendidikan SD yang hanya berjumlah 2 orang atau 0,07 persen.

Beberapa faktor penghambat pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

- Pemberian beasiswa/bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS melalui Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar pada Tahun 2020 tidak dapat direalisasikan karena Pegawai yang sedang tugas belajar sedang dalam proses hukuman disiplin pegawai.
- Belum adanya pemetaan kebutuhan Pegawai dengan spesifikasi pendidikan lanjutan (S1, S2 dan dokter spesialis) yang dapat mendukung tercapainya Sasaran/ Tujuan RPJMD 2016 - 2021.
- Kurangnya minat Pegawai untuk meningkatkan kompetensinya melalui Diklat Teknis/ Fungsional, Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya yang



memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatannya khususnya dimasa Pandemi Covid-19 ini.

Tabel 3.27
Capaian Indikator Kinerja Tujuan Menguatkan Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,17	82,73	77,57	Perlu Upaya Lebih

Melihat realisasi Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 masuk dalam kategori **rendah**, sementara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada akhir periode RPJMD (di tahun 2021) untuk target indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah **kategori tinggi** (rentang nilai 80-90) meskipun terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi masih belum mencapai target. Untuk mencapai target akhir RPJMD, tentunya masih banyak upaya yang harus dilakukan kedepannya.

Beberapa langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian sasaran Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemetaan kebutuhan Pegawai dengan spesifikasi pendidikan lanjutan (S1, S2 dan dokter spesialis) yang dapat mendukung tercapainya Sasaran/ Tujuan RPJMD 2016 – 2021;
- b. Meningkatkan minat Pegawai untuk meningkatkan kompetensinya melalui Diklat Teknis/ Fungsional, Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatannya baik secara Daring/ Online maupun tatap muka;
- c. Dalam penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemkab. Bangka Barat direncanakan akan menggunakan aplikasi yang terintegrasi langsung ke Badan Kepegawaian Negara sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang efektif didukung oleh program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM dan Aparatur antara lain :

1. Program Peningkatan Kompetensi ASN;
2. Program Pemanfaatan Database ASN dan Layanan Kesejahteraan; serta



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Sasaran Strategis 7 “Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik”

Pengukuran sasaran “Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik” dilakukan melalui dua indikator yaitu Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Pelayanan Publik.

Capaian indikator kinerja Sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik
Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	Persen	77,93	79,76	92,59	116,09	Baik Sekali
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Pelayanan Publik	Nilai	78,62	83	80,98	97,57	Baik

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara



pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar didapat dari nilai rata-rata capaian SPM yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan wajib pelayanan dasar tersebut terdiri dari Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Urusan Sosial.

Tabel 3.29
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2020
1	Urusan Pendidikan	62,25%
2	Urusan Kesehatan	91,52%
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93,20%
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50%
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	62,76%
6	Urusan Sosial	159,97%
CAPAIAN SPM KABUPATEN BANGKA BARAT		92,59%

Sumber : Perangkat Daerah Pelaksana Layanan Standar Pelayanan Minimal, 2021

Pada Tahun 2020, untuk indikator Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar terealisasi sebesar 92,59 persen dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 79,76 persen. Dari realisasi tersebut maka pada Tahun 2020 telah melebihi dari target yang ditetapkan sehingga didapat capaian 116,09 persen.

Detail capaian pada masing-masing indikator Standar Pelayanan Minimal pelayanan dasar tergambar pada tabel dibawah.



Tabel 3.30
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Dibandingkan Dengan Target Nasional

No.	INDIKATOR	REALISASI 2020	TARGET NASIONAL	KET
I	URUSAN KESEHATAN			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	95,25%	100%	Tidak Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	96,61%	100%	Tidak Tercapai
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,38%	100%	Tidak Tercapai
4	Pelayanan Kesehatan Balita	93,34%	100%	Tidak Tercapai
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	97,81%	100%	Tidak Tercapai
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	70,23%	100%	Tidak Tercapai
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	78,32%	100%	Tidak Tercapai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	84,99%	100%	Tidak Tercapai
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	105,30%	100%	Tercapai
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	100%	Tercapai
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	71,68%	100%	Tidak Tercapai
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	105,38%	100%	Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN		91,52%	100%	Tidak Tercapai
II	URUSAN PENDIDIKAN			
1	Pendidikan Usia Dini	87,55%	100%	Tidak Tercapai
2	Pendidikan Dasar	86,64%	100%	Tidak Tercapai
3	Pendidikan Kesetaraan	4,53%	100%	Tidak Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN		59,57%	100%	Tidak Tercapai



No.	INDIKATOR	REALISASI 2020	TARGET NASIONAL	KET
III	URUSAN PEKERJAAN UMUM			
	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	91,78%	100%	Tidak Tercapai
	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan air Limbah Domestik	94,61%	100%	Tidak Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM		93,19%	100%	Tidak Tercapai
IV	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT			
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	Tercapai
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0%	100%	Tidak Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT		50%	100%	Tidak Tercapai
V	URUSAN SOSIAL			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%	100%	Tercapai
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100%	100%	Tercapai
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%	100%	Tercapai
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandang dan Pengemis di Luar Panti	100%	100%	Tidak Tercapai
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL		100%	100%	Tidak Tercapai



No.	INDIKATOR	REALISASI 2020	TARGET NASIONAL	KET
VI	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak Tercapai
	SUB URUSAN BENCANA DAERAH			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	7,87%	100%	Tidak Tercapai
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3,29%	100%	Tidak Tercapai
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	Tidak Tercapai
	SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH			
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	Tidak Tercapai
	CAPAIAN SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	62,23%	100%	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari 12 indikator SPM Urusan Kesehatan yang mencapai target nasional ada 3 (tiga) indikator yaitu indikator persentase penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, persentase orang dengan gangguan jiwa (OGDJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dan persentase orang



dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

Ada 3 (tiga) indikator yang telah mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditentukan, yaitu:

1. Persentase penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Diabetes Melitus (DM) atau penyakit kencing manis adalah suatu keadaan dimana tubuh tidak dapat menghasilkan hormon insulin yang sesuai kebutuhan tubuh, akibatnya mengganggu metabolisme gula sehingga gula yang semestinya berada dalam sel justru berada dalam darah. Penderita mengalami penurunan kualitas hidup, kinerja menurun karena cepat lelah. Pemeriksaan gula darah secara rutin dapat mengetahui gejala awal kencing manis sehingga terapi pengobatan dapat dilakukan pada fase awal penyakit dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup penderita. Pada tahun 2020 capaian indikator ini sebesar 105,30%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 (98,35%) mengalami peningkatan dan jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 100% indikator ini telah mencapai target. Hal ini disebabkan sasaran yang menjadi target lebih kecil dari capaian yang ada. Perhitungan sasaran berdasarkan angka kesakitan DM yang didapat dari hasil Riskesdas tahun 2018 (2,63%) dikalikan dengan jumlah penduduk 15 tahun keatas. Capaian diatas 100% mengartikan bahwa saat ini angka kesakitan di kabupaten Bangka Barat lebih dari 2,63%, yang berarti ada peningkatan jumlah penderita DM.

2. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, pada keadaan ini virus menyerang sistem kekebalan tubuh manusia akibatnya kemampuan tubuh untuk melawan infeksi penyakit mengalami penurunan, sampai saat ini obat untuk menyembuhkan HIV belum ditemukan, pengobatan yang diberikan adalah untuk mempertahankan jangan sampai HIV berkembang menjadi AIDS serta meningkatkan kualitas hidup penderita. AIDS adalah suatu keadaan dimana tubuh sudah sama sekali kehilangan sistem kekebalan tubuh sehingga kemungkinan penderita meninggal amat besar karena tubuh tidak mampu lagi melawan penyakit. Pada tahun 2020 pemeriksaan HIV pada kelompok yang rentan terinfeksi sebesar 105,38%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 (86,29%) indikator ini mengalami peningkatan dan jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 100% telah mencapai target. Hal ini disebabkan



adanya penambahan jumlah sasaran (warga binaan pemasyarakatan (WBL) dan waria) yang tidak bisa diprediksi dan diketahui bertambah di akhir tahun sehingga data sasaran tidak lagi bisa dirubah karena sudah disampaikan ke Kementerian Kesehatan pada bulan Oktober tahun 2020.

3. Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Orang dengan gangguan jiwa adalah seseorang yang setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan memiliki gangguan kesehatan jiwa. Dalam kehidupannya kualitas hidup maupun produktifitas dengan gangguan jiwa sangat rendah, untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok ini dilakukan program pelayan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa. Pada tahun 2019 orang dengan gangguan jiwa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 (100%) dan target nasional (100%) indikator ini sudah mencapai target. Tercapainya ini indikator ini disebabkan kerjasama lintas sektor yang telah terlaksana dengan maksimal dengan adanya bantuan/peran serta aktif yang terlibat dalam penanganan ODGJ seperti Rumah Sakit Jiwa, Polisi, dinas sosial, Dinas Dukcapil, Pol PP, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Meskipun sudah mencapai target dan sudah terlaksana dengan baik masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam hal pengobatan ODGJ tersebut diantaranya ada ODGJ yang belum memiliki jaminan kesehatan, kondisi ODGJ yang sulit ditangani, ODGJ yang tidak memiliki keluarga/terlantar sehingga tidak ada yang mengawasi dalam pemberian obat dan jika sudah kembali dari pengobatan di RSJ tidak ada keluarga yang mengurusnya. Selain itu ada penambahan ODGJ setiap tahun, dengan data pada tahun 2017 sebanyak 318 ODGJ menjadi sebanyak 493 ODGJ pada tahun 2020. Ada penambahan 175 ODGJ dalam jangka waktu 3 tahun.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target SPM urusan kesehatan, antara lain:

1. Adanya kejadian covid-19 yang menyebabkan beberapa hal, antara lain:
 - a. Adanya jeda pemberian pelayanan kesehatan selama 3 bulan (April s.d Juni) untuk beberapa Puskesmas, sehingga tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana mestinya
 - b. Setelah adanya new normal atau penggunaan protocol kesehatan masih ada masyarakat yang enggan dan takut untuk memeriksakan kesehatan ke pelayanan kesehatan.



- c. Adanya masyarakat yang enggan dan takut dikunjungi oleh tenaga kesehatan kerumah.
2. Masih rendahnya komitmen dalam pencapaian program seperti adanya pergantian petugas/pengelola program yang berdampak pada regulasi dalam menjalankan misi atau target yang ingin dicapai program.
3. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan yang terbatas masih menjadi kendala tercapainya indikator kesehatan.
4. Masih adanya masyarakat yang enggan memeriksakan kesehatan pribadi dikarenakan malu, takut, dan ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan pribadi untuk deteksi dini kejadian penyakit.
5. Peran aktif desa dalam penganggaran kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) serta komitmen perangkat desa dalam membantu pelaksanaan kegiatan kesehatan di Desa, masih ada beberapa desa yang belum maksimal.
6. Masih ada sarana pelayanan kesehatan lainnya yang belum melaporkan pelayanan yang diberikan ke Puskesmas.
7. Rendahnya status ekonomi juga menyebabkan masyarakat tidak bisa memeriksakan kesehatannya/masih ada masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan pelayanan kesehatan.
8. Masih ada penerima pelayanan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan luar wilayah kerja Kabupaten ataupun Kecamatan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target nasional 100% untuk SPM urusan kesehatan, antara lain:

1. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam meningkatkan capaian indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
2. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat pada umumnya dan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama pada khususnya.
3. Advokasi penerapan dan pencapaian SPM baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kecamatan.
4. Meningkatkan penyuluhan di masyarakat dalam rangka penyampaian informasi terkait dengan SPM baik melalui penyuluhan massa, media informasi dan lainnya.
5. Mengkafer seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu dalam jaminan pelayanan kesehatan



6. Melalui kunjungan rumah terhadap masyarakat yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan maupun UKBM.
7. Petugas di sarana pelayanan kesehatan telah dibekali dengan pengetahuan deteksi dini dan upaya pencegahannya, kemampuan petugas tetap perlu di pantau melalui berbagai pelatihan.
8. Memenuhi ketersediaan sarana prasarana sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
9. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan 12 indikator SPM yang harus dicapai, yang merupakan pelayanan minimal/dasar yang harus diterima oleh setiap orang. Melalui indikator SPM ini dapat dideteksi status kesehatan seseorang, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.
10. Meningkatkan peran dan fungsi Puskesmas dan jaringannya itu sendiri. Puskesmas dan jaringannya merupakan sarana pelayanan kesehatan yang berperan sebagai pusat pelayanan, pusat pembangunan wawasan serta pusat penggerak pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan.
11. Perbaikan pelayanan terus dilakukan untuk mencapai target SPM ini melalui penambahan jaringan puskesmas hingga ke pedesaan dan jangkauan pelayanan juga di dukung dengan pembentukan Posbindu di desa yang bertujuan untuk meningkatkan pemeriksaan kesehatan pribadi masyarakat.
12. Pemeriksaan secara berkala kelompok yang rentan terinfeksi HIV memungkinkan terdaksinya penderita HIV secara dini, deteksi dini akan berdampak pula akan penanganan dini sehingga lebih efektif mencegah HIV berkembang menjadi AIDS.
13. Meningkatkan peran aktif desa dalam penganggaran kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan komitmen perangkat desa dalam membantu pelaksanaan kegiatan kesehatan.
14. Menciptakan inovasi-inovasi kesehatan yang dapat mendukung tercapainya program kesehatan baik ditingkat Puskesmas maupun Kabupaten, seperti yang saat ini telah dicoba dilakukan di kabupaten Bangka Barat yaitu bedah desaku, sukro, buka lapak, terasi dan lainnya.
15. Saat ini vaksinasi menjadi salah satu faktor yang akan membantu untuk meningkatkan capaian SPM.

Untuk rata-rata capaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 adalah 62,25 persen, dimana dari 3 (tiga) indikator tidak ada satupun indikator



yang mendapatkan capaian 100 persen. Namun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan dimana pada tahun 2019 capaian SPM urusan pendidikan sebesar 57,57 persen. Dalam pelaksanaan penerapan SPM di bidang pendidikan tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas tekhnis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Minimnya aspirasi orang tua dalam bidang pendidikan untuk menyekolahkan anaknya yang dimulai dari pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Minimnya pendataan terhadap anak putus sekolah pada usia sekolah yang membuat Dinas tekhnis kesulitan dalam melakukan penghitungan kebutuhan SPM untuk anak putus sekolah;
- c. Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan rentang usia jenjang pendidikan tersebut ;
- d. Terbatasnya penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian SPM di Kabupaten;
- e. Perubahan kebijakan penerapan SPM di tingkat pusat yang belum diikuti dengan penyesuaian program dan kegiatan SPM di tingkat daerah dikarenakan kebijakan SPM tersebut di implementasikan oleh Pemerintah Daerah pada ujung tahun.

Rata-rata capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 adalah 93,20 persen. Capaian rata-rata tersebut merupakan capaian dari indikator “pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari” sebesar 91,78 persen serta capaian dari indikator “penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik” sebesar 94,61 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2019 capaian SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya sebesar 79,39 persen.

Rata-rata capaian SPM urusan perumahan dan permukiman Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 adalah 50 persen, dimana dari 2 (dua) indikator ada 1 (satu) yang mendapatkan capaian 100 persen sedangkan indikator lainnya 0 persen. Detail penjelasan setiap indikator pada SPM urusan perumahan dan permukiman yaitu :

- a. Capaian SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah 100 persen, dimana dari 2 (dua) kasus rumah warga yang terkena dampak bencana, semuanya dilakukan perbaikan. Penentuan



sasaran indikator “Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana”, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.45/142.a/1.4.1.1/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi/Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020. Berikut adalah daftar penerima bantuan kegiatan rehabilitasi/perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020.

Tabel 3.31
Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi/Perbaikan Perumahan
Akibat Bencana Alam/Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	NAMA	PENYEBAB	ALAMAT
1	Kasiran	Angin Kencang	Dusun I Desa Pangek Kecamatan Simpang Teritip
2	Darna	Angin Kencang	Dusun I Desa Pangek Kecamatan Simpang Teritip

- b. Capaian SPM untuk fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten adalah 100 persen, dimana pada tahun 2020, tidak terdapat kasus rumah masyarakat yang terdampak akibat relokasi program Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Rata-rata capaian SPM urusan sosial Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 adalah 159,97 persen, dimana dari 5 (lima) indikator semuanya mendapatkan capaian 100 persen. Layanan standar rehabilitasi sosial dasar yang harus diterima oleh penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial berupa pelayanan data dan pengaduan, kedaruratan, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Terjadi peningkatan nilai SPM urusan sosial jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya sebesar 88,22 persen.

Rata-rata capaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 adalah 62,76 persen, dimana dari 5 (lima) indikator terdapat 3 (tiga) indikator yang mendapatkan capaian 100 persen. Namun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan dimana pada tahun 2019 capaian nilai SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar 46,54 persen.



Untuk realisasi indikator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Pelayanan Publik, pada Tahun 2020 mendapat nilai 80,98. Pencapaian ini dibawah target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pemerintah daerah dimana target yang ditetapkan pada Tahun 2020 adalah 83. Pencapaian hasil SKM atas pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pencapaian di Tahun 2019 sebesar 78,62.

Dalam pelaksanaan SKM terkait pelayanan publik, perangkat daerah dan unit pelayanan melakukan secara mandiri dengan didampingi oleh tim fasilitasi SKM yaitu Bagian Organisasi dan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Di Tahun 2020 terdapat 22 perangkat daerah dan unit pelayanan yang melaksanakan SKM, akan tetapi ada 2 (dua) perangkat daerah dan unit pelayanan yang tidak dapat dihitung karena masih berpedoman pada aturan yang lama, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kecamatan Tempilang.

Tabel 3.32
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2020

No.	Unit Pelayanan	SKM 2019	SKM 2020	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	76,12	77,37	Meningkat
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81,30	81,41	Meningkat
3	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	81,84	82,1	Meningkat
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	81,03	86,62	Meningkat
5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	88,29	87,41	Menurun
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	85,95	82,10	Menurun
7	RSUD Sejiran Setason	74,81	76,82	Meningkat
8	Kecamatan Muntok	81,86	81,90	Meningkat
9	Kecamatan Simpang Teritip	84,78	85,48	Meningkat
10	Kecamatan Jebus	81,49	81,49	Sama



No.	Unit Pelayanan	SKM 2019	SKM 2020	Keterangan
11	Kecamatan Parittiga	82,75	80,05	Menurun
12	Kecamatan Kelapa	80,72	80,75	Meningkat
13	Puskesmas Muntok	78,75	78,42	Menurun
14	Puskesmas Simpang Teritip	74,40	79,90	Meningkat
15	Puskesmas Kelapa	81,90	82,12	Meningkat
16	Puskesmas Sekar Biru	81,76	81,87	Meningkat
17	Puskesmas Puput	77,96	74,89	Menurun
18	Puskesmas Tempilang	80,16	80,49	Meningkat
19	Puskesmas Jebus	77,34	83,25	Meningkat
20	Puskesmas Kundi	67,36	75,07	Meningkat
PEMKAB. BANGKA BARAT		78,62	80,98	Meningkat

Sumber : Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, 2021

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	Persen	92,59	80	115,74	Tercapai

Jika melihat capaian kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal di Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sudah memenuhi target di akhir RPJMD. Tentu saja tugas selanjutnya adalah untuk mempertahankan nilai tersebut sampai dengan Tahun 2021, dengan cara memperbaiki komitmen dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal terhadap pelayanan publik yang berhak diperoleh warga negara, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui perangkat daerah melaksanakan urusan wajib yang bersifat dasar akan melakukan upaya penguatan, antara lain :

- a. Memperbaiki database khususnya terkait indikator yang digunakan dalam Standar pelayanan Minimal;
- b. Menjamin database terkait indikator yang digunakan dalam Standar pelayanan Minimal akan digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran;



- c. Memastikan pelaksanaan Standar pelayanan Minimal memperhatikan mutu layanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Melakukan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat secara berkala.

Dalam pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal antara lain didukung oleh Program :

- a. SPM Urusan Kesehatan : Program Upaya Kesehatan Perorangan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, serta Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
- b. SPM Urusan Pendidikan : Program Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta Program Pendidikan Non Formal;
- c. SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- d. SPM Urusan Perumahan dan Permukiman : Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial;
- e. SPM Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat: Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran serta Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam;
- f. SPM Urusan Sosial : Program Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Sosial Penanganan Bencana, serta Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Indikator Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2020
Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik	Persen	80,98	85	95,27	Optimis Tercapai

Jika melihat capaian kinerja indikator kualitas pelayanan publik di Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sangat optimis bahwa target di akhir RPJMD terkait SKM atas pelayanan publik akan dapat tercapai. Dari hasil SKM di



Tahun 2020 sebesar 80,98 persen, jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD yaitu sebesar 85 maka telah tercapai 95,27 persen. Berkaca dari hasil survei kepuasan masyarakat pada perangkat daerah/unit perangkat daerah yang berhubungan dengan layanan publik, secara umum unsur layanan yang mendapatkan nilai rendah yaitu pada unsur waktu penyelesaian, sarana dan prasarana, biaya/tarif, serta kompetensi pelaksana. Unsur-unsur yang masih menjadi sorotan masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan publik untuk dapat lebih ditingkatkan kualitasnya pada tahun kedepannya. Dalam pelaksanaan penilaian SKM di Tahun 2020 masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

- a. Masih ada unit layanan (yang berhubungan dengan pelayanan publik) yang menyusun laporan SKM belum sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017.
- b. Masih banyak catatan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan pelayanan publik, yang masuk dalam unsur penilaian SKM, khususnya pada unsur waktu penyelesaian, sarana dan prasarana, biaya/tarif, serta kompetensi pelaksana.

Dalam pencapaian kualitas pelayanan publik didukung oleh Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program penyelenggaraan tugas pelimpahan kewenangan Kepala daerah, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Upaya-upaya yang akan diterapkan untuk peningkatan nilai SKM Kabupaten Bangka Barat antara lain :

- a. Memastikan bahwa semua unit layanan (yang berhubungan dengan pelayanan publik) dalam penyusunan laporan SKM sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan penggantinya;
- b. Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah dapat melakukan pendampingan secara lebih intensif dalam penyusunan laporan SKM pada semua unit layanan;
- c. Memperbaiki unsur-unsur pelayanan publik yang masih dianggap lemah dalam penilaian SKM di tahun sebelumnya, baik berupa peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi pelaksana.



Sasaran Strategis 8 **“Meningkatnya Jumlah Investasi/Penanaman Modal di Daerah”**

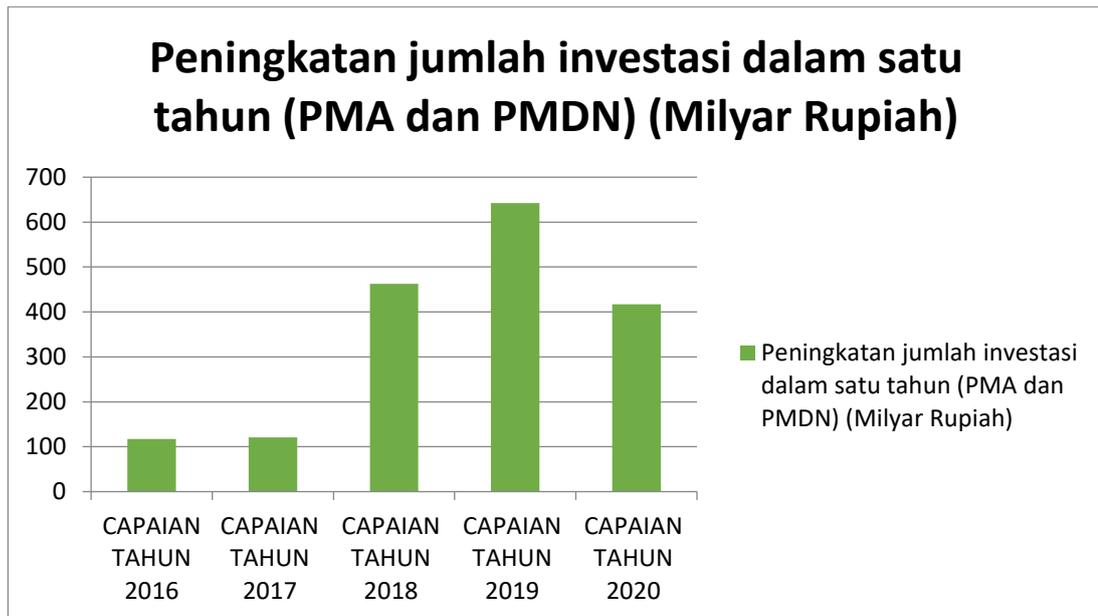
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Jumlah Investasi/ Penanaman Modal Di Daerah” sebesar 417,08 persen dengan status capaian “Tercapai”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.35
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Jumlah Investasi/Penanaman Modal di Daerah Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	miliar	642	100,00	417,08	417,08	Tercapai

Target peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (Penanaman Modal Asing/PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN) pada Tahun 2020 sebesar Rp100.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 417.082.000.000 sehingga capaiannya adalah 417,08 persennilai ini mengalami penurunan sebesar 64,96 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 642.000.000.000. Berdasarkan realisasi capaian Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp224.918.000.000,00 hal ini dikarenakan sistem pelaporan perusahaan yang memiliki kantor Cabang di daerah Kabupaten Bangka Barat masih terpusat belum terkoneksi ke daerah sehingga menyebabkan data laporan investasi Cabang Perusahaan tersebut belum dapat diterima oleh Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan OPD DPMNAKERTRANS yang mempunyai Tugas Fungsi terkait adalah menjalankan program kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di perusahaan terhadap perusahaan yang belum menyampaikan data investasi.

Faktor pendukung yang mempengaruhi peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) pada tahun 2020 adalah adanya program promosi investasi dan penanaman modal yang telah laksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat melalui OPD terkait secara berkala dan berkesinambungan.



Sumber : Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Nakertrans, 2020

Gambar 3.9

Nilai Investasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 (dalam juta rupiah)

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD sampai Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.36

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Investasi/
Penanaman Modal di Daerah Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	miliar	417,08	600	69,51	Perlu Upaya Lebih

Melihat pencapaian pada Tahun 2020, target Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) pada tahun kelima RPJMD sebesar 69,51 persen maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah Investasi/Penanaman Modal di Daerah perlu upaya lebih untuk mencapai target yang ditetapkan diakhir periode RPJMD.



Sasaran Strategis 9 **“Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat”**

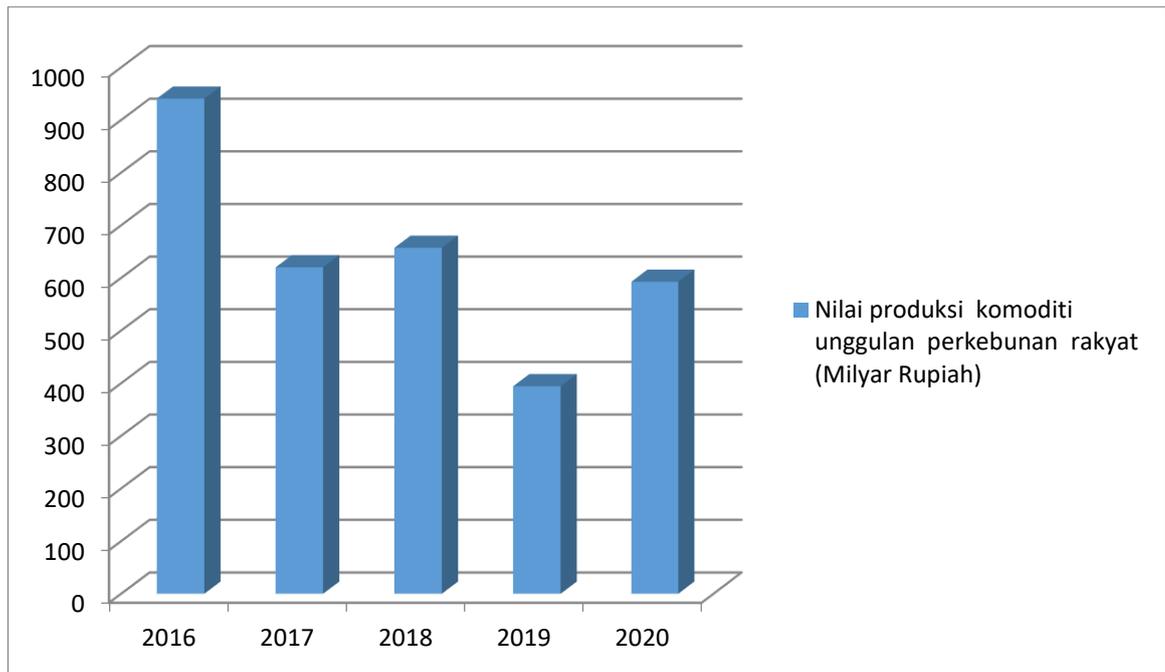
Capaian indikator kinerja Sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel3.37
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Nilai Produksi,
Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Miliar Rupiah	394,1	3,391.00	592,67	17,48	Tidak Tercapai

Indikator Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat dihitung dari tiga komoditas perkebunan yaitu karet, sawit dan lada. Pada Tahun 2020, Nilai Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Rakyat terealisasi sebesar 592,67 miliar rupiah dengan capaian 17,48 persen dari target Tahun 2020 sebesar 3,391.00 miliar rupiah. Nilai ini naik sebesar 50,41 persen jika dibandingkan Tahun 2019 dengan nilai 394,1 miliar rupiah. Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat ini cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dari awal tahun pencapaian RPJMD di tahun 2016 yaitu sebesar 940,64 milyar rupiah.

Permasalahan rendahnya harga ditingkat petani dan penurunan produksi komoditi diidentifikasi sebagai faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya pencapaian nilai produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Bangka Barat.



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020

Gambar 3.10
Nilai Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2016-2020

Faktor yang menyebabkan komoditi perkebunan di Kabupaten Bangka Barat tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu:

- Rendahnya harga komoditi perkebunan sehingga petani cenderung meninggalkan kebunnya dan tidak lagi mengelola kebun dengan benar, mulai dari perawatan tanaman, pemupukan, hingga pemanenan. Hal ini berakibat kepada menurunnya produktivitas tanaman dan meningkatnya kehilangan hasil akibat tidak dilakukannya pemanenan hasil.
- Produktivitas komoditi yang rata-rata masih rendah akibat kualitas benih tidak baik.
- Pengelolaan sistem usaha tani yang belum maksimal karena keterbatasan teknologi dan pengetahuan petani.
- Terbatasnya akses modal, kondisi tanaman yang sebagian besar baru memasuki fase mutasi ke Tanaman Menghasilkan dan umur tanaman sudah tua.
- Pengaruh perubahan iklim yang terjadi dimana musim panas cukup panjang.
- Penyebab lainnya khusus pada komoditas karet yaitu dikarenakan adanya penyakit pada tanaman karet yaitu Penyakit Gugur Daun Pestalotiopsis (PGDP).



Tabel 3.38
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS
Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Milyar Rupiah	592,67	4,069.20	14,56%	Perlu Upaya Lebih

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sampai dengan Tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 14,56 persen. Melihat capaian yang masih jauh dari target akhir RPJMD, maka pemerintah daerah harus melakukan upaya lebih dalam rangka peningkatan produksi serta menjaga kestabilan harga jual komoditas. Program pendukung untuk mencapai sasaran yaitu :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2. Program Peningkatan Produksi Perkebunan;
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan; dan
4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

Sasaran Strategis 10 **“Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan”**

Untuk mengukur pencapaian sasaran “Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan” digunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut.

Tabel3.39
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,29	68,00	63,29	93,07	Baik



Perhitungan IKLH diukur dari 3 (tiga) parameter/indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH) dengan bobot untuk masing-masing parameter sebesar 30 persen untuk IKA, 30 persen untuk IKU dan 40 persen untuk ITH.

Pada Tahun 2020, IKLH Kabupaten Bangka Barat terealisasi sebesar 63,29 persen dan jika dibandingkan dengan target sebesar 68,00 persen, maka tercapai 93,07 persen dengan kategori "Tercapai". Jika dibandingkan dengan IKLH Tahun 2019 sebesar 66,29 persen, maka terjadi penurunan indeks sebesar 3,00 poin.

Pada Tahun 2020, parameter untuk perhitungan IKA yang diuji oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan hasil pengujian didapat nilai indeks kualitas air sebesar 70,00. IKA Kabupaten Bangka Barat mengalami kenaikan dari Tahun 2019 yaitu sebesar 67,00. Jika dibandingkan dengan IKA Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019, Indeks Kualitas Air Kabupaten Bangka Barat mengalami kenaikan indeks sebesar 3,00 poin.

Tabel 3.40
Perhitungan Indeks Pencemaran Air Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No	Nama Sungai	Bulan	TSS	DO	BOD	COD	Posfat	Fecal-Coli	Total Coliform	Pij	Status Mutu Air
1	Kampak Hulu	Pebruari	4,00	4,63	4,62	14,8	0,0398	23,00	170,00	0,54	Memenuhi
2	Kampak Tengah	Pebruari	6,50	4,63	2,72	13,4	0,0316	2,00	9,20	0,46	Memenuhi
3	Kampak Hilir	Pebruari	5,50	4,03	2,92	13,4	0,0316	2,00	11,00	0,47	Memenuhi
4	Kampak Hulu	November	2,00	4,23	2,82	14,7	0,0312	4,00	16,50	0,50	Memenuhi
5	Kampak Tengah	November	4,50	4,23	2,92	13,8	0,0312	14,00	17,00	0,48	Memenuhi
6	Kampak Hilir	November	11,50	4,43	2,92	16,8	0,0312	4,50	27,00	0,56	Memenuhi
7	Antan Hulu	Pebruari	3,00	4,83	2,42	9,35	0,0316	1,80	1,80	0,47	Memenuhi
8	Antan Tengah	Pebruari	3,00	4,83	2,62	10,5	0,0316	1,80	1,80	0,51	Memenuhi
9	Antan Hilir	Pebruari	3,00	4,03	2,92	12,3	0,0316	1,80	1,80	0,57	Memenuhi
10	Antan Hulu	November	5,50	4,43	2,72	13,7	0,0312	1,80	1,80	0,59	Memenuhi
11	Antan Tengah	November	15,50	4,03	2,52	15,4	0,0312	1,80	1,80	0,64	Memenuhi



No	Nama Sungai	Bulan	TSS	DO	BOD	COD	Posfat	Fecal-Coli	Total Coliform	Pij	Status Mutu Air
12	Antan Hilir	November	9,50	4,03	2,52	16,6	0,0312	1,80	1,80	0,66	Memenuhi
13	Sukal Hulu	Pebruari	4,00	4,83	2,52	10,7	0,0316	1,80	1,80	0,37	Memenuhi
14	Sukal Tengah	Pebruari	5,50	4,43	2,82	11,9	0,0316	1,80	1,80	0,42	Memenuhi
15	Sukal Hilir	Pebruari	3,00	4,03	2,92	13,0	0,108	2,00	4,00	0,46	Memenuhi
16	Sukal Hulu	November	2,50	4,23	2,72	14,3	0,0312	1,80	1,80	0,47	Memenuhi
17	Sukal Tengah	November	5,50	4,43	2,92	16,2	0,0312	4,80	23,00	0,53	Memenuhi
18	Sukal Hilir	November	8,50	4,03	2,72	18,0	0,0312	47,00	1.600	0,61	Memenuhi
19	Kayu Arang Hulu	Pebruari	5,50	4,83	2,52	12,8	0,0316	1,80	1,80	0,57	Memenuhi
20	Kayu Arang Tengah	Pebruari	4,50	4,43	2,82	14,0	0,0316	1,80	1,80	0,60	Memenuhi
21	Kayu Arang Hilir	Pebruari	4,00	4,83	2,82	13,2	0,0316	27,00	41,00	0,58	Memenuhi
22	Kayu Arang Hulu	November	4,50	4,03	2,32	13,3	0,0312	14,00	1,80	0,58	Memenuhi
23	Kayu Arang Tengah	November	2,50	4,03	2,52	14,1	0,0312	4,00	24,00	0,60	Memenuhi
24	Kayu Arang Hilir	November	25,50	4,03	2,32	16,4	0,0312	10,00	12,5	0,66	Memenuhi
25	Sungai Babi	Pebruari	4,00	4,73	2,92	8,53	0,0316	1,80	1,80	0,46	Memenuhi
26	Sungai Babi	November	2,50	4,63	2,01	10,4	0,0312	1,80	1,80	0,50	Memenuhi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Dari tabel diatas bisa disampaikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk sungai yang status mutu air nya tercemar ringan 0 (nol) sungai, sungai yang status mutu air nya memenuhi 26 sungai, dengan indeks kualitas air 70,00.

Untuk perhitungan IKU, telah dilakukan pengujian atas kualitas udara di Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan pada beberapa titik pantau yaitu transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran dan didapat hasil indeks kualitas udara pada Tahun 2020 sebesar 91,52. Indeks ini didapat dari rata-rata hasil pengukuran NO2 Udara Ambien dan SO2 udara Ambien. Jika dibandingkan denga IKU Kabupaten Bangka



Barat Tahun 2019, Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bangka Barat mengalami kenaikan indeks sebesar 0,53 poin.

Tabel 3.41
Hasil Pengukuran NO₂ Udara dan SO₂ Udara Ambien Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Peruntukan	Kadar NO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar SO ₂	Rata-rata NO ₂ /Peruntukan	Rata-rata NO ₂ /Peruntukan	Rata-rata NO ₂ /Kab Kota	Rata-rata SO ₂ /Kab kota	Indeks NO ₂	Indeks SO ₂	Ieu	IKU Kabupaten/Kota
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³								
Transportasi	6,66	8,63	8,69	4,64	7,65	6,67	6,24	6,98	0,16	0,35	0,25	91,52
Industri	11,14	7,09	10,43	8,77	9,12	9,60						
Permukiman	3,34	5,09	5,88	2,71	4,22	4,30						
PERkantoran	3,40	4,60	7,20	7,53	4,00	7,37						
BLANK	<0,41	<0,41	<2,57	<2,57								

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Tabel 3.42
Indeks Standar Pencemaran Udara

SPU	Pencemaran Udara Level	Dampak kesehatan
0 - 50	Baik	tidak memberikan dampak bagi kesehatan manusia atau hewan.
51 - 100	Sedang	tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang peka.
101 - 199	Tidak Sehat	bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang peka atau dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.
200 - 299	Sangat Tidak Sehat	kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.
300 - 500	Berbahaya	kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada



SPU	Pencemaran Udara Level	Dampak kesehatan
		populasi (misalnya iritasi mata, batuk, dahak dan sakit tenggorokan).

Sumber : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP 45 / MENLH / 1997

Dengan nilai IKU Kabupaten Bangka Barat sebesar 91,52, masuk dalam kategori “Sedang”. Meskipun kualitas udara Kabupaten Bangka Barat dikategorikan Sedang, namun kondisi ini tetap harus menjadi perhatian karena semakin banyaknya sumber emisi udara baik dari kendaraan bermotor maupun dari kegiatan usaha.

Parameter terakhir dalam perhitungan IKLH adalah luas tutupan hutan dan berdasarkan hasil perhitungan indeks tutupan hutan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebesar 37,08 dengan total tutupan hutan seluas 45.541,73 ha. Jikadibandingkan dengan Indeks Tutupan Hutan tahun Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019, terdapat penurunan indeks sebesar 10,14 poin.

Tabel 3.43

Luas Tutupan Hutan Per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Jebus	8.208,40
2.	Kelapa	6.326,89
3.	Muntok	7.386,87
4.	Parittiga	2.832,82
5.	Simpang teritip	16.799,61
6.	Tempilang	3.987,15
	Total Tutupan Hutan	45.541,73

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Berdasarkan ketiga parameter tersebut, maka diperoleh IKLH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebesar 63,29. Dibandingkan dengan IKLH Tahun 2019 sebesar 66,29 terdapat penurunan sebesar 3,00 poin. Ketiga parameter IKLH Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.44
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Parameter	Rata-Rata	Bobot (%)	Nilai	IKLH
Indeks Pencemaran Air	70,00	30	21,00	63,29
Indeks Pencemaran Udara	91,52	30	27,46	
Indeks Tutupan Hutan	37,08	40	14,83	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan” pada Tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi terhadap regulasi dan koordinasi antar instansi dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan;
2. Pelayanan permohonan izin lingkungan;
3. Kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
4. Penanaman ruas jalan dengan pohon perindang dan pembuatan taman/ penyediaan ruang terbuka hijau di tempat strategis;
5. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan air limbah domestik;
6. Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, maka sampai dengan Tahun 2020 telah tercapai sebesar 90,41 persen. Melihat capaian tersebut, maka diperkirakan sampai akhir masa RPJMD target yang telah ditetapkan optimis akan dapat dicapai.

Tabel 3.45
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	63,29	70,00	90,41	Optimis Tercapai



Program dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 yang berkaitan dengan sasaran antara lain :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2. Program Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
5. Program pengembangan lingkungan sehat
6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

3.3 Capaian Tujuan dan Sasaran RPJMD di Tahun 2020

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam lima tahun perencanaan pembangunan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama lima tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 telah menetapkan indikator tujuan dan sasaranstrategis yang memuat target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Di dalam RPJMDKabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 telah dirumuskan 9 (sembilan) tujuan dengan 11 indikator tujuan serta 29 sasaran dengan 48 indikator sasaran.

3.3.1 Capaian Indikator Tujuan Tahun 2020

Di dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 telah ditetapkan tujuan yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut ditetapkan indikator beserta target tahunan serta jangka menengah, dengan realisasi dan capaian sampai dengan Tahun 2020 sebagai berikut :



Tabel 3.46
Pencapaian Indikator Tujuan Tahun 2020 dan sampai dengan Akhir RPJMD

No.	TUJUAN	INDIKATOR	Target		Realisasi					Capaian (%)	
			2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2020	s.d. 2021
1.	Menguatkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	65	70	63,37	60,65	74,87	45,24	n/a	-	-
2.	Mengembangkan agribisnis/agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	0,98%	1,45 (21.000 unit usaha)	20.000 unit usaha	11,61	8,62	1,44 (22.230 unit usaha)	5,94	605,91	409,66
3.	Meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif sebagai bagian Kawasan Perhatian Investasi	Peningkatan Jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	100 M	600 Miliar	117,115 Miliar	120,782 Miliar	462,456 Miliar	642,238 Miliar	417,08 Miliar	417,08	293,28
4.	Mengembangkan Usaha mikro, industri kecil, dan menengah	Kontribusi UMi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB	11,26%	9,78%	8,87% (Data 2015)	9,26% (Data 2016)	9,33% (Data 2017)	9,95% (Data diolah)	n/a	-	-
5.	Mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,26%	1,80%	1,11%	1,17%	1,17%	1,26%	0,93	73,81	51,67
		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	5 %	20%	12,29 (1,383 M)	58,24 (2,188 M)	25,23 (2,718 M)	-12,00 (2,393 M)	8,94 (2,607 M)	178,80	44,70
		Persentase benda, situs, benda, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang	39%	42%	28,16	33,64	44,23	50,00	35,58	91,22	84,71



No.	TUJUAN	INDIKATOR	Target		Realisasi					Capaian (%)	
			2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2020	s.d. 2021
		terintegrasi dengan program pariwisata									
6.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi	Indeks konektivitas kabupaten	1,2	1,06	1,2	1,2	1,20	1,25	1,25	121,36	117,92
7.	Meningkatkan Pembangunan Manusia	Indeks pembangunan Manusia	69,10	72,23	67,60	67,94	68,68	69,05	69,08	99,97	95,64
8.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68	70,00	67,04	68,07	64,73	66,29	67,34	99,03	96,20
9.	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap produk hukum penataan ruang dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	100%	100%	70,59	73,68	99,09	12,00	44,44	44,44	44,44



3.3.2 Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020

Berdasarkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, telah ditetapkan indikator sasaran strategis yang memuat target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Di dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 terdapat 29 sasaran dan 48 indikator yang harus dicapai di Tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Sasaran dengan kategori “Baik Sekali” sebanyak 15 sasaran;
- b. Sasaran dengan kategori “Baik” sebanyak 6 sasaran;
- c. Sasaran dengan kategori “Cukup” sebanyak 4 sasaran;
- d. Sasaran dengan kategori “Kurang” sebanyak 3 sasaran;
- e. Sasaran yang belum tersedia datanya sebanyak 1 sasaran.

Tabel 3.47
Rata-rata Capaian Sasaran Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	Sasaran	Rata-rata Capaian Sasaran (%)	Kategori
1.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	100	Baik
2.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	92,09	Baik
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	n/a	-
4.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	79,49	Cukup
5.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	106,83	Baik Sekali
6.	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	78,61	Cukup
7.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	17,48	Kurang
8.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	211,93	Baik Sekali
9.	Meningkatnya nilai produksi peternakan	149,74	Baik Sekali
10.	Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	303,06	Baik Sekali
11.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	417,08	Baik Sekali
12.	Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri.	111,21	Baik Sekali
13.	Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi,	248,07	Baik Sekali



No.	Sasaran	Rata-rata Capaian Sasaran (%)	Kategori
	Industri kecil dan menengah yang berdaya saing		
14.	Berkembangnya destinasi wisata	124,93	Baik Sekali
15.	Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata	91,23	Baik
16.	Meningkatnya konektivitas daerah	119,05	Baik Sekali
17.	Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian	54,19	Kurang
18.	Meningkatnya kualitas pendidikan	88,90	Baik
19.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	100,68	Baik Sekali
20.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	128,42	Baik Sekali
21.	Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga	100%	Baik
22.	Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/ kegiatan yg berbudaya/ berwawasan lingkungan	109,67	Baik Sekali
23.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	66	Cukup
24.	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	105,12	Baik Sekali
25.	Terkendalinya bencana banjir	114,59	Baik Sekali
26.	Terwujudnya konservasi sumber air	139,36	Baik Sekali
27.	Terwujudnya pemulihan lahan kritis	66,67	Cukup
28.	Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	44,44	Kurang
29.	Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	145,45	Baik Sekali

Capaian dari masing-masing indikator sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel3.48

Capaian Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WDP	WTP	WDP	WDP	WTP



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
2.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	6,30	9,40	10,15	7,39	7,77
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	60,24	65,44	68,65	69,24	n/a
4.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84,65	77,84	50	51,55	64,17
5.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2018	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	Persen	-	-	90,27	77,93	92,59
		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Pelayanan Publik	Nilai	80,36	81,02	81,32	78,62	80,98
6.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan	Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	Juta Rupiah	0,61	0,64	0,66	1,02	1,4
7.	Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Miliar Rupiah	940,64	620,12	657,16	394,1	592,67
8.	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	239.730,42	449.026,80	547.851,08	2.290.137,50	632.902.236.020,00
		Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	Rp	597,84	635,06	1.696,70	2.290,14	2.747.875.000,00
		Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Laut	Rp	6.548	1.990,64	2.313,60	8.599,61	30.534.700.000,00
9.	Meningkatnya Nilai Produksi Peternakan	Nilai produksi ternak ruminansia	Juta Rupiah	12.894,24	18.227,20	31.650,60	37.720,20	32.264,52
		Nilai produksi ternak unggas	Juta Rupiah	9.772,71	21.731,82	33.658,70	32.212,52	47.417,25
10.	Berkembangnya Sistem Agribisnis/ Agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	%	20.000 unit usaha	6,39 (21.384 unit usaha)	8,62	1,44	5,94
		Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas	%	13,72	11,61	15,85	11,55	n/a



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
11.	Meningkatnya Jumlah Investasi/Penanaman Modal di Daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	miliar	117,115	120,782	462,456	642,238	417,08
12.	Berkembangnya Jumlah Unit dan Kapasitas Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah yang Mandiri	Persentase peningkatan unit usaha mikro	%	-	3,29	1,87	2,55	5,60
		Persentase peningkatan unit industri kecil dan menengah	%	12,87	7,43	6,14	5,52	5,27
		Peningkatan Skala usaha UMi	%	-	-	86,74	7,07	0,04
		Kapasitas usaha industri kecil dan menengah unggulan						
		- Industri makanan olahan/kuliner	Ton/thn	3.121,08	3.133,75	3.161,96	3.244,49	2.133,29
		- Industri kerajinan	Unit/thn	191.940	192.852	198.029	203.721	99.556
13.	Berkembangnya Ragam Usaha dan Produk Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing	Jumlah ragam usaha / produk UMi	unit	86	100	120	137	151
		Jumlah ragam usaha Industri kecil dan menengah	unit	46	46	48	50	51
		Jangkauan pasar produk UMi	%	DK=100	DK=99,62 AK=0,04 AP=0,34	DK=98,66 AK=1,19 AP=0,15	DK=86,46 AK=13,10 AP=0,44	DK=84,69 AK=14,76 AP=0,55
		Jangkauan pasar produk unggulan industri kecil dan menengah	%	DK=100	DK=95,41 AK=0,43 AP=4,16	DK=95,86 AK=1,07 AP=3,07	DK=95,9 AK=1,16 AP=2,94	DK=96,03 AK=1,21 AP=2,76
		Kontribusi UMi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB	%	8,87	9,26	9,33	9,95	n/a
14.	Berkembangnya Destinasi Wisata	Kunjungan wisata	Orang	48.644	109.174	216.256	136.252	61.087
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,17	1,17	0,96	0,99	0,93
		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	%	12,29	58,24	25,00	-12,00	8,94



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
15.	Terjaganya Kelestarian Warisan Budaya sebagai Aset Wisata	Persentase benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata	%	28,16	33,64	44,23	50,00	35,58
16.	Meningkatnya Konektivitas Daerah	Indeks konektivitas kabupaten	Indeks	1,2	1,2	1,20	1,25	1,25
17.	Tersedianya Air Baku untuk Usaha Budidaya Komoditas Pertanian	Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis	%	9,13	23,39	37,89	51,35	51,35
18.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Peringkat Ujian Nasional se-Provinsi						
		- SD sederajat		7	7	-	-	n/a
		- SMP sederajat	Peringkat	6	6	6	6	n/a
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,48	11,49	11,50	11,52	11,53
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten	Tahun	6,68	6,89	7,06	7,21	7,22
19.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,47	69,52	69,56	69,99	70,06
20.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	112,07	67,24	26,32	31,58	63,16
21.	Meningkatnya Minat dan Wadah Pengembangan Olahraga	Prestasi olahraga pendidikan di tingkat provinsi	Peringkat	7 (Popda)	6 (Kejurda)	7 (Popda)	6 (Kejurda)	3 (Popda)
		Peringkat olahraga prestasi di tingkat provinsi	Peringkat	-	-	7 (Porprov)	-	-
22.	Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Berbudaya/ Berwawasan Lingkungan	Persentase desa/ kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/ kelurahan	%	-	9,38	10,94	12,5	15,2



No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
		Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas (Civil Society Organization/C SO) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif	Unit	6	8	9	10	11
		Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara baik	%	19,18	19,18	38,36	28,04	23,42
23.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	%	7,8	7,8	7,81	7,81	10,61
24.	Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan Permukiman	Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak	%	82,68	82,66	86,94	93,79	94,61
25.	Terkendalinya bencana banjir	Persentase desa/ kelurahan/titik banjir yang dimitigasi terhadap banjir/ genangan air	%	-	62,86	68,57	80	91,67
26.	Terwujudnya Konservasi Sumber Air	Persentase sumber air yang telah di konservasi	%	16,26	26,02	26,02	33,33	39,02
27.	Terwujudnya pemulihan lahan kritis	Persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif	%	-	-	-	-	1
28.	Menjaga dan Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Produk Hukum Penataan Ruang	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	%	70,59	73,68	99,09	12,00	44,44
29.	Meningkatnya Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	0,11	0,11	0,11	0,11	4



Berikut analisis dari masing-masing pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 serta dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 :

Sasaran Strategis 1 **“Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan”**

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.49
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Opini BPK terhadap Laporan keuangan Daerah	Opini	WDP	WTP	WTP	100	Baik

Untuk mewujudkan birokrasi pemerintah daerah yang transparan salah satunya adalah dengan melihat opini BPK atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Untuk memperoleh kinerja pengelolaan keuangan yang baik, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan upaya yaitu pemantapan terhadap penatausahaan keuangan dengan pembinaan terhadap pegawai yang bertugas dibidang keuangan.

Pada Tahun 2020 untuk pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2020, maka capaian indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah telah tercapai.

Namun meskipun opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Bangka Barat Wajar Tanpa Pengecualian, masih terdapat catatan berupa 4 (empat) temuan terkait laporan keuangan daerah serta 2 (dua) temuan terkait barang milik daerah.



Tabel 3.50
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan Tahun 2020
Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Opini BPK terhadap Laporan keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100	Tercapai

Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tetap berkomitmen untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK.

Pada Tahun 2020, Indikator Sasaran strategis ini didukung oleh program strategis sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Faktor pendukung dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanakan Koordinasi intern dan ekstern dalam penganggaran, pengelolaan Keuangan daerah , dan pengelolaan barang milik daerah (BMD);
2. Pelaksanakan pembinaan dalam penganggaran, pengelolaan Keuangan daerah dan pengelolaan BMD;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan penatausahaan BMD;
4. Pelaksanakan pendampingan terhadap aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Melengkapi regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan per undangan- undangan yang berlaku;
6. Pelaksanakan pengelolaan aset daerah dengan baik dan benar (pengamanan, penilaian, Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah).



Sasaran Strategis 2 “**Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah**”

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.51
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	7,39	8,44	7,77	92,09	Baik

Pada Tahun 2020, Realisasi Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebesar 7,77 persen. Pencapaian ini masih dibawah target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pemerintah daerah terkait DOFD yaitu sebesar 8,44 persen. Dengan realisasi tersebut, maka pencapaian DOFD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 92,09 persen.

DOFD Kabupaten Bangka Barat sebesar 7,77 persen didapat dari perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 64.304.326.355,09 dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 827.319.557.834,46.

Tabel 3.52
Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	KOMPONEN PENDAPATAN	REALISASI	PORSI
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 64.304.326.355,09	7,77
2.	Dana Perimbangan	Rp. 599.326.297.108,00	72,44
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 163.688.934.371,37	19,79
TOTAL PENDAPATAN TAHUN 2020		Rp. 827.319.557.834,46	

Sumber : BPPRD, 2021

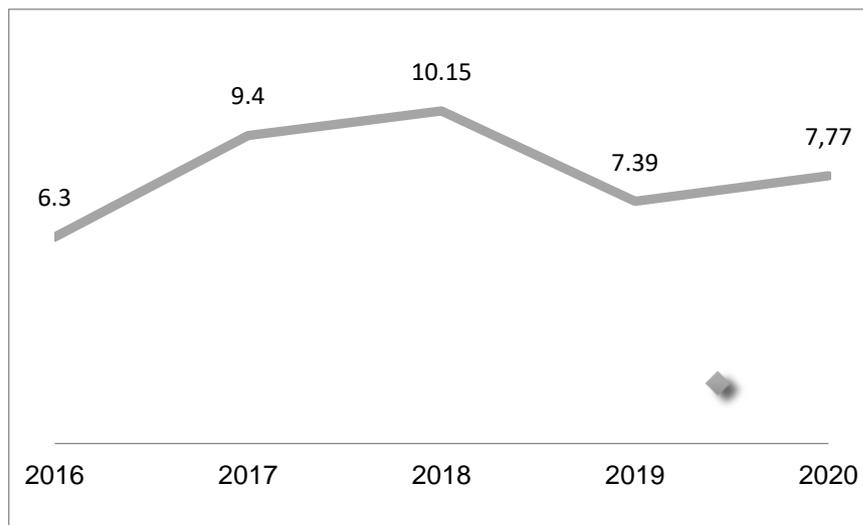


Tabel 3.53
Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2020

NO	KOMPONEN PAD	REALISASI 2019	%	REALISASI 2020	%
1	Pajak	Rp. 21.936.235.354,47	32,50	Rp. 20.610.403.491,80	32,05
2	Restibusi	Rp. 4.385.901.940,00	6,50	Rp. 5.346.696.788,00	8,31
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 3.760.378.244,79	5,57	Rp. 3.994.903.752,78	6,21
4	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp. 37.423.927.087,75	55,44	Rp. 34.352.322.322,51	53,42
TOTAL PAD		Rp. 67.506.442.627,01		Rp. 64.304.326.355,09	

Sumber : BPPRD, 2021

Jika dibandingkan dengan pencapaian DOFD tahun 2019 sebesar 7,39 persen, maka terjadi peningkatan realisasi DOFD pada Tahun 2020 sebesar 0,38 persen.



Sumber : BPPRD, 2021

Gambar 3.11
Capaian DOFD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

Peningkatan capaian DOFD di Tahun 2020 antara lain disebabkan oleh :

1. Adanya komitmen yang tinggi dari Pimpinan dan dukungan seluruh Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2021;
2. Adanya komitmen yang tinggi dari aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah;



3. Adanya dukungan anggaran dan fasilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah;
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat telah memiliki Standar Operasional Prosedur yang memadai dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Tabel 3.54

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	7,77	9,00	86,36	Optimis Tercapai

Dari pencapaian DOFD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebesar 7,77 persen, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 9,00 persen maka telah mencapai 86,36 persen dan sampai dengan akhir masa RPJMD optimis tercapai melalui upaya dan strategi yang tepat serta memperbaiki kekurangan yang ditemukan pada tahun - tahun sebelumnya. Program pendukung sasaran “Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah “ adalah Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Program Optimalisasi PBB dan BPHTB yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam pencapaian dan peningkatan DOFD pada Tahun 2020 yaitu :

1. Kepatuhan, ketaatan, kejujuran dan *tax discipline* sebagian wajib pajak relatif masih kurang;
2. SDM yang masih terbatas baik secara jumlah personil maupun keahlian dan pemahaman;
3. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat belum terkelola dengan baik;
4. Data potensi pajak dan retribusi daerah yang teradministrasi masih belum sesuai dengan kondisi dilapangan;
5. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap penunggakan pajak daerah oleh wajib pajak;
6. Belum adanya PPNS dan Juru Sita Pajak;



7. Laju pertambahan dana perimbangan lebih besar dari laju pertambahan PAD;
8. Belum optimalnya penggunaan sistem dalam pengelolaan pendapatan yang berbasis aplikasi;
9. Adanya pandemi *Covid-19* serta pemangkasan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah.

Dalam hal pencapaian target indikator DOFD, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah harus tetap berupaya untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah khususnya pada komponen pajak dan retribusi daerah. Strategi dan arah kebijakan terkait peningkatan DOFD antara lain melalui intensifikasi serta ekstensifikasi PAD.

Upaya-upaya peningkatan PAD melalui intensifikasi serta ekstensifikasi antara lain:

- a. Memberikan surat peringatan kepada pengelola rumah makan/restoran/cafe yang selama ini belum melakukan pembayaran pajak restoran;
- b. Melakukan relaksasi denda untuk PBB P2;
- c. Kerjasama dengan operator telekomunikasi terkait SMS *Gateway* kepada wajib pajak;
- d. Berkoordinasi dengan BUMN dan swasta terkait potensi pajak yang ada di BUMN dan swasta;
- e. Melakukan penyempurnaan tarif pajak dan retribusi daerah;
- f. Melakukan penagihan-penagihan pajak terutang yang timbul;
- g. Melakukan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan, kejujuran, dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak;
- h. Melakukan penyusunan *data base* potensi pajak;
- i. Menyempurnakan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis aplikasi secara optimal;
- j. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait yaitu kejaksaan sebagai pengacara negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam melakukan penagihan pajak dan piutang pajak;

Sasaran strategis 3 **"Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel"**

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :



Tabel 3.55
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	69,24	67	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>

Keberhasilan pencapaian sasaran RPJMD ketiga “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel” diukur melalui satu indikator kinerja yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah. Pada Tahun 2019 untuk penilaian SAKIP Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mendapat nilai 69,24 dengan predikat “B” (Baik) oleh Kementerian PAN RB. Jika dibandingkan dengan target di Tahun 2019 sebesar 68,65 maka capaian kinerja sasaran telah melebihi target yaitu sebesar 100,86 persen. Sedangkan Untuk Nilai SAKIP Daerah Tahun 2020 masih dalam tahap evaluasi sehingga belum bisa untuk ditampilkan.

Faktor pendorong terhadap peningkatan capaian indikator nilai evaluasi SAKIP daerah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Melakukan revisi terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai arahan Kementerian PAN RB;
- b. Perbaiki komponen perencanaan kinerja melalui penggunaan aplikasi SIMDA perencanaan keluaran BPKP. Dalam penerapan aplikasi SIMDA perencanaan, terdapat 2 (dua) aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi 5 tahun perencanaan (RPJMD dan RENSTRA PD) yang berbasis desktop serta aplikasi tahun perencanaan (RKPD dan RENJA PD) yang berbasis website;
- c. Perbaiki komponen perencanaan kinerja dimana dalam penyusunan dokumen perencanaan selalu disertai dengan pelaksanaan reviu oleh inspektorat dan pembinaan oleh pihak pemerintah provinsi berupa fasilitasi terkait pengendalian penyusunan dokumen perencanaan;
- d. Melakukan penyusunan perjanjian kinerja mulai dari tingkatan pemerintah daerah sampai dengan tingkat eselon terendah;
- e. Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja perangkat daerah pasca penandatanganan perjanjian kinerja;



- f. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan menyusun laporan kinerja pemerintah daerah yang lebih komprehensif dan dilakukan reviu oleh inspektorat terhadap laporan kinerja pemerintah daerah sebelum disampaikan kepada Kementerian PAN RB;
- g. Meningkatkan kualitas capaian kinerja dengan cara melakukan koordinasi rutin terkait pengendalian kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala (per triwulan);
- h. Melakukan evaluasi internal terhadap seluruh laporan kinerja perangkat daerah oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat dan memberikan rekomendasi hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti.

Sebagai penunjang SAKIP Kabupaten Bangka Barat, SAKIP perangkat daerah juga memegang peranan yang sangat penting. Hasil evaluasi 30 SAKIP perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2019 menunjukkan perbaikan, dimana secara rata-rata nilai evaluasi adalah 67,05 (kategori baik).

Tabel 3.56
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel
Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	<i>n/a</i>	70	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>

Capaian kinerja indikator nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2019 jika dibandingkan dengan target capaian di akhir Tahun RPJMD, masih menyisakan pekerjaan rumah untuk beberapa tahun kedepannya. Beberapa komponen SAKIP masih harus ditingkatkan, agar target akhir RPJMD terkait indikator nilai evaluasi SAKIP dapat tercapai. Akan tetapi, jika melihat capaian kinerja di Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sangat optimis bahwa target di akhir RPJMD terkait Nilai SAKIP Daerah akan dapat tercapai.



Dalam pencapaian sasaran terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang akuntabel secara umum dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pengawasan internal daerah, serta oleh seluruh perangkat daerah untuk penyusunan perencanaan, perjanjian, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah;
2. Program Perencanaan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh;
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Sasaran strategis 4 **"Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif"**

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.57
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	51,55	80,73	64,17	79,49	Cukup

Indeks Profesionalitas ASN sebagai indikator dalam Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif merupakan Sasaran RPJMD pada bidang kepegawaian dimana tata cara dan pelaksanaan pengukurannya berpedoman pada



Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 8 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 sebesar 79,49 persen, yaitu dari target yang diperjanjikan sebesar 80,73 terealisasi 64,17. Nilai indeks profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 masuk dalam **kategori rendah**. Namun demikian, nilai Indeks Profesionalitas ASN di Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019) yang memperoleh nilai 51,55.

Tabel 3.58
Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 Kabupaten Bangka Barat

NO	DIMENSI	BOBOT	HASIL	REALISASI
1.	Kualifikasi	25	12,86	51,44
2.	Kompetensi	40	21,20	53
3.	Kinerja	30	25,13	83,77
4.	Disiplin	5	4,98	99,60
TOTAL		100	64,17	

Sumber : BKPSDM, 2021

Merujuk pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan indeks penilaian profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 masih jauh dari target yang telah ditetapkan, terutama dimensi kualifikasi dan dimensi kompetensi.

Beberapa faktor penghambat pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian beasiswa/bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS melalui Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar pada Tahun 2020 tidak dapat direalisasikan karena Pegawai yang sedang tugas belajar sedang dalam proses hukuman disiplin pegawai.
- b. Belum adanya pemetaan kebutuhan Pegawai dengan spesifikasi pendidikan lanjutan (S1, S2 dan dokter spesialis) yang dapat mendukung tercapainya Dimensi Kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN.



- c. Kurangnya minat Pegawai untuk meningkatkan kompetensinya melalui Diklat Teknis/ Fungsional, Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatannya khususnya dimasa Pandemi Covid-19 ini.

Tabel 3.59
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,17	82,73	77,57	Perlu Upaya Lebih

Melihat realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020, meskipun terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi masih belum mencapai target. Untuk mencapai target akhir RPJMD, tentunya masih banyak upaya yang harus dilakukan kedepannya.

Beberapa langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian sasaran Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

- Melakukan pemetaan kebutuhan Pegawai dengan spesifikasi pendidikan lanjutan (S1, S2 dan dokter spesialis) yang dapat mendukung tercapainya Dimensi Kualifikasi pada Indeks Profesionalitas ASN;
- Meningkatkan minat Pegawai untuk meningkatkan kompetensinya melalui Diklat Teknis/ Fungsional, Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatannya baik secara Daring/ Online maupun tatap muka;
- Dalam penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemkab. Bangka Barat direncanakan akan menggunakan aplikasi yang terintegrasi langsung ke Badan Kepegawaian Negara sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang efektif didukung oleh program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM dan Aparatur antara lain :

- Program Peningkatan Kompetensi ASN;
- Program Pemanfaatan Database ASN dan Layanan Kesejahteraan; serta
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.



Sasaran strategis 5 “Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik”

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan yang diamanahkan memiliki standar pelayanan minimal untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat adalah urusan wajib yang terkait pelayanan dasar yang terdiri dari Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Sosial, serta Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Namun demikian, peraturan pemerintah sebagai pelaksana yang diamanahkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait standar pelayanan minimal baru terbit di awal Tahun 2018 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis terkait mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar akan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan urusan wajib yang terkait pelayanan dasar.

Capaian indikator kinerja Sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.60
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik
Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	Persen	77,93	79,76	92,59	116,09	Baik Sekali
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Pelayanan Publik	Nilai	78,62	83	80,98	97,57	Baik

Pada Tahun 2020, untuk indikator Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar terealisasi sebesar 92,59 persen dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 79,76 persen. Dari realisasi tersebut maka pada Tahun 2020 telah



melebihi dari target yang ditetapkan sehingga didapat capaian 116,09 persen. Sedangkan untuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik terealisasi sebesar 80,98 persen dari, yang tentu saja belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 83 persen dalam Perjanjian Kinerja.

Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar didapat dari nilai rata-rata capaian SPM yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan wajib pelayanan dasar tersebut terdiri dari Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Urusan Sosial.

Tabel 3.61
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2020
1	Urusan Pendidikan	62,25%
2	Urusan Kesehatan	91,52%
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93,20%
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50%
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	62,76%
6	Urusan Sosial	159,97%
CAPAIAN SKM KABUPATEN BANGKA BARAT		92,59%

Sumber : Perangkat Daerah Pelaksana Layanan Standar Pelayanan Minimal, 2021

Untuk realisasi indikator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Pelayanan Publik, pada Tahun 2020 mendapat nilai 80,98. Pencapaian ini dibawah target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pemerintah daerah dimana target yang ditetapkan pada Tahun 2020 adalah 83. Pencapaian hasil SKM atas pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pencapaian di Tahun 2019 sebesar 78,62.

Dalam pelaksanaan SKM terkait pelayanan publik, perangkat daerah dan unit pelayanan melakukan secara mandiri dengan didampingi oleh tim fasilitasi SKM



yaitu Bagian Organisasi dan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Di Tahun 2020 terdapat 22 perangkat daerah dan unit pelayanan yang melaksanakan SKM, akan tetapi ada 2 (dua) perangkat daerah dan unit pelayanan yang tidak dapat dihitung karena masih berpedoman pada aturan yang lama, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kecamatan Tempilang.

Tabel 3.62
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2020

No.	Unit Pelayanan	SKM 2019	SKM 2020	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	76,12	77,37	Meningkat
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81,30	81,41	Meningkat
3	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	81,84	82,1	Meningkat
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	81,03	86,62	Meningkat
5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	88,29	87,41	Menurun
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	85,95	82,10	Menurun
7	RSUD Sejiran Setason	74,81	76,82	Meningkat
8	Kecamatan Muntok	81,86	81,90	Meningkat
9	Kecamatan Simpang Teritip	84,78	85,48	Meningkat
10	Kecamatan Jebus	81,49	81,49	Sama
11	Kecamatan Parittiga	82,75	80,05	Menurun
12	Kecamatan Kelapa	80,72	80,75	Meningkat
13	Puskesmas Muntok	78,75	78,42	Menurun
14	Puskesmas Simpang Teritip	74,40	79,90	Meningkat
15	Puskesmas Kelapa	81,90	82,12	Meningkat
16	Puskesmas Sekar Biru	81,76	81,87	Meningkat
17	Puskesmas Puput	77,96	74,89	Menurun
18	Puskesmas Tempilang	80,16	80,49	Meningkat
19	Puskesmas Jebus	77,34	83,25	Meningkat
20	Puskesmas Kundi	67,36	75,07	Meningkat
PEMKAB. BANGKA BARAT		78,62	80,98	Meningkat

Sumber : Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, 2021



Tabel 3.63
Capaian Kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	Persen	92,59	80	115,74	Tercapai

Jika melihat capaian kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal di Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sudah memenuhi target di akhir RPJMD. Tentu saja tugas selanjutnya adalah untuk mempertahankan nilai tersebut sampai dengan Tahun 2021, dengan cara memperbaiki komitmen dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal terhadap pelayanan publik yang berhak diperoleh warga negara, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui perangkat daerah melaksanakan urusan wajib yang bersifat dasar akan melakukan upaya penguatan, antara lain :

- a. Memperbaiki database khususnya terkait indikator yang digunakan dalam Standar pelayanan Minimal;
- b. Menjamin database terkait indikator yang digunakan dalam Standar pelayanan Minimal akan digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran;
- c. Memastikan pelaksanaan Standar pelayanan Minimal memperhatikan mutu layanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Melakukan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat secara berkala.

Dalam pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal antara lain didukung oleh Program :

- a. SPM Urusan Kesehatan : Program Upaya Kesehatan Perorangan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, serta Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
- b. SPM Urusan Pendidikan : Program Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta Program Pendidikan Non Formal;
- c. SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Program Lingkungan Sehat Perumahan;



- d. SPM Urusan Perumahan dan Permukiman : Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial;
- e. SPM Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat: Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran serta Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam;
- f. SPM Urusan Sosial : Program Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Sosial Penanganan Bencana, serta Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Tabel 3.64
Capaian Kinerja Indikator Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2020
Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik	Persen	80,98	85	95,27	Optimis Tercapai

Jika melihat capaian kinerja indikator kualitas pelayanan publik di Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sangat optimis bahwa target di akhir RPJMD terkait SKM atas pelayanan publik akan dapat tercapai. Dari hasil SKM di Tahun 2020 sebesar 80,98 persen, jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD yaitu sebesar 85 maka telah tercapai 95,27 persen. Dalam pelaksanaan penilaian SKM di Tahun 2020 masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

- a. Masih ada unit layanan (yang berhubungan dengan pelayanan publik) yang menyusun laporan SKM belum sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017.
- b. Masih banyak catatan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan pelayanan publik, yang masuk dalam unsur penilaian SKM, khususnya pada unsur waktu penyelesaian, sarana dan prasarana, biaya/tarif, serta kompetensi pelaksana.

Dalam pencapaian kualitas pelayanan publik didukung oleh Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program penyelenggaraan tugas pelimpahan



kewenangan Kepala daerah, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Upaya-upaya yang akan diterapkan untuk peningkatan nilai SKM Kabupaten Bangka Barat antara lain :

- a. Memastikan bahwa semua unit layanan (yang berhubungan dengan pelayanan publik) dalam penyusunan laporan SKM sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan penggantinya;
- b. Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah dapat melakukan pendampingan secara lebih intensif dalam penyusunan laporan SKM pada semua unit layanan;
- c. Memperbaiki unsur-unsur pelayanan publik yang masih dianggap lemah dalam penilaian SKM di tahun sebelumnya, baik berupa peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi pelaksana.

Sasaran strategis 6 **"Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan"**

Capaian indikator kinerja Sasaran "Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan" diukur melalui indikator sasaran rata-rata pendapatan bersih petani per bulan dengan perhitungan yaitu :

Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	=	Pendapatan petani bersih dibagi jumlah petani dibagi 12 bulan
---	---	--

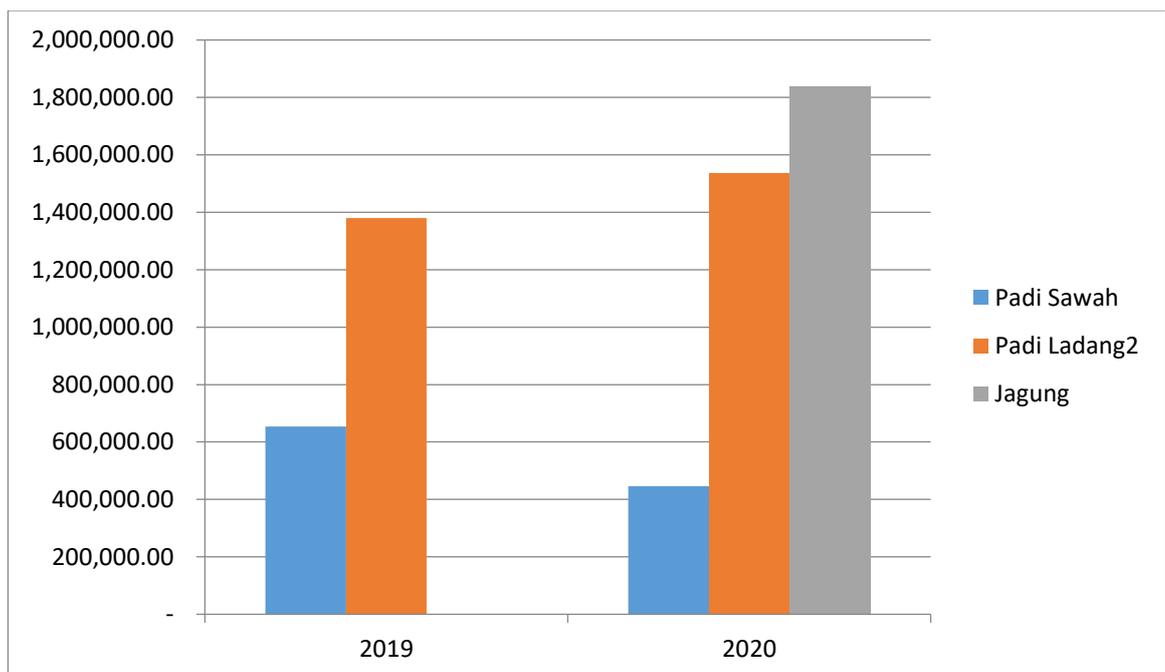
Dari perhitungan tersebut, didapat rata-rata pendapatan bersih petani perbulan di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 sebesar 1.415.000,00 atau mencapai 78,61 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.800.000,00.

Tabel 3.65
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	Juta Rupiah	1,02	1,8	1,4	78,61	Cukup



Pendapatan petani bersih perbulan diukur dari tiga komoditas yaitu padi sawah, padi ladang dan jagung. Pada Tahun 2020 jumlah petani sawah 5.948 petani dan petani ladang 3.104 petani, harga rata rata sebesar Rp 14.000,00 / Kg untuk padi dan Rp. 7.500 / Kg untuk jagung kemudian untuk biaya produksi di Tahun 2020 sebesar Rp 2.950.000,00 Per Siklus Tanam (0,25 ha) untuk padi sawah, Rp 2.200.000,00 Per Ha untuk padi ladang dan jagung Rp 9.900.000,00 Per Ha. Pendapatan petani bersih untuk padi sawah Rp21.381.440,39, padi ladang Rp 18.440.316,00 dan jagung sebesar Rp 22.087.653,28 . Sehingga rata-rata pendapatan bersih petani per bulan padi sawah sebesar Rp. 445.446,67, padi ladang Rp 1.536.693,03 dan jagung sebesar Rp 1.840.653,28. Pendapatan petani menggambarkan tingkat kesejahteraan petani dan peningkatan produktivitas pertanian. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 pendapatan petani perbulan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 38,72 persen atau sebesar Rp395.000,00.



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020

Gambar 3.12
Pendapatan Petani melalui Komoditas Padi Sawah, Padi Ladang dan Jagung
Tahun 2019-2020

Peningkatan produksi padi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Adanya dukungan program dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten untuk menunjang peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi;



2. Meningkatnya pengetahuan petani tentang budidaya padi misalnya pengetahuan tentang aplikasi teknologi pertanian;
3. Adanya pendampingan dari penyuluh pertanian;
4. Penggunaan mekanisasi alat mesin pertanian oleh petani mulai dari pengolahan lahan sampai penanganan pasca panen, jumlah alsintan yang dikelola petani bertambah dengan adanya bantuan dari Pemerintah;
5. Program/Kegiatan Pembangunan infrastruktur pertanian sistem irigasi/pengairan, optimalisasi lahan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat.

Tabel 3.66

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Petani
Tanaman Pangan Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	Juta Rupiah	1,4	2	70	Perlu Upaya Lebih

Sampai dengan Tahun 2020 capaian indikator rata-rata pendapatan bersih petani per bulan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD masih di bawah target akhir Rp2.000.000,00 pada Tahun 2021. Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu:

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian
2. Program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan
3. Program Pengembangan Kelembagaan Petani
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Sasaran strategis 7 **"Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat"**

Capaian indikator kinerja Sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

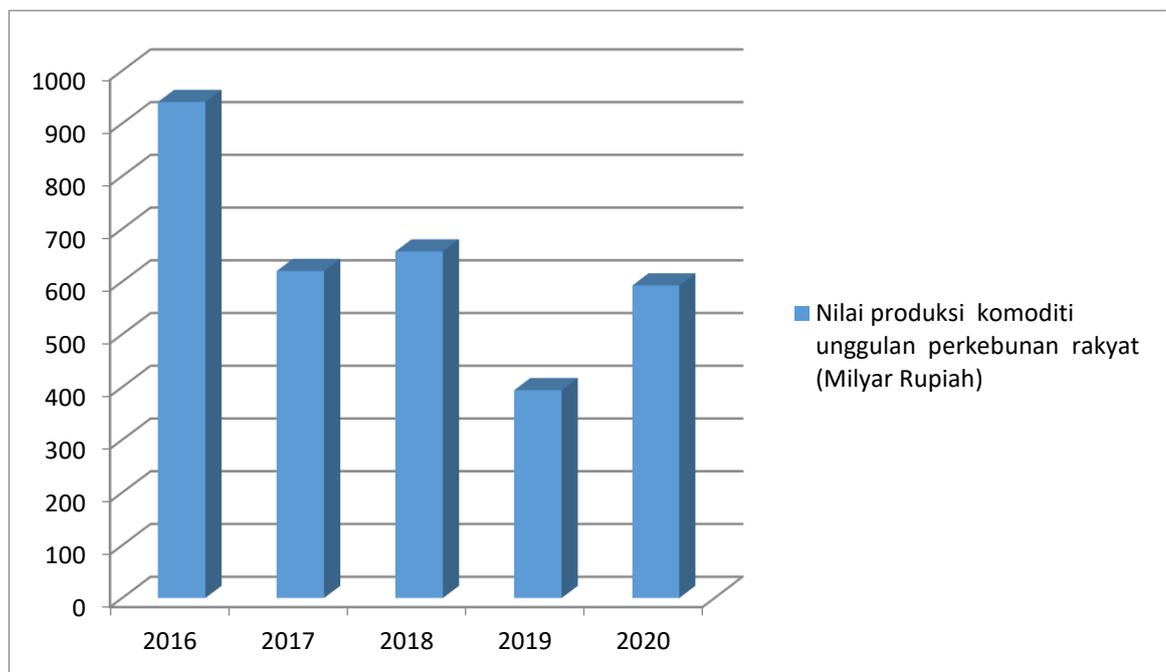


Tabel3.67
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi,
Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Miliar Rupiah	394,1	3,391.00	592,67	17,48	Kurang

Indikator Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat dihitung dari tiga komoditas perkebunan yaitu karet, sawit dan lada. Pada Tahun 2020, Nilai Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Rakyat terealisasi sebesar 592,67 miliar rupiah dengan capaian 17,48 persen dari target Tahun 2020 sebesar 3,391.00 miliar rupiah. Nilai ini naik sebesar 50,41 persen jika dibandingkan Tahun 2019 dengan nilai 394,1 miliar rupiah. Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat ini cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dari awal tahun pencapaian RPJMD di tahun 2016 yaitu sebesar 940,64 milyar rupiah.

Permasalahan rendahnya harga ditingkat petani dan penurunan produksi komoditi diidentifikasi sebagai faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya pencapaian nilai produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Bangka Barat.



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020

Gambar 3.13
Nilai Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan Rakyat Tahun 2016-2020



Faktor yang menyebabkan komoditi perkebunan di Kabupaten Bangka Barat tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu:

- a. Rendahnya harga komoditi perkebunan sehingga petani cenderung meninggalkan kebunnya dan tidak lagi mengelola kebun dengan benar, mulai dari perawatan tanaman, pemupukan, hingga pemanenan. Hal ini berakibat kepada menurunnya produktivitas tanaman dan meningkatnya kehilangan hasil akibat tidak dilakukannya pemanenan hasil.
- b. Produktivitas komoditi yang rata-rata masih rendah akibat kualitas benih tidak baik.
- c. Pengelolaan sistem usaha tani yang belum maksimal karena keterbatasan teknologi dan pengetahuan petani.
- d. Terbatasnya akses modal, kondisi tanaman yang sebagian besar baru memasuki fase mutasi ke Tanaman Menghasilkan dan umur tanaman sudah tua.
- e. Pengaruh perubahan iklim yang terjadi dimana musim panas cukup panjang.
- f. Penyebab lainnya khusus pada komoditas karet yaitu dikarenakan adanya penyakit pada tanaman karet yaitu Penyakit Gugur Daun Pestalotiopsis (PGDP).

Tabel 3.68
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS
Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Milyar Rupiah	592,67	4,069.20	14,56%	PerluUpaya Lebih

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sampai dengan Tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 14,56 persen. Melihat capaian yang masih jauh dari target akhir RPJMD, maka pemerintah daerah harus melakukan upaya lebih dalam rangka peningkatan produksi serta menjaga kestabilan harga jual komoditas. Program pendukung untuk mencapai sasaran yaitu :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2. Program Peningkatan Produksi Perkebunan;
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan; dan



4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

Sasaran strategis 8 "Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan"

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran "Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan" dengan 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan angka capaian dengan nilai rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 211,94persen dengan status capaian "Baik sekali".

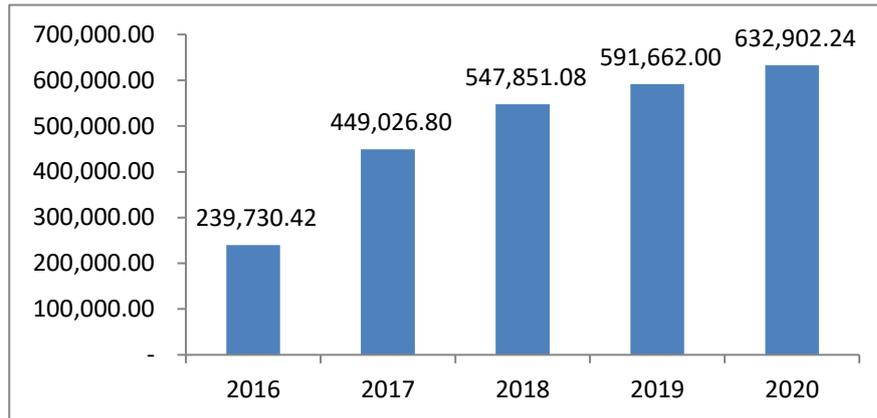
Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Nilai Produksi Perikanan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.69
Capaian Indikator Sasaran Meningkatkan Nilai Produksi Perikanan Tahun 2020

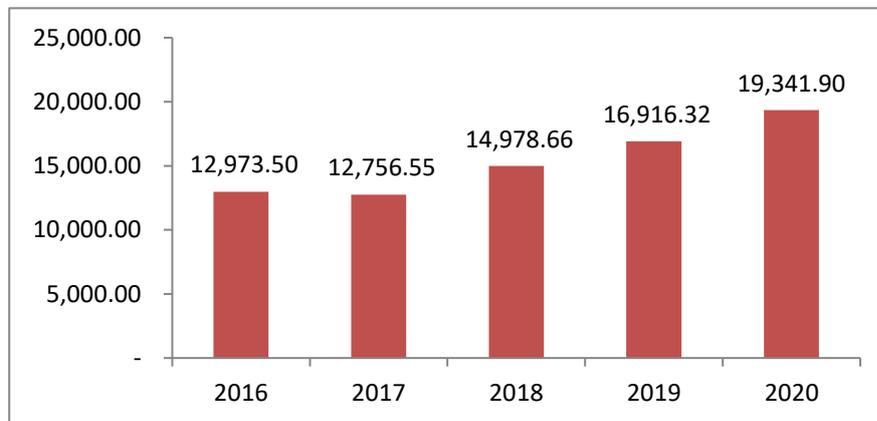
INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
1. Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	632.902.236.020,00	563.254.420.000,00	632.902.236.020,00	122,37	Baik Sekali
2. Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	Rp	2.290.137.500,00	6.365.200.000,00	2.747.875.000,00	43,17	Kurang
3. Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Laut	Rp	8.599.610.000,00	6.493.000.000,00	30.534.700.000,00	470,27	Baik Sekali

1. Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Pada Tahun 2020 realisasi untuk nilai produksi perikanan tangkap sebesar Rp632.902.236.020,00 dengan capaian 112,37 persen, dari target yang direncanakan sebesar Rp563.254.420.000,00. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan Nilai Produksi ini dikarenakan adanya peningkatan produksi perikanan tangkap dan kenaikan harga jual ikan di pasaran. Hal tersebut terlihat dari grafik di bawah ini :



Gambar 3.14
Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Juta Rupiah) Tahun 2020



Gambar 3.15
Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Tahun 2020

Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020:

Tabel 3.70
Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PRODUKSI (TON)	NILAI PRRODUKSI (Rp) JUTA
1	MUNTOK	5,066.31	160,814,172
2	SIMTER	4,973.39	147,603,096
3	JEBUS	1,823.15	62,441,756
4	PARITTIGA	2,615.39	89,127,282



NO.	KECAMATAN	JUMLAH PRODUKSI (TON)	NILAI PRRODUKSI (Rp) JUTA
5	KELAPA	1,780.04	53,302,817
6	TEMPILANG	3,083.63	119,613,112.52
JUMLAH		19,341.90	632,902,236.02

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2020

Pencapaian Nilai produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 dikategorikan berhasil karena melebihi target yang ditetapkan, capaian tahun 2020 yaitu 112,37 persen. Keberhasilan tersebut dapat dicapai dikarenakan :

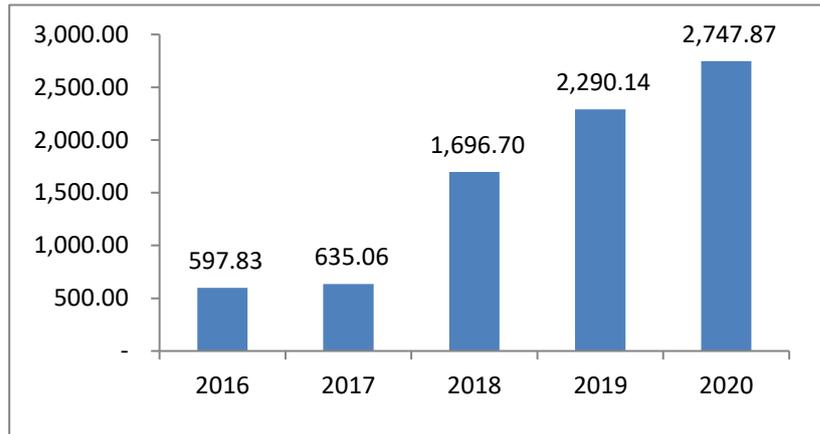
- Adanya peningkatan sarana dan prasarana yang sangat menunjang para nelayan seperti bantuan perahu, alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan;
- Bertambahnya jumlah dan jenis alat tangkap melalui bantu yang diberikan oleh Pemerintah;
- Pola kerja masyarakat yang sudah mulai mau menerima teknologi alat penangkapan yang lebih baik.

2. Nilai Produksi Perikanan Air Tawar

Untuk tahun 2020 capaian kinerja sasaran nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar terealisasi Rp. 2.747.875.000. Realisasi ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp. 6.365.200.000 sehingga capaiannya hanya sebesar 43,17 %.

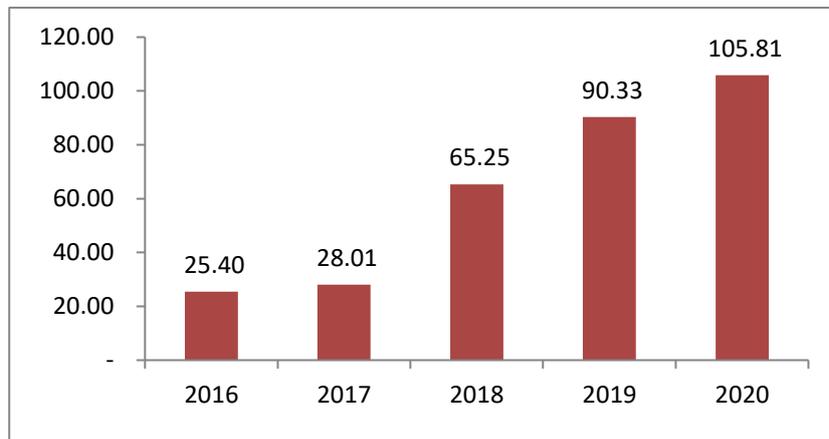
Jika dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, nilai produksi perikanan budidaya air tawar mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu pada Tahun 2017 sebesar Rp635.060.000,00 Tahun 2018 kembali mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp1.696.700.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp.2.290.137.500,00. Hal tersebut dapat digambarkan oleh grafik di bawah ini :

Hal tersebut dapat digambarkan oleh grafik di bawah ini :



Gambar 3.16

Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (Juta Rupiah) Tahun 2020



Gambar 3.17

Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (Ton) Tahun 2020

Tabel 3.71
Produksi Budidaya Ikan Air Tawar Per Kecamatan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PRODUKSI (TON)	NILAI PRODUKSI
1	MUNTOK	29.71	754,125,000
2	SIMTER	0.57	14,300,000
3	JEBUS	11.76	294,425,000
4	PARITTIGA	44.87	1,177,300,000



NO.	KECAMATAN	JUMLAH PRODUKSI (TON)	NILAI PRODUKSI
5	KELAPA	7.56	189,000,000
6	TEMPILANG	11.34	318,725,000
JUMLAH		105.81	2,747,875,000

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2020

Dari gambar diatas dapat dilihat di tahun 2020 terjadi peningkatan nilai produksi pada tahun 2020. Namun pada tahun 2020 capaian jumlah produksi perikanan budidaya tidak mencapaitarget yang telah ditetapkan, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas
2. Harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas
3. Potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor
4. Keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budidaya
5. Keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budidaya
6. SDM Penyuluh masih kurang secara kuantitas berbanding luasan wilayah dan Rumah Tangga Perikanan (RTP).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah :

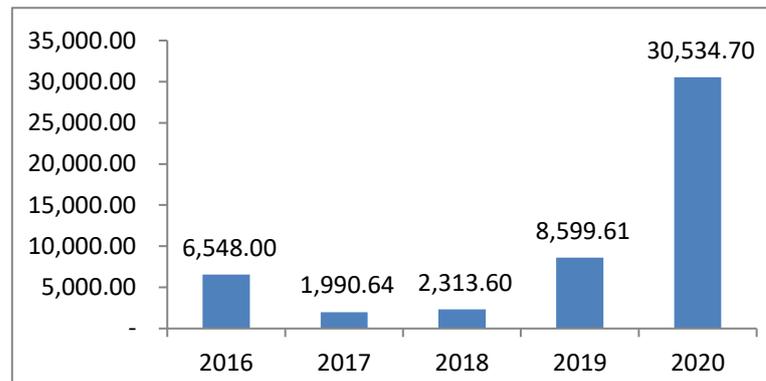
- Mempercepat pelaksanaan bantuan pemerintah diawal tahun atau pada triwulan pertama untuk mengatasi musim kemarau;
- Diperlukan peran aktif Pemerintah Desa dalam membina kesadaran masyarakat dalam melakukan budidaya dan mendukung sarana dan prasarana budidaya;
- Perlunya optimalisasi jaringan pemasaran ikan terutama kerja sama dengan kabupaten lain;
- Menyampaikan usulan penambahan jumlah SDM Penyuluh Perikanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Nilai Produksi Perikanan Air Laut

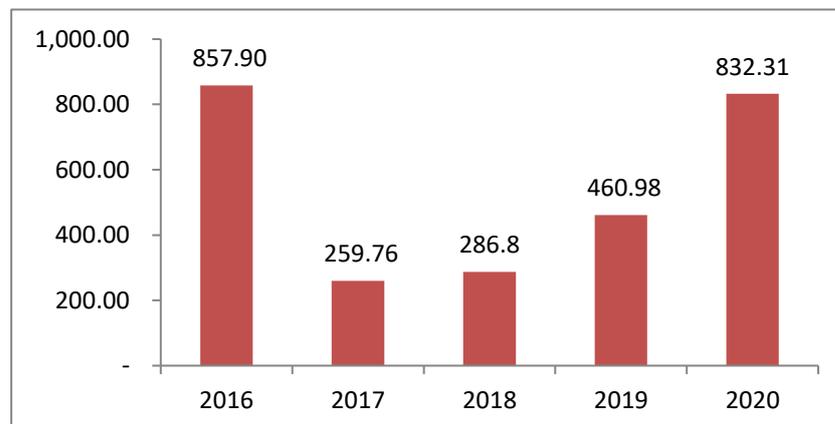
Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Laut Tahun 2020 terealisasi sebesar 30.534.700.000,00 dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu



sebesar 6.493.000.000,00 Jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, jumlah produksi perikanan Budidaya Air Laut ini mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu pada Tahun 2017 sebesar Rp1.990.000.000,00 Tahun 2018 sebesar Rp2.313.000.000,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp8.599.610.000,00. Hal tersebut dapat digambarkan oleh grafik di bawah ini :



Gambar 3.18
Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Laut (Juta Rupiah) Tahun 2020



Gambar 3.19
Produksi Perikanan Budidaya Air Laut (Ton) Tahun 2020

Tabel 3.72
Produksi Budidaya Ikan Air Laut Per Kecamatan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PRODUKSI (TON)	NILAI PRRODUKSI (Rp)
1	MUNTOK	485.30	4,367,700,000
2	SIMTER	342.07	25,651,700,000



NO.	KECAMATAN	JUMLAH PRODUKSI (TON)	NILAI PRRODUKSI (Rp)
3	JEBUS	-	-
4	PARITTIGA	4.94	515,300,000
5	KELAPA	-	-
6	TEMPILANG	-	-
JUMLAH		832.31	30,534,700,000

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2020

Pada Tahun 2020 capaian jumlah produksi perikanan budidaya air laut melebihi target yang telah ditetapkan, Pencapaian sasaran strategis ini dikarenakan berbagai faktor yaitu, Adanya Diversifikasi Jenis Ikan pada Perikanan laut dan payau Yaitu Ikan Kerapu, Udang Vaname dan Ikan Kakap dan di dukung juga oleh faltar tingginya Produksi dan Harga Jual Ikan Kerapu dan Udang Vaname. Program penunjang sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut;
2. Program Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar;
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Tabel 3.73
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	632.902.236.020,00	633.268.730.000,00	99,94	Optimis Tercapai
Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	Rp	2.747.875.000,00	7.520.050.000,00	36,52	Perlu Upaya Lebih
Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Laut	Rp	30,534,700,000,00	7.982.000.000,00	382,54	Tercapai



Melihat pencapaian pada Tahun 2020, target Nilai Produksi Perikanan Tangkap pada tahun keempat RPJMD sebesar 99,94 persen, diharapkan sampai akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat target akan tercapai dan memungkinkan akan melebihi target. Untuk Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar sebesar 36,52 persen, hal ini masih jauh dari target yang harus dicapai pada akhir periode RPJMD sehingga memerlukan upaya lebih untuk pencapaian, dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Laut sebesar 382,54 persen sudah mencapai target.

Sasaran strategis 9 **"Meningkatnya Nilai Produksi Peternakan"**

Capaian indikator kinerja Sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel3.74
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Nilai Produksi Peternakan Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
1	Nilai produksi ternak ruminansia	Juta Rupiah	37.720,20	33.833	32.264,52	91,70	Baik
2	Nilai produksi ternak unggas	Juta Rupiah	32.212,52	22.820	47.417,25	207,78	Baik sekali

Jika dilihat dari capaian Tahun 2020, berdasarkan tabel 3.80 Nilai Produksi ternak ruminansia sebesar Rp 32.264.520.000,00 Nilai Produksi Unggas Rp 47.417.250.000,00. Capaian tersebut menunjukkan adanya penurunan pada nilai produksi ternak ruminansia sebesar 14,46 persen atau sebesar Rp. 5.455.680.000,00 dan adanya peningkatan pada nilai produksi ternak unggas sebesar 47,20 persen atau sebesar 15.204.730.000,00 dari Tahun 2019.

Adapun penjelasan capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya nilai produksi peternakan sebagai berikut.

1. Nilai Produksi Ternak Ruminansia

Produksi ternak ruminansia merupakan produksi beberapa ternak yaitu sapi, kambing, domba dan kerbau dengan harga rata-rata per kilogramnya sebesar Rp 120.000,00 sehingga nilai produksi tahun 2020 mencapai Rp 31.026.120.000,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*). Jumlah produksi ternak ruminansia di Kabupaten Bangka Barat cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun hal ini



tidak terjadi pada tahun 2020. Dibawah ini dapat dilihat tabel produksi ternak ruminansia.

Tabel3.75
Populasi dan Produksi Ternak Ruminansia Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016-2020

No.	Jenis Ternak	2016		2017		2018		2019		2020	
		Populasi (ekor)	Produksi (Kg)								
1	Sapi	1.572	145.860	1.670	182.437	1.630	251.104	1.757	303.389	1.375	246.167
2	Kambing	287	4.086	349	11.248	392	12.536	367	10.563	517	12.384
3	Kerbau	-	-	3	-	-	-	0	0	-	-
4	Domba	44	77	48	-	20	115	89	383	79	-
TOTAL		2.353	161.178	2.494	205.250	2.042	263.755	2.213	314.335	1.971	258.551

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Ternak ruminansia di Kabupaten Bangka Barat terdiri dari sapi, kambing, kerbau dan domba. Namun produksi yang lebih dominan adalah sapi dan kambing sedangkan untuk kerbau tidak didata dan kurang diminati sebagai ternak penghasil daging melainkan ternak pekerja. Jika dilihat dari sisi jumlah produksi, produksi daging sapi memberikan sumbangsih paling besar dibandingkan dengan ternak lainnya, akan tetapi pada tahun 2020 Produksi Daging Sapi mengalami penurunan sebesar yaitu meningkat sebesar 18,86 persen atau sebesar 6.866.640.000,00 sedangkan produksi Kambing memberikan kontribusi tambahan sebesar 17,24 persen atau sebesar Rp 404.666.667,00 dibandingkan sapi Tahun 2019.

Capaian indikator nilai produksi ternak ruminansia Secara umum, produksi daging ruminansia menurun sebesar 17,75% pada tahun 2020. Penurunan produksi daging ruminansia mungkin disebabkan menurunnya daya beli masyarakat karena pandemi Covid 19 yang menghantam hampir semua sektor termasuk sektor ekonomi di sepanjang tahun 2020. Akibat dari penurunan produksi daging ternak ruminansia, capaian indikator nilai produksi ternak ruminansia tidak memenuhi target yang diharapkan. Namun demikian,



Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat tetap melakukan upaya strategis untuk mendongkrak produksi daging ternak ruminansia dengan cara meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peternak dalam melaksanakan budidaya dan pemanfaatan teknologi serta memfasilitasi akses dukungan modal usaha. Untuk meningkatkan populasi ternak ruminansia, Pemerintah Pusat gencar melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan produktifitas ternak. Kegiatan tersebut diantaranya adalah program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) sebagai program pengganti UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) dengan tingkat kelahiran ternak sapi di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 376 ekor atau meningkat 3,52% dibandingkan tahun 2019. Capaian ini juga tidak lepas dari dukungan Pemerintah Pusat yang gencar melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan produktifitas ternak. Kegiatan tersebut adalah program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting dengan tingkat kelahiran ternak sapi di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 356 ekor. Selain itu, ada kegiatan bantuan ternak dan sarpras kepada kelompok tani, penyuluhan/sosialisasi kepada peternak serta Asuransi Usaha Ternak Sapi untuk mengurangi tingkat resiko dalam pemeliharaan ternak sapi. Pada program ini Pemerintah Pusat mensubsidi biaya polis sebesar 80 persen dari total biaya polis sebesar Rp200.000,00 per ekor sapi betina dan 20 persen ditanggung melalui APBD I Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, dalam rangka meningkatkan produksi ternak ruminansia Pemerintah Kabupaten Bangka Barat khususnya Dinas Pertanian dan Pangan telah melakukan berbagai upaya yang dituangkan melalui program dan kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan yang bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan hewan kepada masyarakat dari berbagai macam penyakit hewan;
- b. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan hewan (keswan), melalui pemeliharaan keswan dan peningkatan kesiagaan terhadap ancaman penyakit hewan menular dengan penyediaan obat-obatan dan vaksin;
- c. Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak, yang berupa pengadaan perlengkapan kandang dan pakan di Kecamatan Kelapa, dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan populasi sapi;



- d. Kegiatan Sosialisasi Kualitas Gizi Pakan yang dilaksanakan kepada kelompok peternak di Kecamatan Muntok dan sekitarnya serta Kecamatan Jebus dan sekitarnya untuk meningkatkan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak sehingga peternak dapat menjalankan usahanya secara efektif dan efisien;
- e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna, dua kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan teknologi peternakan tepat guna di dalam pencapaian produksi ternak yang berkualitas melalui kegiatan inseminasi buatan.

2. Nilai Produksi Ternak Unggas

Produksi ternak unggas di Kabupaten Bangka Barat didukung oleh beberapa jenis ternak yaitu ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik dan puyuh dengan harga rata-rata per kilogramnya Rp37.500,00 sehingga nilai produksi ternak unggas pada tahun 2020 adalah Rp 47.417.250.000,00. Ternak unggas (non ruminansia) di Kabupaten Bangka Barat lebih didominasi oleh ayam pedaging sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel3.76
Populasi dan Produksi Ternak Unggas Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016-2020

No.	Jenis Ternak	2016		2017		2018		2019		2020	
		Populasi (ekor)	Produksi (Kg)								
1	Ayam Petelur	6.181	13.036	14.751	20.540	8.502	26.826	11.361	32.757	4.300	34.276
2	Ayam Pedaging	7.504	272.958	5.560	457.869	0	843.516	0	766.669	0	1.155.163
3	Ayam Buras	142.409	37.914	148.771	34.638	166.105	39.077	145.974	55.771	120.029	71.220
4	Itik	6.293	1.749	8.514	1.682	18.972	6.464	6.333	3.722	7.112	3.742
5	Puyuh	829	100	502	99	0	0	125	82	1.495	59
TOTAL (Kg)		163.216	325.757	178.098	514.828	193.579	915.883	163.793	859.000,53	132.936	1.264.460

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Populasi ternak pada tabel tersebut diatas merupakan selisih antara populasi bulan lalu ditambah kelahiran dan pemasukan ternak bulan berjalan dengan kematian ditambah pengeluaran dan pemotongan bulan berjalan. Pada tabel tersebut, populasi ayam pedaging tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa jenis ternak unggas tersebut telah dipotong dan tidak ada ternak yang tersisa.



Berdasarkan tabel diatas, total produksi daging ternak unggas mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 47,20% dibanding tahun 2019. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh perubahan pola konsumsi masyarakat dengan mensubstitusi daging sapi ke daging ayam di masa pandemi Covid 19. Hal ini terlihat dari data bahwa kontribusi terbesar produksi daging ternak unggas diberikan oleh ayam pedaging, yaitu sebesar 91,36% pada tahun 2020. Kegiatan yang mendukung produksi ternak unggas adalah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak dan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan hewan (keswan), melalui pemeliharaan keswan dan peningkatan kesiagaan terhadap ancaman penyakit hewan menular dengan penyediaan obat-obatan dan vaksin.

Tabel 3.77
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya
Nilai Produksi Peternakan
Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS
1	Nilai produksi ternak ruminansia	Juta Rupiah	32.264,52	35.525	90,82	Optimis Tercapai
2	Nilai produksi ternak unggas	Juta Rupiah	47.417,25	22.934	206,76	Tercapai
Rata-rata					148,79	Tercapai

Jika dibandingkan antara capaian tahun 2020 dengan target akhir RPJMD, sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Peternakan sudah memenuhi target tahun 2021 yang merupakan tahun akhir dari RPJMD Periode 2016-2021 yaitu rata-rata sebesar 148,79 %. Hal ini tentunya merupakan hasil kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan nilai produksi ternak ruminansia maupun unggas. Meskipun target sudah tercapai, segala upaya harus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, termasuk mengkoordinasikan program dan kegiatan Peternakan dengan stakeholder terkait dan meningkatkan dukungan anggaran daerah di sektor Peternakan.



Sasaran Strategis 10 adalah "**Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri**"

Capaian indikator kinerja Sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut.

Tabel3.78
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Berkembangnya Sistem Agribisnis/Agroindustri Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
1 Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	%	1,44	0,98	5,94	606,12	Baik sekali
2 Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas	%	5,21	4	n/a	-	-

Sasaran Berkembangnya Sistem Agribisnis/Agroindustri terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir) dan persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas dengan capaian 303,12persen dengan status capaian "Tercapai".

Cara perhitungan indikator tersebut adalah :

Indikator Kinerja Sasaran	Cara Perhitungan
Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	Jumlah unit usaha tahun 2020 dikurangi tahun ke 2019 [dibagi] jumlah unit usaha tahun ke 2019 [dikali] 100
Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas	Nilai tambah komoditas pertanian tahun 2020 dikurangi 2019 [dibagi] nilai tambah komoditas pertanian 2019 [dikali] 100

Pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dari penjelasan indikator pendukungnya, yaitu Munculnya wirausaha baru karena bertambahnya jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja dampak dari Covid 19 sehingga mempengaruhi peningkatan Persentase jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir).

1. Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis mencakup kegiatan usaha pada sub sistem (1) penyediaan input dan sarana produksi, (2)



sistem usaha tani/usaha produksi, (3) penanganan pasca panen dan pengolahan, dan (4) distribusi dan pemasaran. Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir) sudah mencapai target Tahun 2020 dengan capaian 281,37 persen (jumlah usaha 23.550 unit). Rantai agribisnis dari hulu hingga hilir meliputi berbagai usaha sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Tabel 3.79
Jumlah Usaha Rantai Agribisnis Hulu hingga Hilir Tahun 2020
Kabupaten Bangka Barat

No	Bidang Usaha	Muntok	Simpang Teritip	Kelapa	Jebus	Parittiga	Tempilang	Total
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Peternakan	417	3.698	6.345	1.834	924	4.481	17.699
Total Industri Hulu		417	3.698	6.345	1.834	924	4.481	17.699
1	Industri Pengolahan	875	188	180	212	187	69	1.711
2	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	839	467	678	714	805	343	3.846
3	Transportasi dan Pergudangan	3	0	1	6	9	0	19
4	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	96	8	24	110	24	13	275
Total Industri Hilir		1.813	663	883	1.042	1.025	425	5.851

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustriaan, 2020

Terjadi peningkatan sebanyak 1.320 unit usaha atau 5,93 persen jumlah usaha dalam rantai agribisnis pada tahun 2020 (23.550) dibanding dengan tahun 2019 sebanyak 22.230 unit usaha.

Jumlah unit usaha yang termasuk dalam industri hulu tahun 2020 sebanyak 17.699 unit usaha yaitu bidang pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan. Sedangkan industri hilir berjumlah 5.851 unit usaha yang terdiri dari 4 (empat)



bidang usaha yaitu industri pengolahan sebanyak 1.711 unit usaha, perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebanyak 3.846 unit usaha, transportasi dan pergudangan sebanyak 19 unit usaha, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebanyak 275 unit usaha.

2. Capaian indikator persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas merupakan capaian dari angka pada PDRB Tahun 2020 dengan target perkembangan yang telah ditetapkan sebesar 4 % dari tahun sebelumnya. Adapun indikator yang digunakan adalah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan sejenisnya, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri furniture, industri pengolahan lainnya; jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan industri pengolahan yang terdiri dari subkategori industri makanan dan minuman; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman; industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri furniture dan industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan serta sub Kategori Penyediaan Makan Minum.

Namun dikarenakan pada Tahun 2020 BPS tidak melakukan publikasi PDRB sampai dengan subkategori sehingga data capaian untuk indikator ini tidak dapat disajikan.

Tabel 3.80
Nilai Tambah Komoditas Pertanian dalam Arti Luas (Juta Rupiah)
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.858.657	1.865.339	1.677.559	1.296.720	1.343.376
2.	Industri Pengolahan					
	Industri Makanan dan Minuman	1.096.142	1.274.928	1.324.406	-	-
	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.482	1.610	1.703	-	-
	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	34.367	34.812	46.019	-	-
	Industri Kertas dan	566	614	671	-	-



No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
	Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman					
	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	488	530	565	-	-
	Industri Furnitur	870	945	969	-	-
	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	2.653	2.881	2.707	-	-
3	Penyediaan Makan Minum	141.851	152.615	164.187	110.487	109.765
	Nilai Tambah Komoditas Pertanian dalam Arti Luas	3.137.076	3.334.276	3.769.699	n/a	n/a

Sumber : BPS Bangka Barat, Tahun 2020

Program penunjang sasaran Berkembangnya Sistem Agribisnis/Agroindustri adalah sebagai berikut :

1. Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
4. Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Mikro dan Industri Kecil
5. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro
6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
8. Program Pengembangan Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
10. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Kawasan Pedesaan
11. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah
12. Program Penataan Struktur Industri
13. Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
14. Program pengembangan budidaya perikanan
15. Program pengembangan perikanan tangkap
16. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
17. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
18. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
19. Program peningkatan produksi pertanian/Perkebunan
20. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
21. Program peningkatan produksi hasil peternakan



22. Program peningkatan penerapan teknologi Peternakan
23. Program Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi tingkat usaha tani
24. Program Pengembangan Perekonomian Masyarakat Desa
25. Program Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Tabel 3.81

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Sistem Agribisnis/Agroindustri
Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
1	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	%	5,94 (23.550 unit usaha)	1,45 (21.000 unit usaha)	409,66	Tercapai
2	Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas	% (Juta Rupiah)	n/a	4,5 (1.087.635,68)	-	-
Rata- rata capaian target RPJMD					-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Sistem Agribisnis/Agroindustri Terhadap Target Akhir RPJMD secara keseluruhan mengalami perkembangan terhadap RPJMD sudah mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Namun, pemerintah tidak boleh merasa cukup dengan capaian tersebut, dan masih harus melakukan upaya-upaya yang maksimal agar Sistem Agribisnis/Agroindustri dapat berjalan dengan lebih baik.

Sasaran Strategis 11 adalah "**Meningkatnya Jumlah Investasi/Penanaman Modal di Daerah**"

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Jumlah Investasi/ Penanaman Modal Di Daerah" sebesar 417,08 persen dengan status capaian "Tercapai". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

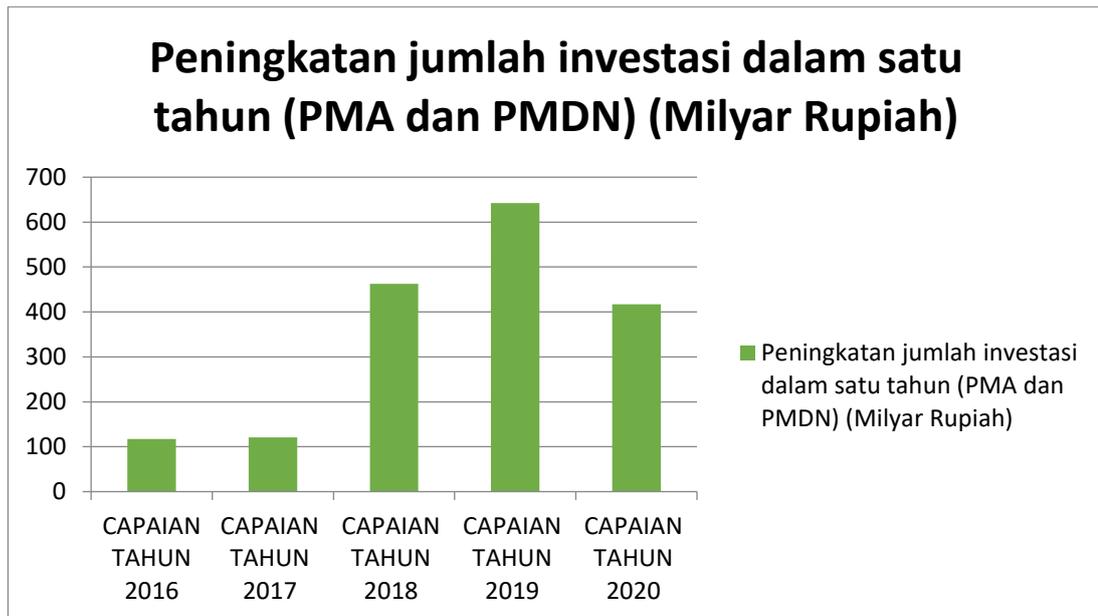


Tabel 3.82
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Jumlah Investasi/Penanaman Modal di Daerah Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	Miliar	642	100,00	417,08	417,08	Baik sekali

Target peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (Penanaman Modal Asing/PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN) pada Tahun 2020 sebesar Rp100.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 417.082.000.000 sehingga capaiannya adalah 417,08 persennilai ini mengalami penurunan sebesar 64,96 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 642.000.000.000. Berdasarkan realisasi capaian Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp224.918.000.000,00 hal ini dikarenakan sistem pelaporan perusahaan yang memiliki kantor Cabang di daerah Kabupaten Bangka Barat masih terpusat belum terkoneksi ke daerah sehingga menyebabkan data laporan investasi Cabang Perusahaan tersebut belum dapat diterima oleh Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan OPD DPMNAKERTRANS yang mempunyai Tugas Fungsi terkait adalah menjalankan program kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di perusahaan terhadap perusahaan yang belum menyampaikan data investasi.

Faktor pendukung yang mempengaruhi peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) pada tahun 2020 adalah adanya program promosi investasi dan penanaman modal yang telah laksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat melalui OPD terkait secara berkala dan berkesinambungan.



Sumber : Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Nakertrans, 2020

Gambar 3.20

Nilai Investasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 (dalam juta rupiah)

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD sampai Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.83

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Investasi/ Penanaman Modal di Daerah Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	miliar	1.759,67	600	293,28	Tercapai

Melihat pencapaian pada Tahun 2020, target Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) pada tahun kelima RPJMD sebesar 293,28persen maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian telah tercapai melebihi target yang ditetapkan di akhir periode RPJMD.

Sasaran strategis 12 **"Berkembangnya Jumlah Unit dan Kapasitas Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah yang Mandiri"**

Capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut.



Tabel 3.84
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Jumlah Unit dan Kapasitas UMi,
Industri Kecil dan Menengah yang Mandiri Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASIT AHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASIT AHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
1. Persentase peningkatan unit usaha UMi	%	2,55	2,00	5,60	280,04	Baik Sekali
2. Persentase peningkatan unit industri kecil dan menengah	%	5,52	5,00	5,27	105,30	Baik Sekali
3. Peningkatan Skala usaha Umi	%	7,13	2,00	0,04	2,19	Kurang
4. Kapasitas usaha industri kecil dan menengah unggulan						
- Industri makanan olahan/kulin er	Ton/ thn	3.244,49	3.147,18	2.133,29	67,78	Cukup
- Industri kerajinan	Unit/ thn	203.721,00	212.492,00	99.556,00	46,85	Kurang

Sasaran strategis Berkembangnya Jumlah Unit dan Kapasitas Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah yang Mandiri terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran dengan realisasi di Tahun 2020 untuk dua indikator dapat tercapai di atas 100 persen atau kategori “Baik Sekali” dan dua indikator terealisasi dengan kategori “Kurang”. Secara rata-rata, capaian Sasaran Berkembangnya Jumlah Unit dan Kapasitas Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah yang Mandiri sebesar 111,21 persen atau dengan kategori “**Baik Sekali**”.

Penjelasan untuk capaian masing-masing indikator adalah :

1. Untuk indikator Persentase Peningkatan Unit Usaha UMipada Tahun 2020 terealisasi 5,60 persen dari target 2,00 persen sehingga didapat capaian sebesar 280,04 persen. Jumlah Usaha Mikro pada Tahun 2020 sebanyak 25.077 unit usaha, bertambah 1.330 unit usaha dari Tahun 2019 dengan jumlah 23.747 unit usaha. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, persentase peningkatan usaha



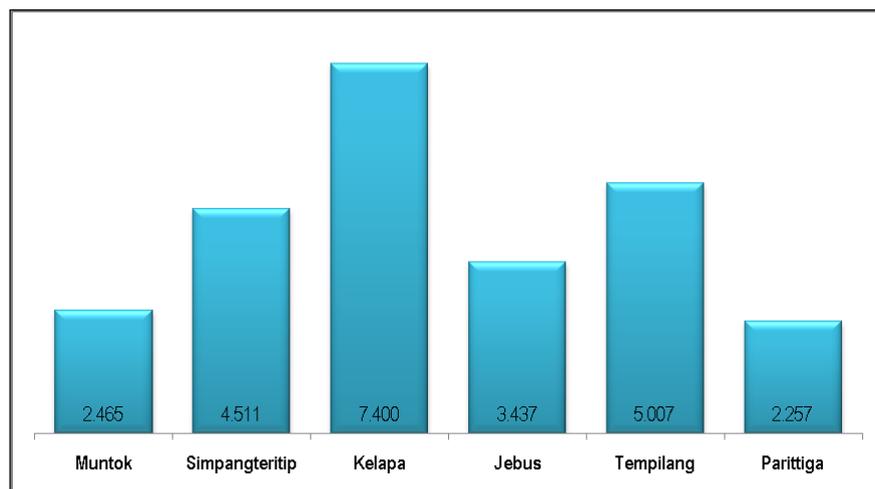
mikro di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 lebih tinggi yaitu meningkat 3,11 persen dengan realisasi di Tahun 2019 sebesar 2,55 persen.

Dilihat dari jumlah usaha mikro di Kabupaten Bangka Barat dari Tahun 2017 sampai dengan 2020, menunjukkan perkembangan yang positif atau terus meningkat, begitu pula dengan persentase peningkatan/pertumbuhan usaha mikro menunjukkan kecenderungan meningkat khususnya di tiga tahun terakhir.



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar 3.21
Jumlah dan Persentase Peningkatan Usaha Mikro
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2020

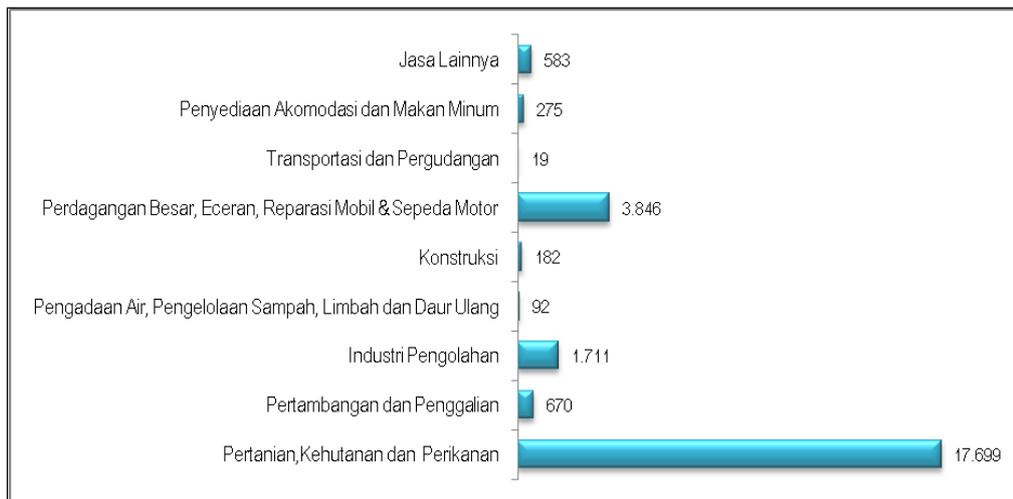


Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar 3.22
Jumlah Usaha Mikro per Kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020



Berdasarkan sebaran UMi di Kabupaten Bangka Barat, jumlah UMi terbanyak terdapat di Kecamatan Kelapa sebanyak 7.400 unit UMi atau 29,51 persen dari total seluruh UMi yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Sektor terbanyak yang digeluti oleh masyarakat Kecamatan Kelapa ada pada sektor Pertanian yaitu sebanyak 6.176 unit UMi atau 83,46 persen. Jumlah UMi terbanyak kedua adalah di Kecamatan Tempilang yaitu 5.007 unit UMi atau 19,97 persen.



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar 3.23
Sektor UMi yang Dikerjakan Masyarakat
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Pada Tahun 2020, sektor Usaha Mikro yang paling banyak digeluti masyarakat adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan dengan jumlah 17.699 unit usaha atau sebesar 70,58 persen. Sektor usaha kedua yang paling banyak adalah sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor sebanyak 3.846 unit usaha atau 15,34 persen dari total Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Dari total 20 sektor Usaha Mikro, terdapat 9 (sembilan) sektor yang tidak diminati masyarakat di Kabupaten Bangka Barat, yaitu Sektor Kehutanan, Pengadaan Listrik dan Gas, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

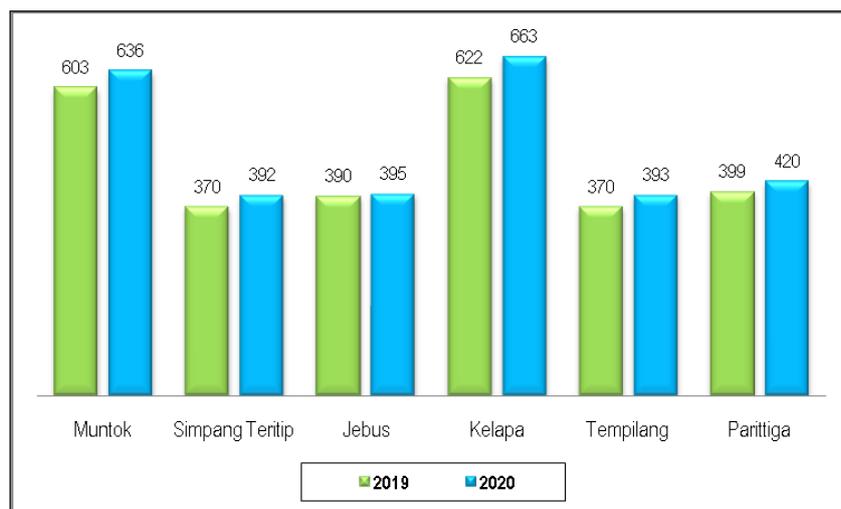
Dengan jumlah usaha mikro Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 sebanyak 25.077 unit usaha, jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD di



Tahun 2021 sebanyak 24.782 unit usaha, maka realisasi tersebut telah mencapai 101,19 persen atau melebihi target yang ditetapkan.

2. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota, untuk Urusan Industri yang menjadi kewenangan adalah pengembangan Industri Kecil. Selanjutnya untuk penghitungan Persentase Peningkatan Unit Industri Kecil dan Menengah hanya menggunakan data jumlah Industri Kecil. Pada Tahun 2020, Indikator Persentase Peningkatan Unit Industri Kecil dan Menengah ditargetkan sebesar 5 persen dan terealisasi sebesar 5,27 persen dengan tingkat capaian 105,30 persen atau kategori "Baik Sekali".

Jumlah industri kecil di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 bertambah 145 unit dari 2.754 unit di Tahun 2019 sehingga total industri kecil di Tahun 2020 sebanyak 2.899 unit. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, realisasi Persentase Peningkatan Unit Industri Kecil dan Menengah di Tahun 2020 lebih rendah yaitu dengan pertumbuhan 5,52 persen di Tahun 2019 atau menurun 0,25 persen.



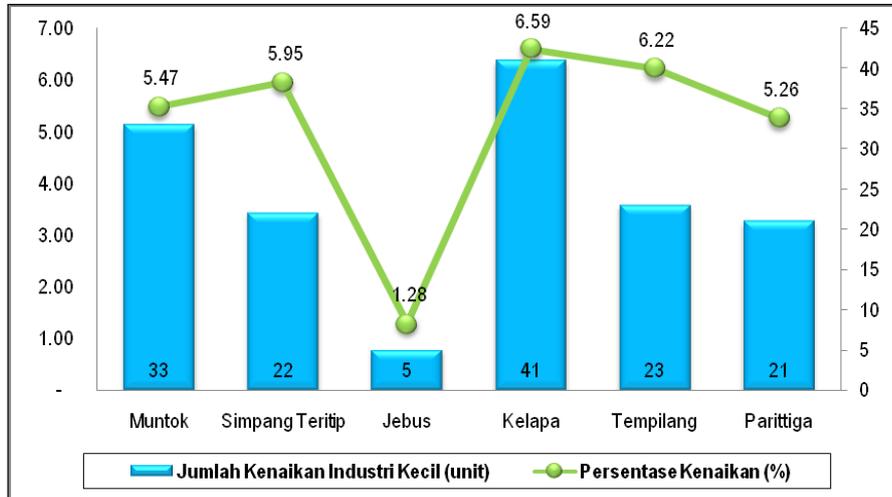
Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar 3.24
Jumlah Industri Kecil per Kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2020

Selama dua tahun terakhir, Kecamatan Kelapa memiliki jumlah industri kecil terbanyak yaitu 622 di Tahun 2019 dan meningkat menjadi 663 unit di Tahun 2020. Kecamatan Muntok menjadi kecamatan kedua yang memiliki industri kecil terbanyak yaitu 636 unit. Jika dilihat dari persentase kenaikan, Kecamatan



Kelapa lebih tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya dengan kenaikan sebesar 6,59 persen diikuti oleh Kecamatan Tempilang dengan persentase 6,22 persen.

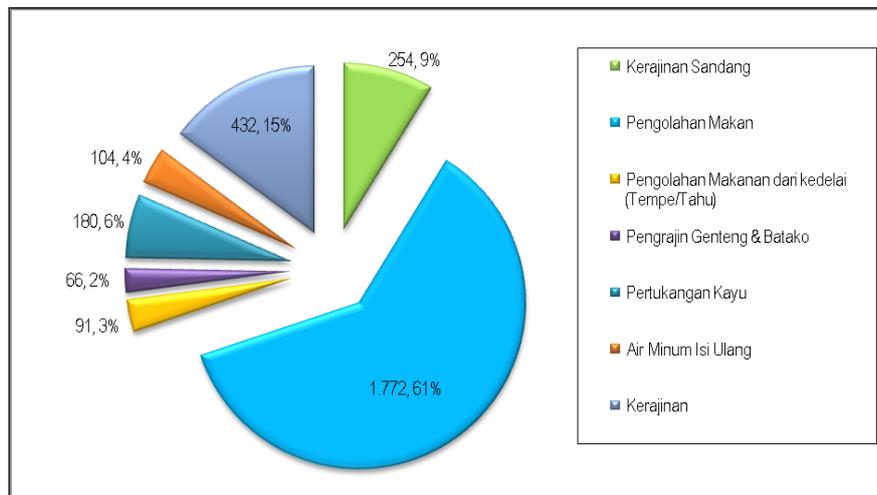


Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar 3.25

Jumlah dan Persentase Kenaikan Industri Kecil per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

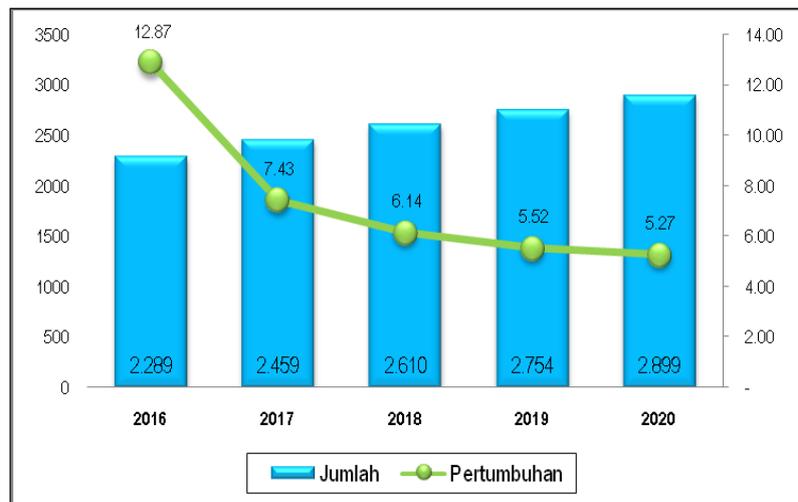
Untuk jenis/direktori bidang industri yang terbanyak diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 adalah direktori Pengolahan Makanan sebanyak 1.772 unit dengan persentase 61,12 persen diikuti oleh direktori Kerajinan sebanyak 432 unit atau 14,90 persen.



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar 3.26

Jumlah dan Persentase Industri Kecil per Direktori di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Grafik 3.27
Jumlah dan Pertumbuhan Industri Kecil
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah industri kecil di Kabupaten Bangka Barat sejak Tahun 2016 terus mengalami peningkatan yaitu dari 2.289 unit menjadi 2.899 unit di Tahun 2020. Meskipun jumlah industri kecil terus bertambah, namun jika dilihat dari laju pertumbuhannya selama lima tahun terakhir justru cenderung mengalami perlambatan. Persentase pertumbuhan industri kecil di Tahun 2016 sebesar 12,87 persen menjadi 5,27 persen di Tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yaitu sebanyak 2.718 unit industri kecil, maka realisasi sampai dengan Tahun 2020 telah melampaui target dengan capaian sebesar 106,66 persen.

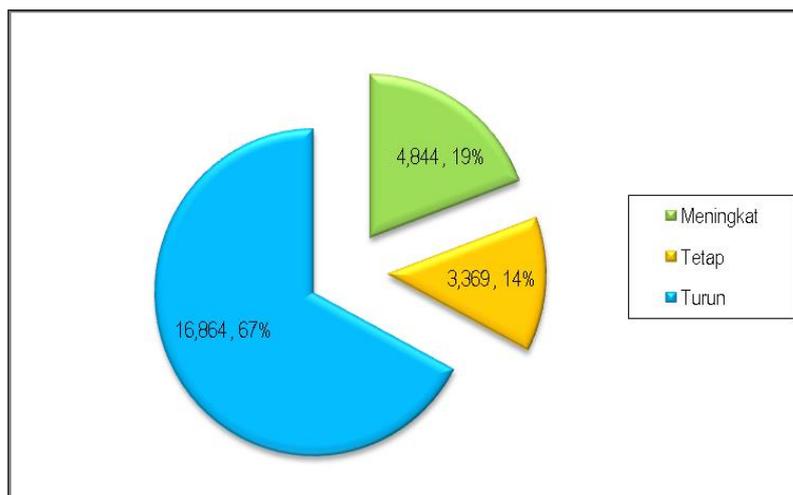
3. Skala usaha UMi menggambarkan omset/nilai yang dijual dalam satuan waktu tertentu. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, Peningkatan Skala usaha UMi dihitung dari UMi yang modal/omset usahanya meningkat lebih dari 25 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan Skala Usaha Mikro di Tahun 2020 ditargetkan meningkat sebesar 2,00 persen dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020, UMi yang mengalami peningkatan omset usaha lebih dari 25 persen hanya sebanyak 11 UMi dari total UMi sebanyak 25.077 unit atau hanya 0,04 persen sehingga capaian indikator Peningkatan



Skala usaha UMi jika dibandingkan dengan target Tahun 2020 hanya mencapai 2,19 persen. Rendahnya capaian di Tahun 2020 tersebut disebabkan oleh menurunnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di sepanjang Tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2019 dengan persentase usaha UMi yang meningkat lebih dari 25 persen sebesar 7,13 persen, maka di Tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu menurun sebesar 99,38 persen.

Pada Tahun 2020, secara umum dari total jumlah UMi di Kabupaten Bangka Barat, terdapat 16.864 unit UMi yang mengalami penurunan omset atau sebesar 67,25 persen dari total UMi. Sebanyak 4.844 unit UMi atau 19,32 persen UMi mengalami peningkatan omset dan 13,43 persen atau sebanyak 3.369 unit UMi yang tetap omsetnya.



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar 3.28
Perkembangan Omset UMi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

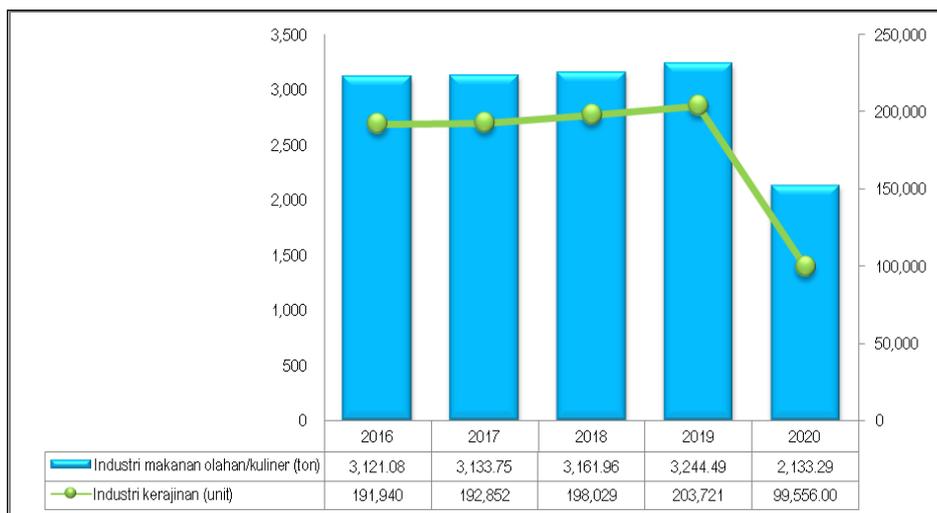
Dengan capaian indikator Peningkatan Skala usaha UMi di Tahun 2020 sebesar 0,04 persen, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2021 sebesar 2,5 persen maka hanya mencapai 1,75 persen. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya lebih dalam mencapai target yang ditetapkan tersebut.

4. Untuk peningkatan kapasitas usaha IKM unggulan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu; kapasitas usaha IKM unggulan olahan kuliner dan kapasitas



usaha IKM unggulan Kerajinan. Pada Tahun 2020, kapasitas usaha IKM unggulan olahan kuliner ditargetkan mencapai 3.147,18 ton/tahun dengan realisasi sebesar 2.133,29 ton/tahun atau dengan capaian sebesar 67,78 persen. Sedangkan kapasitas usaha IKM unggulan kerajinan pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 212.492 unit/tahun hanya realisasi sebesar 99.556 unit/tahun atau hanya mencapai 46,85 persen dari target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, capaian indikator kapasitas usaha industri kecil dan menengah unggulan di Tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Untuk industri makanan olahan/kuliner pada Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 34,25 persen atau sebesar 1.111,20 ton dari 3.244,49 ton di Tahun 2019. Sementara pada industri kerajinan terjadi penurunan 51,13 persen atau sebesar 104.165 unit kerajinan menurun dari Tahun 2019 dengan jumlah 203.721 unit kerajinan.



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar 3.29
Perkembangan Kapasitas Usaha Industri Kecil dan Menengah Unggulan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

Jika dilihat dari perkembangan kapasitas usaha industri kecil dan menengah unggulan Kabupaten Bangka Barat dari Tahun 2016-2020, terjadi pertumbuhan yang positif atau terjadi peningkatan disetiap tahunnya kecuali pada Tahun 2020. Rendahnya capaian di Tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh sektor ekonomi masyarakat khususnya kapasitas usaha industri kecil dan menengah yang juga turut mengalami penurunan.



Berdasarkan hasil capaian kinerja Sasaran Berkembangnya Jumlah Unit Dan Kapasitas UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Mandiri dengan 4 (empat) indikator, maka rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 111,21 persen.

Faktor pendorong pencapaian Sasaran Berkembangnya Jumlah Unit dan Kapasitas UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Mandiri di Tahun 2020 antara lain :

1. Usaha Mikro dan perdagangan tradisional merupakan mata pencaharian yang diminati sebagian besar masyarakat sehingga berkembang cukup baik.
2. Dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan.
3. Penguatan pengembangan usaha melalui bantuan sarana prasarana usaha.

Untuk pencapaian Sasaran Berkembangnya Jumlah Unit Dan Kapasitas UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Mandiri didukung oleh program-program antara lain :

1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Industri Kecil dan menengah;
2. Program pengembangan kewirausahaan industri kecil dan menengah;
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi usaha mikro.

Berdasarkan rata-rata dari 4 (empat) indikator kinerja Sasaran Berkembangnya Jumlah Unit Dan Kapasitas UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Mandiri jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2021, diperoleh capaian sampai dengan Tahun 2020 sebesar 66,45 persen.

Tabel 3.85

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Jumlah Unit dan Kapasitas UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Mandiri Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Persentase peningkatan unit usaha mikro	Unit	25.077	24.782	101,19	Tercapai



INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Persentase peningkatan unit industri kecil dan menengah	Unit	2.899	2.718	106,66	Tercapai
Peningkatan Skala usaha Umi	Persen	0,04	2,5	1,75	Perlu Upaya Lebih
Kapasitas usaha industri kecil dan menengah unggulan					
- Industri makanan olahan/kuliner	Ton / thn	2.133,29	3.152,18	67,68	Perlu Upaya Lebih
- Industri kerajinan	Unit / thn	99.556,00	222.492	44,75	Perlu Upaya Lebih

Dari 4 (empat) indikator sasaran, terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang telah mencapai target, yaitu pada indikator Persentase Peningkatan Unit Usaha Mikro dan indikator Persentase Peningkatan Unit Industri Kecil dan Menengah dengan nilai diatas 100 persen. Sedangkan capaian indikator Peningkatan Skala usaha Umi masih sangat jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD dan hanya mencapai 1,75 persen dari target sebesar 2,5 persen sehingga memerlukan upaya lebih dalam pencapaian indikator. Untuk indikator kapasitas usaha industri kecil dan menengah unggulan yang terbagi atas 2 (dua) sub indikator, juga masih belum mencapai target akhir RPJMD dengan capaian rata-rata sebesar 56,21persen. Secara umum faktor penghambat pencapaian sasaran di Tahun 2020 adalah terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat sehingga sangat berpengaruh terhadap Usaha Mikro dan Industri Kecil masyarakat.

Solusi dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan Sasaran Berkembangnya Jumlah Unit Dan Kapasitas UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Mandiri antara lain :

1. Mendukung penyediaan sarana dan prasarana Usaha Mikro dan Industri Kecil masyarakat.
2. Memberikan bimbingan dan pendampingan dalam pengembangan usaha.
3. Mempermudah akses terhadap permodalan usaha.
4. Melakukan inovasi pengembangan produk Usaha Mikro dan Industri Kecil.
5. Pengembangan ekonomi kreatif.
6. Melakukan program kemitraan dengan perusahaan yang memberikan fasilitasi CSR.



7. Meningkatkan peran serta koperasi dalam pengembangan UMi.

Sasaran Strategis 13 adalah ” **Berkembangnya Ragam Usaha dan Produk Usaha Mikro, Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing**”, dengan pencapaian indikator kinerja pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.86
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Ragam Usaha dan Produk UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASITAH UN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASITAH UN 2020	%	STATUS CAPAIAN
1. Jumlah ragam usaha/produk Umi	unit	137	140	151	107,86	Baik Sekali
2. Jumlah ragam usaha Industri kecil dan menengah	unit	50	52	51	98,08	Baik
3. Jangkauan pasar produk Umi	persen	DK=86,46 AK=13,10 AP=0,44	DK=99 AK=0,65 AP=0,35	DK=84,69 AK=14,76 AP=0,55	DK=114,45 AK=2.270,77 AP=157,14	Baik Sekali
4. Jangkauan pasar produk unggulan industri kecil dan menengah	persen	DK=95,9 AK=1,16 AP=2,94	DK=98 AK=1,25 AP=0,75	DK=96,03 AK=1,21 AP=2,76	DK=102,01 AK=96,80 AP=368,00	Baik Sekali
5. Kontribusi UMi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB	persen	9,95	11,26	n/a	-	-

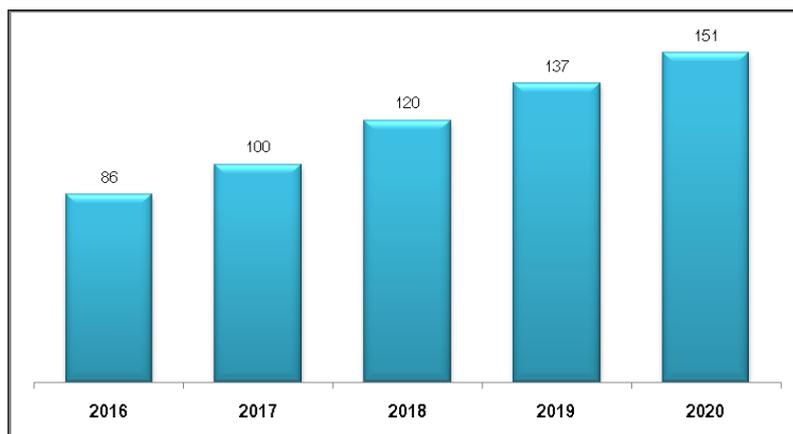
Sasaran Berkembangnya Ragam Usaha dan Produk UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing terdiri dari 5 (lima) indikator dengan rata-rata capaian sebesar 248,07 persen. Dari 5 (lima) indikator tersebut 3 (tiga) indikator dapat dicapai dengan kategori “**Baik Sekali**” atau diatas 100 persen, 1 (indikator)dengan kategori “**Baik**” dan 1 (satu) indikator tidak dapat dihitung dikarenakan pada Tahun 2020 BPS tidak melakukan publikasi PDRB sampai dengan subkategori.



Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, maka analisis atas pencapaian dari masing-masing indikator dari Sasaran Berkembangnya Ragam Usaha dan Produk UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing adalah :

1. Indikator Jumlah ragam usaha/produk UMi pada Tahun 2020 ditargetkan sebanyak 140 ragam usaha denganrealisasi sebanyak 151 ragam. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja Jumlah ragam usaha/produk UMi di Tahun 2020 sebesar 107,86 persen.Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, pada Tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah ragam UMi sebanyak 14 ragam dari tahun 2019dengan jumlahsebanyak 137 ragam usaha/produk UMi.

Pada Tahun 2020 ragam usaha terbanyak adalah usaha petani karet dengan jumlah 11.203 UMi atau 44,67 persen diikuti oleh Petani Sawit sebanyak 3.088 UMi atau 12,31 persen dan Petani Lada sebanyak 1.850 UMi atau 7,38 persen dari total UMi sebanyak 25.077 UMi.



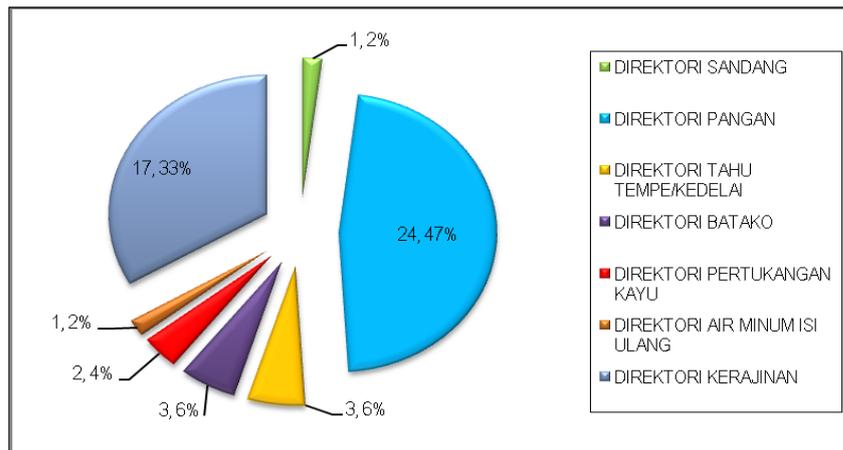
Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar 3.30
Perkembangan Jumlah Ragam Usaha Mikro
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2021 sebesar 150 ragam usaha, maka realisasi indikator jumlah ragam usaha UMi sampai dengan Tahun 2020 telah melebihi target atau tercapai 100,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mikro di Kabupaten Bangka Barat sangat beragam, sejalan dengan peningkatan jumlah usaha mikro yang telah mencapai 25.077 unit. Dengan keberagaman usaha tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta daya saing dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.



2. Jumlah ragam usaha IKM pada Tahun 2020 sesuai dengan Perjanjian Kinerja ditargetkan sebanyak 52 ragam dan terealisasi sebanyak 51 ragam usaha sehingga capaian indikator kinerja sebesar 98,08 persen. Ragam usaha IKM tersebut dihitung berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar 3.31
Jumlah Ragam Usaha Industri Kecil Berdasarkan Direktori di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Pada Tahun 2020, jumlah ragam usaha terbanyak adalah dari Direktori Pangan yaitu 24 ragam atau 47,06 persen dan pada urutan kedua adalah Direktori Kerajinan sebanyak 17 ragam atau 33,33 persen dari total 51 ragam usaha industri kecil yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 3.87
Ragam Usaha Industri Kecil di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	RAGAM USAHA	UNIT
DIREKTORI SANDANG		
1	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	254
DIREKTORI PANGAN		
2	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	286



No.	RAGAM USAHA	UNIT
3	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	257
4	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	45
5	Industri Kue Basah	770
6	Industri Produk Roti dan Kue	39
7	Industri Pengolahan Kopi	2
8	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	26
9	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	21
10	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	13
11	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	73
12	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	15
13	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	17
14	Industri Produk Makanan Lainnya	7
15	Industri Produk Obat Tradisional	4
16	Industri Makanan Dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	3
17	Industri Bahan Baku Obat Tradisional	2
18	Industri Minuman Ringan	5
19	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	5
20	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	79
21	Industri Gula Merah	33
22	Industri Produk Masak Lainnya	61
23	Industri Pengolahan The	4
24	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	3
25	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	2
DIREKTORI TAHU TEMPE/KEDELAI		



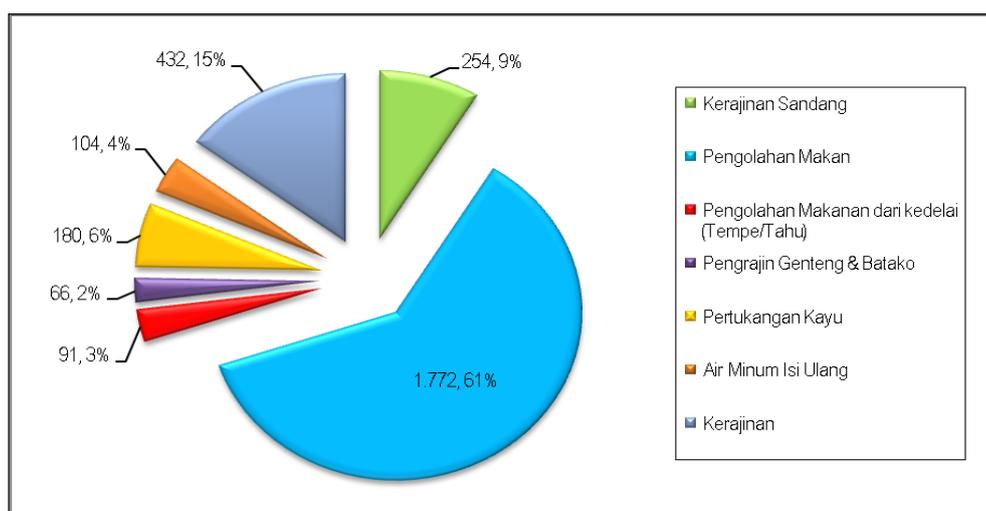
No.	RAGAM USAHA	UNIT
26	Industri Tempe Kedelai	30
27	Industri Tahu Kedelai	50
28	Industri Minuman Ringan	11
DIREKTORI BATAKO		
29	Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik	4
30	Industri Barang Dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi	51
31	Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya	11
DIREKTORI PERTUKANGAN KAYU		
32	Industri Barang Bangunan dari Kayu	122
33	Industri Kapal dan Perahu	58
DIREKTORI AIR MINUM ISI ULANG		
34	Industri Air Minum dan Air Mineral	104
DIREKTORI KERAJINAN		
35	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	2
36	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	33
37	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	110
38	Industri Permata	3
39	Industri Kain Rajutan	11
40	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	5
41	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	178
42	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang digunakan dalam Rumah Tangga	18
43	Daur Ulang Barang Bukan Logam	12
44	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	6
45	Industri Alat Musik Tradisional	9



No.	RAGAM USAHA	UNIT
46	Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	2
47	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	6
48	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	21
49	Industri Furnitur dari Kayu	3
50	Industri Gips	1
51	Industri Kerajinan YTDL	12
	JUMLAH INDUSTRI KECIL	2.899

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Industri kecil yang paling banyak digeluti oleh masyarakat di Kabupaten Bangka Barat adalah pada Direktori Pengolahan Makanan/Pangan yaitu sebanyak 1.772 unit industri kecil atau sebesar 61,12 persen dan yang kedua adalah pada Direktori Kerajinan sebanyak 432 unit industri kecil atau 14,90 persen. Pada Direktori Pengolahan Makanan/Pangan untuk ragam yang paling banyak digeluti adalah ragam Industri Kue Basah sebanyak 770 unit industri kecil.



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Gambar 3.32
Jumlah dan Persentase Usaha Industri Kecil Berdasarkan Ragam Usaha



di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan jumlah ragam usaha di Tahun 2019 sebanyak 50 ragam usaha, maka di Tahun 2020 ragam usaha hanya bertambah 1 ragam saja. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD di Tahun 2021 sebanyak 54 ragam usaha, maka sampai dengan Tahun 2020 telah mencapai 94,44 persen. Dengan capaian tersebut, sampai dengan akhir masa RPJMD, indikator Jumlah Ragam Usaha Industri Kecil dan Menengah optimis dapat dicapai sesuai target.

3. Pada Tahun 2020 indikator Jangkauan Pasar Produk UMi ditargetkan 99,00 persen untuk lingkup dalam kabupaten, untuk lingkup antar kabupaten ditargetkan 0,65 persen, dan antar propinsi ditargetkan sebesar 0,35 persen. Dari keseluruhan total UMi yaitu 25.077 unit usaha, sebanyak 21.238 unit UMi yang jangkauan pemasaran produknya didalam lingkup kabupaten atau sebesar 84,69 persen, 3.702 unit UMi atau 14,76 persen telah menjangkau pasar antar kabupaten dan 137 unit UMi atau 0,55 persen mampu menjangkau pemasaran antar provinsi. Dengan demikian, capaian Tahun 2020 untuk jangkauan pasar produk UMi jika dibandingkan dengan target yaitu di Dalam Kabupaten (DK) = 114,45 persen, Antar Kabupaten (AK) = 2.270,77 persen, sementara jangkauan Antar Provinsi (AP) terealisasi sebesar 157,14 persen.

Sektor usaha dengan jangkauan antar kabupaten paling banyak di Tahun 2020 adalah pada sektor usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebanyak 3.667 unit usaha.

Tabel 3.88
Lingkup Pemasaran Usaha Mikro di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2020

No.	Sektor Usaha Mikro	Lingkup Pemasaran					
		DK		AK		AP	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.171	14.032	3.075	3.667	-	-
2.	Pertambangan dan Penggalian	663	670	-	-	-	-
3.	Industri Pengolahan	1.180	1.567	32	32	81	112
4.	Pengadaan Listrik, Gas	-	-	-	-	-	-
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan	91	92	-	-	-	-



No.	Sektor Usaha Mikro	Lingkup Pemasaran					
		DK		AK		AP	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang						
6.	Konstruksi	180	182	-	-	-	-
7.	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	3.373	3.818	3	3	25	25
8.	Transportasi dan Pergudangan	15	19	-	-	-	-
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	275	275	-	-	-	-
10.	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-	-	-
12.	Real Estat	-	-	-	-	-	-
13.	Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-	-
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-
15.	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	-
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	-
17.	Jasa Lainnya	583	583	-	-	-	-
JUMLAH		20.531	21.238	3.110	3.702	106	137
PERSENTASE		86,46	84,69	13,10	14,76	0,45	0,55

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Jika dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2019, pada Tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah jangkauan pemasaran produk usaha mikro khususnya lingkup pemasaran antar kabupaten dan antar provinsi. Pada Tahun 2019 lingkup pemasaran antar kabupaten sebesar 13,10 persen dan di Tahun 2020 menjadi 14,76 persen. Untuk lingkup pemasaran antar provinsi pada Tahun 2019 sebesar 0,45 persen menjadi 0,55 persen di Tahun 2020.

Dilihat dari capaian indikator Jangkauan Pasar Produk UMi sampai dengan Tahun 2020, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2021, maka seluruh sub indikator telah melebihi target dengan capaian diatas 100 persen.



4. Pada Tahun 2020 indikator Jangkauan Pasar Produk Unggulan IKM ditargetkan 98,00 persen masih dalam lingkup Kabupaten, 1,25 persen untuk lingkup Antar Kabupaten dan 0,75 persen untuk lingkup Antar Provinsi. Realisasi jangkauan pemasaran bagi produk unggulan IKM pada Tahun 2020 untuk Dalam Kabupaten (DK) = 96,03 persen, Antar Kabupaten (AK) = 1,21 persen, dan Antar Provinsi (AP) = 2,76 persen. Dengan demikian, capaian kinerja indikator sasaran untuk DK tercapai sebesar 102,01 persen, untuk AK tercapai sebesar 96,80 persen dan untuk AP tercapai sebesar 368,00 persen.

Tabel 3.89
Lingkup Pemasaran Industri Kecil di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2020

Direktori	Lingkup Pemasaran					
	DK		AK		AP	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Sandang	233	254	-	-	-	-
Pengolahan Makanan	1.564	1.665	29	32	76	75
Pengolahan Makanan dari kedelai	103	91	-	-	-	-
Pengrajin genteng dan batako	73	66	-	-	-	-
Pertukangan Kayu	175	180	-	-	-	-
Air Minum Isi Ulang	100	104	-	-	-	-
Kerajinan Anyaman	393	424	3	3	5	5
Total	2.641	2.784	32	35	81	80
Persentase	95,90	96,03	1,16	1,21	2,94	2,76

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2021

Dilihat dari tabel data di atas, pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 jangkauan pemasaran untuk lingkup antar kabupaten dan antar provinsi adalah dari Direktori Pengelolaan Makanan dan Direktori Kerajinan Anyaman. Untuk lingkup pemasaran antar kabupaten, pada Tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 3 unit dari Tahun 2019 dengan jumlah 32 unit industri kecil menjadi 35 unit industri kecil yang melakukan pemasaran di lingkup antar kabupaten. Sementara untuk lingkup pemasaran antar provinsi, pada Tahun 2020 terjadi penurunan 1 unit usaha dari Tahun 2019 yang berjumlah 81 unit menjadi 80 unit di Tahun 2020.



Capaian indikator Jangkauan Pasar Produk Unggulan Industri Kecil dan Menengah sampai dengan Tahun 2020 dibanding dengan target akhir RPJMD di Tahun 2021, jika dirata-ratakan telah mencapai 166,34 persen atau telah melebihi target. Dengan capaian tersebut, menunjukkan bahwa produk unggulan Kabupaten Bangka Barat telah menjangkau pasaran luar daerah khususnya di tingkat regional maupun nasional.

- Indikator kelima dari Sasaran Berkembangnya Ragam Usaha dan Produk UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing adalah Kontribusi UMi dan IKM terhadap PDRB dengan target di Tahun 2020 sebesar 11,26 persen. Sumber data untuk perhitungan indikator ini adalah dari PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha yang dipublikasi oleh BPS.

Nilai PDRB yang diambil untuk perhitungan indikator ini adalah dari 7 Subkategori PDRB dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu Industri makanan dan minuman; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman; industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri furniture; industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Namun dikarenakan pada Tahun 2020 BPS tidak melakukan publikasi PDRB sampai dengan subkategori sehingga data capaian untuk indikator ini tidak dapat disajikan.

Tabel 3.90
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Ragam Usaha dan Produk UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Jumlah ragam usaha / produk Umi	Unit	151	150	100,67	Tercapai
Jumlah ragam usaha Industri kecil dan menengah	Unit	51	54	94,44	Optimis Tercapai
Jangkauan pasar produk Umi	Persen	DK=84,69 AK=14,76 AP=0,55	DK= 98,5 AK= 1,0 AP = 0,5	DK=114,02 AK=1.476,00 AP=110,00	Tercapai
Jangkauan pasar produk unggulan	Persen	DK=96,03 AK=1,21	DK = 98 AK = 1	DK=102,01 AK=121,00	Tercapai



INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
industri kecil dan menengah		AP=2,76	AP = 1	AP=276,00	
Kontribusi UMi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB	Persen	n/a	9,78	-	-

Dari capaian 5 (lima) indikator Sasaran Berkembangnya Ragam Usaha dan Produk UMi, IKM yang Berdaya Saing jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2021, sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran telah tercapai bahkan melebihi target yaitu Jumlah Ragam Usaha/Produk UMi, Jangkauan Pasar Produk UMi, dan Jangkauan Pasar Produk Unggulan Industri Kecil dan Menengah. Untuk indikator Jumlah Ragam Usaha Industri Kecil dan Menengah sampai dengan Tahun 2020 belum mencapai target yaitu sebesar 94,44 persen, namun jika dilihat dari perkembangan industri kecil di Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Tahun 2020, target akhir RPJMD dengan target sebanyak 54 ragam industri optimis dapat dicapai. Untuk indikator Kontribusi UMi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB tidak dapat dihitung karena data tidak tersedia.

Secara keseluruhan, Sasaran Berkembangnya Ragam Usaha dan Produk UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing dapat dicapai dengan baik yang didorong oleh faktor-faktor antara lain :

1. Peningkatan promosi produk, perluasan pemasaran produk, serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung Usaha Mikro dan Industri Kecil masyarakat.
2. Pemanfaatan media sosial dalam promosi produk Usaha Mikro dan Industri Kecil.
3. Inovasi pengembangan produk Usaha Mikro dan Industri Kecil.

Untuk mencapai Sasaran Berkembangnya Ragam Usaha dan Produk UMi, Industri Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing di Tahun 2020 didukung oleh program-program :

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro;
2. Program Penataan Struktur Industri
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;



4. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.

Sasaran strategis 14 adalah “**Berkembangnya Destinasi Wisata**”.

Kinerja Sasaran “Berkembangnya Destinasi Wisata” diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu Kunjungan wisata, Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata.

Hasil pengukuran capaian Kinerja Sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.91
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
1.	Kunjungan wisata	Orang	136.252	50.000	61.087	122,17	Baik Sekali
2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,99	1,26	0,93	73,81	Cukup
3.	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	%	- 11,80	5,00	8,94	178,80	Baik Sekali

Berdasarkan realisasi ketiga indikator tersebut, maka rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 124,93 persen dengan status capaian “Baik Sekali”. Capaian sasaran tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi di Tahun 2020 dengan target indikator yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020. Perubahan tersebut dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi pembangunan daerah khususnya dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang diperkirakan akan sangat mempengaruhi sektor pariwisata daerah.

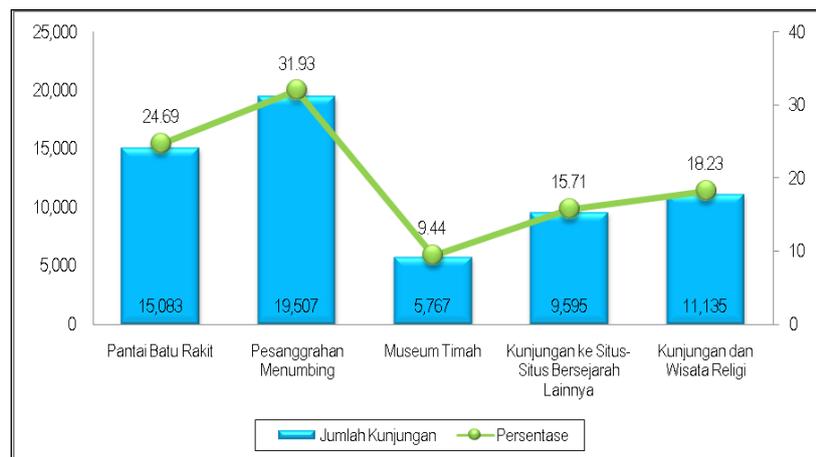
Uraian capaian indikator kinerja sasaran “Berkembangnya Destinasi Wisata” Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2020 untuk realisasi indikator kunjungan wisata di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 61.087 wisatawan dan jika dibandingkan dengan target sebanyak 50.000 wisatawan, maka telah tercapai 122,17 persen. Jumlah kunjungan wisata tersebut didapat dari wisatawan yang berkunjung ke objek wisata pada wisata alam Pantai Batu Rakit, wisata sejarah yaitu Pesanggrahan



Menumbing dan Museum Timah, wisata religi yaitu Makam Khotamar Rasyid serta kunjungan ke situs-situs bersejarah lainnya.

Berdasarkan objek kunjungan, pada Tahun 2020 kunjungan tertinggi adalah Pesanggrahan Menumbing sebanyak 19.507 orang atau sebesar 31,93 persen dari total kunjungan wisata di Kab. Bangka Barat dan Pantai Batu Rakit menduduki peringkat kedua dengan jumlah kunjungan sebanyak 15.083 orang atau 24,69 persen.



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Gambar 3.33
Jumlah dan Persentase Sebaran Kunjungan Wisata
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Tabel 3.92
Data Kunjungan Wisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2020

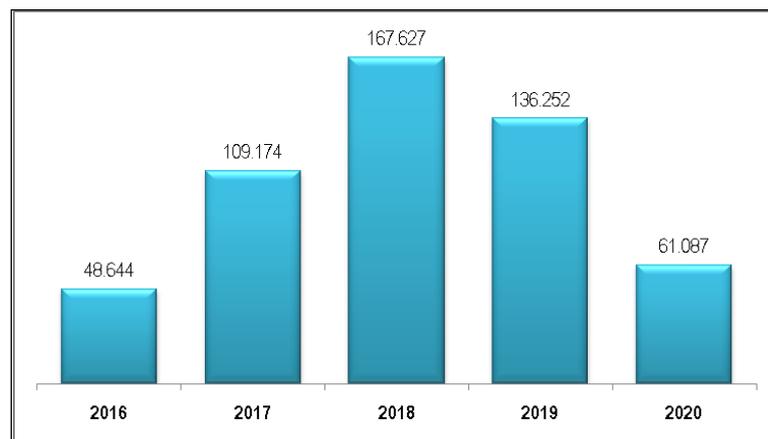
Tahun	Jenis Kunjungan					Total
	Wisata Alam Pantai Batu Rakit	Kunjungan ke Pesanggrahan Menumbing	Kunjungan ke Museum Timah	Kunjungan ke Situs-Situs Bersejarah Lainnya	Kunjungan dan Wisata Religi	
2018	54.700	82.004	15.079	4.043	11.801	167.627
2019	55.213	40.932	15.025	4.588	20.494	136.252
2020	15.083	19.507	5.767	9.595	11.135	61.087

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Meskipun dibanding dengan target Tahun 2020 indikator ini dapat dicapai dengan sangat baik, namun jika dibandingkan dengan Tahun 2019 realisasi di



Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2020 jumlah kunjungan wisata menurun sebesar 55,17 persen atau 75.165 kunjungan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 dengan jumlah kunjungan sebanyak 136.252 orang. Penurunan jumlah kunjungan ini disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan seluruh destinasi wisata di Kabupaten Bangka Barat ditutup khususnya mulai Bulan Maret sampai dengan Bulan Juli Tahun 2020 sesuai instruksi pemerintah pusat untuk mencegah penyebaran Covid-19.



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Gambar 3.34
Kunjungan wisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

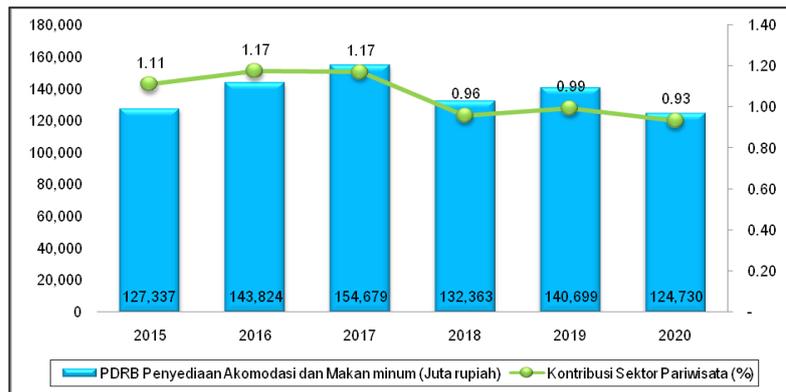
Jika dilihat dari perkembangan antar waktu selama kurun lima tahun dari Tahun 2016-2020, jumlah kunjungan wisata tertinggi di Kabupaten Bangka Barat terjadi pada Tahun 2018, sedangkan selama dua tahun terakhir mengalami penurunan jumlah kunjungan wisata.

2. Kontribusi untuk sektor pariwisata diambil dari besaran kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha. Pada Tahun 2020 realisasi kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB sebesar 0,93 persen dan jika dibandingkan dengan target di Tahun 2020 dengan nilai 1,26 persen, maka diperoleh capaian sebesar 73,81 persen.

Jika dilihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, maka penyediaan akomodasi pada Tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu dari 0,99 persen menjadi 0,93 persen di Tahun 2020. Sementara dilihat dari nilai PDRB, sektor ini juga mengalami penurunan sebesar



11,35 persen yaitu dari 140.699 juta rupiah di Tahun 2019 menjadi 124.730 juta rupiah pada Tahun 2020. Menurunnya nilai PDRB pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada Tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang juga berpengaruh pada beberapa sektor lapangan usaha PDRB.



Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021

Gambar3.35
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020

Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB selama 5 tahun terakhir berfluktuasi dengan capaian tertinggi pada Tahun 2016-2017 sebesar 1,7 persen dan kondisi terendah pada Tahun 2020 dengan kontribusi hanya sebesar 0,93 persen terhadap PDRB.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dihitung dari 4 jenis pendapatan daerah yang berkaitan dengan sektor pariwisata yaitu dari Pajak Hotel (Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel), Pajak Restoran (Rumah Makan), Pajak Hiburan (Pajak Pertandingan Olahraga) dan Retribusi wisata dan rekreasi (Retribusi Izin tertentu). Untuk perhitungan Indikator Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata adalah dari Jumlah PAD sektor pariwisata tahun n dikurangi PAD sektor pariwisata tahun n-1 dibagi PAD sektor pariwisata pada tahun n-1 dikali 100.

Pada Tahun 2020 realisasi indikator Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata yaitu sebesar 8,94 persen dari target sebesar 5,00 persen dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020.



Berdasarkan realisasi tersebut, maka capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata sebesar 178,80 persen dengan kategori “Baik Sekali”.

Jika dibandingkan dengan Jumlah PAD sektor pariwisata pada Tahun 2020 sebesar Rp2.607.490.408,00 dengan Tahun 2019 dengan jumlah PAD sebesar Rp2.393.548.510,00 terjadi peningkatan sebesar Rp213.941.898,00. Peningkatan PAD Sektor Pariwisata pada Tahun 2020 disebabkan oleh dua jenis pendapatan yaitu Pajak Restoran (Rumah Makan) serta Retribusi Wisata dan Rekreasi (Retribusi Izin tertentu), sementara pada Pajak Hotel (Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hotel) dan Pajak Hiburan (Pajak Pertandingan Olahraga) justru mengalami penurunan pendapatan.

Tabel 3.93
PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pajak Hotel (Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hotel)	107.003.033,00	108.295.589,00	94.254.117,00	96.795.137,00	63.051.026,00
2.	Pajak Restoran (Rumah Makan)	1.225.012.102,00	1.908.482.123,70	2.422.680.765,00	2.114.418.273,00	2.350.967.382,00
3.	Pajak Hiburan (Pajak Pertandingan Olahraga)	12.879.750,00	34.286.000,00	38.846.000,00	22.235.100,00	6.434.000,00
4.	Retribusi wisata dan rekreasi (Retribusi Izin tertentu)	37.804.000,00	120.018.000,00	158.042.000,00	160.100.000,00	187.038.000,00
Jumlah		1.382.698.885,00	2.171.081.712,70	2.713.822.882,00	2.393.548.510,00	2.607.490.408,00
% peningkatan PAD sektor pariwisata		12,25	57,02	25,00	-11,8	8,94

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, 2021

PAD sektor pariwisata untuk Pajak Restoran (Rumah Makan) mengalami peningkatan sebesar 11,19 persen yaitu dengan nilai Rp2.114.418.273,00 di Tahun 2019 menjadi Rp2.350.967.382,00 di Tahun 2020. Hal ini disebabkan mulai meningkatnya kesadaran para pemilik rumah makan/restoran di Kabupaten Bangka Barat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak usaha yang dimilikinya. Untuk Retribusi Wisata dan Rekreasi (Retribusi Izin tertentu) meningkat 16,83 persen dari Tahun 2019 dengan nilai Rp160.100.000,00 menjadi Rp187.038.000,00 di Tahun 2020.



Pendapatan dari Pajak Hotel (Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel) di Tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 34,86 persen yaitu Rp96.795.137,00 di Tahun 2019 menjadi Rp63.051.026,00 di Tahun 2020. Sementara Pajak Hiburan (Pajak Pertandingan Olahraga) juga menurun sebesar 71,06 persen dari Tahun 2019 dengan nilai Rp22.235.100,00 di Tahun 2019 menjadi Rp6.434.000,00 di Tahun 2020. Menurunnya jumlah pendapatan dari sektor ini disebabkan jumlah tempat penginapan dan tempat-tempat hiburan di Kabupaten Bangka Barat tidak terlalu banyak serta terjadinya Pandemi Covid-19 sehingga jumlah orang yang menginapsertapelaksanaan even-even hiburan berkurang cukup signifikan.

Secara rata-rata pada Tahun 2020 pencapaian indikator Sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata sangat baik dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikatorkinerjasasaranini diantaranya adalah :

1. Dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan kepariwisataan.
2. Partisipasi masyarakat maupun pihak swasta dalam mendukung pariwisata daerah.
3. Mulai tumbuhnya kelompok masyarakat yang mengembangkan potensi lingkungannya menjadi objek wisata.
4. Pengembangan pariwisata melalui pelatihan-pelatihan bidang kepariwisataan.
5. Promosi pariwisata daerah melalui publikasi cetak, elektronik, dan media sosial.

Pencapaian Sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata di Tahun 2020didukung oleh program :

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Realisasi akumulasi capaian sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata sampai dengan Tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD di Tahun 2021 adalah sebesar 51,70 persen dengan masing-masing capaian indikator sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.94
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata
Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
1. Kunjungan wisata	Orang	61.087	104.000	58,74	Perlu Upaya Lebih
2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,93	1,80	51,67	Perlu Upaya Lebih
3. Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	%	8,94	20,00	44,70	Perlu Upaya Lebih

Dilihat dari realisasi di Tahun 2020 untuk indikator kunjungan wisata dengan jumlah sebanyak 61.087 orang, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2021 sebesar 104.000 orang, maka masih sangat rendah yaitu hanya mencapai 58,74 persen. Untuk realisasi indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 0,93 persen, jika dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD di Tahun 2021 sebesar 1,8 persen, maka sampai dengan Tahun 2020 hanya dapat dicapai sebesar 51,67 persen. Sementara untuk realisasi indikator Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata sebesar 8,94 persen jika dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD di Tahun 2021 sebesar 20 persen, maka sampai dengan Tahun 2020 hanya dapat dicapai sebesar 44,70 persen.

Dilihat dari rata-rata pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata sampai dengan Tahun 2020 sebesar 51,70 persen, maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan upaya lebih untuk mencapai target yang ditetapkan di akhir periode RPJMD khususnya di Tahun 2021. Secara umum rendahnya capaian indikator Sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata di Tahun 2020 disebabkan oleh merebaknya wabah/pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh sektor kepariwisataan daerah. Hal ini membutuhkan upaya yang lebih oleh Pemerintah Daerah untuk dapat menggairahkan kembali sektor kepariwisataan sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata di Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan.

Selain hal di atas, untuk mencapai target sasaran Berkembangnya Destinasi Wisata, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah :



1. Pengembangan dan penguatan kemitraan serta jaringan kerja sama antara pemerintah yaitu pusat, provinsi dan kabupaten serta antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
2. Penyediaan sarana prasarana yang memadai pada objek wisata.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan kawasan pariwisata.
4. Melakukan pengembangan kepariwisataan daerah sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Sasaran strategis 15 adalah **“Terjaganya Kelestarian Warisan Budaya sebagai Aset Wisata”**.

Sasaran Terjaganya Kelestarian Warisan Budaya sebagai Aset Wisata terdiri dari satu indikator yaitu Persentase Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya, Seni dan Kebudayaan Daerah yang Dilestarikan yang Terintegrasi dengan Program Pariwisata. Indikator kinerja sasaran tersebut diperoleh dari jumlah benda budaya, warisan tak benda, bangunan peninggalan sejarah/cagar budaya, kawasan situs, kesenian budaya yang diselenggarakan, dan *event* budaya/*event* tradisi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat yang dilestarikan dan terintegrasi dengan program pariwisata dibagi dengan jumlah seluruh benda budaya, warisan tak benda, bangunan peninggalan sejarah/cagar budaya, kawasan situs, kesenian budaya yang diselenggarakan, dan *event* budaya/*event* tradisi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat.

Target dan realisasi sasaran Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.95

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terjaganya Kelestarian Warisan Budaya sebagai Aset Wisata Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Persentase Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya, Seni dan Kebudayaan Daerah yang Dilestarikan yang Terintegrasi dengan Program Pariwisata	%	50,00	39,00	35,58	91,22	Baik



Realisasi indikator Persentase Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya, Seni dan Kebudayaan Daerah yang Dilestarikan yang Terintegrasi dengan Program Pariwisata pada Tahun 2020 adalah 91,22 persen dengan kategori "Baik". Pada Tahun 2020 benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan dan terintegrasi dengan Program Pariwisata sebanyak 37 benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang terdiri dari :

- a. Bangunan cagar budaya/peninggalan sejarah yang dilestarikan sebanyak 17 unit terdiri dari :
 - Bangunan cagar budaya/peninggalan sejarah yang dilestarikan melalui Dana APBD Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari 11 bangunan yaitu :
 1. Masjid Jami';
 2. Kelenteng Kung Fuk Miao;
 3. Rumah Mayor Cina;
 4. Makam Bangsawan Melayu;
 5. Pesanggrahan Menumbing;
 6. Gereja Bethesda;
 7. Gereja Katolik;
 8. Bangunan Pastoran;
 9. Makam Hario Pakuningprang;
 10. Benteng Sungai Buluh; dan
 11. Benteng Kota Tempilang.
 - Bangunan cagar budaya/peninggalan sejarah yang dilestarikan oleh pihak lain, terdiri dari 6 bangunan yaitu :
 1. Wisma Ranggung;
 2. Museum Timah;
 3. Rumah Resident;
 4. Menara Suar Tanjung Kalian;
 5. Eks. Europe School; dan
 6. Meriam Lantaka.
- b. Event adat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebanyak 20 event yaitu :
 1. Acara Cap Go Meh Kelenteng Kong Fuk Miao, Kecamatan Muntok;
 2. Acara Cap Go Meh Kelenteng, Desa Puput, Kecamatan Parittiga;



3. Ceriak Nerang, Desa Bukit Terak, Kecamatan Simpang Teritip;
4. Khataman Desa Kapit, Kecamatan Parittiga;
5. Sedekah Bumi, Dusun Peraceh, Desa Air Menduyung, Kecamatan Simpang Teritip;
6. Perang Ketupat, Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang;
7. Perayaan 10 Muharram KH. Khotamarasyid, Desa Bakit Kecamatan Parittiga;
8. Sembahyang Rebut, Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip;
9. Sembahyang Rebut, Dusun Anyai, Desa Air Menduyung, Kecamatan Simpang Teritip;
10. Sembahyang Rebut, Dusun Tayu, Kecamatan Jebus;
11. Sembahyang Rebut, Kecamatan Muntok;
12. Sembahyang Rebut, Pecinan Desa Bakit, Kecamatan Parittiga;
13. Sembahyang Rebung, Dusun Jangpan Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga;
14. Sembahyang Rebut, Desa Tanjung Ular, Kecamatan Muntok;
15. Sedekah Gunung, Pelangas Kec Kecamatan Simpang Teritip;
16. Sembahyang Bulan, Kecamatan Muntok;
17. Sembahyang Bulan, Desa Puput, Kecamatan Parittiga;
18. Sedekah Gunung, Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip;
19. Pesta Adat Suku Jering, Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip; dan
20. Acara Kampung Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W, Dusun Terabek Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok.

Tabel 3.96

Realisasi Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya, Seni dan Kebudayaan Daerah yang Dilestarikan dan Terintegrasi dengan Program Pariwisata Tahun 2017 – 2020

No.	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
1.	Benda Warisan Budaya	5	-	5	-	5	-	5	-
2.	Warisan Tak Benda	3	-	3	-	3	-	3	-
3.	Bangunan Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya	65	2	65	6	65	13	65	17
4.	Even Budaya/Even Tradisi	33	31	26	34	26	35	26	20
5.	Kesenian Budaya yang diselenggarakan	4	4	4	5	4	3	4	-
6.	Pelestarian nilai sejarah	-	-	1	1	1	1	1	-
Total		110	37	104	46	104	52	104	37
Persentase		33,64		44,23		50,00		35,58	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021



Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, realisasi indikator Persentase Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya, Seni dan Kebudayaan Daerah yang Dilestarikan yang Terintegrasi dengan Program Pariwisata di Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,42 persen dengan realisasi di Tahun 2019 sebesar 50,00 persen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target Sasaran Terjaganya Kelestarian Warisan Budaya Sebagai Aset Wisata di Tahun 2020 secara umum adalah karena tidak dapat diselenggarakannya kegiatan kesenian budaya dan pelestarian nilai sejarah yang melibatkan orang banyak mengingat pandemi Covid-19. Selain hal tersebut,

Program yang mendukung Sasaran Terjaganya Kelestarian Warisan Budaya Sebagai Aset Wisata antara lain :

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
2. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya;
3. Program Pengembangan Nilai Budaya.

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan Tahun 2020 dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.97

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terjaganya Kelestarian Warisan Budaya sebagai Aset Wisata Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASIT AHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Persentase benda, situs, benda, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata	%	35,58	42,00	84,71	Optimis Tercapai

Melihat capaian indikator Sasaran Terjaganya Kelestarian Warisan Budaya sebagai Aset Wisata sampai dengan Tahun 2020, jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 42,00 persen maka telah terealisasi 84,71 persen dan



masih optimis untuk dapat dicapai pada tahun 2021, khususnya jika kondisi akibat pandemi Covid-19 telah membaik.

Sasaran Strategis 16 adalah **"Meningkatnya Konektivitas Daerah"**

Perkembangan dan pembangunan suatu daerah sangat berpengaruh terhadap kondisi jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah ke wilayah lain. Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dilakukan dengan pembangunan dan peningkatan pada jalan yang belum terhubung antar daerah, menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serta secara umum meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Konektivitas Daerah didapat dari jumlah jaringan jalan dibagi jumlah desa/kelurahan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah.

Tabel 3.98

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Konektivitas Daerah Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Konektivitas Kabupaten	Indeks	1,25	1,05	1,25	119,05	Baik Sekali

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Konektivitas Daerah dengan satu indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 119,05 persen dengan status capaian "Baik Sekali".

Indeks konektivitas kabupaten pada Tahun 2020 terealisasi 1,25 dari target 1,05. Capaian kinerja tersebut terealisasi sebesar 119,05 persen, artinya telah melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, capaian ini tidak mengalami peningkatan dari capaian tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh faktor rasionalisasi anggaran akibat *refocusing* penanganan dampak COVID-19, sehingga penganggaran bidang jalan difokuskan untuk kegiatan-kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala jalan. Kendati demikian upaya-upaya peningkatan konektivitas terus dilakukan seperti Rencana Pembangunan Jalan dari Desa Air Limau menuju KIPT.

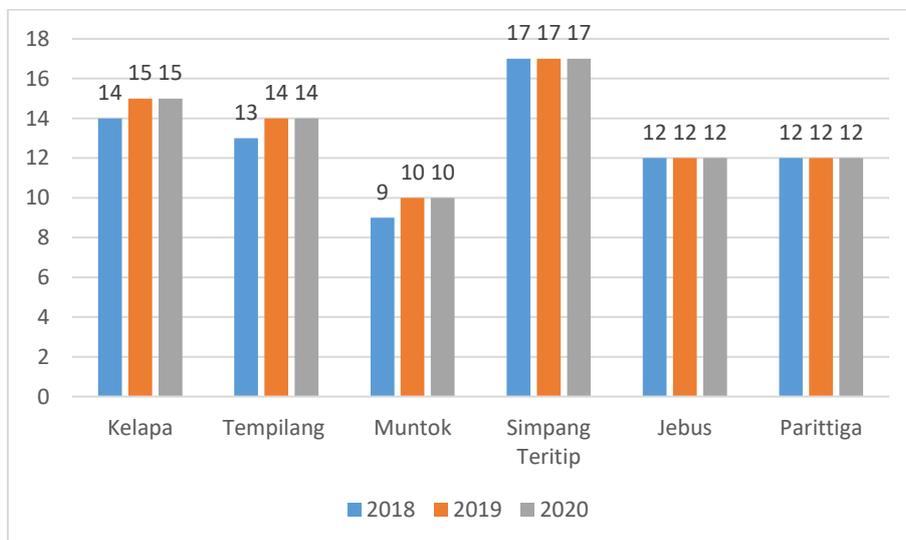


Pada tahun 2020 selesai dilaksanakan studi kelayakan dan pengukuran lahan. Apabila tidak terkendala pada tahun 2021 akan dilaksanakan pembebasan lahan dan pelaksanaan fisik oleh TMMD (Tentara Manunggal Masuk desa).

Pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks konektivitas kabupaten dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.99
Indeks Konektivitas Kabupaten per Kecamatan Tahun 2018-2020

No.	KECAMATAN	JALAN JUMLAH JARINGAN (KAB,PROV,NAS)			JUMLAH DESA/KELURAHAN
		2018	2019	2020	
1.	Kelapa	14	15	15	14
2.	Tempilang	13	14	14	9
3.	Muntok	9	10	10	7
4.	Simpang Teritip	17	17	17	13
5.	Jebus	12	12	12	11
6.	Parittiga	12	12	12	10
TOTAL		77	80	80	64
INDEKS KONEKTIVITAS		1,20	1,25	1,25	



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020 (diolah)

Gambar 3.36
Indeks Konektivitas Kabupaten per Kecamatan Tahun 2018-2020

Jika dilihat dari interaksi antar kabupaten lain dengan pusat kota Kabupaten Bangka Barat indeks konektivitasnya masih sangat rendah karena hanya ada satu jaringan jalan. Namun interaksi antara desa/kelurahan ke pusat kegiatan setiap kecamatan



yang ada di Kabupaten Bangka Barat memiliki konektivitas yang tinggi karena terdapat lebih dari satu jalan alternatif.

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target capaianakhir RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.100
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Konektivitas Daerah
Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Konektivitas Kabupaten	Indeks	1,25	1,06	117,92	Tercapai

Sampai dengan Tahun 2020, target Indikator Kinerja Sasaran Indeks Konektivitas Kabupaten telah tercapai sebesar 117,92 persen atau telah melebihi target yang ditetapkan.

Kendala yang dihadapi pada proses pencapaian tersebut adalah masalah anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana terkait konektivitas masih ketergantungan dari anggaran dana pusat khususnya terhadap dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus. Selain itu, untuk penambahan konektivitas berdasarkan usulan masyarakat terdapat permasalahan status lahan yang masih merupakan kawasan.

Adapun program yang mendukung pencapaian ini yaitu:

1. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

Sasaran Strategis 17 adalah **"Tersedianya Air Baku untuk Usaha Budidaya Komoditas Pertanian"**

Penyediaan air baku digunakan untuk kebutuhan masyarakat serta kebutuhan air irigasi pertanian rakyat dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian..

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Tersedianya Air Baku Untuk Usaha Budidaya Komoditas Pertanian" diperoleh dari luas areal yang memiliki jaringan irigasi teknis dibagi dengan luas areal pertanian, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 3.101
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Tersedianya Air Baku untuk Usaha Budidaya Komoditas Pertanian Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis	%	51,35	94,76	51,35	54,19	Kurang

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Tersedianya Air Baku Untuk Usaha Budidaya Komoditas Pertanian” dengan indikator kinerja Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 54,19 persen dengan status capaian “Kurang”.

Irigasi teknis yang dimaksud adalah saluran sekunder baik permanen maupun non permanen yang secara fungsional sudah siap dikoneksikan dengan saluran tersier. Sampai dengan tahun 2020, dari 2.518 ha areal pertanian, yang telah beririgasi teknis adalah seluas 1.293 ha (51,35 persen), namun belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu seluas 1.941,88 ha (77,12 persen). Jika dilihat perkembangan capaian indikator persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis pada tahun 2020 tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berikut perbandingan luasan areal pertanian yang beririgasi sekunder per kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2016 hingga 2020:

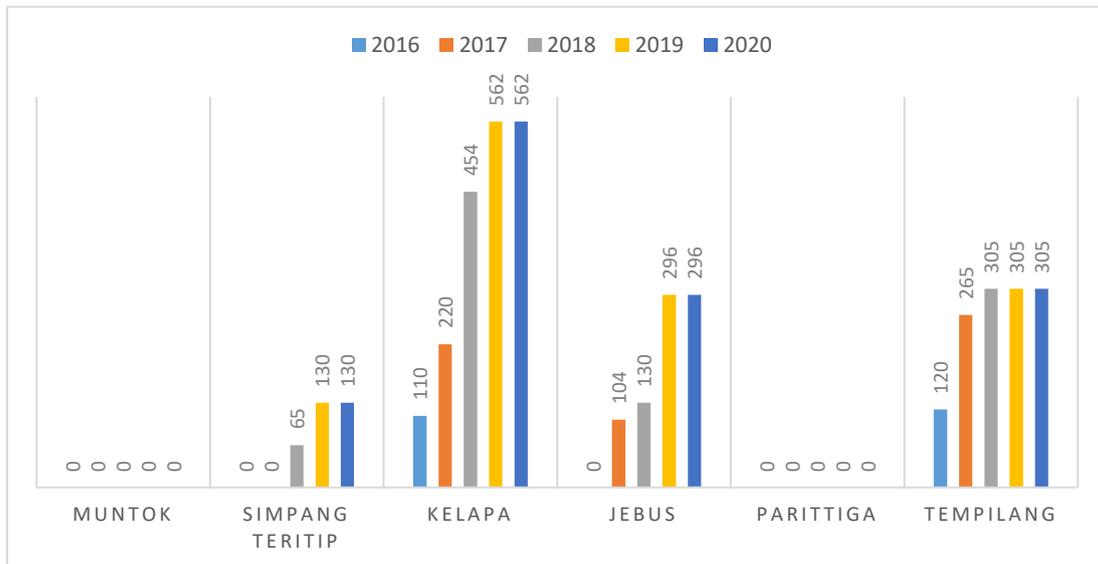
Tabel 3.102
Luas Areal Pertanian yang Beririgasi Sekunder
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Luas Areal Pertanian (Ha)	Luas Irigasi Sekunder (Ha)				
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Muntok	64	-	-	-	-	-
2.	Simpang teritip	555	-	-	65,00	130,00	130,00
3.	Kelapa	1.228	110	220	454,00	562,00	562,00
4.	Jebus	366	-	104	130,00	296,00	296,00
5.	Parittiga	-	-	-	-	-	-
6.	Tempilang	305	120	265	305,00	305,00	305,00
	Total	2.518	230	589	954	1.293	1.293
	Persentase		9,13	23,39	37,89	51,35	51,35

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020



Jika digambarkan ke dalam bentuk grafik batang sebagaimana berikut:



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020 (diolah)

Gambar 3.37
Luas Areal Pertanian yang Beririgasi Sekunder
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.103
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Air Baku untuk Usaha Budidaya
Komoditas Pertanian Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis	%	51,35	94,76	54,19	Perlu Upaya Lebih

Sampai dengan Tahun 2020 Indikator Kinerja Sasaran “Persentase Luas Areal Pertanian yang Beririgasi Teknis” jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru mencapai sebesar 54,19 persen dengan status “Perlu Upaya Lebih”. Dalam hal ini, pembangunan saluran sekunder yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih bergantung pada dana perimbangan (Dana Alokasi Khusus).



Upaya yang harus dilakukan adalah komitmen dan konsistensi perangkat daerah dalam pencapaian sasaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap mempedomani strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sehingga upaya pencapaian sasaran berjalan efektif dan efisien. Adapun program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini yaitu Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

Sasaran strategis 18 adalah **“Meningkatnya Kualitas Pendidikan”**.

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu 1). Peringkat Ujian Nasional (UN) se-Provinsi; 2). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS); dan 3). Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten. Rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 92,89persen dengan Status Capaian “Baik” sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.104
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
1. Peringkat Ujian Nasional se-Provinsi						
- SD sederajat		n/a	2	n/a	n/a	n/a
- SMP sederajat	Peringkat	6	2	n/a	n/a	n/a
2. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,52	13,05	11,53	88,35	Baik
3. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten	Tahun	7,21	8,07	7,22	89,47	Baik
Rata-rata capaian					88,90	Baik

Peringkat UN se-Provinsi ditentukan dari peringkat nilai ujian rata-rata siswa SD sederajat dan SMP sederajat dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

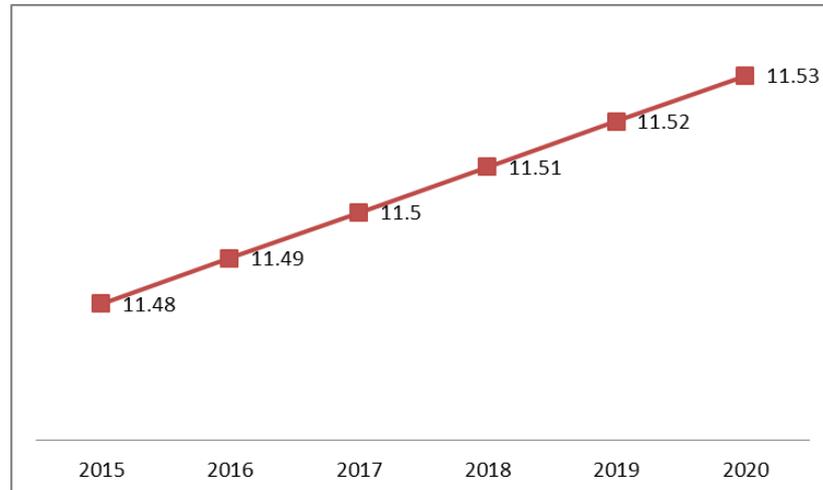
Pada Tahun 2020 pelaksanaan ujian untuk jenjang SD dan SMP ditiadakan disebabkan masih dalam masa pandemic Covid 19. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease*.



Indikator ke 2 (dua) dari sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan” adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS dihitung untuk usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar yang dimulai dari usia 7 (tujuh) tahun.

Angka realisasi HLS diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Angka HLS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebesar 11,53 meningkat 0,01 point dari Tahun 2019 yaitu 11,52. Capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 13.05. Perkembangan Angka HLS Kabupaten Bangka Barat selama 6(enam) tahun terakhir konsisten terus mengalami peningkatan 0,01 poin setiap tahunnya dan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



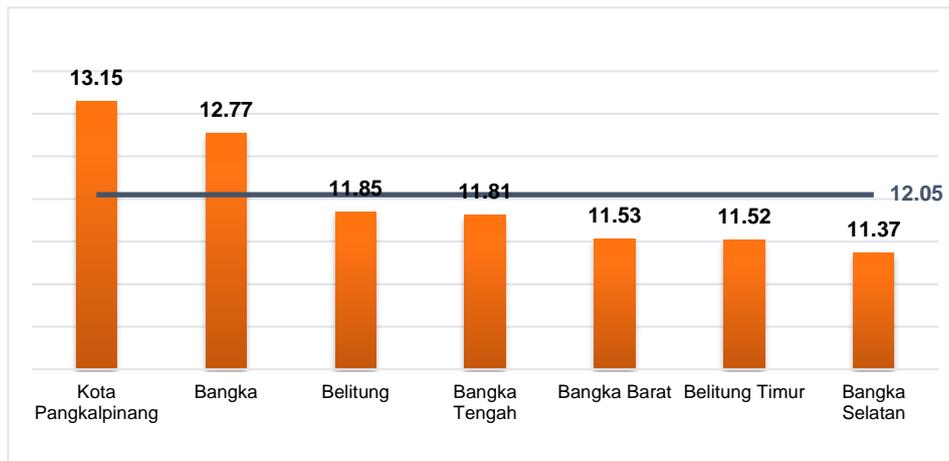
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2020

Gambar 3.38
Angka HLS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi ke-5 setelah Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung. Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata capaian



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 12,05 tahun. Grafik lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 3.39
Angka HLS Kabupaten/Kotase Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

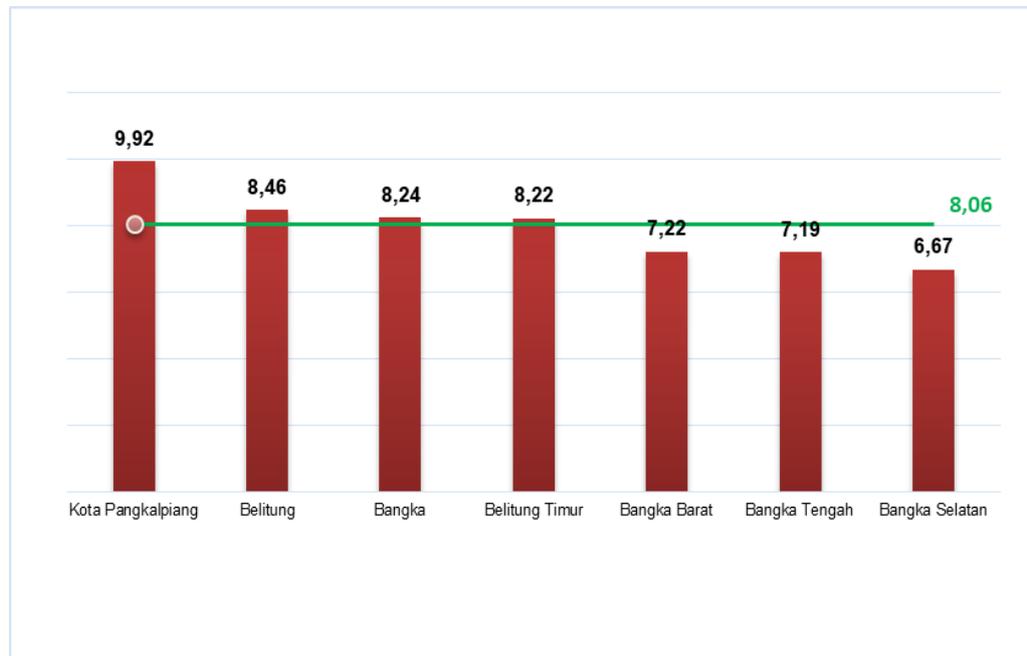
Indikator ke 3 (tiga) yang digunakan untuk mengukur kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan” adalah Angka RLS yang didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Lamanya sekolah merupakan angka lamanya sekolah dari masuk SD sampai kelas terakhir. Rata-rata lama sekolah tidak mempertimbangkan putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, tidak naik kelas dan masuk sekolah dasar diusia terlalu muda maupun terlambat.

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 adalah 7,22 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut rata-rata penduduk Bangka Barat yang usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan formal selama 7,22 tahun. Angka RLS ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 7,21 tahun dan namun untuk mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 7,41 di tahun 2020 belum tercapai.

Sementara jika dibandingkan dengan Angka RLS dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Tahun 2020 Kabupaten Bangka Barat berada pada urutan ke 5 (lima) setelah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Belitung Timur. Capaian RLS Kabupaten



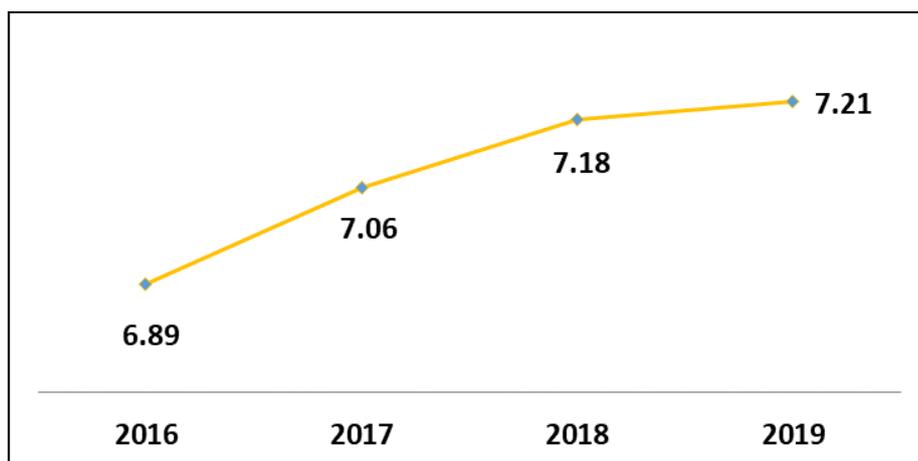
Bangka Barat sebesar 7,22 masih berada dibawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencapai 8,06.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 3.40
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Berdasarkan data 4 (empat) tahun terakhir realisasi Angka RLS terus meningkat, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan rata-rata hanya sebesar 0,11 poin.

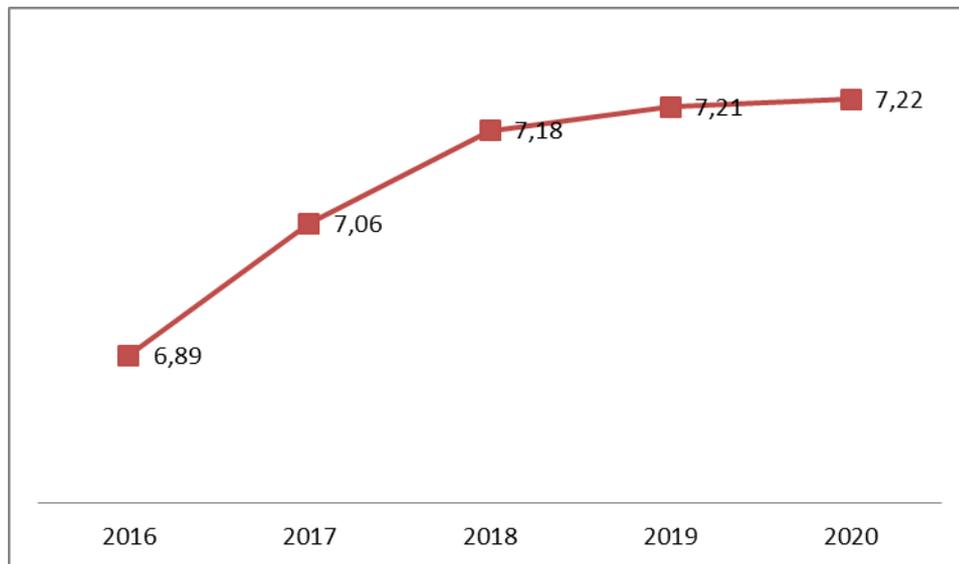


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 3.41
Rata- Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016–2019



Sedangkan pada tahun 2020, realisasi Angka RLS hanya meningkat sebesar 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Jika dihitung rata-rata dengan data lima tahun terakhir, maka Angka RLS hanya meningkat pada kirasan 0,08 poin.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 3.42
Rata- Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016–2020

Lambatnya peningkatan angka RLS juga dipengaruhi oleh penduduk yang melanjutkan pendidikan diluar wilayah Kabupaten Bangka Barat, karena Angka RLS tidak memperhitungkan penduduk yang melanjutkan pendidikan di luar Kabupaten Bangka Barat. Penduduk melanjutkan pendidikan diluar wilayah Kabupaten Bangka Barat dikarenakan belum terpenuhinyadaya tampung sekolah lanjutan yang tersedia di Kabupaten Bangka Barat.

Angka RLS sangat ditentukan oleh lamanya pendidikan yang ditempuholeh penduduk, sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Angka RLS adalah sebagai berikut:

1. Menambah jumlah sekolah dan ruang kelas;
2. Pelaksanaan program pendidikan keluarga;
3. Pelaksanaan program paguyuban sekolah;
4. Menekan angka putus sekolah (mengurangi beban pengeluaran orang tua murid terhadap biaya pendidikan antara lain melalui dana BOS pemerintah kabupaten,



bantuan untuk siswa miskin seperti perlengkapan sekolah, penyediaan anggaran untuk guru honor yang lebih memadai, pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi);

5. Menyelenggarakan kegiatan *parenting*;
6. Meningkatkan angka melanjutkan sekolah (meningkatkan peran komite sekolah dan alumni untuk mensosialisasikan pentingnya sekolah).

Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2020 dengan target akhir RPJMD ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.105
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Peringkat Ujian Nasional se-Provinsi - SD sederajat	Peringkat	n/a	1	n/a	-
- SMP sederajat		n/a	1	n/a	-
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,53	13,35	86,37	Optimis Tercapai
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten	Tahun	7,22	8,26	87,41	Optimis Tercapai

Berdasarkan tabel tersebut capaian peringkat UN SD dan SMP sederajat pada Tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD masih sangat jauh *gap* antara realisasi dan target yang harus dikejar. Namun tentu hal tersebut terjadi diakibatkan karena ditiadakannya UN SD dan SMP sesuai dengan keputusan Kementerian Pendidikan.

Sedangkan untuk indikator Angka HLS berdasarkan realisasi sampai dengan Tahun 2020 dan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 tampak bahwa diperlukan peningkatan sebesar 1,82 poin lagi sampai Tahun 2021. Melihat capaian selama 5 tahun terakhir dimana peningkatan setiap tahunnya hanya mencapai 0,01 poin, indikator ini sepertinya tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan di akhir RPJMD yaitu sebesar 13,35.

Adapun untuk indikator Angka RLS jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD masih diperlukan 1,04 poin untuk mencapai target. Sama halnya dengan HLS,



dengan rata-rata peningkatan capaian 0,11 poin setiap tahunnya dari 2016 - 2019, namun jika dihitung dengan rata-rata per lima tahun terakhir (sampai tahun 2020) maka peningkatan capaian hanya sebesar 0,08 poin dan Angka RLS yang ditargetkan sebesar 8,26 tahun di akhir masa RPJMD sepertinya sulit untuk dicapai.

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas terhadap 3 (tiga) indikator tersebut, masih diperlukan upaya yang cukup besar untuk mencapai target akhir masa RPJMD.

Program pembangunan yang berpengaruh terhadap pencapaian indikator Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pendidikan" Tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan;
2. Program Pendidikan Non Formal;
3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Wajib Belajar 9 Tahun;
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Sasaran strategis 19 "**Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan**",

Sasaran "Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan" diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Peningkatan AHH mengindikasikan semakin membaiknya kondisi sosial, ekonomi penduduk, kesehatan serta lingkungannya.

AHH dihitung berdasarkan data kematian ditahun tertentu dengan menjumlahkan keseluruhan umur dari penduduk yang meninggal dibagi jumlah seluruh penduduk yang meninggal. AHH sangat dipengaruhi oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika jumlah kasus kematian bayi banyak, maka secara otomatis AHH akan rendah.

AHH dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta derajat kesehatan penduduknya. AHH yang rendah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori serta program penanggulangan kemiskinan.

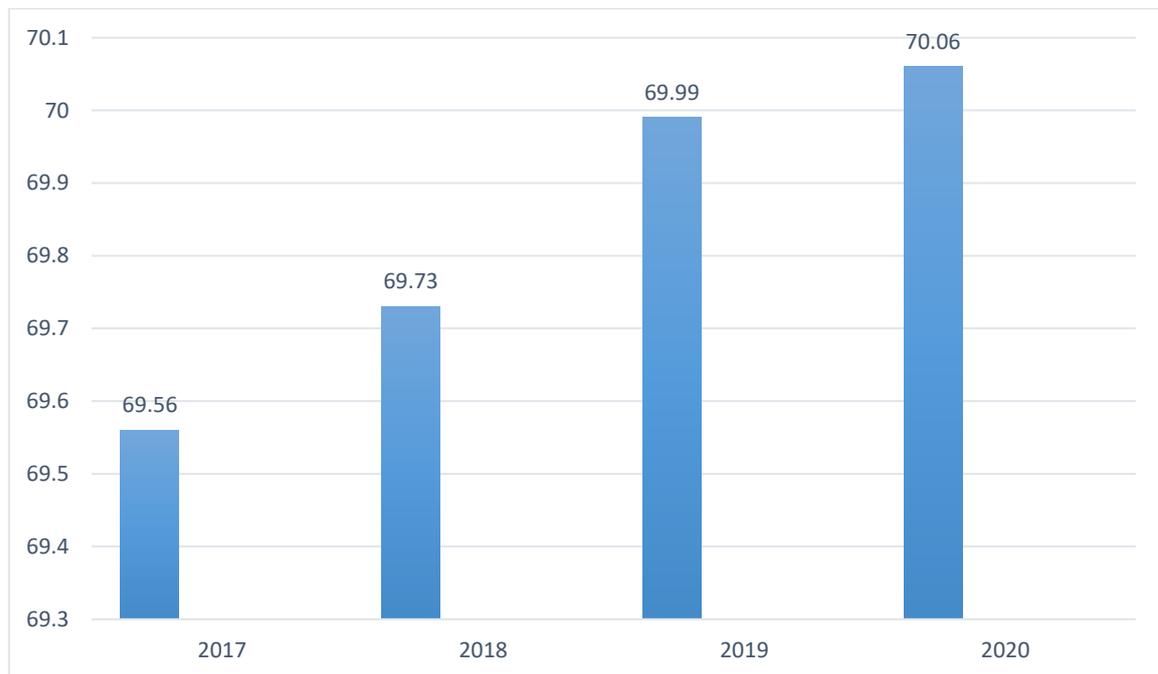


Secara lengkap uraian capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat” adalah sebagai berikut :

Tabel 3.106
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,99	69,59	70,06	100,68	Baik Sekali

Pada Tahun 2020 AHH Kabupaten Bangka Barat sebesar 70,06 tahun lebih besar dari capaian Tahun 2019 yaitu sebesar 69,99. Dilihat dari capaian AHH selama 4 (empat) tahun terakhir, AHH Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan dari Tahun 2017 hingga Tahun 2020. Realisasi AHH Kabupaten Bangka Barat 4 (empat) tahun terakhir ditampilkan pada gambar berikut:



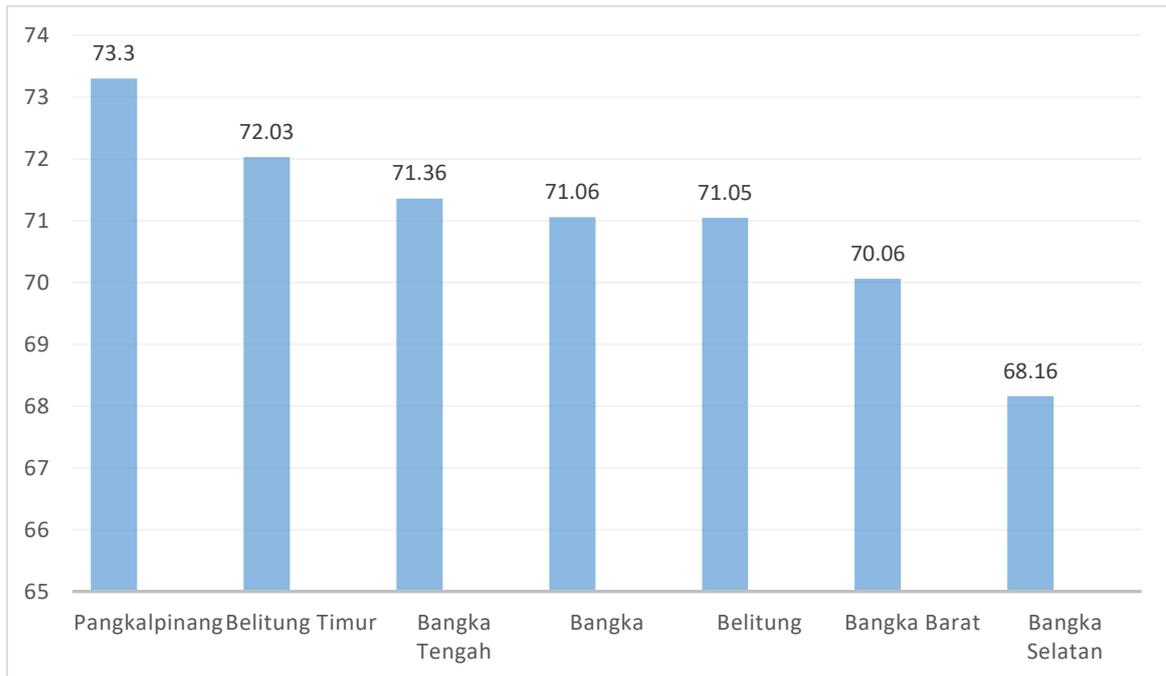
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

Gambar 3.43
Perkembangan Angka Harapan Hidup
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020



AHH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, jika dibandingkan dengan AHH kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 berada pada posisi ke 6 dari 7 kabupaten/kota. Capaian ini masih dibawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 70,64 dan dibawah capaian Nasional yang mencapai 71,47.

AHH kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ditampilkan pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

Gambar 3.44
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota
se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Dari hasil evaluasi pencapaian indikator sasaran “Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan” Tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 100,09 persen dari target yang ditetapkan dengan status capaian “Tercapai” secara lengkap ditampilkan pada tabel berikut:



Tabel 3.107
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan
Kualitas Layanan Kesehatan Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,06	69,99	100,10	Tercapai

Walaupun target akhir RPJMD telah tercapai, namun upaya berkelanjutan untuk terus meningkatkan AHH perlu dilakukan agar meningkatkan derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Bangka Barat.

Upaya yang dilakukan berupa tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang sehat dengan melaksanakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Upaya preventif (pencegahan) menysasar kelompok masyarakat yang memiliki resiko tinggi terhadap penyakit. Upaya ini dapat dilakukan melalui :

- Pemeriksaan kesehatan secara berkala (balita, bumil, remaja, usila) melalui posyandu, puskesmas, maupun kunjungan rumah;
- Pemberian Vitamin A, Yodium melalui posyandu, puskesmas, maupun dirumah;
- Pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas dan menyusui;
- Deteksi dini kasus dan faktor resiko (maternal, balita, penyakit);
- Imunisasi terhadap bayi dan anak balita serta ibu hamil.

Upaya kuratif (penyembuhan) menysasar kelompok masyarakat yang sakit, upaya ini dilakukan melalui :

- Dukungan penyembuhan, perawatan, contohnya : dukungan psikis penderita TB;
- Perawatan orang sakit sebagai tindak lanjut perawatan dari puskesmas dan rumah sakit;
- Perawatan ibu hamil dengan kondisi patologis dirumah, ibu bersalin dan nifas;
- Perawatan payudara;
- Perawatan tali pusat bayi baru lahir;
- Pemberian obat : Fe, Vitamin A, oralit.

Upaya rehabilitatif merupakan upaya pemulihan kesehatan bagi penderita penyakit. Upaya ini dapat dilakukan melalui latihan fisik bagi yang mengalami gangguan fisik



seperti, patah tulang, kelainan bawaan dan latihan fisik tertentu bagi penderita penyakit tertentu misalnya, TBC (latihan nafas dan batuk), Stroke (fisioterapi).

Walaupun capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan” pada Tahun 2020 telah tercapai, namun ada beberapa permasalahan yang cukup menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yaitu angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Bangka Barat yaitu 12,38 persen berdasarkan data dari aplikasi *e-PPGBM*. Angka prevalensi *stunting* tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Simpang Teritip sebesar 27,38 persen, dimana menurut standar WHO, batas maksimal prevalensi *stunting* adalah 20 persen dari jumlah balita. Selain permasalahan *stunting*, permasalahan status Poskesdes sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 yang tidak lagi menjadi bagian dari jaringan puskesmas yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berdampak pada sulitnya koordinasi.

Pada akhir tahun 2019, munculnya penyakit *covid-19* dan telah diumumkan oleh Badan Kesehatan Dunia sebagai KKMMMD (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia). Adanya penyakit ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap bidang kesehatan. Jumlah kasus *covid-19* pada akhir desember 2020 di Kabupaten Bangka Barat terkonfirmasi 127 orang, sembuh 97 orang dan meninggal 1 orang. Pada tahun 2021, kasus *covid-19* terus mengalami peningkatan dengan data per 31 Januari 2021, kasus terkonfirmasi 235 orang, sembuh 196 orang dan meninggal 4 orang. Kondisi ini akan berpengaruh signifikan terhadap capaian sasaran “Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan” pada akhir masa RPJMD.

Selain itu, secara umum upaya-upaya untuk tetap menjaga bahkan meningkatkan kinerja sasaran “Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan” adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM dan fasilitas pelayanan kesehatan sampai ke dusun yang jauh dari pusat desa;
2. Peningkatan status akreditasi Puskesmas, pemenuhan standar SDM, sarana, dan prasarana di puskesmas dan jaringannya;
3. Peningkatan status akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah;
4. Pemenuhan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
5. Mengubah perilaku masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);



6. Memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu, serta melakukan sosialisasi untuk menuju *Universal Health Coverage (UHC)*;
7. Peningkatan kesehatan lingkungan melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
8. Melakukan konvergensi lintas sektor dan lintas program terhadap permasalahan kesehatan seperti permasalahan tingginya kasus *stunting*;
9. Optimalisasi penggunaan Anggaran Dana Desa untuk menunjang sektor kesehatan di tingkat desa.

Program pembangunan yang berpengaruh mendukung pencapaian indikator AHH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
6. Program Sumber Daya Kesehatan;
7. Program Kesehatan komunitas dan kesehatan kerja;
8. Program Pengawasan dan Pengendalian Obat dan Kesehatan Makanan;
9. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan;
10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
11. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/RSJiwa/RS Paru/RS Mata;
12. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD;
13. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
14. Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat.

Sasaran strategis 20 **"Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak"**

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran "Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak" adalah persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun capaian indikator kinerja sasaran di Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.108
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan
Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	31,58	88,23	63,16	128,42	Baik Sekali

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Barat, pada Tahun 2020 dilaporkan dan ditangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 24 kasus atau 63,16 persen. Capaian indikator ini sebesar 128,42 persen dengan Status Capaian “Baik Sekali”.

Capaian Tahun 2020 sebanyak 24 kasus telah melampaui target tahunan dalam RPJMD yaitu 34 kasus. Namun, jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2019, capaian Tahun 2020 mengalami penurunan kinerja, dimana pada Tahun 2019 jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani sebanyak 12 kasus atau 31,58 persen.

Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada Tahun 2020 sebanyak 24 kasus dengan rincian jumlah kasus di setiap kecamatan adalah sebagai berikut:

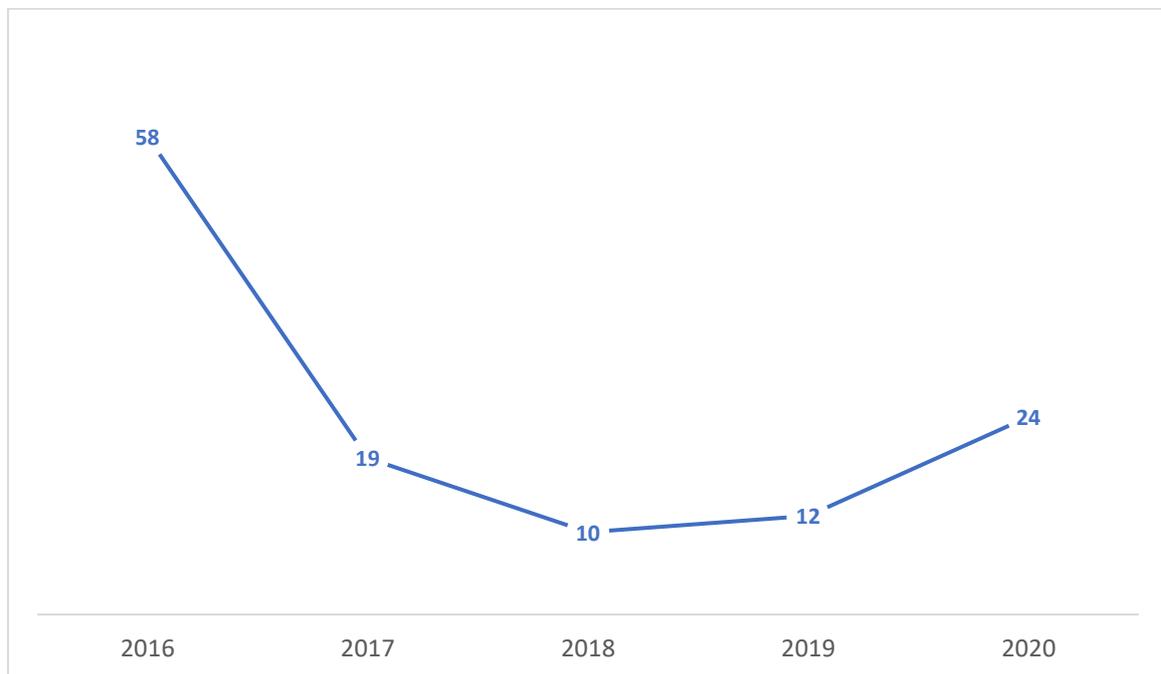
1. Kecamatan Muntok : 10 kasus
2. Kecamatan Simpangteritip : 1 kasus
3. Kecamatan Jebus : 2 kasus
4. Kecamatan Parittiga : 5 kasus
5. Kecamatan Kelapa : 3 kasus
6. Kecamatan Tempilang : 3 kasus

Pencapaian sasaran strategis ini bergantung pada peran pemerintah daerah dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi dalam kegiatan sosialisasi pencegahan/perlindungan anak dan remaja dari kekerasan.

Dalam penanganan kasus yang dilaporkan akan ditindaklanjuti dan ditangani oleh masing-masing unit pelayanan terkait yaitu RSUD Sejiran Setason, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan Kejaksaan di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Jumlah



kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 di tampilkan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Dinas Dalduk, KB, dan Perlindungan Anak, 2020 (diolah)

Gambar 3.45
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Selain 24 kasus kekerasan yang dilaporkan dan ditangani di Tahun 2020 tersebut, masih terdapat permasalahan di masyarakat yang menyulitkan pihak terkait dalam memberikan bantuan penanganan sebagai upaya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak yaitu masyarakat yang masih belum terbuka dalam melaporkan kasus yang dialami karena faktor pola pikir dan budaya. Permasalahan lainnya yaitu Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Barat telah disahkan pada tahun 2020, akan tetapi untuk pengisian personilnya dimulai dari Kepala UPT, Pelaksana hingga Pejabat Fungsionalnya belum ditunjuk. Sehingga UPT PPA belum dapat beroperasi dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan perlindungan ada di wilayah Bangka Barat. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan di tahun 2020 ditekankan pada tindakan pencegahan berupa edukasi dan promosi.



Tabel 3.109
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	63,16 % (24 kasus)	84.85 % (33 kasus)	125,57	Tercapai

Dari tabel di atas diketahui bahwa target akhir RPJMD terkait capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak” terhadap target akhir RPJMD sebesar 125,57 persen dengan Status Capaian “Tercapai”.

Program pembangunan yang berpengaruh dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak” Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
2. Program Pemenuhan hak anak

Sasaran Strategis 21 adalah **”Meningkatnya Minat dan Wadah Pengembangan Olahraga”**

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran “Meningkatnya Minat dan Wadah Pengembangan Olahraga” adalah prestasi olahraga pendidikan di tingkat provinsi dan peringkat olahraga prestasi di tingkat provinsi. Prestasi olahraga pendidikan dilihat dari peringkat pada lomba Kejuaraan Daerah (Kejurda) dan Pekan Olahraga Pelajar (Popda) sedangkan peringkat olahraga prestasi dilihat dari peringkat pada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Popda dan Kejurda dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali, sedangkan Porprov dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali. Di Tahun 2020 kejuaraan yang dilaksanakan adalah Popda, sehingga pengukuran indikator kinerja menggunakan peringkat pada ke 3(tiga) kejuaraan tersebut. Porprov tidak diselenggarakan pada Tahun 2020, sehingga tidak ada pengukuran capaian indikator Peringkat Olahraga Prestasi di Tingkat Provinsi di



Tahun 2020. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.110
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Minat
dan Wadah Pengembangan Olahraga Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASIT AHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASIT AHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Prestasi olahraga pendidikan di tingkat provinsi	Peringkat	6 (Kejurda)	3 (Popda)	3 (Popda)	100	Baik

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Kabupaten Bangka Barat telah mencapai target prestasi olahraga pendidikan di tingkat Provinsi di Tahun 2020 yaitu peringkat ke 3 (tiga) dalam Popda dengan status capaian “Baik”.

Rendahnya prestasi olahraga pendidikan di Kabupaten Bangka Barat disebabkan oleh sangat minimnya sarana dan prasarana olahraga, kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi para atlet baik pembinaan rutin maupun ketika persiapan menghadapi perlombaan, serta pendanaan yang belum memadai.

Alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas:

1. Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
2. Membentuk Pembinaan Pelatihan Pelajar Daerah (PPLPD) yaitu memilih pelajar yang berprestasi dalam olahraga dipusatkan di ibu kota kabupaten sehingga dapat fokus dalam pembinaan/pelatihan olahraga guna meningkatkan prestasi olahraga pelajar;
3. Mengoptimalkan waktu untuk pemusatan latihan (*training centre*) sebelum pertandingan;
4. Memunculkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pembinaan keolahragaan;
5. Mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif selain APBD.

Perolehan medali dan peringkat pada Pekan Olahraga Daerah ditampilkan pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.111
Perolehan Medali dan Peringkat Pekan Olahraga Daerah (POPDA)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

KABUPATEN/KOTA	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL MEDALI	PERINGKAT
Pangkalpinang	6	10	8	24	1
Bangka	5	6	4	15	2
Bangka Barat	5	2	5	12	3
Bangka Selatan	4	3	7	14	4
Bangka Tengah	4	1	8	13	5
Belitung	2	4	7	13	6
Belitung Timur	-	-	-	-	Tidak ikut
Total	21	26	39	91	

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2020

Dari ke tabel diatas terlihat bahwa Kabupaten Bangka Barat selain merupakan peringkat ke-tiga pada POPDA, perolehan total medalnya juga berjumlah 12 (dua belas) diantaranya : 5 (lima) medali emas, 2 (dua) medali perak dan 5 (lima) medali perunggu. Peringkat lomba Porprov, Popda, dan Kejurda dari Tahun 2014 - 2019 ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.112
Peringkat Lomba Porprov, Popda, dan Kejurda
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2020

Kabupaten/Kota	Peringkat							
	Porprov 2014	Kejurda 2015	Popda 2016	Kejurda 2017	Popda 2018	Porprov 2018	Kejurda 2019	Popda 2020
Bangka	4	5	4	5	3	1	4	2
Pangkalpinang	1	4	3	3	1	2	1	1
Bangka Tengah	7	2	2	4	6	3	5	4
Belitung	3	1	5	1	4	4	3	6
Belitung Timur	2	3	6	2	5	5	2	0
Bangka Selatan	5	7	1	7	2	6	7	5
Bangka Barat	6	6	7	6	7	7	6	3

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2020



Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari ke 3 (tiga) kejuaraan tersebut, Kabupaten Bangka Barat selalu masuk dalam peringkat 6 (enam) atau 7 (tujuh), yang menunjukkan bahwa olahraga pelajar maupun olahraga prestasi di Kabupaten Bangka Barat belum dapat bersaing dengan 6 (enam) Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun berbeda dengan Tahun 2020, dalam Pekan Olahraga Daerah Bangka Barat mendapatkan Peringkat 3 (tiga) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Faktor pendukung yang signifikan terlihat pencapaian Tahun 2020 adalah Pembinaan dari KONI kepada atlet di Kabupaten Bangka Barat.

Dari hasil evaluasi pencapaian indikator sasaran “Meningkatnya Meningkatkan Minat dan Wadah Pengembangan Olahraga” Tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan Status Capaian “Perlu upaya lebih” secara lengkap ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.113
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Minat dan Wadah Pengembangan Olahraga Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Prestasi olahraga pendidikan di tingkat provinsi	Peringkat	Popda 3	Kejurda 3	n/a	-

Sasaran meningkatnya minat dan wadah pengembangan olahraga dicapai melalui pelaksanaan program-program berikut:

1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
3. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;
4. Program Penyelenggaraan Olahraga Daerah;
5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

Melalui Program - program tersebut dilakukan berbagai upaya di daerah yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Bangka Barat.

Selain program-program tersebut diatas, sebagai upaya meningkatkan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga untuk mencapai prestasi olahraga secara maksimal diupayakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Barat dengan pembinaan kepada atlet yang optimal.



Sasaran strategis 22 adalah **”Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berbudaya/Berwawasan Lingkungan”**

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ke-22 terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Persentase desa/kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/kelurahan, Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas (*Civil Society Organization/CSO*) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif, dan persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara baik. Capaian indikator kinerja sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berbudaya/Berwawasan Lingkungan sebagai berikut:

Tabel 3.114

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berbudaya/Berwawasan Lingkungan Tahun 2020

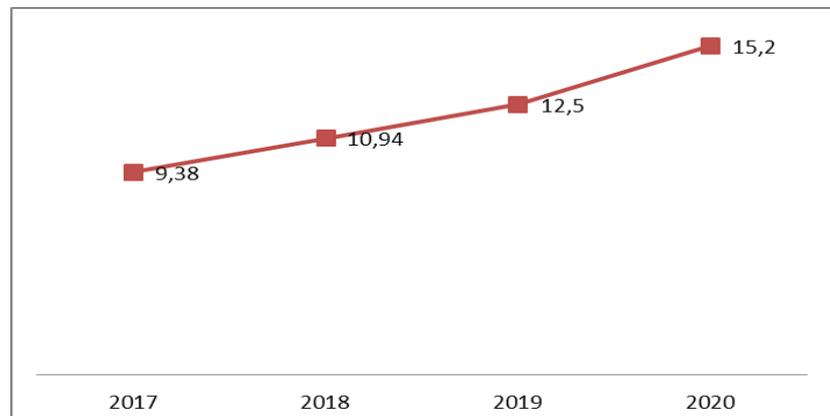
INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASITAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
1. Persentase desa/kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/ kelurahan	%	12,5	8,00	15,2	190	Baik Sekali
2. Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas (<i>Civil Society Organization/CSO</i>) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif	Unit	10	11	11	100	Baik
3. Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara baik	%	28,04	60	23,42	39,03	Kurang

Rata-rata capaian atas 3 (tiga) indikator kinerja sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berbudaya/Berwawasan Lingkungan di Tahun 2020 adalah sebesar 109,68 persen atau dengan kategori “Baik Sekali”.



Pada Tahun 2020 indikator Persentase desa/kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/kelurahan ditargetkan 5(lima) desa atau 8 persen dan dapat terealisasi 10 (sepuluh) desa/kelurahan atau sebesar 15,2 persen dengan capaian 190 persen.

Desa/kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/kelurahan adalah desa yang memiliki budaya lingkungan hidup seperti mereduksi sampah, sistem penanganan sampah swadaya, melakukan penataan tanaman di RTH (jalan dan taman) dan pekarangan rumah, pengaturan buangan limbah rumah tangga dilakukan secara sistem, kelembagaan di desa/kelurahan, maupun dibangun oleh komunitas. Desa/Kelurahan yang memiliki budaya lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 yaitu di Kecamatan Muntok terdiri dari Desa Air Limau, Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Sungai Daeng, Kelurahan Keranggan dan Kelurahan Menjelang. Kecamatan Tempilang di Desa Tempilang, Kecamatan Simpangteritip di Desa Pelangas. Kecamatan Parittiga di Desa Kelabat dan Desa Bakit. Masing-masing desa/kelurahan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup seperti meletakkan tempat sampah disekitar desa/kelurahan, mengambil sampah, kemudian diolah menjadi pupuk kompos maupun organik.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Gambar 3.46
Persentase Desa/ Kelurahan yang Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat Desa/Kelurahan Tahun 2017 - 2020

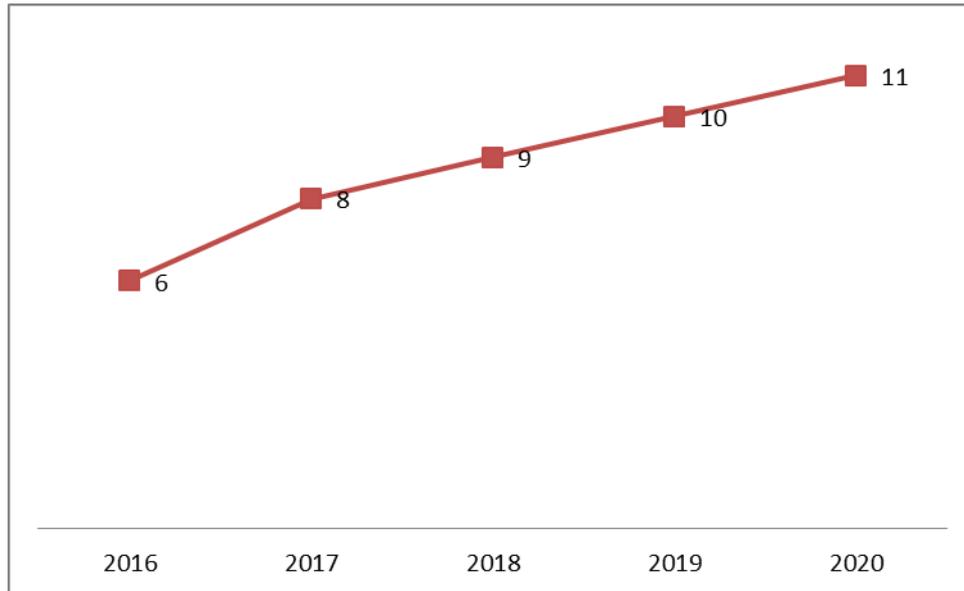
Pada Tahun 2020 Indikator Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas (Civil Society Organization/CSO) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif tercapai sebesar 100persen, dengan target 11 (sebelas) dapat terealisasi 11



(sebelas) LSM dan CSO yang bergerak dibidang lingkungan hidup meningkat dari tahun sebelumnya dengan realisasi 10LSM/CSO.

LSM dan CSO yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif pada Tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat adalah :

1. Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) Jl. Jendral Sudirman Pal 2 No. 2a (Depan Toko Siong Bun) Muntok;
2. LSM Wahana Cinta Lingkungan (WCL) Jl. Balai No. 170 Kp. Tegalorejo Muntok;
3. Bank Sampah Wahana Laskar Hijau (WALAH) yang berada di kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok;
4. Laskar Bangka Barat adalah forum nelayan yang tidak secara langsung bergerak di bidang lingkungan hidup, namun banyak mengangkat isu lingkungan;
5. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Gelud yang berlokasi di Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang. KSM Gelud telah mengelola sampah khususnya sampah organik untuk dijadikan kompos;
6. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Muara Jepu yang berlokasi di Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip. KSM Muara Jepu telah mengelola sampah khususnya sampah organik untuk dijadikan kompos serta memilah sampah plastik untuk di daur ulang;
7. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lah Nyata yang berlokasi di Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga. KSM Lah Nyata yang telah mengelola sampah khususnya sampah organik untuk dijadikan kompos;
8. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bakit Berseri yang berlokasi di Desa Bakit, Kecamatan Parittiga. KSM Bakit Berseri telah mengelola sampah khususnya sampah organik untuk dijadikan kompos;
9. KSM Laskar Hijau yang berlokasi di JL. Rajawali RT 3 RW 3 Nomor 1C Pal II Muntok Kelurahan Sungai Daeng. Launching pengambilan sampah tanggal 10 januari 2018. konsep yang dilakukan/ditawarkan oleh Laskar Hijau yaitu dimulai dari pendaftaran warga sebagai pengendali sampah melalui RT setempat lalu selanjutnya sampah yang telah dipilah warga akan diambil oleh petugas laskar hijau. setelah diambil kemudian sampah diolah secara fisik dan biologis (komposting) dan sisa sampah yang tak terpakai di buang ke TPA;
10. KSM Sepakat yang berlokasi di Desa Air Limau, Kecamatan Muntok yang mengelola Bank Sampah.KSM Perigi Batu yang di Kampung Senang Hati , Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Gambar 3.47
Jumlah Organisasi Masyarakat Sipil (LSM), Komunitas
(Civil Society Organization/CSO) yang Bergerak di Bidang Lingkungan Hidup
Secara Aktif Tahun 2016 - 2020

Indikator persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara baik, yaitu dari target sebesar 60 persen hanya dapat dicapaisebanyak 23,42 persen perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara baik.

Pada Tahun 2020, terdapat 111 perusahaan/industri/usaha yang diawasi dokumen pelaporannya berdasarkan jenis perusahaan dan dokumennya. Dari 111 perusahaan/industri/usaha tersebut, yang kemudian menjadi subyek pengawasan di Tahun 2020 sebanyak 56 perusahaan/industri/usahadengan hasil sebanyak 26 perusahaan/industri/usaha telah taat dan menyusun laporan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Berikut daftar perusahaan/industri/masyarakat yang taat dalam menyampikan laporan RKL-RPL:



Tabel 3.115
Perusahaan/industri/masyarakat yang taat dalam menyampaikan
laporan RKL-RPL Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020
Berdasarkan Kalayakan Amdal

No.	No. Surat Keputusan	Tentang / Perusahaan	Ketaatan Menyampaikan Laporan RKL-RPL
1.	188.45/90.A/IV.05/2007	Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Galian Bauksit PT. Kelabat Surya Kencana di Kec. Jebus Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
2.	188.45/51.A/IV.05/2007	Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pabrik Peleburan Bijih Timah (SMELTER) PT. Timah Nusantara di Jln Tempilang Raya Km.1 Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
3.	188.45/178.A/1.08.02/2008	Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pengoperasian Pabrik Bijih Timah (SMELTER) Kapasitas 8 Ton Perhari PT. Tinindo Internusadi Desa Sekar Biru Kec. Jebus Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
4.	188.45/182.A/1.08.02/2008	Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pengoperasian Pabrik Bijih Timah (SMELTER) Kapasitas 8 Ton Perhari CV. Sari Bumi Sejatidi Kp. Air Samak Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
5.	188.45/175.A/1.08.02/2008	Kelayakan Lingkungan Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Timah Lepas Pantai (OFFSHORE) PT. Sukses Indo Resources di Laut Kampak Sungai Buluh Kec. Jebus Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
6.	188.44/381/BLHD/2009	PT. Timah Unit Metalurgi di Kec. Muntok Kab. Bangka Barat	Taat
7.		PT. Timah Unit Tambang Darat Jebus di Kab. Bangka Barat	Taat
8.	188.45/324/1.08.02/2009	Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Mineral Timah Laut CV.	Tidak Taat



No.	No. Surat Keputusan	Tentang / Perusahaan	Ketaatan Menyampaikan Laporan RKL-RPL
		Bahari Utama di Laut Tanah Merah dan Laut Menjelang Kec. Muntok Kab. Bangka Barat	
9.	188.45/325/1.08.02/2009	Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Mineral Timah Laut PT. Sinar Mutiara Sejahtera di Laut Penganak dan Jebu Kec. Jebus Kab. Bangka Barat	Taat
10.	188.45/49.B/1.08.02/2014	Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Timah di Desa Ketap, Kec. Paritiga, Kab. Bangka Barat seluas ± 25 Hektar Oleh PT. PRIMA TIMAH UTAMA	Taat
11.	188.45/378/1.08.02/2014	Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Timah Lepas Pantai yang berlokasi di Laut Rambat seluas 4.452 Ha Oleh PT. Sentra Tin Indo di Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
12.	188.45/246/1.08.02/2015	Kegiatan Pertambangan Timah yang berlokasi di desa tugang kec. Kelapa, Desa Ibul Kec. Simpang Teritip, Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip seluas ± 1.200 Ha oleh PT. Nusantara Arta Mining di Kab. Bangka Barat	Taat
13.	188.45/247/1.08.02/2015	Kegiatan Pertambangan Timah yang berlokasi di desa tugang kec. Kelapa, Desa Ibul Kec. Simpang Teritip, Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip seluas ± 1.200 Ha oleh PT. Nusantara Arta Mining di Kab. Bangka Barat	Taat
14.	188.45/522/1.08.02/2016	Kegiatan Pembangunan PLTD Jebus, di Desa Ranggi Asam, Kec. Jebus, Kab. Bangka barat, Luas Lahan 6.351 M ² , Kapasitas 12.000KW oleh PT. PLN (PERSERO) Wilayah Bangka Belitung Sektor Pembangkitan	Tidak Taat
15.	188.45/522/1.08.02/2016	Addendum AMDAL Kegiatan Perkebunan dan	



No.	No. Surat Keputusan	Tentang / Perusahaan	Ketaatan Menyampaikan Laporan RKL-RPL
		Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Desa Air Belo, Kec. Muntok, Desa Mayang dan Desa Air Limau Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat Seluas ± 12.000 Ha oleh PT. GUNUNG SAWIT BINA LESTARI	Taat
	188.45/548.A/1.08.02/2016	Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, di Desa Air Belo, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat Seluas ± 12.000 Ha oleh PT. GUNUNG SAWIT BINA LESTARI (PERUBAHAN)	
16.	188.45/54.B/2.12.1.1/2019	Kegiatan Pembangunan Sport Centre di Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Bangka Barat	Taat

Tabel 3.116
Perusahaan/industri/masyarakat yang taat dalam menyampaikan laporan RKL-RPL Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020
Berdasarkan Kelayakan Lingkungan (UKL – UPL)

No	No. Surat Keputusan	Tentang	
1.	188.4/002/III/2006	Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Agen Pengisian dan Penyaluran Elpiji (APPEL) PT. Binamulya Jaya Abadi di Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
2.	188.4/011/IV.05/2006	Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) Pal. III Dusun Daya Baru Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
3.	188.4/009/IV.05/2006	Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya	Tidak Taat



No	No. Surat Keputusan	Tentang	
		Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pengangkutan dan Penyimpanan Sementara) Oli Bekas dan Residu Oleh CV. Jaya Makmur Sentosa di Kab. Bangka Barat	
4.	188.4/131/IV.05/2006	Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Pembangunan PLTU Tenaga Biomassa 2 x 6 MW Oleh PT. Listrindo Kencana di Kab. Bangka Barat	Taat
5.	188.4/034/IV.05/2006	Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) DAN Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) oleh Sdr. Welly Chandra di Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
6.	188.4/044/IV.05/2006	Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) DAN Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Pembangunan Pabrik Peleburan Bijih Timah (SMELTER) PT. Timah Nusantara di Kab. Bangka Barat	Taat
7.	188.4/084/IV.05/2006	Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) DAN Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Pengoperasian Pabrik Bijih Timah (SMELTER) Kapasitas 8 ton Perhari Oleh CV. Sari Bumi Sejati di Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
8.	188.4/085/IV.05/2006	Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan	



No	No. Surat Keputusan	Tentang	
		(UKL) DAN Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Pengoperasian Pabrik Bijih Timah (SMELTER) Kapasitas 8 ton Perhari Oleh PT. Tinindo Internusa di Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
9.	188.4/139/IV.05/2006	Pemberian Izin Gangguan (Hinder Ordinantie) Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN 29.004.09) di Kp. Tanjung Rw.14 Kec. Muntok Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
10.	188.4/186/IV.05/2007	Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.333.125 di kec. Kelapa Kab. Bangka barat	Taat
11.	188.4/800/253/2007	Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Pembangunan PLTU oleh PT. Sawindo Kencana di Kec. Tempilang Kab. Bangka barat	Taat
12.	188.4/03/IV.05/2007	Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Pembangunan Kernel Crushing Plant Kapasitas 300 Ton Perhari di Kec. Tempilang Oleh PT. Kencana Agro Jaya di Kab. Bangka barat	Tidak Taat
13.	188.4/01/1.08.02/2008	Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Asphalt Mixing Plant dan Fasilitas Penunjang Oleh PT.	Tidak Taat



No	No. Surat Keputusan	Tentang	
		Argamakmur Mandiri di Desa Ibul Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat	
14.	1888.4/013/SK/1.08.02/2009	Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)24.333.76 Kec. Muntok Kab. Bangka Barat	Taat
15.	188.4/014/SK/1.08.02/2009	Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)24.333.78 Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat	Taat
16.	188.4/015/SK/1.08.02/2009	Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)24.333.85 Kec. Jebus Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
17.	188.4/031/SK/1.08.02/2009	Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)24.333.77 Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat	Taat
18.	188.4/036/SK/1.08.02/2009	Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mini (AMPS)Dusun Anyai Desa Kundi Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
19.	660/410/1.08.02/2010	Rekomendasi atas DPLH kegiatan Balai Pengobatan	



No	No. Surat Keputusan	Tentang	
		dan Rumah Bersalin (BP&RB) di Muntok (Poli luar) di Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
20.	660/411/1.08.02/2010	Rekomendasi atas DPLH kegiatan Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin (BP&RB) oleh Pusat Pelayanan Medik Bakti Timahdi Jebus Kab. Bangka Barat	Taat
21.	660/413/1.08.02/2010	Rekomendasi atas DPLH kegiatan Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin (BP&RB) di Muntok (Poli Dalam) di Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
22.	660/039/1.08.02/2011	Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL kegiatan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN 29.365.070) Sdr. Moh. Tanwin di Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
23.	660/290/1.08.02/2011	Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL kegiatan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) Oleh PT. Cahaya Bina Mulya di Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
24.	660/193/1.08.02/2011	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pertambangan Timah Rakyat Perorangan Oleh Saudara Suparto di Kec. Muntok Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
25.	660/390/1.08.02/2011	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pertambangan Pasir Kwarsa Oleh CV. Sanjaya di Desa Semulut Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
26.	660/401/1.08.02/2011	Rekomendasi atas DPLH kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Bahan Galian oleh CV. NN. Brothers di Desa Bakit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
27.	660/057/1.08.02/2012	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Penambangan Zikron Oleh PT. Bangka	Tidak Taat



No	No. Surat Keputusan	Tentang	
		Jawa Mining Mills di Kab. Bangka Barat	
28.	660/176/1.08.02/2012	Rekomendasi atas DPLH Kegiatan Pembangunan PLT Bio Gas Oleh PT. Magenko di Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
29.	660/217/1.08.02/2012	Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Penambangan Bahan Galian Batuan Granit oleh PT. Berkati Altec Sejahtera di Kab. Bangka Barat	Taat
30.	660/255/1.08.02/2012	Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Status Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin (BP & RB) Muntok (Poli Dalam) menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D Oleh Pusat Pelayanan Medik Bakti Timah di Kab. Bangka Barat	Taat
31.	660/277/1.08.02/2012	Rekomendasi perubahan kepemilikan SPBU atas Dokumen UKL-UPL kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU 24.333.77) di Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat	Taat
32.	660/284/1.08.02/2012	Rekomendasi perubahan kepemilikan SPBU atas Dokumen UKL-UPL kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU 24.333.97) di Simpang Ibul Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat	Taat
33.	660/290/1.08.02/2012	Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pertambangan kaolin Oleh PT. Putra Kusuma Abadi di Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
34.	188.45/49.B/1.08.02/2014	Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Timah di Desa Ketap, Kec. Paritiga, Kab. Bangka Barat seluas ± 25 Hektar Oleh PT. PRIMA	Taat



No	No. Surat Keputusan	Tentang	
		TIMAH UTAMA	
35.	188.45/121.A/1.08.02/2014	Kegiatan Peningkatan Status Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Muntok (Poli Dalam) Menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D di Jl. Raya Timah Pusmet Muntok, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat Oleh YAYASAN BAKTI TIMAH (PUSYANDIK MUNTOK-KAB. BANGKA BARAT)	Taat
36.	188.45/415/1.08.02/2014	Kegiatan Pembangunan Perumahan Griya Asri Madani di Jl. Batu Balai Kel. Tanjung Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat seluas ± 3 Hektar Oleh BUMD PERUSDA BANGKA BARAT SEJAHTERA	Tidak Taat
37.	188.45/673/1.08.02/2014	Kegiatan Pembangunan Kolong Retensi Menumbing, diKelurahan Tanjung, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat, Daya Tampung ≤ 500.000 M ³ , Tinggi Bendungan ≤ 15 M Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
38.	188.45/545/1.08.02/2014	Kegiatan Pembangunan HOTEL YASMIN di Jalan Pos RT 003 RW 006 Kel. Tanjung, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat, Luas Area Kegiatan Lt ± 643 M ² / Lb1.000.55M ² /28 Kamar	Taat
39.	188.45/300.A/1.08.02/2014	Kegiatan Operasional Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA AIR BELO) di Desa Air Belo, Kec. Muntok, KAB. Bangka Barat Seluas ± 4,2 Hektar Oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
40.	188.45/55/1.08.02/2015	Kegiatan Pabrik Tepung Tapioka di Desa Air Putih, Kec. Muntok Kab. Bangka Barat seluas ± 20 Ha dengan Kapasitas	Tidak Taat



No	No. Surat Keputusan	Tentang	
		Terpasang ≤ 1.560 Ton Singkong/ Bulan Oleh CV. MENUMBING JAYA PERKASA	
41.	188.45/362/1.08.02/2015	Kegiatan perkebunan kelapa sawit seluas ± 1.215,6 hektar di Desa Sinar Sari, Desa Mancung, Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa dan Desa Simpang Yul, Desa Penyampak, Desa Sangku, Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kab. Bangka Barat oleh PT. TATA HAMPARAN EKA PERSADA	Taat
42.	188.45/453.B/1.08.02/2015	Kegiatan pembangunan perumahan harmoni sinar manik kepada Saudara Hendri seluas ± 37.588M ² di Desa Sinar Manik Kec. Jebus Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
43.	188.45/677/1.08.02/2015	Kegiatan Pembangunan Terminal khusus (tuks/ terminal untuk kepentingan sendiri, dikawasan pantai batu berani, kel. Tanjung, kec. muntok sepanjang 150M, Lebar 15M, SELUAS 3, 712M ² Oleh CV. MAJU BERSAMA	Tidak Taat
44.	188.45/678/1.08.02/2015	Kegiatan pengambilan bahan galian bukan logam dan bebatuan (tanah Urug) di kelurahan tanjung, kec. muntok oleh CV. MAJU BERSAMA seluas 10,44 hektar	Tidak Taat
45.	188.45/554/1.08.02/2014	Kegiatan Rumah Sakit Umum Kelas D di Kecamatan Muntok Menjadi Rumah Sakit Bakti Timah Muntok Kelas D di Jl. Raya Timah Pusmet Muntok, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat Oleh PT. RUMAH SAKIT BAKTI TIMAH (PERUBAHAN)	Tidak Taat
46.	1.88.45/702/1.08.02/2015	Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran	Tidak Taat



No	No. Surat Keputusan	Tentang	
		Setason di Desa Belo Laut Kec. Muntok (DPLH)	
47.	188.45/707/1.08.02/2015	Kegiatan Operasional Pasadena Hotel Hall & Restaurant di Desa Belo Laut Kec. Muntok (DPLH)	Tidak Taat
48.	188.45/271/1.08.02/2016	Kegiatan Pembangunan Pabrik Tepung Tapioka oleh CV. SENJA UTAMA dengan lokasi Dusun I Peradong, Desa Peradong, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat, Luas Lahan 21.450 m ² dan Kapasitas Produksi 150 Ton Tepung Tapioka/ Bulan	Tidak Taat
49.	188.45/328/1.08.02/2016	Kegiatan Pembangunan Jetty dan Stockpile Akasia di Dusun Kampak, Desa Jebus, Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Oleh CV. JAYA BERSAMA sepanjang ± 20 M, Lebar ± 8 M, Luas Lahan 6.100 M ²	Tidak Taat
50.	188.45/400.A/1.08.02/2016	Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Desa Simpang Yul, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka Barat dengan Panjang Irigasi ± 6 KM dan Luas Kegiatan ± 100 Hektar	Tidak Taat
51.	188.45/402/1.08.02/2016	Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Buyan Kelumbi, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka Barat dengan Panjang Irigasi ± 2,3 KM dan Luas Kegiatan ± 150 Hektar	Tidak Taat
52.	188.45/399.A/1.08.02/2016	Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Kelurahan Kelapa, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka Barat dengan Panjang Irigasi ± 7 KM dan Luas Kegiatan ± 159 Hektar	Tidak Taat



No	No. Surat Keputusan	Tentang	
53.	188.45/547/1.08.02/2016	Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kab. Bangka Barat di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Sungai Baru, Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, Luas Bangunan ± 7.284 M ² , Luas Lahan ± 10.000 M ² Oleh Kantor Arsip dan Pepustakaan Daerah Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
54.	188.45/59/2.5.1.1/2017	Kegiatan Pembangunan Asphalt Mixing Plant (AMP) di Desa Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat Oleh PT. Multi Bangun Perkasa Abadi	Tidak Taat
55.	188.45/397/2.5.1.1/2017	Kegiatan Pembangunan Tower Telekomunikasi di Dusun Menduyung Lembu, Desa Air Menduyung, Kec. Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat oleh PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA	Tidak Taat
56.	188.45/493/2.12.1.1/2017	Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Desa Rukam RT. 02 RW. 01, Kec. Jebus, Kab. Bangka Barat, dengan Luas Lahan ± 100 M ² , Luas Bangunan ± 64 M ² , Tinggi Menara ± 51 M kepada PT. GIHON TELEKOMUNIKASI	Tidak Taat
57.	188.45/494/2.12.1.1/2017	Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi di RT. 011 RW. 05, Kel. Kelapa Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, dengan Luas Lahan ± 144 M ² , Luas Bangunan ± 144 M ² , Tinggi Menara ± 51 M kepada PT. PERSADA SOKA TAMA	Tidak Taat
58.	188.45/495/2.12.1.1/2017	Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Jalan BBI Air PDAM RT. 004 RW. 002, Kel. Kelapa Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat, dengan Luas Lahan ± 225 M ² , Luas Bangunan ± 225 M ² , Tinggi Menara ± 72	Tidak Taat



No	No. Surat Keputusan	Tentang	
		M kepada PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk	
59.	188.45/496/2.12.1.1/2017	Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Pal 10 RT. 001 RW. 001, Desa Air Limau Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat, dengan Luas Lahan ± 100 M ² , Luas Bangunan ± 64 M ² , Tinggi Menara ± 51 M kepada PT. GIHON TELEKOMUNIKASI	Tidak Taat
60.	660/93/2.5.1.1/2018	Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Jl. Air Lintang RT. 10 RW. 01 Desa Air Lintang, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, dengan Luas Lahan ± 225 M ² , Tinggi Menara ± 42 M oleh PT. CENTRATAMA NENARA INDONESIA	Tidak Taat
61.	660/92/2.5.1.1/2018	Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Jl. Raya Desa Bakit, Kec. Parittiga, Kab. Bangka Barat, dengan Luas Lahan ± 120 M ² , Tinggi Menara ± 42 M oleh PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Tidak Taat
62.	660/49/2.5.1.1/2018	Kegiatan Pembangunan Klinik Utama di Jl. Depati Barin No. 2, Simpang Tugu Perahu, Kel. Tanjung, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat, dengan Luas Lahan ± 150 M ² , Luas Bangunan ± 252 M ² , Kapasitas Kamar 5 Kamar kepada PT. KLINIK RIZKY DZAKIYYAH ADZRA	Taat
63.	660/20/2.5.1.1/2018	Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Dusun Kebayan Desa Kacung, Kec. Kelapa dan Desa Limbung Kec. Jebus, dengan Luas Sawah ± 128 Ha, Panjang Saluran ± 12.674,55 M kepada DINAS PEKERJAAN	Tidak Taat



No	No. Surat Keputusan	Tentang	
		UMUM DAN PENATAAN RUANG Kab. Bangka Barat	
64.	660/19/2.5.1.1/2018	Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Desa Tebing dan Desa Air Bulin, Kec. Kelapa, dengan Luas Sawah ± 146 Ha, Panjang Irigasi Primer ± 4,7 Km kepada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
65.	660/18/2.5.1.1/2018	Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Desa Pebuar Kec. Jebus, dengan Luas Sawah ± 125 Ha, Panjang Irigasi Primer ± 3,6 Km kepada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
66.	660/22/2.5.1.1/2018	Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Desa Tebing dan Desa Air Bulin, Kec. Kelapa, dengan Luas Sawah ± 110 Ha, Panjang Saluran ± 1.518.17 M kepada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
67.	660/23/2.5.1.1/2018	Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Desa Jebus Kec. Jebus, dengan Luas Sawah ± 49 Ha, Panjang Saluran ± 1.620 M kepada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
68.	660/21/2.5.1.1/2018	Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Desa Kacung, Kec. Kelapa, dengan Luas Sawah ± 99 Ha, Panjang Saluran ± 3.123,21 M kepada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kab. Bangka Barat	Tidak Taat
69.	660/131/2.5.1.1/2018	Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Gunung Manik Kelas D di Desa	Taat



No	No. Surat Keputusan	Tentang	
		Puput, Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, dengan Luas Lahan ± 6.000 M ² , Bangunan 2 Lantai, Lebar BANGUNAN Utama 30 M, Panjang Bangunan Utama 30 M, kepada PT. NIRWANA ANUGRAH MEDIKA	
70.	660/277/2.5.1.1/2018	Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Timah di Desa Air Limau, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat dengan Luas Lahan ± 27,72 Ha kepada PT. TIMAH NUSANTARA	Taat
71.	660/275/2.5.1.1/2018	Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Timah di Desa Limbung, Kec. Jebus, Kab. Bangka Barat dengan Luas Lahan ± 25 Ha kepada PT. TIMAH NUSANTARA DUA	Taat
72.	660/274/2.5.1.1/2018	Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Timah di Desa Limbung, Kec. Jebus, Kab. Bangka Barat dengan Luas Lahan ± 19,46 Ha kepada PT. TIMAH NUSANTARA SATU	Taat
73.	660/276/2.5.1.1/2018	Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Timah di Desa Air Limau, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat dengan Luas Lahan ± 20,2 Ha kepada PT. TIMAH NUSANTARA TIGA	Taat
74.	660/313/2.5.1.1/2018	Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS) di RT. 04, Dusun Bangun Jaya, Desa Air Kuang, Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat dengan Luas Lahan ± 144 M ² , Tinggi Menara ± 42 M kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Tidak Taat
75.	660/297/2.5.1.1/2018	Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS) di Desa Sinar Surya, Kecamatan Tempilang, Kab. Bangka Barat dengan Luas Lahan ± 100 M ² , Tinggi Menara ± 42 M	Tidak Taat



No	No. Surat Keputusan	Tentang	
		kepada PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	
76.	660/475/2.5.1.1/2018	Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Desa Tebing, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat kepada PT. TOWER BERSAMA	Tidak Taat
77.	660/474/2.5.1.1/2018	Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kelurahan Sungai Baru, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat kepada PT. TOWER BERSAMA	Tidak Taat
78.	660/476/2.5.1.1/2018	Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Dusun Buyan Kelumbi Desa Buyan Kelumbi, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat kepada PT. TOWER BERSAMA	Tidak Taat
79.	660/044/2.5.1.1/2019	Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip dengan Panjang Jaringan \pm 1.883,6 meter, Luas Lahan \pm 100 hektar kepada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Taat
80.	660/166/2.5.1.1/2019	Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus Kab. Bangka Barat kepada CV. AZIANKA MANDIRI	Tidak Taat
81.	660/045/2.5.1.1/2019	Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Desa Mancung dan Dusun Belit Kecamatan Kelapa dengan Panjang Jaringan \pm 21.252 meter, Luas Lahan \pm 211 hektar kepada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Taat
82.	660/043/2.5.1.1/2019	Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi di Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip dengan Panjang Jaringan \pm 2.203 meter, Luas Lahan \pm 66,5 hektar kepada DINAS	Tidak Taat



No	No. Surat Keputusan	Tentang	
		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
83.	660/556/2.5.1.1/2019	Kegiatan Operasional Puskesmas yang berlokasi di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kab. Bangka Barat oleh DINAS KESEHATAN KAB. BANGKA BARAT (DPLH)	Taat
84.	660/558/2.5.1.1/2019	Kegiatan Operasional Puskesmas yang berlokasi di Jalan Raya Muntok-Pangkalpinang, Ds. Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kab. Bangka Barat oleh DINAS KESEHATAN KAB. BANGKA BARAT (DPLH)	Taat
85.	660/559/2.5.1.1/2019	Kegiatan Operasional Puskesmas yang berlokasi di Jalan Panglima Angin No. 20 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kab. Bangka Barat oleh DINAS KESEHATAN KAB. BANGKA BARAT (DPLH)	Taat
86.	660/553/2.5.1.1/2019	Kegiatan Operasional Puskesmas yang berlokasi di Jalan Raya Muntok – Pangkalpinang, Kel. Kelapa Kecamatan Kelapa Kab. Bangka Barat oleh DINAS KESEHATAN KAB. BANGKA BARAT (DPLH)	Taat
87.	660/552/2.5.1.1/2019	Kegiatan Operasional Puskesmas yang berlokasi di Jalan Kampak No. 188, Ds. Jebus Kecamatan Jebus Kab. Bangka Barat oleh DINAS KESEHATAN KAB. BANGKA BARAT (DPLH)	Taat
88.	660/554/2.5.1.1/2019	Kegiatan Operasional Puskesmas yang berlokasi di Jalan Baru, Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kab. Bangka Barat oleh DINAS KESEHATAN KAB. BANGKA BARAT (DPLH)	Taat
89.	660/557/2.5.1.1/2019	Kegiatan Operasional Puskesmas yang berlokasi	



No	No. Surat Keputusan	Tentang	
		di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kab. Bangka Barat oleh DINAS KESEHATAN KAB. BANGKA BARAT (DPLH)	Taat
90.	660/555/2.5.1.1/2019	Kegiatan Operasional Puskesmas yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat No. 190, Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kab. Bangka Barat oleh DINAS KESEHATAN KAB. BANGKA BARAT (DPLH)	Tidak Taat
91.	660/188/2.5.1.1/2019	Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 24.333.77 di kelurahan Kelapa Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat Kepada PT. CHANDRA PUTRA PETROLEUM UTAMA (DPLH)	Tidak Taat

Tabel 3.117

Perusahaan/industri/masyarakat yang taat dalam menyampaikan laporan RKL-RPL Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Berdasarkan Izin Lingkungan OSS

No	No. Surat Keputusan	Tentang	Ketaatan Menyampaikan Laporan RKL-RPL
1.	188.45/253/2.12.1.1/2020	Izin Lingkungan OSS tanggal 15 Mei 2020 PT. Multi Jaya Menumbing di Kab. Bangka Barat	
2.	660/488/2.5.1.1/2020	Izin Lingkungan OSS tanggal 10 November 2020 Koperasi Jasa Gempita Babel di Kab. Bangka Barat	
3.	660/512/2.5.1.1/2020	Izin Lingkungan OSS tanggal Bukit Mantan Indah Park (Okta Sriliany) tanggal 23 November 2020	
4.	660/516/2.5.1.1/2020	Izin Lingkungan OSS tanggal 27 November 2020 PT Sejahtera Indah Perkasa di Kab. Bangka Barat	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020



Sedangkan berdasarkan realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana dalam RPJMD dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3.118
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berbudaya/Berwawasan Lingkungan Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
1. Persentase desa/ kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/ kelurahan	Persen	15,2	11	138,18	Tercapai
2. Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM) dan komunitas (<i>Civil Society Organization/CSO</i>) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif	Unit	11	12	91,67	Optimis Tercapai
3. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara baik	Persen	23,42	70	33,46	Perlu Upaya Lebih

Jika dilihat dari capaian sampai dengan Tahun 2020 dari ketiga indikator pendukung sasaran ini masih terdapat satu indikator yang cukup rendah jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD yaitu indikator persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara baik yang hanya tercapai 23,42 persen. Melihat hal ini perlu dilakukan usaha atau strategi yang lebih baik agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Adapun faktor penghambat secara umum dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Kesadaran pelaku usaha yang masih rendah dalam pengelolaan lingkungan dikarenakan dalam pengelolaan lingkungan pelaku usaha masih menganggap sebagai beban;



2. Infrastruktur pengelolaan lingkungan seperti laboratorium lingkungan dan fasilitas pengolahan limbah B3 yang masih terbatas khususnya di Kabupaten Bangka Barat;
3. Sumber Daya Manusia khusus laboratorium pengelolaan lingkungan masih terbatas.

Sementara faktor pendorong dalam pencapaian sasaran antara lain adalah :

1. Mulai tumbuhnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan pengelolaan lingkungan secara swadaya;
2. Tersedianya regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup;
3. Dukungan pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan yang berbasis masyarakat.

Dalam pencapaian Sasaran Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berbudaya/Berwawasan Lingkungan didukung oleh program-program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2. Program Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Sasaran strategis 23 adalah **"Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan"**

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ke-23 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.119

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berkelanjutan Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASITAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	persen	7,81	16	10,61	66	cukup

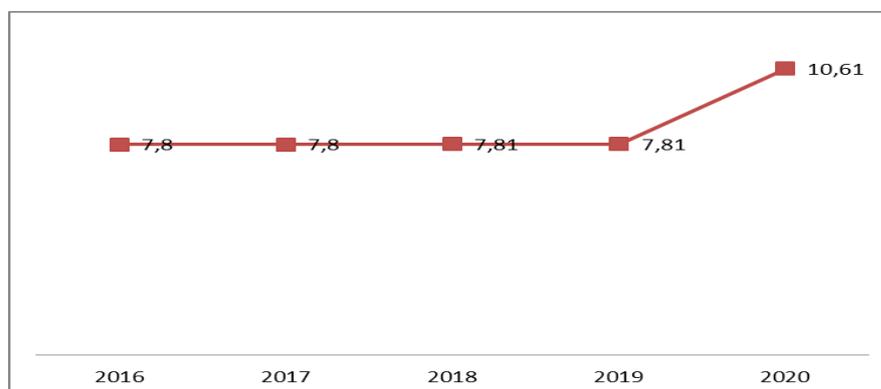
Sasaran ke-23 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 66 persen atau dengan status "Cukup".



Capaian sasaran “Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan” didukung oleh indikator persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu, yaitu Tahun 2020 realisasi cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terintegrasi mencapai 10,61 persen dari target 16 persen.

Capaian tersebut dihitung dari jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Bangka Barat yang mendapat layanan pengelolaan sampah sebanyak 7 (tujuh) desa/kelurahan dari total jumlah desa/kelurahan yang ada sebanyak 60 (enam puluh) desa dan 6 (enam) kelurahan.

Pada tahun 2020 wilayah yang telah mendapat layanan pengelolaan sampah baru mencakup kecamatan Muntok, yaitu 5 (lima) kelurahan terdiri dari Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungai Daeng dan Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Keranggan, Kelurahan Menjelang, serta 2(dua) Desa yaitu Desa Air Belo dan Desa Belo Laut. Capaian tersebut dihitung dari jumlah kelurahan / desa di kabupaten Bangka Barat yang mendapat layanan pengelolaan sampah sebanyak 7 (tujuh) kelurahan / desa dari total jumlah kelurahan/desa yang ada sebanyak 6 (enam) kelurahan dan 60 desa. Hal ini dikarenakan karena belum adanya penambahan kawasan dalam pelayanan pengelolaan sampah namun untuk penambahan zona/ruang sudah dilakukan, namun masih bertahap. Untuk kedepan akan dilakukan pengelolaan persampahan di Kecamatan lain, seperti Kecamatan Simpang Teritip, Jebus, Parittiga, Kelapa dan Tempilang sesuai dengan kemampuan serta kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan. Sasaran Meningkatkan Pengelolaan sampah Terpadu dan Berkelanjutan dicapai melalui program, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Gambar 3.48
Persentase Cakupan Wilayah yang Terlayani
Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Tahun 2018 - 2020



Realisasi tahun 2016 hingga 2019 terealisasi sama sebesar 7,81 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 sebesar 19 persen maka capaian Tahun 2020 baru terpenuhi sebesar 55,84 persen.

Tabel 3.120
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berkelanjutan Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	persen	10,61	19	55,84	Perlu Upaya Lebih

Dapat dilihat bahwa persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu, terealisasi sebesar 10,61 persen pada Tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 19 persen masih cukup jauh dari target akhir RPJMD. Untuk mencapai target sasaran ini, kedepannya perlu meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah secara terpadu serta dapat diperluas ke Kecamatan lainnya di Kabupaten Bangka Barat.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik masih rendah;
2. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai;
3. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola persampahan;

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola persampahan;
4. Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir regional.

Sasaran strategis 24 adalah **"Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan Permukiman"**

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran "Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan Permukiman" adalah persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi



syarat kesehatan antara lain yaitu dilengkapi dengan leher angsa, tanki septic atau sistem pengelolaan air limbah (SPAL). Indikator ini diperoleh dari persentase jumlah penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak di wilayah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat tahun 2020. Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan Permukiman disajikan pada tabel sebagai berikut:

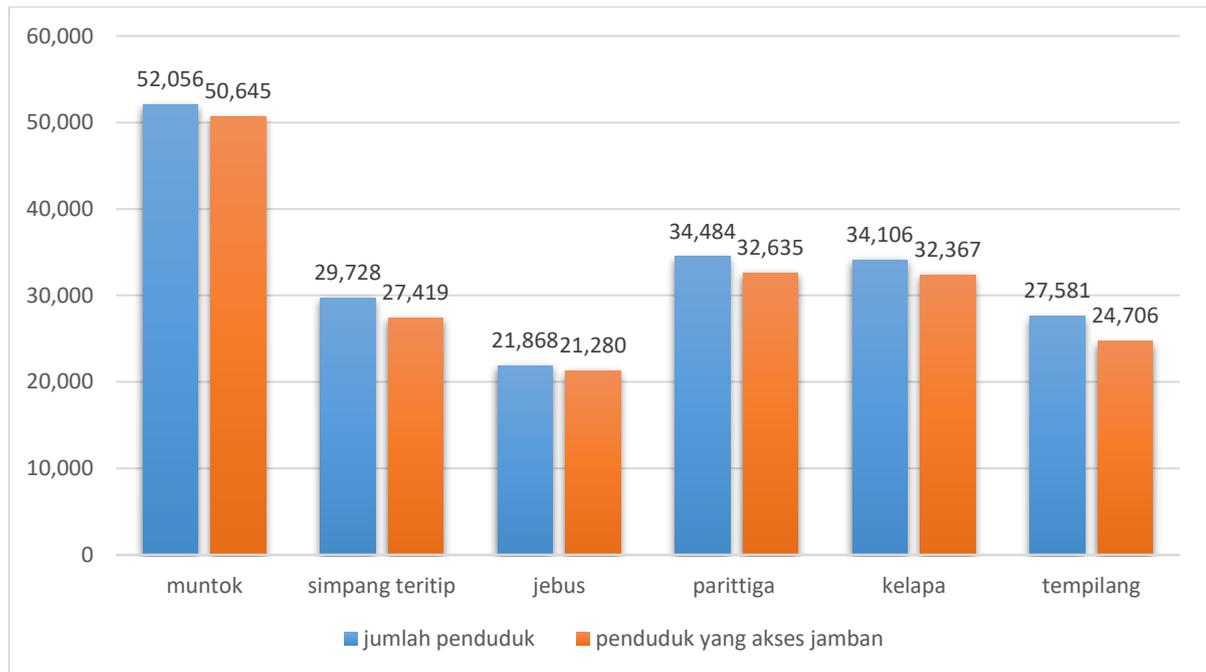
Tabel 3.121
Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas Sanitasi
Lingkungan Permukiman Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	PERSEN	STATUS CAPAIAN
Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak	persen	93,79	90	94,61	105,12	Baik Sekali

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan Permukiman” yang terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 105,12 persen atau dengan status “Baik Sekali”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilihat dari indikator persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak terealisasi 94,61 persen dari target sebesar 90 persen.

Berdasarkan pendataan pada tahun 2020 dari jumlah penduduk 199.823 jiwa, sebanyak 189.052 jiwa telah memiliki fasilitas sanitasi yang layak berupa jamban sehat. Jika membandingkan jumlah sanitasi yang layak di kecamatan, maka penduduk yang memiliki akses fasilitas sanitasi yang layak tertinggi ada di Kecamatan Muntok yaitu sejumlah 50.645 jiwa, sedangkan yang terendah ada di Kecamatan Jebus sejumlah 21.280 jiwa.

Perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk yang memiliki akses sanitasi yang layak di setiap kecamatan pada tahun 2020, disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Tahun 2020 (diolah)

Gambar 3.49
Perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk yang memiliki akses sanitasi yang layak disetiap kecamatan pada tahun 2020

Tabel 3.122
Jumlah Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat)
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	KECAMATAN	DESA/KEL	PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK YANG AKSES JAMBAN	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Muntok	Tanjung	9.133	9.133	100
		Sungai Daeng	9.051	9.051	100
		Sungai Baru	6.737	6.737	100
		Air Putih	6.426	5.789	90,09
		Air Belo	4.051	3.915	96,64
		Belo Laut	12.104	11.490	94,93
		Air Limau	4.552	4.530	99,52
	JUMLAH		52.056	50.645	
2	Simpang Teritip	Kundi	2.664	2.449	91,93
		Air Menduyung	1.710	1.422	83,16
		Bukit Terak	1.920	1.920	100
		Simpang Tiga	2.120	1.953	92,12
		Pelangas	2.217	2.217	100
		Simpang Gong	1.306	1.212	92,80



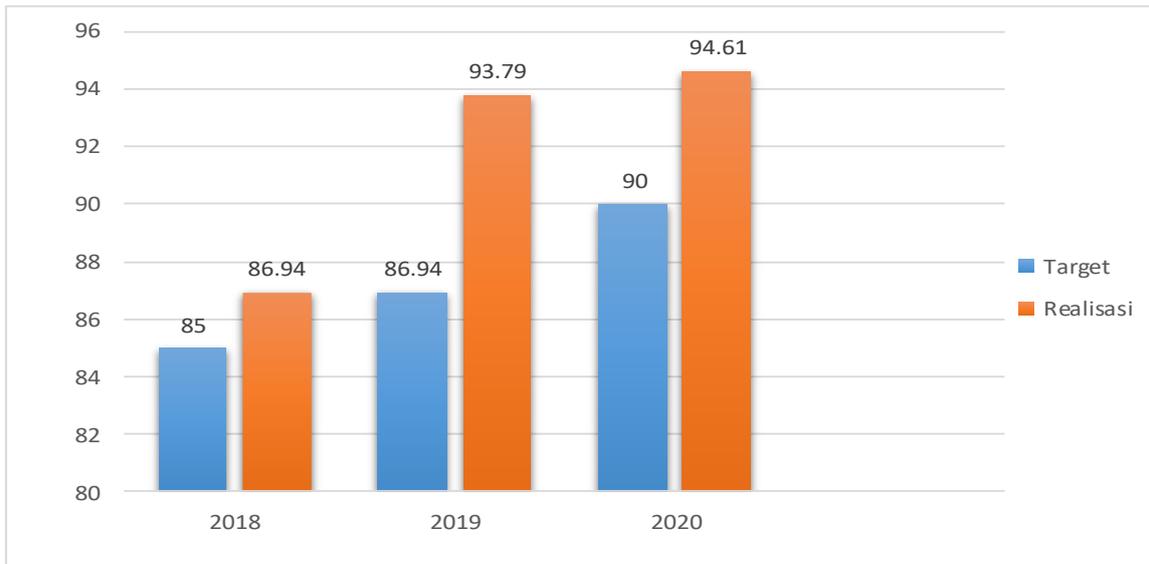
No.	KECAMATAN	DESA/KEL	PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK YANG AKSES JAMBAN	
				JUMLAH	%
		Peradong	1.878	1.643	87,49
		Pangek	2.312	2.194	94,90
		Berang	3.606	3.020	83,75
		Ibul	2.817	2.397	83,09
		Air Nyatoh	2.781	2.701	97,12
		Mayang	3.198	3.092	96,69
		Rambat	1.199	1.199	100
	JUMLAH		29.728	27.419	
3	Jebus	Jebus	3.038	2.869	94,44
		Sungai Buluh	1.493	1.493	100
		Tumbak Petar	2.748	2.700	98,25
		Limbung	852	852	100
		Rukam	1.282	1.282	100
		Ranggi Asam	2.538	2.399	94,52
		Ketap	1.847	1.781	96,43
		Mislak	1.843	1.843	100
		Pebuar	968	895	92,46
		Sinar Manik	2.743	2.715	98,89
		Air Kuang	2.516	2.451	97,42
	JUMLAH		21.868	21.280	
4	Parittiga	Puput	5.637	5.380	95,44
		Air Gantang	4.822	4.540	94,15
		Kelabat	3.434	2.735	79,64
		Teluk Limau	3.809	3.575	93,86
		Cupat	4.601	4.317	93,83
		Sekar Biru	4.523	4.523	100
		Telak	1.728	1.728	100
		Kapit	1.552	1.534	98,84
		Semulut	2.576	2.501	97,09
		Bakit	1.802	1.802	100
	JUMLAH		34.484	32.635	
5	Kelapa	Kelapa	6.918	6.722	97,17
		Sinar Sari	1.518	1.518	100
		Mancung	1.529	1.529	100
		Tebing	1.367	1.367	100
		Dendang	4.556	4.118	90,39



No.	KECAMATAN	DESA/KEL	PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK YANG AKSES JAMBAN	
				JUMLAH	%
		Kacung	2.372	2.290	96,54
		Terentang	2.695	2.521	93,54
		Tugang	3.305	2.835	85,78
		Kayu Arang	1.778	1.765	99,27
		Beruas	1.706	1.631	95,60
		Pusuk	2.043	2.043	100
		Tuik	725	725	100
		Pangkal Beras	1.797	1.506	83,81
	JUMLAH		34.106	32.367	
6	Tempilang	Benteng Kota	3.735	3.693	98,88
		Air Lintang	4.194	4.194	100
		Tempilang	4.540	4.540	100
		Sinar Surya	2.185	1.729	79,13
		Tanjung Niur	3.344	2.892	86,48
		Sangku	2.180	1.817	83,35
		Buyan Kelumbi	1.485	1.485	100
		Penyampak	2.745	2.092	76,21
		Simpang Yul	3.173	2.264	71,35
	JUMLAH		27.581	24.706	
Jumlah			199.821	189.052	94,61

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Tahun 2020

Jika dianalisa realisasi capaian Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 selalu di atas target, dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2020 sebesar 90 persen, capaian tahun 2020 mencapai target yaitu sebesar 94,61 persen. Peningkatan Persentase Penduduk yang Memiliki Fasilitas Sanitasi Yang Layak Tahun 2018 – 2020 disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Tahun 2020 (diolah)

Gambar 3.50
Peningkatan Persentase Penduduk yang Memiliki Fasilitas Sanitasi Yang Layak Tahun 2018 - 2020

Tabel 3.123
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan Permukiman Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	persen	STATUS CAPAIAN
Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak	persen	94,61	95	99,59	Optimis Tercapai

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2020 pada status “Optimis Tercapai” untuk memenuhi target akhir masa RPJMD. Secara umum faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini adalah:

1. Terlaksananya secara optimal program dan kegiatan terkait peningkatan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat;
2. Dukungan terbesar adalah dari masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat;
3. Dukungan dari pihak – pihak terkait untuk pemenuhan program nasional tersebut.

Program pendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman” di Tahun 2020 adalah:



1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
3. Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh;
4. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial;
5. Program Areal Pemakaman.

Sasaran Strategis 25 adalah **“Terkendalinya bencana banjir”**

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran “Terkendalinya Bencana Banjir” diperoleh dari persentase jumlah desa/kelurahan/titik banjir kumulatif yang dimitigasi thd banjir dibagi dengan jumlah desa/kelurahan/titik banjir yang perlu dimitigasi thd banjir kondisi tahun awal (2015), yang dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.124
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terkendalinya Bencana Banjir Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASIT AHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASIT AHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Persentase desa/ kelurahan/titik banjir yang dimitigasi terhadap banjir/ genangan air	persen	77,78	80	91,67	114.59	Baik Sekali

Sasaran “Terkendalinya Bencana Banjir” terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 114.59persen atau dengan status “Baik Sekali”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dilihat dari indikator persentase desa/ kelurahan/titik banjir yang dimitigasi terhadap banjir/ genangan air sebesar 91,67 persen dari target sebesar 80 persen.

Mitigasi yang dimaksud adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Berdasarkan analisis dan kondisi alam lingkungan, potensi bahaya beraspek geologi di Kabupaten Bangka Barat yang utama adalah daerah berpotensi banjir/genangan dan daerah berpotensi abrasi.

Pada Tahun 2020, terdapat 36 titik lokasi banjir yang tersebar di Kabupaten Bangka Barat. Pada dasarnya di Kabupaten Bangka Barat jarang terjadi banjir yang besar, banjir yang terjadi cenderung diakibatkan oleh faktor alam dan kerusakan



lingkungan akibat penambangan. Adapun sebaran lokasi banjir di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.125
Sebaran Titik Banjir di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	Nama Titik Lokasi	Desa	Kecamatan	Keterangan
1	Jalan Parit 4	Puput	Parittiga	Tb 0,50 m – 1 m
2	Jalan Puput Atas	Puput	Parittiga	Tb 0,50 m – 1 m
3	Jalan Kimjung SPBU Kimjung	Puput	Parittiga	Tb 0,50 m – 1 m
4	Jalan raya bakit wilayah Dusun Jompang	Kapit	Parittiga	Tb 0,50 m – 1 m
5		Sekar biru	Parittiga	
6	Dusun sungai tangok	Kelabat	Parittiga	
7	Jalan air kuang sekitar Lokasi SPBU	Air kuang	Jebus	Tb 0,50 m – 1 m
8	Dusun Petar	Tambak petar	Jebus	Tb 0,50 m – 1 m
9	Jembatan Masjid Jebus	Jebus	Jebus	Tb 0,50 m – 1 m
10	Dusun pasir mungai	Jebus	Jebus	
11	Jalan kampung Palembang	Sinar manic	Jebus	
12	Kampung ulu	Tanjung	Muntok	Tb 1 m – 2 m
13	Kampung teluk rubiah	Tanjung	Muntok	Tb 1m – 2 m
14	Kampung baru	Tanjung	Muntok	
15	Kampung culong	Sungai daeng	Muntok	
16	Pal 1	Sungai baru	Muntok	
17	Pasar muntok	Pusat kota	Muntok	Tb 1 m – 2 m
18	Jalan raya belo laut	Belo laut	Muntok	Tb 0,5m – 1 m
19	Jalan depan masjid jamik		Muntok	Tb 0,30 m – 0,50 m
20	BRI muntok tebing salam		Muntok	
21	Jalan Raya Mentok-Belo Laut	Belo Laut	Muntok	
22	Jalan Muntok simpang teritip	Mayang	Simpang teritip	TB 1 m
23	Jalan raya simpang teritip - ibul jebus	Mayang	Simpang teritip	
24	Jalan sekitar sungai rambat	Mayang	Simpang teritip	
25	Jalan sekitar jembatan	Mayang	Simpang teritip	
26	Sekitar hilir sungai peradong	Peradong	Simpang teritip	
27	Jalan sekitar jembatan	Peradong	Simpang teritip	



No.	Nama Titik Lokasi	Desa	Kecamatan	Keterangan
28	Pemukiman sekitar sungai plangas	Berang	Simpang teritip	
29	Jalan raya sekitar jembatan plangas 1	Berang	Simpang teritip	
30	Jalan raya sekitar jembatan plangas 2	Berang	Simpang teritip	
31	Pemukiman sekitar sungai A ija	Berang	Simpang teritip	
32	Jalan pros muntok – pangkalpinang (areal sawit)	Dendang	Kelapa	Tb 0,50 cm
33	Jembatan air mangkung jalan poros muntok – pangkalpinang	Air bulin	Kelapa	
34		Tebing	Kelapa	Tb 1m-2m
35		Sinar sari	Kelapa	
36	Antara desa beruas dengan desa tuik	Tuik	Kelapa	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Dari 36 titik lokasi banjir, sampai dengan Tahun 2020 titik banjir yang telah dimitigasi sebanyak 33 titik dengan rincian per kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3.126
Jumlah Titik Lokasi Banjir dan lokasi yang telah dimitigasi per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir	Jumlah yang dimitigasi	Mitigasi
1.	Muntok	10	9	Normalisasi
2.	Simpangteritip	10	9	Normalisasi
3.	Kelapa	5	5	Normalisasi
4.	Jebus	5	4	Normalisasi
5.	Parittiga	6	6	Normalisasi
6.	Tempilang	-	0	Normalisasi
	Total	36	33	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 dimana jumlah titik lokasi banjir yang telah dimitigasi diseluruh wilayah kecamatan berjumlah 28 Mitigasi dengan persentase 77.78 persen, maka pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 13.89 persen. Dimana jumlah titik lokasi banjir yang dimitigasi pada tahun 2020 sebanyak 33 titik lokasi banjir dengan persentase berjumlah 91.67 persen.

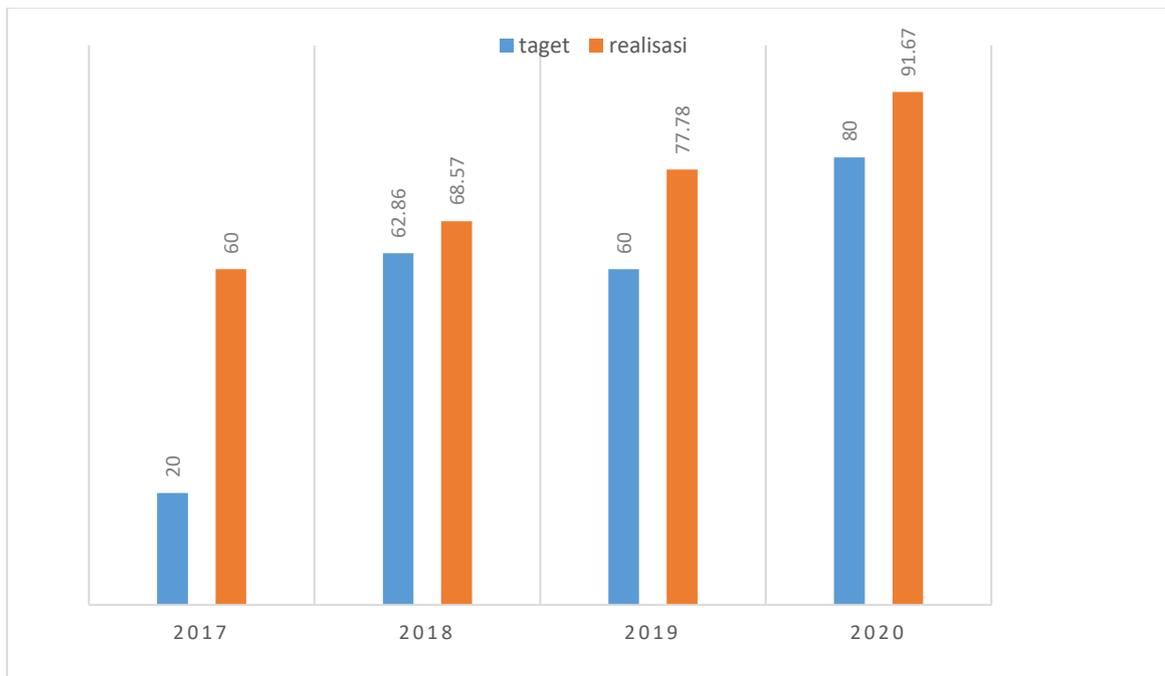
Tabel 3.127



Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terkendalinya Bencana Banjir Tahun 2020
Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Persentase desa/kelurahan/ titik banjir yang dimitigasi terhadap banjir/genangan air	Persen	91.67	100	91.67	Optimis Tercapai

Progres pencapaian indikator Persentase desa/kelurahan/titik banjir yang dimitigasi terhadap banjir/genangan air pada sasaran Terkendalinya Bencana Banjir mulai tahun 2016 hingga 2020 digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020 (diolah)

Gambar 3.51
Realisasi Indikator Persentase Desa/Kelurahan/Titik Banjir yang
Dimitigasi Terhadap Banjir/Genangan Air Tahun 2017-2020

Pada tahun 2020 indikator ini telah mencapai target. Walaupun secara umum ada rasionalisasi anggaran, akan tetapi khusus kegiatan yang berkaitan dengan penanganan banjir tetap dilaksanakan untuk mengantisipasi bencana yang kerap terjadi saat musim penghujan. Terlepas dari itu semua penanganan banjir masih



dirasakan belum optimal karena belum dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan stakeholder terkait.

Dilihat dari capaian sampai dengan Tahun 2020, sasaran “Terkendalnya Bencana Banjir” dapat tercapai sesuai dengan target akhir RPJMD jika didukung upaya yang intensif melalui program dan kegiatan. Pencapaian terwujudnya sasaran “Terkendalnya Bencana Banjir” didukung oleh pelaksanaan Program Pengendalian Banjir.

Sasaran strategis 26 adalah ” **Terwujudnya Konservasi Sumber Air**”

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran “Terwujudnya Konservasi Sumber Air” adalah persentase sumber air yang telah dikonservasi, yang diperoleh dari perhitungan persentase jumlah air yang telah dikonservasi dibagi dengan jumlah seluruh sumber air, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel3.128

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Konservasi Sumber Air Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Persentase sumber air yang telah di konservasi	persen	33,33	28	39.02	139.36	Baik Sekali

Sasaran “Terwujudnya Konservasi Sumber Air” terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 139.36persen atau dengan kategori “Baik Sekali”. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah persentase sumber air yang telah di konservasi dengan target sebesar 28persen dan terealisasi sebesar 39.02persen.

Sumber air adalah wadah air yang berada diatas dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini yaitu akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk/kolong dan muara. Data sumber air yang digunakan dalam perhitungan persentase sumber air yang telah dikonservasi terdiri dari sungai, kolong, dan mata air yang berada disekitar daerah permukiman sejumlah 123 sumber air yang tersebar di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Sumber air yang dimaksud diuraikan sebagaimana table sebagai berikut:



Tabel 3.129
Sumber air
Di Kabupaten Bangka Barat

No.	Toponim	No.	Toponim	No.	Toponim
1	Sungai Penyampak	42	Air Mengkinang	83	Air Sangku
2	Sungai Buluh	43	Air Nyato	84	Air Bedil
3	Sungai Melangir	44	Air Gedabang	85	Air Kasai
4	Sungai Melangir	45	Air Payak	86	Air Cepaga
5	Sungai Gemuruh	46	Air Teram	87	Air Mreng
6	Sungai Antan	47	Air Kacung	88	Air Liding
7	Sungai Menduyung	48	Air Menduren	89	Air Bejong Bodoh
8	Sungai Mentok	49	Air Gendit	90	Air Kliawat
9	Sungai Rubiah	50	Air Pulan	91	Air Landang
10	Sungai Bugis	51	Air Anjil	92	Air Kranak
11	Sungai Pait	52	Air kandis	93	Air Menuruk
12	Sungai Ranggam	53	Air Bare	94	Air Pelai
13	Sungai Kadar	54	Air Sibisuh	95	Air Kijang
14	Sungai Daeng	55	Air Dinai	96	Air Lelabi
15	Sungai Terjun	56	Air Limau	97	Air Sungkirang
16	Sungai pondokpanjang	57	Air Plaben	98	Air Balai
17	Sungai Ganggung	58	Air Sekabul	99	Air Kubu
18	Sungai Menyingat	59	Air Tamiang	100	Air Tuik
19	Sungai Pelawan	60	Air Pemenang	101	Air Bido
20	Sungai Mancung	61	Air Hitam	102	Air Mesirak
21	Sungai Tanahmerah	62	Air Aur	103	Air Galang Batang
22	Sungai Kampak	63	Air Kuku	104	Air Mempagung
23	Sungai Jering	64	Air Pengasan	105	Air Ramunding
24	Sungai Kotawaringin	65	Air Palah	106	Air Terentang
25	Sungai Tampalang	66	Air Lambur	107	Air Melaka
26	Sungai Bunut	67	Air Penganak	108	Air Jering
27	Air Pala	68	Air Lingkungtujuh	109	Air Barat
28	Air Limau	69	Air Pawan	110	Kolong trabek
29	Air Belanak	70	Air Semeran	111	Kolong berang
30	Air Cupat	71	Air Tayu	112	Kolong sekarbiru
31	Air Anyai	72	Air Unar	113	Kolong parit 4
32	Air Masar	73	Air Gelogor	114	Kolong ketap
33	Air Selang	74	Air Kebur	115	Kolong hijau/alang
34	Air Kuang	75	Air Bonang	116	Kolong panca
35	Air Tembelok	76	Air Lambur	117	Kolong menjelang 1
36	Air Biak	77	Air Pelangas	118	Kolong menjelang 2
37	Air Cokat	78	Air Medang	119	Sekar biru 2
38	Air Tikek	79	Air Berang Kecil	120	Cempedak Luar
39	Air Anggi	80	Air Mayang	121	Jerambah panjang
40	Air Ungkai	81	Air Kedi	122	Mata air desa telang
41	Air Sepang	82	Air Putih	123	Mata air pancur

Sampai dengan Tahun 2020, jumlah sumber air yang telah dikonservasi sebanyak 48 sumber air yang dilaksanakan melalui kegiatan normalisasi sungai, penghijauan, pembangunan talud, dan pembangunan sarana prasarana sumber air baku untuk



air minum yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan PDAM Tirta Sejiran Setason.

Tabel 3.130
Data Sumber Air yang Telah Dikonservasi

No	Jenis	Kecamatan	Kel/desa/dusun	Kegiatan	Tahun
A.	SUNGAI				
1	Lambing/kacung	Kelapa	Kacung	Talud	2016
2	Kebur	Jebus	Jebus/tumbak petar	Normalisasi sungai	2016
3	Cupat	Paritiga	Cupat	Normalisasi sungai	2016
4	Air pangkal / air gelogor			Normalisasi sungai	2016
5	Tampalang/air ungkai	Paritiga	Puput	Normalisasi sungai	2016
6	Ganggeng/nanak	Sp teritip	Bukit terak	Normalisasi sungai	2016
7	Mengkinang (bengkinang)	Kelapa	Sinar sari	Normalisasi sungai	2016
8	Air belanak (budak)	Sp teritip	Air menduyung	Normalisasi sungai	2016
9	Bare (bara)	Sp teritip	Mayang	Normalisasi sungai	2016
10	Air semeran	Jebus	Sungai buluh	Normalisasi sungai	2017
11	Air hitam	Sp teritip	Air nyatoh	Normalisasi sungai	2017
12	Air krana	Sp teritip	Air nyatoh	Normalisasi sungai	2017
13	Jering/mancung	Kelapa	Dendang	Normalisasi sungai	2017
14	Lingkung tujuh	Jebus	Jebus	Normalisasi sungai	2017
15	Sapon	Tempilang	Buyan kelumbi	Normalisasi sungai	2017
16	Lambur	Sp teritip	Peradong	Normalisasi sungai	2017
17	Anjil /anjel	Muntok	Air putih	Normalisasi sungai	2017
18	Memati/memuti/memeti	Sp teritip	Kundi	Normalisasi sungai	2017
19	Paser/tikek	Jebus	Sinar manik	Normalisasi sungai	2017
20	Biak/sebisuh/kadur/ semusuk	Muntok	Belo laut	Normalisasi sungai	2017
21	Air bugis	Muntok	Tanjung	Normalisasi sungai	2017
22	Sungkal/sungkai	Muntok	Air limau	Talud	2017
23	Rubiah	Muntok	Air limau	Talud	2017
24	Pawan/pawang	Jebus	Pebuar	Normalisasi sungai	2018
25	Air riang	Muntok	Air putih	Normalisasi	2018



No	Jenis	Kecamatan	Kel/desa/dusun	Kegiatan	Tahun
26	Sidodadi	Muntok	Sungai daeng	Normalisasi	2018
27	Sungai mentok	Muntok	Tanjung	Normalisasi	2018
28	Air mentigi	Muntok	Tanjung ular	Normalisasi	2018
29	Sungai rambat	Sp teritip	Rambat	Normalisasi	2018
30	Sungai pangek	Sp teritip	Pangek	Normalisasi	2018
31	Air kusek	Kelapa	Sinar sari	Normalisasi	2018
32	Sungai air mangkok	Kelapa	Bulin	Normalisasi	2018
33	Sungai juru	Kelapa	Tebing	Normalisasi	2018
34	Sungai kebyan	Kelapa	Limbung	Normalisasi	2018
35	Sungai samat	Kelapa		Normalisasi	2018
36	Sungai benteng kota	Tempilang	Benteng kota	Normalisasi	2018
37	Sungai ahoi	Muntok	Belo laut	Normalisasi	2019
38	Sungai anyai	Sp teritip	Kundi	Normalisasi	2019
39	Air junguk	Sp teritip	Pelangas	Normalisasi	2019
40	Sungai terabek	Muntok	Belo laut	Normalisasi	2019
41	Sungai di belakang gereja gpdi dusun puput atas	Paritiga	Puput	Normalisasi	2020
42	Sungai dusun tiga dan empat desa belo laut	Muntok	Belo laut	Normalisasi	2020
43	Sungai dusun rajek belar	Sp teritip	Berang	Normalisasi	2020
44	Sungai pait (belakang kodim)	Muntok	Belo laut	Normalisasi	2020
45	Sungai simpang tiga	Sp teritip	Simpang tiga	Normalisasi	2020
46	Sungai perai	Tempilang	Buyan kelumbi	Normalisasi	2020
47	Sungai tanjung niur	Tempilang	Tanjung niur	Normalisasi	2020
B.	KOLONG				
48	Menjelang 1	Muntok	Tanjung	Sumber air baku PDAM	2019



Tabel 3.131

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Konservasi Sumber Air Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Persentase sumber air yang telah di konservasi	Persen	39.02	28	139.36	Tercapai

Capaian pada sasaran terwujudnya konservasi sumber air dari target RPJMD, sampai dengan Tahun 2020 telah tercapai sebesar 139.36 persen dengan status "Tercapai". Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pencapaian sasaran "Terwujudnya Konservasi Sumber Air" tahun 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan hingga akhir masa RPJMD. Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Sasaran strategis 27 adalah "**Terwujudnya Pemulihan Lahan Kritis**"

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran "Terwujudnya Pemulihan Lahan Kritis" adalah persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 3.132

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Pemulihan Lahan Kritis Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif	persen	1	1,5	1	66,67	Cukup

Target Kinerja Sasaran Terwujudnya pemulihan lahan kritis sampai Tahun 2020 belum tercapai karena data lahan kritis belum tersedia sehingga kegiatan pemulihan lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif tidak dapat dilakukan. Capaian persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif realiasi 66,67 atau target belum tercapai dengan status capaian "cukup" karena kegiatan inventarisasi lahan kritis untuk produksi biomasa di kabupaten Bangka Barat baru dilaksanakan di tahun anggaran 2016.



Untuk data Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi sesuai data KPH adalah kegiatan Reboisasi pada tahun 2018 di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Muntok Kelurahan Tanjung seluas 2 Ha sebanyak 5.500 batang pohon dan kecamatan Simpang Teritip Desa Simpang Gong seluas 35 Ha sebanyak 42.350 batang pohon. Sehingga sampai dengan tahun 2020, total kegiatan Reboisasi seluas 37 Ha sebanyak 47.850 batang pohon. Luas Lahan Kritis di Kabupaten Bangka Barat seluas 4.012,58 Ha (Data Spatial Lahan kritis BPDAS Baturusa Cerucuk 2018 SK 306).

Tabel 3.133
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Pemulihan Lahan Kritis Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif	persen	0,92	2	46,10	Perlu Upaya Lebih

Dapat dilihat bahwa persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif, terealisasi sebesar 0,92 persen pada Tahun 2020 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 2 persen sehingga masih cukup jauh dari target akhir RPJMD.

Sasaran strategis 28 adalah **"Menjaga dan Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Produk Hukum Penataan Ruang"**

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran "Menjaga dan Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Produk Hukum Penataan Ruang" diperoleh dari persentase jumlah izin yang dikeluarkan sesuai dengan produk hukum penataan ruang dibagi jumlah pengajuan perizinan pemanfaatan ruang, dengan capaian sebagai berikut:

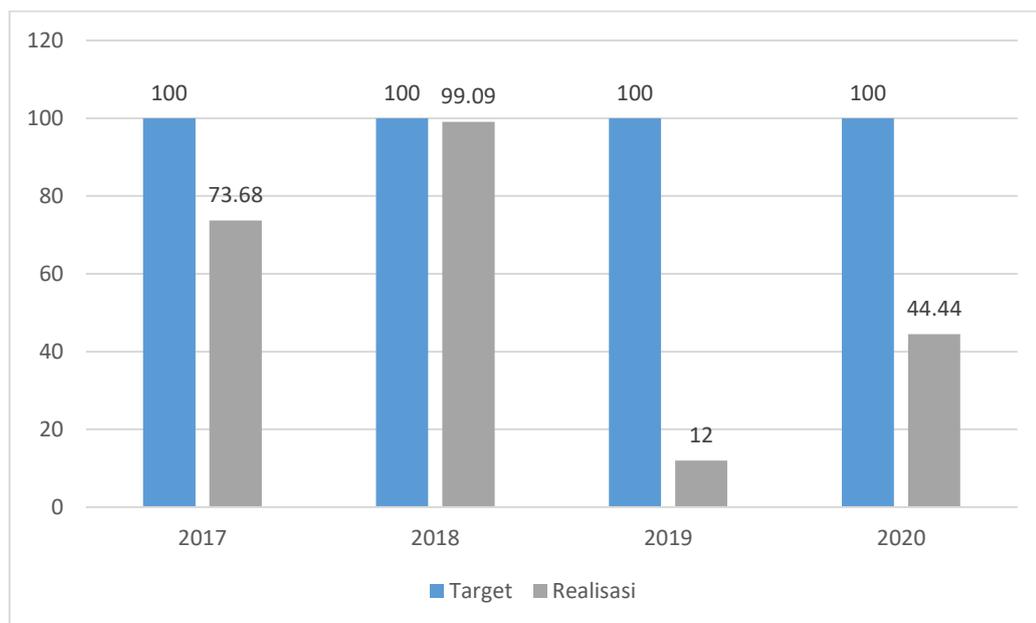


Tabel3.134

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menjaga dan Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Produk Hukum Penataan Ruang Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASIT AHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	persen	12	100	44,44	44,44	Kurang

Sasaran “Menjaga dan Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Produk Hukum Penataan Ruang” terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja dengan nilai capaian sasaran sebesar 44,44 persen atau dengan status “Kurang”.



Sumber : Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2020.

Gambar 3.52

Realisasi Indikator Persentase Pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Produk Hukum Penataan Ruang Tahun 2017-2020

Pada Tahun 2020 jumlah perizinan pemanfaatan ruang yang diajukan sebanyak 36 izin, yang dikeluarkan rekomendasi sesuai dengan tata ruang sebanyak 16 izin. Kendala yang paling sering terjadi dalam penyelesaian izin tata ruang yaitu tidak dapat dikeluarkan rekomendasi karena pengajuan lokasi perizinan berada di IUP



(Izin Usaha Pertambangan) PT. Timah Tbk. dimana rekomendasi dari OPD teknis merupakan syarat mutlak dalam pengajuan perijinan pemanfaatan ruang.

Tabel 3.135
Data Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang
Tahun 2020

No	Nama pemohon	Bidang usaha	Keterangan	Rekomendasi tata ruang	Izin pemanfaatan ruang
1	Ir. Jacobson th. Lalenoh	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	056.50/1255/1.3.1. / 2018	188.4/013/2.12. 1.1/2020
2	Andri Sagita	Pembangunan solar package dealer nelayan (SPDN)	Sudah disurvei belum dibahas di TKPRD	Belum dikeluarkan rekom (tidak direkomendasikan OPD teknis)	
3	Andri Sagita	Pembangunan bbm premium	Sudah disurvei, belum dibahas di TKPRD		
4	Rudi Siswanto	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	056.50/1142/1.3.1. 1/2019	188.4/010/2.12. 1.1/2020
5	Dharmawan/ Vincent Lukito	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	056.50/901/1.3.1.1 /2019	188.4/008/2.12. 1.1/2020
6	Jaya Kenni	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	056.50/1320/1.3.1. 1/2019	188.4/007/2.12. 1.1/2020
7	Kamto	Produksi dan distribusi air minum dalam kemasan (AMDK)	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	056.50/1144/1.3.1. 1/2019	188.4/007.a/2.1 2.1.1/2020
8	Stevannus	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	600/805/1.3.1.1/20 20	188.4/015/2.12. 1.1/2020
9	Along Al Min Lonh	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD (lokasi masuk IUP PT. Timah)	Belum ada rekom	
10	Amos Jayaratnam	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	056.50/1346/1.3.1. 1/2019	188.4/003/2.12. 1.1/2020
11	Hanjaya Salim Susanto	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	600/805/1.3.1.1/20 20	188.4/012/2.12. 1.1/2020



No	Nama pemohon	Bidang usaha	Keterangan	Rekomendasi tata ruang	Izin pemanfaatan ruang
12	Hanjaya Salim Susanto	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	600/710/1.3.1.1/2020	(masih menunggu revisi rekom tata ruang dari TKPRD) lokasi masuk IUP PT. Mutiara Terang Resource
13	Suadi/Sanpri	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	056.50/1312/1.3.1.1/2019	188.4/001/2.12.1.1/2020
14	Hakim	Pembangunan pabrik es	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD (belum keluar rekomendasi) lokasi berada IUP PT. Timah Tbk	Tidak direkomendasikan	
15	Zhaud Marully WS	Perumahan "gita mansion parittiga)	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD (lokasi masuk IUP PT. Timah)	Tidak direkomendasikan	
16	Saparudin	Penginapan	Sudah disurvei	Lokasi berada pada peruntukan kawasan pertanian hotikulutura dan kawasan permukiman perdesaan (rekomendasi tidak keluar)	
17	Eddy Arif	Pembangunan tempat pengolahan sampah 3r	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD (lokasi masuk IUP PT. Timah)	Tidak direkomendasikan (tidak dapat dilanjutkan)	
18	Chandra Sandrawan	Perumahan	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	600/267/1.3.1.1/2020	188.4/004/2.12.1.1/2020
19	Darmawan AR	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	600/1015/1.3.1.1/2020	188.4/014/2.12.1.1/2020
20	Candra	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD (lokasi masuk IUP PT. Timah Tbk)	600/639/1.3.1.1/2020	Masih menunggu revisi rekom TKPRD (penulisan PT ke CV)
21	Yuli Eka Ningsih	Klinik	Sudah disurvei (untuk kelengkapan pembuatan uk1/upl, sudah ada imb dan sig)		



No	Nama pemohon	Bidang usaha	Keterangan	Rekomendasi tata ruang	Izin pemanfaatan ruang
22	Sanpri	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	056.50/1337/1.3.1.1/2019	188.4/002/2.12.1.1/2020
23	Sanpri	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	600/391/1.3.1.1/2020	188.4/006/2.12.1.1/2020
24	Sanpri	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	600/713/1.3.1.1/2020	188.4/009/2.12.1.1/2020
25	Sanpri	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	600/392/1.3.1.1/2020	Lokasi masuk IUP PT. Timah Tbk
26	Sanpri	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	600/390/1.3.1.1/2020	Lokasi masuk IUP PT. Timah Tbk
27	Danny Triyanto	Keg. Pertambangan produksi mineral bukan logam (bahan galian kaolin)	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	056.50/1319/1.3.1.1/2019	Ada perbedaan data antara Dinas ESDM dan Pemohon
28	Muliadi /Okta Sriliany	Agro wisata	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	600/621/1.3.1.1/2020	188.4/011/2.12.1.1/2020
29	Kiki	Pembangunan wisata taman mangrove	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	600/195/1.3.1.1/2020	Pemohon tidak melanjutkan rekomendasi ke BPN
30	Suherman HO	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	600/475/1.3.1.1/2020	Lokasi masuk IUP PT. Timah Tbk
31	Marwan	Tambak udang	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	600/473/1.3.1.1/2020	188.4/001/2.12.1.1/2021
32	M. Tanwin	Pembangunan solar <i>packed dealer</i> nelayan (SPDN) 29.365.07	Sudah disurvei, sudah dibahas di TKPRD	600/866/1.3.1.1/2020	188.4/016/2.12.1.1/2020
33	Nico Gultom	Tambak udang	Sudah disurvei dan belum ada rekomendasi	600/1507/1.3.1.1/2020	188.4/002/DPM NAKERTRANS/2021
34	Suadi/Sanpri	Tambak udang	Sudah disurvei dan belum ada rekomendasi		
35	Aswin Sumampau	Tambak udang	Sudah disurvei dan belum ada rekomendasi		
36	Brian Jonathan	Tambak udang	Belum disurvei PTSP		

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2020



Tabel 3.136
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menjaga dan Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Produk Hukum Penataan Ruang Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASIT AHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	persen	44,44	100	44,44	Perlu Upaya Lebih

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian tahun 2020 belum dapat memenuhi target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 44,44 persen terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen atau dengan status “Perlu Upaya Lebih”. Untuk kedepannya jika indikator ini tercapai dengan baik, maka seluruh pembangunan yang ada di Kabupaten Bangka Barat akan tertib dari sisi pemanfaatan ruang.

Pencapaian sasaran “Menjaga dan Meningkatkan Perizinan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Produk Hukum Penataan Ruang” didukung oleh Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sasaran strategis 29 adalah **”Meningkatnya Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan”**

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran “Meningkatnya Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan” diperoleh dari persentase luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas kawasan perkotaan, yang disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel3.137
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASIT AHUN 2020	%	STATUS CAPAIAN
Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	0,11	2,75	4	145,45	Baik Sekali



Sasaran Meningkatnya Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase ruang terbuka hijau dengan nilai capaian sasaran sebesar 145,45persen atau dengan status “Baik Sekali”.

Persentase ruang terbuka hijau didefinisikan sebagai luas ruang terbuka hijau dibagi luas kawasan perkotaan yang telah ditetapkan berdasarkan rencana umum tata ruang, namun jika data rinci telah tersedia maka digunakan rencana rinci yang telah ditetapkan dikali 100. Realisasi Tahun 2020 dari indikator sasaran “Meningkatnya Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan” yaitu sebesar 4persen dari target sebesar 2,75persen. Luasan RTH diperoleh dari identifikasi dan inventarisir seluruh kebijakan daerah mengenai rencana rinci tata ruang yang mengakomodir Ruang Terbuka Hijau. Nilai capaian sasaran ini diperoleh berdasarkan persentase total luasan ruang terbuka hijau seluas 175,62 ha dibagi dengan luasan kawasan perkotaan Muntok seluas 4.344,76 ha. Luasan ruang terbuka hijau dimaksud disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.138
Luasan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kabupaten Bangka Barat

No.	Kebijakan Daerah	Luasan RTH (Ha)
1.	Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Induk (<i>Master Plan</i>) Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Kabupaten Bangka Barat.	53,39
2.	Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.	9,9
3.	Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Klaster Eropa Kota Muntok.	7,86
4.	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Klaster Melayu Kota Muntok.	4,7
5.	Draft Peraturan Bupati tentang Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.	99,77
	Total RTH	175,62

Tindaklanjut dari penetapan luasan RTH adalah dengan dilakukannya upaya untuk pemeliharaan dan pengelolaan RTH khususnya yang berlokasi di wilayah Kecamatan Muntok. Adapun rekapitulasi luas RTH yang dipelihara yaitu:



Tabel 3.139
Rekapitulasi Ruang Terbuka Hijau yang dipelihara

No.	Lokasi	Luas
Berdasarkan data dari Dokumen non fisik adipura 2014/2015		
1.	Perkantoran Pemda Kab. Bangka Barat	45.620 m ²
2.	Seputaran Cafe Tugu Soekarno Kec. Muntok	2.860 m ²
3.	Taman Locomobil	4.420 m ²
4.	Menjelang	402 m ²
5.	Tebing Kantor Pos	822 m ²
Berdasarkan Data Kontrak Pengadaan Taman Wihelmena Th 2016		
6.	Taman Wihelmena	225 m ²
Total RTH yang dipelihara		54.349 m²

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Tabel 3.140
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	TARGET AKHIR RPJMD	PERSEN	STATUS CAPAIAN
Persentase ruang terbuka hijau	persen	4	2,9	137,93	Tercapai

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 4 persen terhadap target akhir RPJMD sebesar 2,9 persen maka pencapaian sasaran ini telah mencapai 137,93 persen atau dengan status "Tercapai". Akan tetapi masih terdapat kendala dalam pencapaian sasaran "Meningkatnya Luasan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan" yaitu kurangnya dukungan anggaran dalam upaya perluasan kawasan ruang terbuka hijau. Walaupun demikian, tetap perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan RTH yaitu hingga saat ini kecenderungan penetapan kawasan RTH masih terkonsentrasi pada wilayah Kecamatan Muntok. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat harus segera menindaklanjuti permasalahan terkait peningkatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Adapun program yang mendukung capaian sasaran ini yaitu Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.



3.4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2020

3.4.1 Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran

Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2020, didukung program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dan dilaksanakan oleh 30 perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran RPJMD di Tahun 2020 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.141
Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran (%)	Efektivitas
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	177.289.097.532,00	157.312.511.330,24	88,73	100	Efektif
2.	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	146.732.508.965,00	135.627.400.973,63	92,43	92,09	Tidak Efektif
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	9.737.373.000,00	7.730.739.800,00	79,39	n/a	n/a
4.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	2.787.320.500,00	2.406.103.984,00	86,32	79,49	Tidak Efektif
5.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	4.808.549.000,00	3.670.334.000,00	76,33	99,59	Efektif
6.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	27.998.377.500,00	22.285.658.849,00	79,60	78,61	Tidak Efektif
7.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	132.288.542.072,00	119.006.855.180,07	89,96	17,48	Tidak Efektif
8.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	549.622.400,00	497.882.400,00	90,59	211,93	Efektif
9.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	594.080.000,00	562.935.400,00	94,76	149,74	Efektif
10.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	14.349.666.900,00	12.677.360.796,00	88,35	466,43	Efektif



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021 (diolah)

Tabel 3.142
Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2020

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran (%)	Efektivitas
1.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	156.469.881.965,00	143.358.140.773,63	91,62	100	Efektif
2.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	2.787.320.500,00	2.406.103.984,00	86,32	92,09	Efektif
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	4.808.549.000,00	3.670.334.000,00	76,33	n/a	n/a
4.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	27.998.377.500,00	22.285.658.849,00	79,60	79,49	Tidak Efektif
5.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	132.288.542.072,00	119.006.855.180,07	89,56	106,83	Efektif
6.	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	1.635.938.400,00	1.489.168.884,00	91,03	78,61	Tidak Efektif
7.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	594.080.000,00	562.935.400,00	94,76	17,48	Tidak Efektif
8.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	2.237.753.000,00	1.906.650.050,00	85,20	211,93	Efektif
9.	Meningkatnya nilai produksi peternakan	479.735.000,00	469.407.400,00	97,85	149,74	Efektif
10.	Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	8.550.000,00	8.550.000,00	100,00	303,06	Efektif
11.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	549.622.400,00	497.882.400,00	90,59	417,08	Efektif
12.	Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri.	1.826.779.500,00	1.569.604.204,00	85,92	111,21	Efektif
13.	Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing	245.890.000,00	170.840.087,00	69,48	248,07	Efektif
14.	Berkembangnya destinasi wisata	3.696.505.700,00	2.165.306.162,00	58,58	124,93	Efektif
15.	Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata	686.155.000,00	626.721.000,00	91,34	91,23	Tidak Efektif



16.	Meningkatnya konektivitas daerah	57.813.625.741,00	54.029.397.024,16	93,45	119,05	Efektif
17.	Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian	2.014.130.000,00	1.756.607.700,00	87,21	54,19	Tidak Efektif
18.	Meningkatnya kualitas pendidikan	21.003.333.000,00	20.155.127.600,00	95,96	88,90	Tidak Efektif
19.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	83.709.635.191,00	71.826.663.919,08	85,80	100,68	Efektif
20.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	296.605.000,00	257.752.300,00	86,90	128,42	Efektif
21.	Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga	1.634.462.000,00	880.715.000,00	53,88	100%	Efektif
22.	Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berbudaya/berwawasan lingkungan	483.713.000,00	334.439.395,00	69,14	109,67	Efektif
23.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	6.111.971.000,00	6.007.076.455,00	98,28	66	Tidak Efektif
24.	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	5.535.839.000,00	5.232.261.846,00	94,52	105,12	Efektif
25.	Terkendalinya bencana banjir	2.067.436.900,00	954.196.100,00	46,15	114,59	Efektif
26.	Terwujudnya konservasi sumber air	10.107.000,00	10.107.000,00	100,00	139,36	Efektif
27.	Terwujudnya pemulihan lahan kritis	-	-	0,00	66,67	Efektif
28.	Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	132.800.000,00	131.600.000,00	99,10	44,44	Tidak Efektif
29.	Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	7.800.000,00	7.680.000,00	98,46	145,45	Efektif

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021 (diolah)

Secara keseluruhan, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pembangunan Tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp517.135.137.869,00 yang bersumber dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020. Dari total anggaran tersebut, realisasi penyerapan anggaran yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk pencapaian sasaran sebesar Rp 461.777.782.712,94 atau 89,30 persen sehingga terjadi efisiensi penganggaran sebesar Rp 55.357.355.156,06 atau 10,70 persen.



3.4.2 Program Pendukung Capaian Sasaran Tahun 2020

Berdasarkan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, ditetapkan program pembangunan sebagai pendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebanyak 180 program.

Realisasi dari masing-masing program dalam pencapaian sasaran RPJMD dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.143
Realisasi Program dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3.549.988.500,00	3.257.939.400,00	91,77
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.355.127.500,00	1.058.224.000,00	78,09
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	760.570.000,00	607.409.000,00	79,86
		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	10.000.000,00	8.842.000,00	88,42
		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan	237.950.500,00	237.150.500,00	99,66
		Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa	104.145.000,00	73.417.000,00	70,49
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	1.208.435.500,00	188.195.500,00	15,57
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	659.424.000,00	548.056.900,00	83,11
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perpedesaan	186.415.000,00	173.910.000,00	93,29



No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
		Program Pendayagunaan TTG dan SDA	36.630.000,00	29.190.000,00	79,69
		Program Pengembangan Perekonomian Masyarakat Desa	23.565.000,00	23.477.000,00	99,63
		Peningkatan kapasitas kelembagaan desa	93.145.000,00	88.875.000,00	95,42
		Program Pendataan desa Kab Bangka Barat	18.981.000,00	17.881.000,00	94,20
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	15.340.000,00	12.700.000,00	82,79
		Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	1.277.131.000,00	1.233.022.500,00	96,55
		Program Pembinaan BUMD	200.525.000,00	172.450.000,00	86,00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	85.938.167.075,00	81.291.914.493,00	94,59
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	479.377.550,00	471.963.100,00	98,45
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	59.681.267.940,00	53.288.582.480,63	89,29
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	216.198.000,00	186.768.000,00	86,39
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	55.580.000,00	55.580.000,00	100,00
		Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	361.918.400,00	332.592.900,00	91,90
2.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	1.621.042.500,00	1.524.611.700,00	94,05
		Program Optimalisasi PBB & BPHTB	1.166.278.000,00	881.492.284,00	75,58
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.268.182.500,00	979.042.500,00	77,20
		Perencanaan Pembangunan Ekonomi	143.914.800,00	132.974.800,00	92,40



No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
		Perencanaan Sosial Budaya	1.106.707.500,00	1.002.432.500,00	90,58
		Program Perencanaan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	294.678.500,00	238.763.500,00	81,03
		Program perencanaan Pengembangan Wilayah Setrategis Cepat Tumbuh	1.532.798.700,00	1.008.388.700,00	65,79
		Program Pengembangan Statistik Daerah	211.163.000,00	90.423.000,00	42,82
		Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	251.104.000,00	218.309.000,00	86,94
4.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	787.386.500,00	519.911.500,00	66,03
		Program Peningkatan Kompetensi ASN	1.135.352.500,00	757.883.678,00	66,75
		Program pemanfaatan Database ASN dan Layanan Kesejahteraan	301.857.000,00	222.755.000,00	73,79
		Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan	100.632.000,00	92.392.000,00	91,81
		Program Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan	95.726.000,00	87.526.000,00	91,43
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	59.449.000,00	46.619.000,00	78,42
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	59.705.000,00	56.905.000,00	95,31
		Program penetapan dan penegasan batas wilayah	43.415.000,00	42.400.000,00	97,66
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	22.917.827.500,00	18.191.647.873,00	79,38
		Program Peningkatan Semangat Kebangsaan	179.970.000,00	93.445.000,00	51,92
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.698.372.000,00	1.649.975.000,00	97,15



No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
		Program Pengembangan Data/Informasi	92.529.000,00	90.908.000,00	98,25
		Program pengembangan kebijakan perekonomian pembangunan	284.870.000,00	240.865.000,00	84,55
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	241.286.000,00	192.425.798,00	79,75
5.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Program Upaya Kesehatan Perorangan	21.292.228.612,00	16.343.447.499,00	76,76
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	11.150.899.500,00	6.531.087.771,00	58,57
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1.603.206.000,00	1.267.153.100,00	79,04
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.752.236.000,00	5.490.780.090,00	95,45
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	41.908.368.000,00	44.503.266.101,07	106,19
		Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	2.449.687.200,00	2.422.926.296,00	98,91
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	3.823.183.000,00	3.732.659.300,00	97,63
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	371.519.000,00	330.256.000,00	88,89
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.481.209.000,00	1.164.683.350,00	78,63
		Program Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.213.349.500,00	1.895.547.550,00	85,64
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	699.038.900,00	657.173.000,00	94,01
		Program kerjasama informasi dengan massmedia	980.865.000,00	928.939.000,00	94,71
		Program pengembangan komunikasi, informatika dan	944.437.000,00	919.852.079,00	97,40



No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
		media massa			
		Program peningkatan kualitas pelayanan publik	131.943.000,00	126.482.000,00	95,86
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1.704.102.000,00	1.315.150.100,00	77,18
		Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah	325.677.600,00	317.283.600,00	97,42
		Program Penyelenggaraan tugas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah	226.951.650,00	150.191.950,00	66,18
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	39.670.000,00	36.310.000,00	91,53
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	177.338.000,00	123.216.000,00	69,48
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	149.554.800,00	135.369.800,00	90,52
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	163.092.000,00	155.742.000,00	95,49
		Program pendataan dan pemantauan aktifitas orang asing, organisasi non pemerintah dan lembaga asing	45.825.000,00	37.175.000,00	81,12
		Program Pemberdayaan Sosial	38.992.500,00	38.610.500,00	99,02
		Program Sosial penanganan bencana	12.835.660.000,00	11.830.923.385,00	92,17
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	45.415.000,00	40.795.000,00	89,83
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.810.155.310,00	1.766.627.709,00	62,87
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	975.185.000,00	870.401.261,00	89,25
		Program Layanan	38.850.000,00	36.410.000,00	93,72



No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
		Pencatatan Sipil			
		Program Pemanfaatan Sistem Informasi untuk Pengelolaan Administrasi Kependudukan	5.060.000,00	4.000.000,00	79,05
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	4.339.960.000,00	3.671.315.000,00	84,59
		Program Keluarga Berencana	79.565.000,00	63.185.000,00	79,41
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	6.820.000,00	6.820.000,00	100,00
		Program Advokasi dan pergerakan institusi masyarakat	33.610.000,00	33.610.000,00	100,00
		Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	84.059.000,00	84.059.000,00	100,00
		Program Penguatan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	157.403.500,00	149.888.000,00	95,23
		Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi	25.650.000,00	25.650.000,00	100,00
		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	7.600.000,00	4.950.000,00	65,13
		Program Penyempurnaan Kualitas Pelayanan	7.754.561.500,00	6.948.564.289,00	89,61
		Program Pembinaan Kehidupan Beragama	2.425.224.000,00	2.212.274.000,00	91,22
		Program Kerjasama Pembangunan	48.705.000,00	44.900.000,00	92,19
		Program Peningkatan Dukungan Sarana Prasarana Penyuluhan KB	1.070.477.500,00	882.591.650,00	82,45
		Program Peningkatan Pelayanan KB	1.234.368.000,00	1.149.204.750,00	93,10
		Program Fasilitasi Balai Penyuluh KB	636.840.000,00	557.384.050,00	87,52
6.	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Program peningkatan produksi pertanian	210.378.900,00	175.918.250,00	83,62
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian)	208.697.000,00	182.123.400,00	87,27



No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
		Program Penyediaan Informasi Ketahanan Pangan Daerah	52.537.000,00	46.726.000,00	88,94
		Program Pengembangan Kelembagaan Petani	60.490.000,00	58.090.000,00	96,03
		Program Pengembangan Penyuluhan	15.575.000,00	15.575.000,00	100,00
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	838.247.500,00	838.130.500,00	99,99
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	17.630.000,00	9.760.000,00	55,36
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	91.483.000,00	24.348.859,00	26,62
		Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	140.900.000,00	138.496.875,00	98,29
7.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Program peningkatan produksi perkebunan	574.470.000,00	549.215.400,00	95,60
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	19.610.000,00	13.720.000,00	69,96
8.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Program pengembangan perikanan tangkap	1.474.635.000,00	1.190.168.800,00	80,71
		Program pengembangan budidaya perikanan air tawar	654.893.000,00	608.663.000,00	92,94
		Program pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan	108.225.000,00	107.818.250,00	99,62
9.	Meningkatnya nilai produksi peternakan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	182.950.000,00	180.108.400,00	98,45
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	74.580.000,00	74.325.000,00	99,66
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	179.525.000,00	173.804.000,00	96,81
		Program pemberdayaan penyuluh peternakan	1.285.000,00	1.285.000,00	100,00
		Program Pengembangan Usaha Peternakan	41.395.000,00	39.885.000,00	96,35



No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
10.	Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	Program optimalisasi pemasaran produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	8.550.000,00	8.550.000,00	100,00
11.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Program Perencanaan Tata Ruang	295.042.400,00	251.967.400,00	85,40
		Program Pemanfaatan Ruang	115.000.000,00	112.150.000,00	97,52
		Program peningkatan & pengembangan pengelolaan perizinan	110.660.000,00	106.750.000,00	96,47
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	12.020.000,00	10.205.000,00	84,90
		Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Kawasan Perdesaan	8.600.000,00	8.510.000,00	98,95
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	8.300.000,00	8.300.000,00	100,00
12.	Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Industri Kecil dan menengah	368.460.000,00	217.350.000,00	58,99
		Program pengembangan kewirausahaan industri kecil dan menengah	56.700.000,00	44.345.000,00	78,21
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	182.736.500,00	182.736.500,00	100,00
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	10.520.000,00	10.520.000,00	100,00
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	223.500.000,00	193.258.100,00	86,47
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	727.407.000,00	673.412.000,00	92,58
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi usaha mikro	257.456.000,00	247.982.604,00	96,32



No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
13.	Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	63.235.000,00	61.755.000,00	97,66
		Program Penataan Struktur Industri	95.880.000,00	41.990.087,00	43,79
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	56.775.000,00	43.475.000,00	76,57
		Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	30.000.000,00	23.620.000,00	78,73
14.	Berkembangnya destinasi wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.966.260.700,00	1.509.198.252,00	50,88
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	720.060.000,00	647.407.910,00	89,91
		Program Pengembangan Kemitraan	10.185.000,00	8.700.000,00	85,42
15.	Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	379.985.000,00	340.411.000,00	89,59
		Program pengembangn kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	108.855.000,00	101.895.000,00	93,61
		Program Pengembangan Nilai Budaya	197.315.000,00	184.415.000,00	93,46
16.	Meningkatnya konektivitas daerah	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	2.487.865.000,00	2.385.900.213,00	95,90
		Program pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan	25.433.500.000,00	23.244.773.886,69	91,39
		Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	26.882.910.400,00	26.010.123.363,47	96,75
		Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	136.900.000,00	135.273.000,00	98,81
		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	999.411.841,00	791.775.741,00	79,22
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.717.563.500,00	1.307.500.820,00	76,13



No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	155.475.000,00	154.050.000,00	99,08
17.	Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1.858.680.000,00	1.601.699.700,00	86,17
		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	155.450.000,00	154.908.000,00	99,65
18.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	573.595.000,00	432.830.600,00	75,46
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Wajib Belajar 9 Tahun	9.321.100.000,00	9.265.699.000,00	99,41
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	46.030.000,00	36.170.000,00	78,58
		Program Pendidikan Non Formal	10.839.405.000,00	10.301.805.000,00	95,04
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	223.203.000,00	118.623.000,00	53,15
19.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	3.977.436.374,00	3.411.249.482,00	85,77
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	32.171.340.000,00	26.505.458.000,00	82,39
		Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	588.885.400,00	554.479.755,00	94,16
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	106.946.000,00	95.546.000,00	89,34
		Program Obat dan	4.830.047.817,00	4.005.553.651,00	82,93



No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
		Perbekalan Kesehatan			
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.005.288.000,00	4.650.270.500,00	92,91
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	7.435.000,00	7.435.000,00	100,00
		Program pengawasan dan pengendalian Obat dan kesehatan makanan	9.318.300,00	9.318.300,00	100,00
		Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	1.183.480.500,00	913.667.515,00	77,20
		Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat	10.124.672.200,00	8.973.003.802,00	88,63
		Program Sumber Daya Kesehatan	6.017.015.600,00	5.954.063.100,00	98,95
		Program Kesehatan komunitas dan kesehatan kerja	21.970.000,00	21.970.000,00	100,00
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	665.800.000,00	289.622.000,00	43,50
		Program Peningkatan Mutu Layanan Kepada Masyarakat (BLUD)	19.000.000.000,00	16.435.026.814,08	86,50
20.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	162.970.000,00	158.381.000,00	97,18
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	115.790.000,00	81.526.300,00	70,41
		Program Pemenuhan hak anak	17.845.000,00	17.845.000,00	100,00
21.	Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	209.000.000,00	200.734.500,00	96,05
		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	38.425.000,00	36.025.000,00	93,75
		Program Penyelenggaraan Olahraga Daerah	383.174.000,00	-	-
		Program Peningkatan Peran serta	316.036.000,00	42.533.500,00	13,46



No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
		kepemudaan			
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	687.827.000,00	601.422.000,00	87,44
22.	Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/ kegiatan yang berbudaya/berwawasan lingkungan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	181.420.000,00	117.125.000,00	64,56
		Program Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	177.628.000,00	143.928.395,00	81,03
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	124.665.000,00	73.386.000,00	58,87
23.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.111.971.000,00	6.007.076.455,00	98,28
24.	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	Program pengembangan lingkungan sehat	5.875.000,00	4.825.000,00	82,13
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	5.499.744.000,00	5.197.268.346,00	94,50
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	30.220.000,00	30.168.500,00	99,83
25.	Terkendalnya bencana banjir	Program pengendalian banjir	827.256.900,00	815.142.100,00	98,54
		Pembangunan turap/talud/ brojong	1.240.180.000,00	139.054.000,00	11,21
26.	Terwujudnya pemulihan lahan kritis	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	-	-	-
27.	Terwujudnya konservasi sumber air	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	10.107.000,00	10.107.000,00	100,00
28.	Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	132.800.000,00	131.600.000,00	99,10
29.	Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	7.800.000,00	7.680.000,00	98,46

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021 (diolah)



3.4.3 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020

Secara keseluruhan, realisasi APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.144
Realisasi APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN	884.577.846.626,50	827.319.557.834,46	93,53
PENDAPATAN ASLI DAERAH	75.781.823.857,35	64.304.326.355,09	84,85
Pendapatan Pajak Daerah	26.246.000.000,00	20.610.403.491,80	78,53
Hasil Retribusi Daerah	5.239.250.000,00	5.346.696.788,00	102,05
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.694.900.000,00	3.994.903.752,78	85,09
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.601.673.857,35	34.352.322.322,51	86,74
DANA PERIMBANGAN	635.414.533.450,00	599.326.297.108,00	94,32
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	90.834.464.640,00	64.239.176.268,00	70,72
Dana Alokasi Umum	427.997.278.000,00	425.158.892.000,00	99,34
Dana Alokasi Khusus	116.582.790.810,00	109.928.228.840,00	94,29
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	173.381.489.319,15	163.688.934.371,37	94,41
Pendapatan Hibah Dana BOS	26.820.901.431,00	29.811.200.000,00	111,15
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42.446.665.528,15	36.879.667.371,37	86,88
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	82.338.269.000,00	81.638.267.000,00	99,15
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	21.775.653.360,00	15.359.800.000,00	70,54
BELANJA	984.631.597.701,45	916.445.997.111,94	93,08
BELANJA TIDAK LANGSUNG	467.496.459.832,45	454.668.214.399,00	97,26



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	317.250.000.000,00	305.343.462.521,00	96,25
Belanja Hibah	36.845.151.839,00	36.264.574.617,00	98,42
Belanja Bantuan Sosial	252.595.000,00	117.368.000,00	46,46
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	2.632.213.729,45	2.632.212.275,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	110.316.499.264,00	110.301.902.764,00	99,99
Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	8.694.222,00	4,35
BELANJA LANGSUNG	517.135.137.869,00	461.777.782.712,94	89,30
Belanja Pegawai	140.539.331.712,05	129.506.118.995,00	92,15
Belanja Barang dan Jasa	221.063.355.775,95	190.437.411.470,51	86,15
Belanja Modal	155.532.450.381,00	141.834.252.247,43	91,19
SURPLUS / (DEFISIT)	(100.053.751.074,95)	(89.126.439.277,48)	89,08
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	103.053.751.074,95	103.145.296.156,95	100,09
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	102.853.751.074,95	102.853.751.074,95	100,00
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	200.000.000,00	291.545.082,00	145,77
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	100.053.751.074,95	100.145.296.156,95	100,09
SILPA TAHUN BERKENAAN	0,00	11.018.856.879,47	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 merupakan laporan kinerja pembangunan tahun kelima dari periode RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021. Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan untuk sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dapat disimpulkan :

1. Dari 10 Sasaran Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai di Tahun 2020 berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, 3 (tiga) sasaran telah melebihi target yang ditetapkan dengan status capaian “Baik Sekali”, 3 (tiga) sasaran dengan status capaian “Baik”, 1 (satu) sasaran dengan status capaian “Cukup”, 1 (satu) sasaran dengan status capaian “Kurang” dan 2 (dua) sasaran belum dapat diukur karena belum tersedianya data;
2. Dari 10 Sasaran Indikator Kinerja Utama yang dijabarkan kedalam 15 Indikator Sasaran, 4 (empat) indikator telah melebihi target yang ditetapkan dengan status capaian “Baik Sekali”, 6 (enam) indikator dengan status capaian “Baik”, 2 (dua) indikator dengan status capaian “Cukup”, 1 (satu) indikator dengan status capaian “Kurang” dan 2 (dua) indikator belum dapat diukur karena belum tersedianya data;
3. Dari 11 indikator tujuan pembangunan, 4 (empat) indikator mencapai target yang telah ditetapkan, 5 (lima) indikator tidak mencapai target sedangkan 2 (dua) indikator tidak dapat diukur karena tidak tersedianya data;



4. Dari 29 sasaran pembangunan yang tersebar di dalam 4 (empat) misi pembangunan daerah, 15 (lima belas) sasaran pembangunan telah melebihi target yang ditetapkan dengan status capaian “Baik Sekali”, 6 (enam) sasaran pembangunan dengan status capaian ‘Baik”, 4 (empat) sasaran pembangunan dengan status capaian “Cukup”, 3 (tiga) sasaran pembangunan dengan status capaian “Kurang” dan 1 (satu) sasaran pembangunan tidak dapat dihitung karena tidak tersedianya data;
5. Dari 29 sasaran pembangunan yang dijabarkan kedalam 48 indikator sasaran pembangunan, 24 (dua puluh empat) indikator sasaran pembangunan telah melebihi target yang ditetapkan dengan status capaian “Baik Sekali”, 10 (sepuluh) indikator sasaran pembangunan dengan status capaian ‘Baik”, 5 (lima) indikator sasaran pembangunan dengan status capaian “Cukup”, 5 (lima) indikator sasaran pembangunan dengan status capaian “Kurang” dan 4 (empat) indikator sasaran pembangunan tidak dapat dihitung karena tidak tersedianya data.
6. Hasil evaluasi capaian sasaran Tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, dari 29 sasaran pembangunan, 12 (dua belas) sasaran dengan kategori “Tercapai”, 5 (lima) sasaran dengan kategori “Optimis Tercapai”, 9 (sembilan) sasaran dengan kategori “Perlu Upaya Lebih” dan 4 (tiga) sasaran tidak dapat diukur karena tidak tersedianya data;;
7. Hasil evaluasi capaian sasaran Tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, dari 29 sasaran pembangunan yang dijabarkan kedalam 48 indikator sasaran pembangunan, 19 (sembilan belas) indikator sasaran dengan kategori “Tercapai”, 11 (sebelas) indikator sasaran dengan kategori “Optimis Tercapai” , 13 (tiga belas) indikator sasaran dengan kategori “Perlu Upaya Lebih” dan 5 (lima) indikator sasaran pembangunan tidak dapat dihitung karena tidak tersedianya data;
8. Secara keseluruhan, penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pembangunan Tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp517.135.137.869,00 yang bersumber dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020. Dari total anggaran tersebut, realisasi penyerapan anggaran yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk pencapaian sasaran sebesar Rp461.777.782.712,94 atau 89,30 persen dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 121,18 persen. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran



Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam mencapai sasaran pembangunan efektif.

4.2 PERMASALAHAN/ KENDALA PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Adapun secara umum permasalahan atau kendala yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator sasaran strategis pembangunan Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Tahun 2020 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 antara lain:

1. Dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan yang ada masih belum bersinergi secara optimal dengan indikator kinerja sasaran pembangunan yang ditetapkan;
2. Tahapan perencanaan di perangkat daerah masih ada yang tidak didukung dengan data dan analisa yang valid, sehingga mempengaruhi terhadap penentuan target capaian;
3. Tahapan pengendalian dan evaluasi yang belum optimal;
4. Keterbatasan sumber daya keuangan daerah serta aparatur dalam pelaksanaan kinerja sasaran pembangunan;
5. Terjadinya pandemi *covid-19* yang melanda dunia, memberikan dampak domino yang sangat besar pada kehidupan masyarakat, kegiatan ekonomi serta terhadap pelaksanaan pembangunan dimana banyak program/kegiatan terhenti, tertunda bahkan gagal untuk dilaksanakan.

4.3 STRATEGI DI MASA DATANG

Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam pencapaian sasaran strategis Pembangunan Kabupaten Bangka Barat kedepan sebagai berikut :

- a. Menggunakan hasil evaluasi terhadap pencapaian RPJMD sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan melakukan penguatan terhadap data yang akurat dan analisa yang valid;
- c. Mendorong ekstensifikasi dan intensifikasi pada sektor pendapatan asli daerah yang potensial untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mengoptimalkan sumber pendanaan di luar APBD yang bersumber dari



- anggaran pusat/APBN dan provinsi serta sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Peningkatan kualitas serta kompetensi SDM aparatur untuk mampu melakukan inovasi dalam pencapaian kinerja sasaran pembangunan;
 - e. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah terkait akselerasi kinerja sasaran pembangunan lintas perangkat daerah yang saling berhubungan;
 - f. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target sasaran strategis pembangunan secara berkala.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Tahun 2020 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 telah cukup baik meskipun terdapat kendala dan permasalahan sehingga diperlukan langkah-langkah serta strategi yang tepat dalam pencapaian target yang ditetapkan.

Melihat tantangan dan permasalahan di tahun mendatang yang semakin kompleks, dibutuhkan kerja keras dan komitmen yang tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat beserta seluruh *stakeholders* untuk pencapaian sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan "**Bangka Barat Hebat 2021**".

